PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

kilas balik

Habitat di Indonesia

Sebuah Catatan Perjalanan
dan Peran Indonesia dalam Habitat

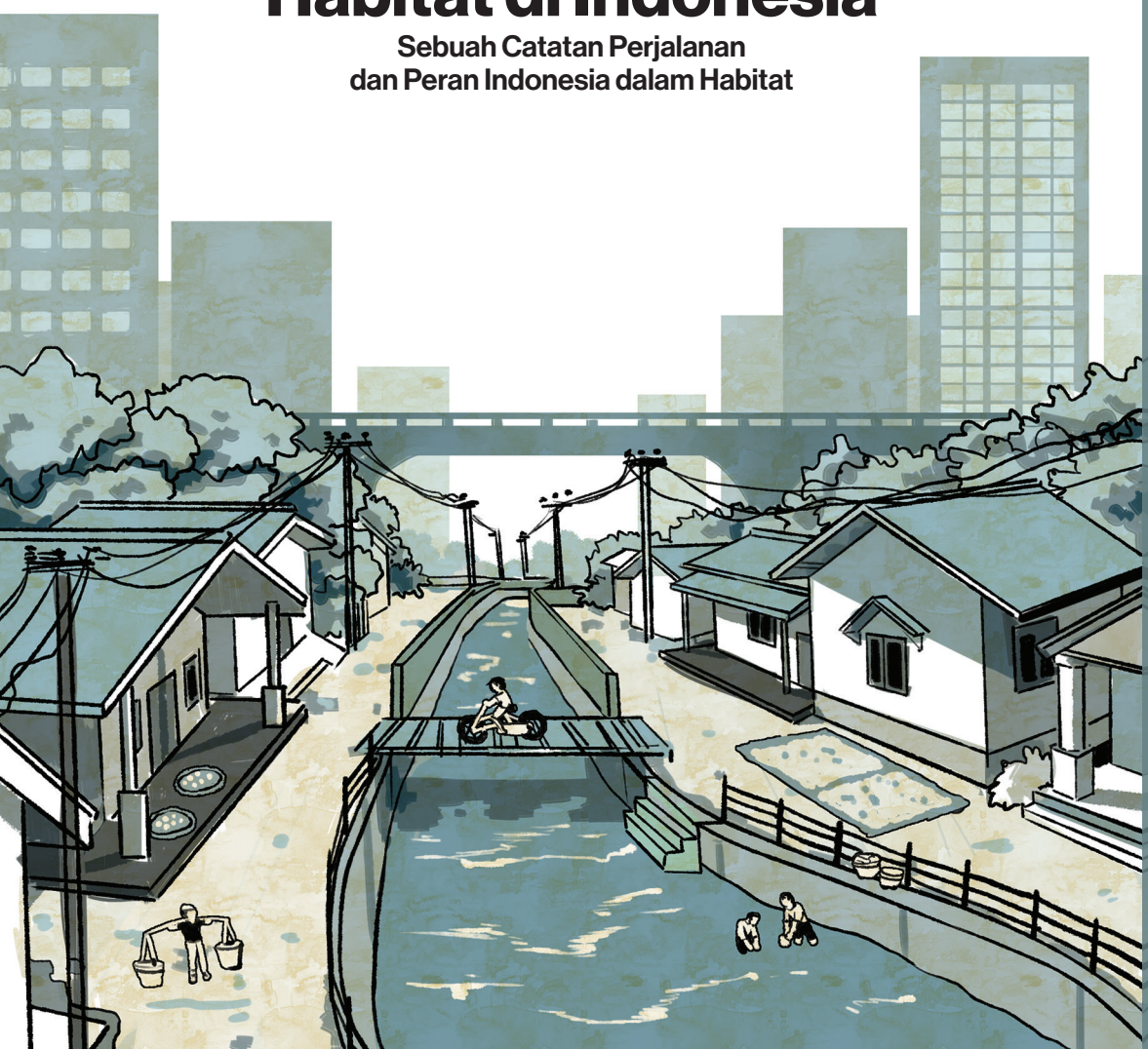

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

kilas balik

Habitat di Indonesia

Sebuah Catatan Perjalanan dan Peran Indonesia dalam Habitat

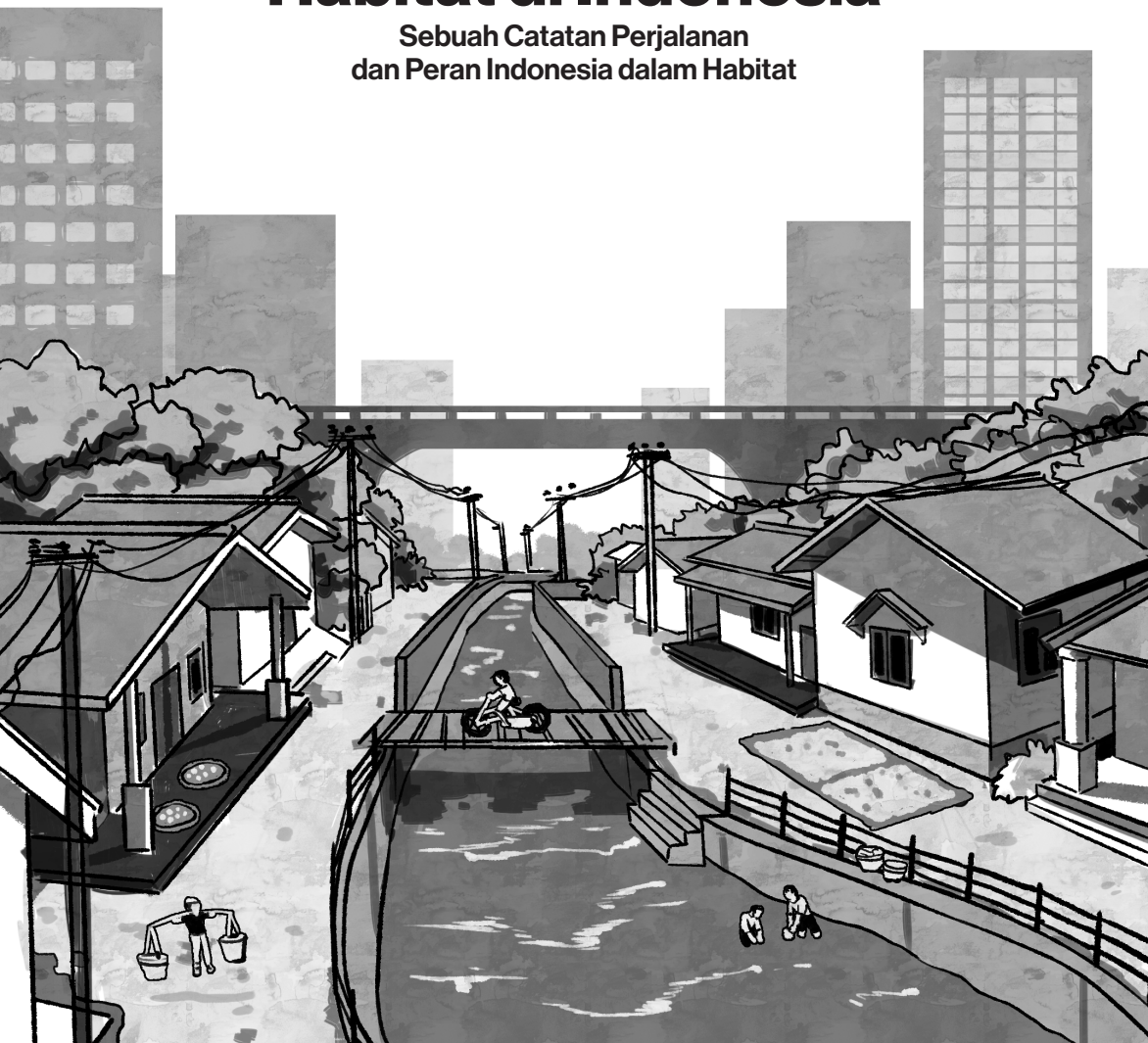

Kilas Balik Habitat di Indonesia

Sebuah Catatan Perjalanan dan Peran Indonesia dalam Habitat

ISBN: 978-979-8230-59-2

Pengarah:
Diana Kusumastuti

Penanggung Jawab:
Dian Irawati

Editor:
Dionisia Gusda Primadita Putri

Narasumber dan Kontributor:
Andreas Suhono, Ahmad Arif, Bakti Setiawan,
Haryo Winarso, Hendro Pranoto Susilo, Joerni Makmoerniarti,
Lana Winayanti, Rachman Kurniawan, Johan Silas,
Teti Armiati Argo, Wicaksono Sarosa, Hadi Sucahyono,
Kemal Taruc, Ira Safitri Darwin

Penulis:
Budianto Prasetio, Fenita Indrasari,
Malindo Andhi Saputra Marpaung, Lilik Andriyani,
Intan Pandini, Yusuf Abdul Kariem

Tata Letak dan Desain:
Haerul Fikri

Desain Kover:
Muhammad Afif

Infografik:
Malindo Andhi Saputra Marpaung,
Lilik Andriyani, Yusuf Abdul Kariem

Penerbit:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selaran

Sambutan

Hari Habitat Dunia atau *World Habitat Day* jatuh pada hari Senin pertama bulan Oktober setiap tahunnya. Sejak tahun 1985, tanggal itu diperingati sebagai hari untuk merefleksikan dan mengingat kembali kelayakan habitat di bumi sebagai tempat tinggal manusia, khususnya wilayah perkotaan.

Perayaan Hari Habitat berawal dari adanya konferensi internasional Habitat I pada 1976 yang memuat komitmen internasional untuk meninjau ulang kondisi lingkungan hunian manusia. Konferensi ini pun berlanjut pada tahun-tahun setelahnya, hingga saat ini.

Dunia mengakui bahwa perkotaan berperan penting menjadi motor penggerak ekonomi suatu negara. Keberadaan kota pada banyak negara ditandai dengan perkembangan industri secara signifikan di wilayah tersebut, yang tentu berkontribusi pada kenaikan pendapatan tingkat nasional. Perkembangan ini diikuti oleh kemajuan yang drastis terkait fasilitas, pelayanan, dan kesempatan kerja. Hal itu memicu terjadinya urbanisasi, di mana masyarakat perdesaan berbondong-bondong berpindah ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih layak.

Seiring berjalannya waktu, migrasi internal ini tak terbendung jumlahnya. Kecepatan kenaikan jumlah penduduk di perkotaan sulit diikuti oleh percepatan peningkatan fasilitas dan kesejahteraan hidup. Alhasil, perkampungan kumuh, kriminalitas, segregasi sosial menjadi hal lumrah yang bisa dilihat di kota-kota modern. Ini membuat kota beralih karakter, yang awalnya menjadi penyangga suatu negara, kini juga menjadi beban negara. Para petinggi negara di dunia menaruh perhatian khusus pada fenomena ini. Sehingga muncul gagasan untuk membuat komitmen global yang berfungsi menciptakan standar dan meninjau ulang kelayakan huni kawasan perkotaan. Tujuannya agar kemakmuran dan kesejahteraan dapat dirasakan oleh berbagai golongan masyarakat di perkotaan dan bisa menyebar hingga wilayah desa sehingga tercipta *urban-rural linkages.*

Selain itu, juga untuk mengembalikan peran perkotaan sebagai wilayah penyangga perekonomian negara dan pusat peradaban.

Indonesia dengan kota megapolitan maupun metropolitannya, sebagai contoh Jakarta, Medan, Bandung, Malang, Surabaya, dan lainnya juga mengalami tantangan yang serupa. Oleh sebab itu, Indonesia turut menjadi "pengemudi" dalam berbagai konferensi internasional dimulai dari Habitat I hingga Habitat III yang menghasilkan Agenda Baru Perkotaan, maupun konferensi entitas PBB lainnya yang menghasilkan Agenda Aksi Addis Ababa, Kerangka Kerja Sendai, dan sebagainya. Indonesia berperan memberikan pandangan dan mengadvokasi masuknya kawasan Asia-Pasifik dalam diskusi untuk membuat kerangka kerja global terkait pembangunan kota yang berkelanjutan.

Dari berbagai agenda dan kerangka kerja tersebut Indonesia berfokus pada pembangunan dan pengelolaan perkotaan yang berkelanjutan serta peningkatan akses layanan dasar. Ini mendasari lahirnya berbagai program pengembangan perkotaan, contohnya Kampung *Improvement Program*, P2KP, Pamsimas, Sanimas, hingga Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang baru berakhir. Program-program tersebut berhasil mengubah wajah perkotaan menjadi lebih tertata, khususnya dalam pengelolaan permukiman kumuh.

Pengimplementasian kerangka kerja tersebut membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pihak swasta, serta masyarakat untuk menghindari pembangunan kota yang bersifat sporadis. Sehingga, kota-kota dengan permukiman yang nyaman, inklusif, dan berkelanjutan bisa terwujud di bumi pertiwi ini. Buku ini menampilkan seluruh kilas balik perjalanan Habitat di Indonesia dalam mendorong dan menghadirkan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan. Besar harapan dengan kehadiran buku ini akan menjadi bahan refleksi bersama dalam rangka mewujudkan kolaborasi antara para pihak untuk membangun perkotaan maju dan layak huni.

Oktober 2023,

Ir. Diana Kusumastuti, M.T
Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian PUPR

Prakata

Apa yang kerap orang pikirkan ketika mendengar kata "kota"? Mungkin yang terlintas pertama kali di pikiran ketika mendengar kata itu adalah wilayah yang terasosiasi dengan banyaknya gedung bertingkat, kehidupan modern yang maju, sarana pendidikan dan kesehatan yang memadai, transportasi umum yang canggih, luasnya lapangan pekerjaan, tingginya pendapatan, hunian layak, dan sebagainya. Bayangan kehidupan yang ideal di wilayah perkotaan selalu berhasil menjadi magnet bagi masyarakat untuk hidup menetap di kota. Selain itu, banyak masyarakat yang menjadikan kota sebagai batu loncatan untuk meraih penghidupan layak.

Di Indonesia, perkembangan wilayah perkotaan sudah terjadi sejak zaman awal kemerdekaan. Pada masa itu, pemerintah mulai mengembangkan sektor ekonomi dengan membangun berbagai macam industri. Meskipun sumber pendapatan negara saat itu masih tetap didominasi oleh sektor pertanian, adanya industri-industri baru tersebut turut mempercepat perputaran roda ekonomi. Wilayah pusat-pusat industri saat itu pun berkembang menjadi cikal bakal perkotaan.

Oleh karena banyaknya kebutuhan tenaga kerja, maka pertambahan penduduk di wilayah-wilayah tersebut sangat signifikan. Kebutuhan akan hunian, fasilitas kesehatan serta pendidikan, transportasi, dan sebagainya pun meningkat. Pembangunan infrastruktur yang terjadi di kawasan industri seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya telah berganti rupa menjadi perkotaan.

Pada masa Orde Baru (1960–1998), pembangunan perkotaan di Indonesia semakin masif terjadi. Pulau Jawa menjadi pusat pembangunan infrastruktur, dan urbanisasi pun semakin tak terbendung. Saat itu, untuk pemerataan penduduk, pemerintah mencanangkan program transmigrasi ke luar Pulau Jawa.

Selanjutnya, pada era Reformasi (akhir 1990-an - 2000-an), tingkat urbanisasi di perkotaan semakin melonjak. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan kota-kota besar, khususnya pada aspek lapangan pekerjaan serta fasilitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Era yang ditandai dengan sistem demokrasi dan adanya kebebasan berpendapat ini, memungkinkan masyarakat untuk turut berdiskusi terkait penggunaan

lahan, pembangunan infrastruktur, transportasi, isu lingkungan, dan lain-lain. Pada masa ini juga terjadi desentralisasi pengembangan wilayah, sehingga pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Era reformasi terjadi saat dunia sudah banyak menerapkan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan yang ditimbulkan dengan adanya penerapan teknologi informasi berpengaruh pula pada adanya gagasan-gagasan *smart city* di Indonesia. Sistem perkotaan mulai banyak mengadopsi teknologi untuk memudahkan pengelolaannya, misalnya dalam bidang transportasi dan sistem telekomunikasi.

Pada masa itu, masyarakat juga mulai menyadari bahwa kota tempat mereka tinggal sudah tidak senyaman dahulu. Pertumbuhan kota yang semakin pesat ditambah semakin tak terkontrolnya populasi, membuat kota menjadi penuh sesak. Hal ini menyebabkan ruang terbuka hijau semakin sulit ditemui, meluasnya perkampungan kumuh, serta meningkatnya ketimpangan sosial, kriminalitas, dan ketidakadilan. Bayangan akan kota yang menyediakan penghidupan layak pun bergeser menjadi hanya tempat untuk mencari pendapatan.

Pada era modernisasi, pemerintah semakin gencar mengupayakan penataan perkotaan melalui berbagai seri kerangka kerja. Pemerintah ingin mengembalikan fungsi perkotaan agar layak huni untuk semua masyarakat dan meminimalisir jumlah permukiman kumuh. Era ini juga dibarengi dengan kemajuan teknologi digital yang semakin pesat hingga pengumpulan dan analisis data menjadi alat penting untuk basis pengelolaan kota.

Tantangan perkotaan semakin bertambah ketika dihadapkan pada fenomena perubahan iklim. Kota-kota yang terletak di daerah pesisir semakin sering kebanjiran karena naiknya permukaan laut (*sea level rise*) dan penurunan tanah (*land subsidence*). Selain itu, bencana alam lain contohnya gempa bumi, turut mengancam keberadaan kota, khususnya pada sarana-sarana maupun permukiman yang dibangun tidak tahan gempa. Kepadatan permukiman dan penggunaan bahan bangunan mudah terbakar (*combustible*) turut pula meningkatkan potensi kebakaran yang mengancam jiwa.

Penataan kota menjadi hal yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Selain aktif menyumbangkan gagasan kerangka kerja di konferensi internasional terkait lingkungan, Indonesia juga menerapkan hasil

bahasan tersebut di tingkat nasional, contohnya melalui Seknas Habitat, Kemitraan Habitat, dan lain-lain. Indonesia pun menjadi tuan rumah untuk beberapa agenda menuju Habitat III, contohnya The First National Urban Forum, The Sixth Asia Pacific Urban Forum, dan The Asia Pacific Urban Youth Assembly.

Konferensi internasional tersebut menyoroti Isu perkotaan yang akan semakin berkembang dari hari ke hari. Ini sejalan dengan yang terjadi di Indonesia, yang diprediksi sebanyak dua pertiga penduduk Indonesia akan hidup di wilayah perkotaan pada tahun 2035. Fenomena ini akan menjadi tantangan sekaligus potensi untuk negara ini. Jika menuju tahun tersebut pengelolaan kota bisa berjalan semakin baik, maka melimpahnya SDM akan mengoptimalkan kontribusi perkotaan untuk negara. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, maka beban negara terkait perkotaan akan semakin berat dan bertambah.

Buku ini merangkum seluruh kilas balik perjalanan perkotaan di Indonesia, khususnya kontribusi negara ini dalam komitmen internasional terkait lingkungan kota: HABITAT. Dalam buku ini terdapat empat bagian. Bagian pertama (Bab 1), berisi gambaran fenomena perkotaan global, kontribusi eksistensi perkotaan pada berbagai bidang, tantangan pengembangannya, serta konteks yang terjadi di Indonesia. Bagian kedua (Bab 2, 3, dan 4) berisi perjalanan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dalam upaya menjalankan berbagai komitmen internasional, untuk menetapkan standar pengimplementasian dalam mewujudkan perkotaan layak huni.

Selanjutnya, pada bagian ketiga (Bab 5 dan 6), tulisan pada buku ini fokus pada perkembangan perkotaan di Indonesia pada masa ke masa, beserta potensi peningkatan kelayakannya di masa depan. Terakhir, pada bagian keempat (Bab 7), berisi refleksi terkait upaya pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia dalam usaha menciptakan hunian dan lingkungan perkotaan yang terbuka, ramah, dan layak untuk ditinggali. Dalam bagian tersebut juga dijelaskan potensi, rencana, dan masukan-masukan yang bisa menjadi acuan untuk memaksimalkan peran perkotaan di Indonesia bagi kehidupan masyarakat, khususnya pada tahun Indonesia emas 2045 nanti.

Untuk menyajikan sebuah catatan perjalanan yang holistik dalam berbagai perspektif, tim penulis mengelaborasi bahan tulisan dari berbagai sumber. Bahan tulisan dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi literatur. Narasumber dipilih dari pihak-pihak yang terlibat langsung dan memiliki

perhatian pada pengembangan wilayah perkotaan. Para narasumber tersebut merupakan senior di Kementerian PUPR, praktisi dan pemerhati wilayah perkotaan, wartawan, serta guru besar perencana wilayah dan kota. Sementara itu, sumber kepustakaan didapatkan dari buku, dokumen perjanjian internasional, berita, dan laman daring yang terkait.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, kontributor, dan rekan-rekan dari Pusat Studi Infrastruktur Indonesia atas kontribusinya dalam penulisan buku ini. Hadirnya buku ini diharapkan mampu menampilkan secara menyeluruh terkait ruang-ruang pembangunan perkotaan yang telah terisi maupun masih kosong beserta perjalanan dan potensinya. Dengan demikian, harapannya masyarakat bisa turut mengambil peran mengisi ruang kosong tersebut dalam usaha mewujudkan lingkungan kota yang inklusif, adil, layak huni, berkelanjutan, serta tanpa adanya segregasi maupun ketimpangan sosial.

Oktober 2023,

Tim Penulis

Daftar Isi

SAMBUTAN ..... **vi**
PRAKATA ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xix**

Prolog: Pembanguan Perkotaan dan Tantangannya **1**
Pertumbuhan Perkotaan 2
Peran Perkotaan dalam Pertumbuhan Ekonomi 3
Mensyaratkan Pengelolaan Urbanisasi yang Baik 7
Tantangan Pembangunan Perkotaan 10

Menuju Agenda Baru Perkotaan **19**
Perjalanan Menuju Agenda Baru Perkotaan 21
Habitat I: Vancouver, 31 Mei–11 Juni 1976 22
Habitat II: Istanbul, 3–14 Juni 1996 29
Habitat III: Quito, 17–20 Oktober 2016 36
Agenda Baru Perkotaan 45
Zero Draft Agenda Baru Perkotaan, 6 Mei 2016 46
Revised Zero Draft Agenda Baru Perkotaan, 18 Juni 2016 46
Draft Agenda Baru Perkotaan, 18 Juli 2016 47
Surabaya *Draft* Agenda Baru Perkotaan, 28 Juli 2016 47

Agreed Draft Agenda Baru Perkotaan, 10 September 2016 48
Adopted Agenda Baru Perkotaan, 20 Oktober 2016 48
Endorsed by UN General Assembly, 10 September 2016 48

Agenda Baru Perkotaan dan Komitmen Lainnya 54
Kerangka Kerja Sendai (Sendai *Framework*) 55
Agenda Aksi Addis Ababa tentang Pembiayaan untuk Pembangunan 61
Agenda 2030: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 65
Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) 70

Peran Indonesia dalam Habitat 77
Upaya Indonesia dalam Peningkatan Pemahaman Perkotaan 79
Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 79
Sekretariat Nasional Habitat 80
The First National Urban Forum (NUF-1) 87
The Second National Urban Forum (NUF-2) 88
Peringatan Hari Kota Dunia dan Hari Habitat Dunia 90
Kiprah Indonesia dalam Berbagai Forum Perkotaan Internasional 93
The Sixth Asia Pacific Urban Forum (APUF-6 2015) 93
The Asia Pacific Urban Youth Assembly (APUFY) 96

High Level Regional Meeting Asia Pacific (HLRM-AP) 98

Preparatory Committee 3 (PrepCom 3) *for* Habitat III 101

World Urban Forum (WUF) 104

Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) ke-3 110

Pre-Meeting on The Implementation of the New Urban Agenda 112

Minesterial Meeting on Urbanization and Climate Change dan Peluncuran Inisiatif Surge (*Sustainable Urban Resilience for The Next Generation*) di COP27 (Sharm El Sheikh, Mesir) 114

The Second UN-Habitat Assembly 115

Perkotaan Indonesia dari Masa ke Masa 119

Pertumbuhan Penduduk Perkotaan di Indonesia 120

Periodesasi Pembangunan Perkotaan Nasional 124

Capaian Pembangunan Perkotaan di Indonesia 133

Pembangunan Perkotaan di Tingkat Nasional 133

Pembangunan Perkotaan di Tingkat Daerah 144

Pembangunan Perkotaan Melalui Peran Organisasi Akar Rumput 152

Transformasi Kota Masa Kini 159

Masa Depan Perkotaan Indonesia 161

Komitmen Pembangunan Perkotaan di Indonesia 163

Tren dalam Pembangunan Perkotaan di Indonesia 168

Faktor Pendukung (*Enabler*) Pembangunan Perkotaan 177
Ibu Kota Negara (IKN)-Nusantara 183
Harapan Pemuda 191

Epilog: Perkotaan Menuju Indonesia 2045 195
Perkotaan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045 198

Lampiran: Suatu Hari yang Baik 2045 199

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Pertumbuhan dan proyeksi penduduk perkotaan dunia 2

Gambar 1.2 Salah satu pusat perbelanjaan di Surakarta..... 3

Gambar 1.3 Grafik perbandingan urbanisasi dan kenaikan GDP per kapita..... 5

Gambar 1.4 Infrastruktur Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta..... 5

Gambar 1. 5 Dampak urbanisasi dalam konteks global 8

Gambar 1.6 Kondisi lingkungan permukiman yang kurang layak..... 9

Gambar 1.7 Gedung-gedung pencakar langit Jakarta di tengah kepungan polusi udara..... 16

Gambar 2. 1 Kerangka kerja pembangunan global dan peta jalan Habitat I hingga Habitat III..... 21

Gambar 2.2 Salah satu pertemuan dalam Habitat I di Vancouver 22

Gambar 2.3 Peta jalan pelaksanaan Habitat I di Vancouver 24

Gambar 2.4 Peta jalan pelaksanaan Habitat II di Istambul, Turki..... 30

Gambar 2.5 Johan Silas bersama diplomat Indonesia di Habitat II 35

Gambar 2.6 Fokus area, isu, dan kebijakan dalam Habitat III..... 37

Gambar 2.7 *National Report Indonesia*..... 38

Gambar 2.8 Suasana ruang diskusi Preparatory Committee Meeting 1 (17–18 September 2014) di New York, Amerika Serikat..... 38

Gambar 2.9 Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menyampaikan laporan nasional pada Preparatory Committee Meeting 1 (17–18 September 2014) di New York, Amerika Serikat..... 39

Gambar 2.10 Peta jalan pelaksanaan Habitat III di Quito..... 40

Gambar 2.11 Stan Indonesia dalam Preparatory Committee 2 (14–15 April 2015) di Nairobi, Kenya..... 41

Gambar 2.12 Para delegasi dari berbagai negara sedang berdiskusi dalam Preparatory Committee 3 (25–27 Juli 2016) di Surabaya, Indonesia..... 42

Gambar 2.13 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menghadiri konferensi pers pada Preparatory Committee 3 (25–27 Juli 2016) di Surabaya, Indonesia..... 42

Gambar 2.14 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bersama Executive Director UN Habitat, Joan Clos saat Preparatory Committee 3

(25–27 Juli 2016) di Surabaya, Indonesia 44

Gambar 2.15 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memberikan sambutan pada Konferensi Habitat III (20 Oktober 2016) di Quito, Ekuador 46

Gambar 3.1 Perbandingan beberapa komitmen global terkait perkotaan 56

Gambar 3.2 Hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah 57

Gambar 3.3 Sampul Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020/2024 58

Gambar 3.4 Pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) di Sulawesi Tengah 60

Gambar 3.5 Presiden Joko Widodo, dalam *Conference of The Parties* 21 (COP 21) di Paris, Perancis 71

Gambar 3.6 Bus listrik Transjakarta melaju di antara sepeda motor 72

Gambar 3.7 Hasil laporan provisional dan final NUA 75

Gambar 3.8 Pengumpulan laporan provisional NUA ke Urban Agenda Platform 75

Gambar 4.1 Delegasi dari berbagai negara dalam *Asia Pasific Urban Youth Assembly*, 2015 78

Gambar 4.2 Beberapa publikasi sekretariat SDGs tentang metadata indikator 80

Gambar 4.3 Publikasi Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan dan Kilas Balik Perumahan Rakyat 1900–2000 Perkotaan 82

Gambar 4.4 Poster penyelenggaraan NUF-1 tahun 2015 83

Gambar 4.5 Pelaksanaan NUF 2 2023 88

Gambar 4.6 Tim perumus dalam NUF-2 tahun 2023 89

Gambar 4.7 Pelaksanaan Hari Habitat periode 2001–2023 92

Gambar 4.8 Delegasi Indonesia dalam APUFY 96

Gambar 4.9 Executive Director UN Habitat, Joan Clos saat membuka High Level Regional Meeting-Asia Pacific 99

Gambar 4.10 Kover Jakarta Deklarasi 101

Gambar 4.11 Pidato pembukaan oleh Wakil Presiden RI pada

Preparatory Committee di Surabaya, Indonesia 102
Gambar 4.12 Situasi Preparatory Committee 3 di Surabaya, Indonesia 104
Gambar 4.13 Delegasi Indonesia bersama dengan Duta Besar RI untuk Brazil pada World Urban Forum (WUF) 5 di Rio de Janeiro, Brazil 104
Gambar 4.14. Delegasi Indonesia dalam World Urban Forum (WUF) 3 di Vancouver, Kanada 105
Gambar 4.15 Delegasi pemuda Indonesia aktif dalam World Urban Forum 9 106
Gambar 4.16 Linimasa pelaksanaan APMCHUD 109
Gambar 4.17 Sesi dalam APMCHUD 3 di Surakarta, Indonesia 110
Gambar 4.18 Pelaksanaan *youth forum* dan pameran dalam APMCHUD 3 111
Gambar 4.19 Pidato pembukaan dari Direktur Jenderal Cipta Karya 113
Gambar 4.20 Peluncuran inisiatif SURGE 114
Gambar 4.21 Keterlibatan dalam *Ministerial Meeting on Urbanization and Climate Change* COP27 115
Gambar 4.22 Suasana pembukaan The Second UN-Habitat Assembly di Nairobi (5/6/2023) 116
Gambar 4.23 Pembacaan pernyataan nasional Indonesia pada hari Kedua *The Second UN-Habitat Assembly* di Nairobi (6/6/2023) 117
Gambar 5.1 Kali besar Batavia 120
Gambar 5.2 Grafik pertumbuhan penduduk perkotaan Indonesia 122
Gambar 5.3 Perkembangan perkotaan Indonesia 126
Gambar 5.4 Ilustrasi Makassar Virtual Economic Centre (Marvec) 131
Gambar 5.5 Transjakarta yang melintas di salah satu jalur khusus 144
Gambar 5.6 Suasana Kali Mas di Surabaya 145
Gambar 5.7 Kampung Masupati Surabaya 149
Gambar 6.1 Ilustrasi desain IKN Nusantara 162
Gambar 6.2 Kawasan Kota Tua Semarang 172
Gambar 6.3 Trotoar Malioboro Yogyakarta yang luas dan tertata rapi 175
Gambar 6.4 Proses penyatuan tanah dan air nusantara di titik nol Ibu Kota Nusantara 184

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Perbandingan Habitat I, Habitat II, dan Habitat III 53

Tabel 4.1. Keterlibatan Indonesia dalam World Urban Forum 107

Tabel 6.1. Misi Kebijakan Perkotaan Nasional 166

Prolog: Pembangunan Perkotaan dan Tantangannya

01

Pertumbuhan Perkotaan

Saat ini, secara global ada lebih banyak orang yang tinggal di perkotaan daripada di perdesaan. Pada tahun 2018, 55% populasi dunia telah tinggal di perkotaan, dan pada tahun 2050, 68% dari penduduk dunia diproyeksikan akan hidup di permukiman perkotaan. Dalam konteks nasional, penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah kota pada tahun 2020 sebanyak 56,7% dan diprediksi akan meningkat hingga mencapai 66,6% pada tahun 2035.

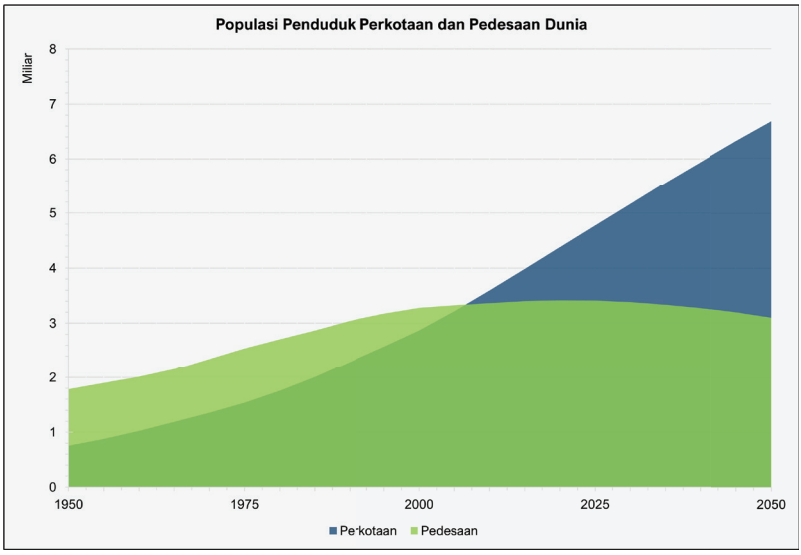

Gambar 1.1 Pertumbuhan dan proyeksi penduduk perkotaan dunia
Sumber: Population Division United Nations, 2018

Fenomena urbanisasi yang terjadi hampir di setiap negara di dunia ini, disebabkan oleh adanya masyarakat yang berkeinginan meningkatkan taraf hidup. Tidak dapat dimungkiri, kehidupan perkotaan memiliki magnet tersendiri bagi orang-orang yang mencari pekerjaan dan mendambakan hidup yang sejahtera, dengan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang memadai, kemajuan sistem transportasi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, pertumbuhan perkotaan pun meningkat pesat seiring berjalannya waktu untuk menampung masyarakat urban yang berdatangan.

Selain perpindahan penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi, penyebab adanya pertumbuhan perkotaan dapat kita lihat dari beberapa pendekatan yang berbeda, yaitu pertumbuhan perkotaan akibat pertumbuhan alami perkotaan serta perubahan fisik suatu wilayah menjadi kota atau perluasan wilayah perkotaan akibat adanya pembangunan.

Peran Perkotaan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Kehidupan perkotaan memberikan pengaruh signifikan dalam kondisi perekonomian global. Saat ini, sekitar 70% dari PDB global dihasilkan oleh perkotaan. Selain itu, lebih dari 60% permintaan akan energi juga berasal dari perkotaan.

Gambar 1.2 Salah satu pusat perbelanjaan di Surakarta

Tingginya permintaan pasokan energi di perkotaan, mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas masyarakat serta kenaikan produksi barang dan jasa di perkotaan. Hal ini pun berdampak pada munculnya berbagai industri baru dalam skala besar maupun sedang, untuk pemenuhan kebutuhan penduduk yang sangat tinggi di wilayah itu. Selain itu, industri-industri baru juga memancing kehadiran investor untuk menyuntikkan dana pada pengembangan bisnis tersebut.

Ketika bisnis menjadi semakin besar, produk barang dan jasa tak lagi hanya berfokus untuk pemenuhan kebutuhan penduduk perkotaan, tetapi berkembang untuk permintaan dari wilayah lain (pinggiran kota dan perdesaan). Pada akhirnya, hal ini pun berujung pada adanya kenaikan PDB.

Seperti yang kita ketahui, besaran PDB menjadi penentu pendapatan dan sebagai gambaran ekonomi makro suatu negara. Ini menunjukkan bahwa jika dikelola dengan baik, urbanisasi bisa meningkatkan kelas ekonomi suatu negara. Sebab, faktanya tak ada negara yang berhasil mencapai kelas ekonomi menengah tanpa adanya urbanisasi. Urbanisasi yang tak terhindarkan ini perlu dimanfaatkan dampak positifnya dari sisi faktor pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi, hingga belanja pemerintah.

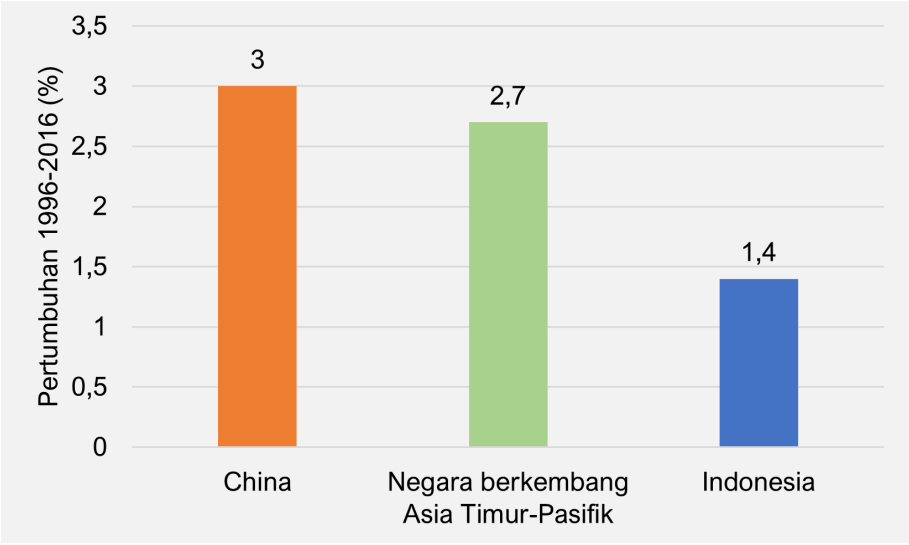

Gambar 1.3 Grafik perbandingan urbanisasi dan kenaikan GDP per kapita
Sumber: World Bank, 2019

Pada rentang waktu tahun 1996–2016, diketahui bahwa setiap pertumbuhan 1% penduduk perkotaan di Indonesia berpengaruh terhadap 1,4% kenaikan GDP per kapita. Meskipun demikian, angka 1,4% ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara berkembang lain di Asia Timur dan Pasifik dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,7%. Apalagi jika dibandingkan dengan China, yang setiap 1% pertumbuhan penduduk perkotaannya berpengaruh pada 3% kenaikan GDP per kapita.

Perkembangan kota dan urbanisasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan perkotaan memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi nasional suatu negara, dengan mengambil bentuk seperti:

Gambar 1.4 Infrastruktur Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta

1. **Pusat aktivitas ekonomi**

   Kota-kota sering kali menjadi pusat aktivitas ekonomi di negara-negara. Mereka menjadi tempat bisnis, industri, perdagangan, dan jasa yang berkembang pesat. Ketersediaan infrastruktur, fasilitas, dan pasar yang baik di kota mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang beragam.

2. **Penciptaan lapangan kerja**

   Pembangunan perkotaan cenderung menciptakan banyak peluang kerja. Dengan adanya berbagai sektor ekonomi yang berkembang di kota, penduduk memiliki akses ke berbagai pekerjaan yang berbeda, baik dalam sektor formal maupun informal.

3. **Peningkatan produktivitas**

   Kehidupan perkotaan sering kali mendukung tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Pusat-pusat perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, pelatihan, teknologi, dan pasar, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perusahaan.

4. **Inovasi dan kreativitas**

   Kota-kota sering kali menjadi tempat inovasi dan pertumbuhan kreativitas. Pertemuan berbagai kelompok sosial, etnis, dan budaya, serta keterbukaan terhadap berbagai ide, mendorong perkembangan teknologi baru, industri kreatif, dan ide-ide revolusioner.

5. **Investasi dan pengembangan infrastruktur**

   Pembangunan perkotaan diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, transportasi umum, dan energi mendukung konektivitas dan aksesibilitas yang lebih baik, pada akhirnya meningkatkan aktivitas ekonomi dan perekonomian kota.

6. **Kontribusi pajak dan pendapatan publik**

   Kota-kota sering kali menghasilkan sebagian besar pendapatan pajak negara. Pajak dari bisnis, properti, dan pendapatan individu di kota berkontribusi pada pendapatan publik yang mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program-program sosial.

7. **Pertumbuhan konsumen**

   Populasi yang berkumpul di perkotaan menciptakan pasar konsumen yang besar. Hal ini mendorong pertumbuhan sektor ritel, makanan, minuman, hiburan, dan sektor lain yang melayani kebutuhan serta keinginan penduduk perkotaan.

Namun, penting juga untuk diingat bahwa pembangunan perkotaan juga dapat menimbulkan tantangan, seperti masalah perumahan, polusi, kemacetan, dan ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan pembangunan perkotaan dengan bijak, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Mensyaratkan Pengelolaan Urbanisasi yang Baik

Tak hanya dampak positif, pertumbuhan perkotaan juga bisa mendatangkan dampak negatif jika peningkatan urbanisasinya tak dikendalikan dengan tepat. Kemiskinan dan kerusakan lingkungan adalah dua dampak negatif, yang akan muncul pertama akibat buruknya tata kelola perkotaan. Kemiskinan yang terjadi menyebabkan berbagai permasalahan sosial, contohnya kriminal. Sedangkan kerusakan lingkungan membuat kota menjadi tidak sehat dan tidak layak huni, contohnya akibat dari polusi pada udara, air, tanah, dan suara.

Hal ini diperkuat dengan diagram data pada Gambar 1.5, perkotaan global yang hanya menempati 2% luas total lahan di bumi, menyumbang 70% PDB global. Jumlah ini dibarengi lebih dari 60% konsumsi energi, 70% emisi gas rumah kaca, dan 70% sampah global. Dari data itu pun dapat disebutkan bahwa perkotaan saat ini menjadi pusat kehidupan penduduk bumi.

Oleh karena itu, tata kelola perkotaan perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan tepat, serta dilengkapi oleh regulasi yang mendukung supaya urbanisasi tetap berada pada koridor pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan perkotaan yang baik, serta urbanisasi yang terencana dan terkendali akan memastikan kota menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi warganya.

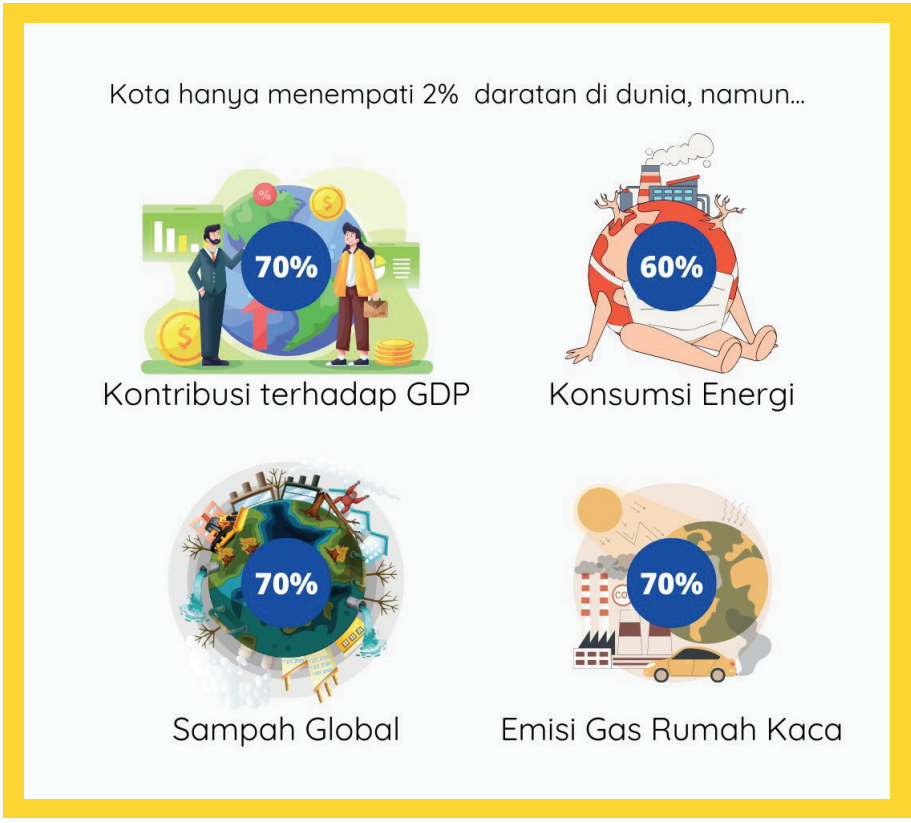

Gambar 1.5 Dampak urbanisasi dalam konteks global

Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia, yaitu pembangunan wilayah di pusat-pusat ekonomi baru cenderung berjalan mengikuti aksi dan reaksi serta terkesan tidak terencana dengan baik, contohnya kawasan industri di Morowali, Sulawesi Tengah.

Kabupaten Morowali menjadi salah satu contoh kawasan industri dengan urbanisasi yang tidak terencana. Di kabupaten ini, tepatnya di Kecamatan Bahodopi, industri pengolahan nikel yang berkembang secara masif berdampak pada naiknya jumlah penduduk semula sebanyak 450% atau 7.388 jiwa menjadi 33.002 jiwa dalam kurun waktu 6 tahun (2016-2022). Pertumbuhan penduduk secara signifikan ini tidak didukung oleh ketersediaan perumahan dan infrastruktur yang kemudian menciptakan lingkungan yang tidak tertata dan cenderung kumuh, bangunan rumah sewa dan kos-kosan menjamur dengan tidak teratur.

Selain itu, banyak infrastruktur dasar yang belum tersedia contohnya penyediaan air bersih, sanitasi, pengolahan persampahan, kondisi jalan

Gambar 1.6 Kondisi lingkungan permukiman yang kurang layak

dan drainase yang belum layak, termasuk minimnya ruang terbuka publik yang belum memadai. Hal ini diperparah dengan kapasitas pemerintah daerah yang masih terbatas dalam mengelola kawasan.

Pengembangan kawasan strategis lainnya yang tidak direncanakan dengan baik memiliki kecenderungan akan memiliki masalah serupa di kemudian hari. Pengelolaan perkotaan yang buruk, tidak terencana, serta kurangnya kapasitas institusi akan menyebabkan perkotaan tumbuh secara meluas (*sprawling*) dan adanya degradasi lingkungan yang berasosiasi dengan kehidupan sosial serta ekonomi suatu wilayah. Tentu, kita tidak mau menciptakan kota yang memiliki masalah yang sama dengan 20 tahun lalu.

Dalam mewujudkan perkotaan yang layak huni, pengelolaan pertumbuhan populasi terutama di daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang meningkat dengan sangat cepat menjadi faktor kunci sekaligus menjadi tantangan relevan yang perlu segera diselesaikan oleh perencana kota. Pengelolaan perkotaan yang baik meliputi tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial, serta lingkungan.

Tantangan Pembangunan Perkotaan

Kota-kota masa depan di Indonesia, sesungguhnya masih menghadapi permasalahan yang sama seperti 20 bahkan 40 tahun yang lalu seperti permukiman kumuh, banjir, sampah, dan kemiskinan kota. Beberapa permasalahan mulai dapat ditangani, tetapi ada beberapa persoalan juga yang semakin mengkhawatirkan. Selain itu, berbagai perkembangan dunia terutama di bidang teknologi dan komunikasi menimbulkan permasalahan baru yang perlu segera ditangani pelaku pembangunan perkotaan.

Kemajuan teknologi yang sangat cepat berkembang selama 15 tahun terakhir ini juga menjadi tantangan sekaligus peluang baru yang tidak dapat terelakkan. Adanya intervensi teknologi dalam kehidupan manusia dapat menjadi terobosan baru dalam menjawab problematika yang ada di perkotaan seperti penerapan *smart city*. Kendati demikian menjadi sebuah pertanyaan besar di masa depan,

"Bagaimana perkembangan perkotaan selanjutnya ketika *artificial intelligence* (AI) ini semakin terus berkembang dan bersaing?"

Akankah AI ini pada nantinya akan menuntaskan permasalahan yang ada atau membawa permasalahan baru lainnya. Tentu saja, hal ini akan membawa rasa kekhawatiran yang tinggi bagi pemerhati perkotaan untuk mencapai masa depan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Berikut tantangan pembangunan perkotaan yang merujuk kepada konsep pembangunan berkelanjutan dengan tiga pilar yang tidak terpisahkan dan saling terkait dalam kehidupan kota:

"Perkembangan AI yang pesat juga menjadi pertanyaan di masa depan. Kita belum tahu nantinya akan seperti apa, karena hal ini relatif baru dan berkembang dengan sangat pesat. Kita juga belum tahu bagaimana implikasinya ke perkotaan. Ada indikasi menuju deglobalisasi, yaitu dunia bisa menjadi terpecah-pecah dengan kubu-kubu tertentu. Jika benar demikian, maka nantinya hal ini juga akan berimplikasi pada konteks perkotaan."

Wicaksono Sarosa
Tokoh Perencanaan Kota di Indonesia

01.
Pilar Ekonomi

Keterjangkauan Tempat Tinggal

Pertumbuhan penduduk dan migrasi ke daerah perkotaan telah menyebabkan meningkatnya permintaan tempat tinggal yang terjangkau di kota-kota. Hal Ini menyebabkan adanya kesenjangan antara pertumbuhan pendapatan rumah tangga dengan kenaikan harga tempat tinggal. Knight Frank, sebuah konsultan *real estate* terkemuka di dunia menemukan bahwa pendapatan di 32 kota besar dunia hanya meningkat sebesar 8% antara tahun 2015 hingga 2020, sedangkan harga rumah rata-rata meningkat sebesar 24% atau 3 kali lipat lebih besar pada rentang tahun yang sama.

Fakta ketidakseimbangan antara pendapatan dan harga rumah ini menyebabkan jumlah tunawisma meningkat dan munculnya permukiman kumuh. Di dalam negeri, berdasarkan *Flash Report* Rumah123.com dan

Indeks Harga Rumah Seken 99.co Indonesia, rata-rata kenaikan harga rumah dalam rentang tahun 2022-2023 yaitu sebesar 2,2%. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Semarang, Surakarta, Medan, Denpasar, dan Makassar adalah kota-kota dengan hunian yang mengalami kenaikan harga tahunan.

Kota-kota yang mencatatkan kenaikan harga tertingginya secara berurutan adalah sebagai berikut Makassar (8,8%), Denpasar (7,0%), Bogor (4,5%), Medan (3,5%), Semarang (3,9%), dan Surakarta (1,2%). Kebutuhan dan permintaan akan hunian di perkotaan yang naik secara pesat, menyebabkan signifikannya kenaikan harga rumah. Terlebih, jika wilayah permukiman dilengkapi dengan infrastruktur dan kemudahan akses. Oleh sebab itu, pemerintah menghadirkan skema rumah bersubsidi untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kenaikan harga rumah subsidi juga tak dapat dihindari akibat tingginya permintaan. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023, pemerintah menaikkan harga rumah bersubsidi pada tahun 2023 sejumlah 6,8-7,7% lebih tinggi dibanding tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2024 harga tersebut diperkirakan naik pada kisaran 2,2-2,9% menurut wilayah. Meskipun demikian, kenaikan harga rumah bersubsidi ini dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Keterampilan Teknis dan Bakat

Pada tahun 2019, *World Economic Forum* (WEF) memperkirakan bahwa pada tahun 2022 akan muncul sekitar 133 juta pekerjaan baru. Pekerjaan-pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang menghubungkan antara manusia, mesin, dan algoritma. Fenomena ini dapat berujung pada kuatnya permintaan akan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis dan kemampuan digital. Selain itu, ditambah dengan adanya perubahan budaya kerja jarak jauh yang memungkinkan seseorang bekerja dari mana saja, menyebabkan kota harus bersaing untuk mendapatkan bakat terbaik agar dapat berkembang. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia. Terlebih pada tahun 2030, negara ini diprediksi akan menjadi negara 7 besar dunia, dan peringkat 4 besar pada tahun 2045.

Pada periode waktu tersebut, sekitar 60-70% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Jika dipersiapkan dan dikelola dengan baik, maka sumber daya manusia Indonesia pada era tersebut bisa menjadi manusia unggul yang sangat produktif. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah merumuskan pilar pembangunan Indonesia 2045 yang berisi pembangunan manusia, penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan, keberlanjutan

ekonomi, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan sosial, dan tata kelola kepemerintahan. Secara umum, menurut Forbes, pada tahun 2030 nanti, sumber daya manusia unggul adalah yang bisa bekerja menggunakan teknologi, punya kemampuan mengolah data, berpola pikir kritis, dan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Oleh sebab itu, menjadi tantangan besar bagi Indonesia khususnya terkait manusia unggul yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ini dikarenakan akses teknologi belum merata dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia tahun 2021 masih berada pada angka 5.76.

Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengejar tahun emas 2045 dan mempersempit kesenjangan bakat adalah dengan transformasi digital pada institusi pendidikan. Ini dilakukan untuk menyamakan progres transformasi digital pada aspek sosial dan lingkungan masyarakat yang sudah banyak dilakukan, contohnya penggunaan *marketplace* atau *e-commerce* untuk memotong rantai pasok sehingga dapat meningkatkan keuntungan masyarakat.

Layanan Digital dan Keamanan Siber

Digitalisasi layanan masyarakat dengan tujuan untuk memudahkan pelayanan, selain meningkatkan daya saing dalam proses pencarian sumber daya manusia, juga membawa tantangan besar bagi perkotaan. Ini disebabkan karena pesatnya perkembangan infrastruktur fisik dan digital, berpotensi meningkatkan risiko serangan siber. Sebagai contoh, diestimasikan sepanjang tahun 2023, dunia akan menghadapi sekitar 33 juta peretasan akun digital.

Selain itu, rata-rata terdapat serangan dari peretas di setiap 39 detik. Sedangkan di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat kenaikan kejahatan siber di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 1.400% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara lebih spesifik, peningkatannya dari 612 kasus menjadi 8.831 kasus. Jenis serangannya pun beragam mulai dari penipuan, kebocoran data, hingga serangan virus. Kasus kejahatan daring ini bisa menyerang siapa pun mulai dari perorangan, institusi, hingga perbankan, contohnya yang terjadi pada salah satu institusi perbankan yang mengalami pencurian 15 juta data nasabah sebesar 1,5 *terabyte* pada pertengahan tahun 2023.

Keterbatasan Pembiayaan

Negara berkembang akan membutuhkan tambahan EUR 1,06 triliun dalam pengeluaran infrastruktur publik untuk pemenuhan permintaan

dan mempertahankan pertumbuhan yang ada. National League of Cities menemukan bahwa kota-kota mengalami penurunan pendapatan pajak penjualan sebesar 11% pada tahun 2020. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan bahwa pandemi mengakibatkan penurunan pendapatan kota sebesar 15% hingga 25%. Hal ini mengakibatkan pemerintah menghadapi kendala anggaran. Kota-kota perlu menemukan model-model pendanaan inovatif untuk menghasilkan aliran pendapatan dan memanfaatkan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dalam hal batasan keuangan, kota-kota di Indonesia menghadapi kesenjangan yang lebar antara pembiayaan infrastruktur perkotaan dengan pendapatan wilayah dan kapasitas pinjaman dana. Sebagai contoh, kesenjangan pembiayaan infrastruktur di Kota Surabaya mencapai angka 2.954 juta USD, Semarang sebesar 1.262 juta USD, Makassar sejumlah 860 juta USD, Bogor sebesar 521 juta USD, dan sebagainya.

02.
Pilar Sosial

Urbanisasi Tak Terencana dan Terkendali

Urbanisasi yang tidak terencana dan terkendali di kota-kota besar telah menyebabkan kelangkaan sumber daya, peningkatan emisi karbon, dan pembebanan pada infrastruktur publik. Hal ini juga menyebabkan munculnya ekonomi transnasional dan model-model baru untuk kota-kota, seperti kawasan *megacity* polisentris. PBB memperkirakan bahwa 60% populasi dunia akan tinggal di kota pada tahun 2030. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa urbanisasi yang tidak terencana akan mengancam lingkungan perkotaan.

Populasi yang Menua dan Kesehatan Perkotaan

Bertambahnya populasi lansia di kota, meningkatkan tekanan pada sistem perawatan kesehatan dan jaminan sosial serta penurunan tenaga kerja. Hal ini mulai terjadi di kota-kota maju Asia seperti Tokyo dan Seoul, serta tentunya kota-kota di Eropa lainnya. Pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di 2019 juga telah mendorong kita untuk memperhatikan kebijakan kesehatan di perkotaan.

Segregasi Sosial dan Kesenjangan

Pandemi memberikan dampak signifikan pada kemakmuran secara global

Diperkirakan sekitar 88 juta orang baru, masuk ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2020. Kaum miskin menjadi pihak yang paling terdesak dengan adanya berbagai kebijakan perkotaan yang tidak berpihak pada kelompok marjinal.

Kebijakan yang tidak efektif untuk mengurai bermacam permasalahan kota menciptakan paparan risiko yang tidak imbang bagi setiap kelas masyarakat, contohnya banjir, kekerasan, dan pembatasan mobilitas. Hal ini diperparah dengan jurang kesenjangan sosial di perkotaan yang semakin lebar dan mengkhawatirkan. Kaum minoritas menjadi terpojok dan dipisahkan dalam komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang signifikan dalam kesetaraan antarkelompok ekonomi, usia, gender, ras, dan difabel.

Aksesibilitas dan Mobilitas

Di kota besar yang sedang berkembang seperti Jakarta, transportasi menyumbang 67% emisi PM 2,5 yang berdampak pada kesehatan berupa penyakit saluran pernapasan. Urbanisasi dan ketergantungan yang terus berlanjut pada kendaraan bermotor milik pribadi menyebabkan kemacetan, menimbulkan kekhawatiran terkait emisi dan dampaknya pada kesehatan. Dalam hal ini, mobilitas merupakan tantangan utama dalam pembangunan kota yang hijau dan berkelanjutan.

Kecerdasan Buatan

Dunia telah mengalami lompatan dalam perkembangan teknologi dalam 50 tahun belakangan ini, salah satunya dengan perkembangan kecerdasan buatan. Saat ini, mungkin referensi terkait pengaruhnya terhadap pembangunan perkotaan masih terbatas, tetapi perkotaan perlu mengantisipasi eksistensinya. Terutama, pada potensi kriminalitas yang dapat ditimbulkan, contohnya penggunaan suara dan gambar rekayasa untuk penipuan dan penyebaran hoaks.

03.
Pilar Lingkungan

Perubahan Iklim

Pada 20 tahun lalu, perubahan iklim mungkin masih menjadi isu yang bukan menjadi permasalahan perkotaan. Namun, kini pembangunan perkotaan tidak terlepas dari upaya pencegahan perubahan iklim. Perubahan iklim

menjadi perhatian utama bagi kota-kota yang mengonsumsi 75% energi secara global dan menyumbang 70% emisi CO^2.

Peningkatan emisi gas rumah kaca ini menyebabkan hujan asam, peningkatan keasaman air laut, pemanasan global, dan kenaikan permukaan laut, sehingga bisa mengancam ketahanan ekosistem alam. Dampak perubahan iklim ini telah dirasakan oleh kota-kota pesisir. Sebagai contoh, wilayah-wilayah di pesisir Pantai Utara Jawa termasuk Jakarta, kini akrab dengan banjir rob dan penyempitan jarak antara permukiman dengan bibir pantai. Dalam hal ini, peran kota menjadi kunci, baik untuk mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim.

Gambar 1.7 Gedung-gedung pencakar langit Jakarta di tengah kepungan polusi udara

Degradasi Tanah

Erosi tanah tidak hanya menyebabkan hilangnya lahan subur, tetapi juga mengakibatkan pencemaran saluran air, banjir, dan kerusakan ekosistem perairan. Penurunan kualitas tanah juga berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Pengelolaan Limbah

Peningkatan konsumsi perkotaan dan konsumerisme pada produk sekali pakai dan langsung buang merupakan penyebab utama krisis pengelolaan limbah. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) jika tidak dikelola dengan tepat dapat berpotensi mencemari air tanah dan ekosistem sekitar.

Sementara itu, produksi limbah global diprediksi akan meningkat 70% dibandingkan saat ini, yang peningkatannya dipercepat oleh urbanisasi dan pertumbuhan populasi.

Polusi Udara

Semakin banyak populasi yang menghirup udara tercemar, maka semakin tinggi pula tingkat kematian akibat polusi udara. Oleh karena itu, bukan sekadar mencegah, tetapi juga perlu meningkatkan kesadaran warga perkotaan tentang efek bahaya polusi udara bagi kesehatan masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah melaporkan bahwa 7 juta kematian dini setiap tahun disebabkan oleh polusi udara.

Emisi pada Sektor Real Estate

Secara global (melalui studi di 32 kota), total emisi karbon yang disumbang oleh pembangunan *real estate* adalah sebesar 60%. Emisi karbon tersebut berasal dari material bahan bangunan, transportasi kendaraan proyek selama pembangunan berlangsung, dan operasional bangunan. Selain itu, pembangunan *real estate* juga dinilai boros dalam penggunaan air dan energi. Dalam hal ini, dibutuhkan kerja sama antara pengembang dan pemerintah untuk mewujudkan dekarbonisasi *real estate* dan lingkungan hijau, khususnya di wilayah perkotaan.

TRAJASA

Menuju Agenda Baru Perkotaan

02

Perjalanan Menuju Agenda Baru Perkotaan

Perjalanan menuju Agenda Baru Perkotaan telah dimulai sejak tahun 1960 hingga awal tahun 1970-an. Pada masa itu, wilayah perkotaan mulai mengalami lonjakan jumlah penduduk, yang disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Migrasi ini terjadi seiring dengan membaiknya keadaan ekonomi di perkotaan dan semakin meningkatnya kemiskinan di wilayah perdesaan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk ini juga disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dengan ditemukannya obat-obat dan pengobatan modern, yang berdampak pada penurunan angka kematian bayi serta peningkatan angka harapan hidup.

Laju urbanisasi yang semakin cepat, tetapi tidak terencana ini menyebabkan banyak masalah di perkotaan, contohnya munculnya permukiman liar, bertambahnya kawasan kumuh, dan penurunan kualitas kehidupan di perkotaan. Di negara-negara sedang berkembang, urbanisasi mendorong munculnya permukiman ilegal atau tak berizin yang tidak jarang menjadi sasaran penertiban dan penggusuran pemerintah kota. Meskipun demikian, saat itu dunia masih belum menyadari dan mengakui secara global masalah yang timbul di perkotaan. Hal ini dikarenakan dua pertiga penduduk dunia masih hidup di perdesaan, sehingga kehidupan kota belum menjadi fokus utama. Dunia masih berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan membangun desa.

Dunia internasional juga masih belum berpengalaman dalam mengatasi berbagai masalah yang ada dalam perkotaan akibat urbanisasi. Dunia belum menyadari, apalagi mengakui bahwa urbanisasi juga berpotensi menjadi pemicu muncul dan naiknya angka kemiskinan. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya urbanisasi, masyarakat cenderung beralih tinggal di kawasan perkotaan, yang mana hal ini menciptakan tekanan baru terhadap lingkungan. Kawasan permukiman menjadi lebih luas dan bertumbuh dengan lebih cepat. Tantangan yang dihadapi penduduk perkotaan kian bertambah contohnya akses terhadap air, ketersediaan pangan, tempat tinggal, energi, transportasi, lapangan pekerjaan, polusi, perlindungan lingkungan, hingga kesehatan mental.

Menguatnya permasalahan akibat urbanisasi yang tidak terkendali, terutama terkait isu lingkungan, membuat para pemimpin dunia merasa hal ini sangat penting dan kompleks. Terlebih karena adanya permintaan untuk

Gambar 2.1 Kerangka kerja pembangunan global dan peta jalan Habitat I hingga Habitat III

melaksanakan pertemuan global guna membahas isu-isu tersebut, maka diadakan konferensi di Stockholm pada 5-16 Juni 1972. Konferensi ini secara khusus mendiskusikan tentang permasalahan lingkungan, serta berfokus pada menyediakan panduan aksi bagi pemerintah nasional dan organisasi internasional untuk menghadapi masalah tersebut.

United Nations Conference on the Human Environment atau UNCHE menghasilkan Stockholm Declaration yang terdiri atas 26 prinsip lingkungan dan pembangunan serta rencana aksi yang memiliki 109 rekomendasi dan resolusi. Adapun Habitat muncul sebagai produk dari konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini.

Kemudian pada tahun 1975, majelis PBB membentuk United Nations Habitat and Human Settlement Foundation (UNHSF) di bawah payung United Nations Environment Programme (UNEP). Organisasi ini merupakan tubuh resmi pertama PBB yang menangani urbanisasi, dan juga menjadi cikal bakal United Nations-Habitat (UN-Habitat) saat ini. Pada saat itu, UNHSF bertugas memberikan bantuan modal dan teknis terhadap program nasional terutama di negara yang sedang berkembang.

Setelah terbentuknya UNEP, maka pada tahun 1976 untuk pertama kalinya Habitat dilaksanakan, sebagai Konferensi PBB tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan yang diadakan setiap 20 tahun sekali. Pada bab ini, kita akan membahas jalan panjang warga kota dunia hingga menghasilkan komitmen bersama terkait pembangunan perkotaan yang disebut sebagai New Urban Agenda atau Agenda Baru Perkotaan.

Habitat I: Vancouver, 31 Mei – 11 Juni 1976

Habitat I merupakan konferensi internasional pertama yang secara penuh mengakui dampak urbanisasi dan kebutuhan untuk memperoleh komitmen politik dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan. Konferensi Habitat I juga mendorong terbentuknya UN Habitat yang secara khusus berfokus pada isu permukiman.

Gambar 2.2 Salah satu pertemuan dalam Habitat I di Vancouver
Sumber: UN Photo/Yutaka Nagata

Terlaksananya konferensi ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan urbanisasi dan kebutuhan pada tingkat global khususnya permukiman layak, serta untuk mengatasi isu-isu perkotaan yang semakin tidak terkendali. Contoh permasalahan saat itu adalah meluasnya perkembangan permukiman yang tidak terkontrol (*urban sprawl*) hingga munculnya permukiman kumuh.

Keberadaan Habitat I juga merupakan rekomendasi dari UN Conference on the Human Environment yang dilaksanakan di Stockholm pada 1972.

Habitat I mengangkat tema *Adequate Shelter for All*. Tema ini dilatarbelakangi oleh peningkatan urbanisasi dan kebutuhan pada tingkat global khususnya permukiman layak.

Secara resmi pada 15 Desember 1972, Majelis Umum PBB menerbitkan **Resolusi 3001** yang menyatakan akan melaksanakan konferensi terkait permukiman dengan tiga tujuan, sebagai berikut:

1. Mendorong inovasi sebagai sarana pertukaran pengalaman, serta memastikan penyebaran ide dan teknologi baru seluas mungkin di bidang permukiman.

2. Merumuskan dan membuat rekomendasi bagi pemerintah internasional untuk membantu pemerintah nasional memahami peran permukiman manusia saat ini dan di masa depan; menetapkan tujuan jangka panjang, kebijakan, dan prioritas untuk pembangunan; serta pengelolaan permukiman manusia bersama dengan langkah-langkah nasional dan internasional yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan ini.

3. Mendorong minat dalam mengembangkan sistem dan lembaga keuangan yang tepat untuk permukiman, di antara mereka yang menyediakan sumber daya keuangan dan mereka yang berada dalam posisi untuk menggunakan sumber daya tersebut.

Konferensi Habitat I dimulai pada akhir Mei 1976. Saat itu perwakilan dari 140 negara berkumpul di Vancouver selama dua minggu untuk mendiskusikan solusi atas tantangan yang dihadapi perkotaan dalam United Nations Conference of Human Settlements, atau yang lebih dikenal dengan Habitat. Konferensi Habitat I ini menyatukan pemerintah dari berbagai negara untuk merumuskan langkah dan menginisiasi program kerja sama internasional bidang permukiman, sebagaimana telah dilakukan pada Konferensi Stockholm yang berfokus dalam bidang lingkungan.

Vancouver, salah satu kota di Kanada, dipilih sebagai lokasi konferensi Habitat I karena secara luasan dan kondisi perkotaannya dapat secara

langsung menunjukkan tantangan urbanisasi dan upaya perlindungan terhadap lingkungan perkotaan. Sebanyak kurang lebih 5.000 delegasi, jurnalis, ahli perkotaan, dan representatif lembaga non-pemerintahan dari berbagai belahan dunia berpartisipasi dalam Habitat I.

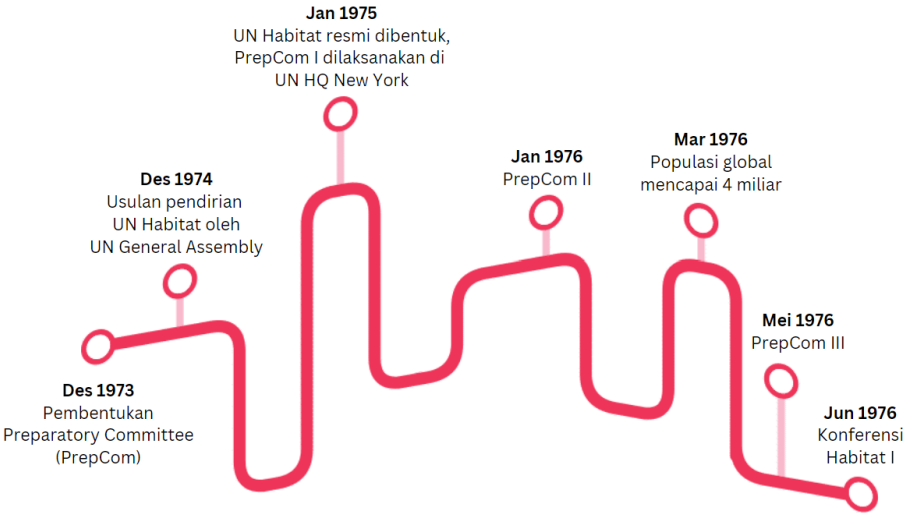

Gambar 2.3 Peta jalan pelaksanaan Habitat I di Vancouver

Habitat I menghasilkan beberapa poin penting, yaitu:

1. **Adopsi Deklarasi Vancouver tentang Permukiman Manusia:** Deklarasi ini menyoroti pentingnya tempat tinggal yang memadai untuk semua, perencanaan kota yang berkelanjutan, dan kebutuhan untuk menyeimbangkan pembangunan perkotaan dan perdesaan.

2. **Pendirian United Nations Centre for Human Settlements (UNCHS):** Juga dikenal sebagai Habitat, badan ini dibentuk untuk memfasilitasi kerja sama internasional dalam mengatasi tantangan urbanisasi dan mempromosikan permukiman manusia yang berkelanjutan.

3. **Penekanan pada Hunian sebagai Hak Asasi Manusia:** Habitat I menekankan bahwa akses ke perumahan yang layak adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan pemerintah didorong untuk mengembangkan kebijakan serta program untuk memastikan hak ini bagi warganya.

Habitat I menghasilkan **"*Report of Habitat: United Nations Conference on Human Settlements,* A/CONF.70/15"**. yang terdiri atas beberapa bagian, sebagai berikut:

Chapter I (p. 6-14): *The Declaration of Principles*, atau yang dikenal sebagai *The Vancouver Declaration on Human Settlements*.

Chapter II (p. 15-95): *Recommendations for National Action*, atau yang dikenal sebagai *The Vancouver Action Plan* yang terdiri atas 64 Rekomendasi untuk Aksi Nasional. Rekomendasi ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu *Section A* (Strategi dan Kebijakan Permukiman), *Section B* (Perencanaan Permukiman), *Section C* (Tempat Tinggal, Infrastruktur, dan Layanan dasar), *Section D* (Lahan), *Section E* (Partisipasi Publik), dan *Section F* (Kelembagaan dan Pengelolaan).

Chapter III – XVIII (p. 96-187): *Recommendations for International Cooperation*, atau rekomendasi kerja sama internasional termasuk prosiding konferensi, laporan panitia, upacara penutupan, dan lampiran.

Adapun rumusan rekomendasi rencana aksi tingkat nasional, sebagai berikut:

1. **Kebijakan dan Strategi Permukiman.** Mendorong ideologi setiap negara direfleksikan ke dalam kebijakan permukiman. Hal ini akan menjadi instrumen yang kuat untuk membawa perubahan dan sejalan dengan prinsip-prinsip *Universal Declaration of Human Rights*. Setiap aspek permukiman-sosial, lingkungan, budaya, dan psikologi akan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi, pertumbuhan populasi dan pergerakan manusia, serta interaksi sosial. Konsekuensi dari pertumbuhan yang cepat memunculkan tantangan sekaligus kesempatan untuk mencapai keseimbangan dalam pembangunan. Setiap negara diwajibkan untuk menyusun kebijakan nasional permukiman yang mempertimbangkan aspek distribusi populasi serta aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, termasuk yang berada di luar teritorial. Kebijakan permukiman harus berorientasi pada peningkatan kondisi permukiman, terutama mengedepankan pemerataan akses dan manfaat bagi daerah dari proses pembangunan. Pemerintah diwajibkan untuk mempublikasikan hasil evaluasi kondisi permukiman secara berkala.

2. **Perencanaan permukiman.** Perencanaan merupakan proses untuk mencapai tujuan pembangunan nasional melalui penggunaan sumber daya yang tersedia secara rasional dan efisien. Oleh karena

itu, perencanaan harus memiliki tujuan yang jelas serta kebijakan dan strategi yang memadai, sehingga sejalan dengan program yang direncanakan. Perencanaan pembangunan permukiman dan lingkungan disusun sejalan dengan kerangka ekonomi dan sosial tingkat nasional, regional, serta lokal—dengan merefleksikan prioritas dan nilai masing-masing daerah. Proses perencanaan dilakukan secara kontinu, dengan koordinasi antarpihak, dan pelaksanaan reviu pemantauan serta evaluasi dari berbagai level pemerintahan. Perencanaan permukiman memiliki tujuan yang berbeda-beda bergantung pada wilayah masing-masing yang terdiri dari:

a. Perencanaan untuk area perdesaan, bertujuan untuk menstimulasi ekonomi dan lembaga sosial, meningkatkan kondisi hidup, serta membawa daerah keluar dari dampak kesenjangan akibat populasi yang tersebar (*scattered*).
b. Perencanaan untuk area metropolitan, bertujuan untuk mengintegrasikan pembangunan dengan area di sekitar wilayah metropolitan.
c. Perencanaan skala lokal, difokuskan pada faktor-faktor sosial dan ekonomi, aktivitas lokal, serta penggunaan lahan.

Beberapa aspek lain yang juga menjadi perhatian dalam perencanaan permukiman, diantaranya adalah meningkatkan kondisi permukiman yang sudah ada (*existing*), memproyeksikan dan merencanakan potensi perluasan perkotaan, merencanakan permukiman baru, merencanakan permukiman yang bersifat temporer, menyusun skenario terhadap bencana di perkotaan, serta merencanakan permukiman bagi para komuter.

3. **Hunian, Infrastruktur, dan Layanan Dasar.** Rumah yang terhubung dengan infrastruktur dan layanan dasar membentuk permukiman individu pada skala yang beragam—unit hunian, klaster perumahan, lingkungan perumahan, perdesaan, kota, hingga metropolitan. Berbagai jenis infrastruktur turut membangun koneksi antar permukiman, serta membentuk jaringan di tingkat regional, nasional, hingga internasional. Dalam memenuhi kebutuhan dasar individu, penyediaan hunian, infrastruktur, serta layanan dasar harus diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Standar pemenuhan ketiga aspek dasar tersebut disesuaikan dengan sumber daya lokal, adaptif terhadap

budaya dan kondisi setempat, menggunakan desain dan teknologi yang merefleksikan kebutuhan masyarakat, mengedepankan efisiensi energi, disediakan oleh badan/instansi pemerintah terkait, serta memperhatikan aspek operasional dan pemeliharaan jangka panjang. Standar pemenuhan tiga aspek dasar tersebut diturunkan lewat beberapa kebijakan berikut ini:

a. Kebijakan hunian, disusun untuk memastikan penyediaan hunian yang memadai, termasuk untuk kelompok berpenghasilan rendah dan disesuaikan antara distribusi sumber daya finansial dengan kebutuhan paling mendasar. Kebijakan ini juga mengakomodasi ragam instrumen pembiayaan hunian, termasuk pembiayaan secara mandiri oleh masyarakat.

b. Kebijakan infrastruktur dan layanan dasar, diarahkan untuk mencapai kesetaraan dalam penyediaan layanan dasar dan utilitas, akses menuju kawasan perekonomian dan rekreasi, serta meminimalisasi dampak terhadap lingkungan. Kebijakan ini mencakup penyediaan air dan pengelolaan limbah, pencegahan polusi, transportasi dan komunikasi, layanan sosial, layanan perdesaan, serta rekreasi.

4. **Lahan.** Luasan lahan merupakan sumber daya terbatas yang harus dikelola dengan baik, diawasi oleh publik maupun diatur oleh negara. Perubahan penggunaan lahan, terutama dari area pertanian ke perkotaan harus didasari oleh regulasi dan pengendalian publik. Kepemilikan lahan oleh publik, dalam hal ini adalah pemerintah, harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar serta upaya mengamankan dan mengendalikan perluasan perkotaan. Pola-pola kepemilikan lahan di masa lampau harus ditransformasi untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, perlunya keterbukaan informasi lahan yang meliputi karakteristik, kepemilikan, penggunaan lahan, dan legalitasnya, sehingga setiap masyarakat atau pemerintah dari berbagai level dapat memberikan intervensi positif terhadap alokasi penggunaan lahan.

5. **Partisipasi Publik.** Partisipasi merupakan bagian yang terintegrasi dengan proses politis terutama pengambilan keputusan. Partisipasi publik bersifat dinamis. Masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi, sosial, dan politis yang berbeda-beda dari setiap negara berperan dalam pengambilan keputusan kolektif. Partisipasi

publik tidak dapat dihindari, terutama dalam proses perencanaan, implementasi, dan manajemen permukiman, serta memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah pada aspek pertumbuhan sosial-ekonomi permukiman.

6. **Kelembagaan dan manajemen.** Kebijakan, strategi, perencanaan, dan program tidak terlepas dari aspek administratif, kelembagaan, dan prosedur formal lainnya untuk menggunakan sumber daya yang tersedia, terutama sumber daya manusia. Permukiman membutuhkan partisipasi dari berbagai institusi, juga jangkauan program yang luas, kompleks, dan relatif bersifat permanen. Kelembagaan untuk permukiman dibentuk mulai dari level nasional, regional, hingga lokal. Ketiganya saling berkoordinasi dan bertanggung jawab untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial, pemeliharaan lingkungan, serta membangun kerja sama interdisipliner. Lembaga yang dibentuk bersifat adaptif terhadap perubahan, dan mendorong serta memfasilitasi partisipasi publik.

"Habitat should not be viewed as an isolated, two-week long event in Vancouver. The Conference marks the turning-point in human settlements."

Enrique Peñalosa
Habitat I Conference Secretary General

Dari Habitat I kita dapat melihat bahwa terdapat 6 fokus topik yang telah menjadi pembahasan 60 tahun lalu, yaitu kebijakan dan strategi permukiman, perencanaan permukiman, hunian, infrastruktur dan layanan dasarnya, lahan, partisipasi publik, serta kelembagaan dan manajemen pembangunan.

Sesungguhnya, berbagai topik tersebut masih relevan untuk dibahas dan menjadi perhatian hingga saat ini. Habitat I juga dikenal sebagai acara internasional penting yang berfokus pada penanganan urbanisasi, permukiman manusia, dan tantangan yang terkait dengan pertumbuhan kota yang pesat.

Secara nasional, Habitat memberikan pengertian baru di tingkat nasional bahwa pembangunan hunian dan infrastruktur nya merupakan suatu kesatuan permukiman yang perlu diintegrasikan.

Habitat II: Istanbul, 3–14 Juni 1996

Dalam rangka menindaklanjuti dan memperbarui berbagai rekomendasi yang telah dihasilkan 20 tahun sebelumnya, dengan berbagai perubahan dalam pembangunan perkotaan, maka konferensi Habitat II dilaksanakan di Istanbul, Turki pada 3–14 Juni 1996. Habitat II juga dikenal sebagai "*The City Summit*", yang mana lebih dari 12.000 orang berkumpul dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran global dan nasional terhadap masalah dan potensi permukiman.

Habitat II hadir di tengah periode kritis dalam sejarah global. Dalam 20 tahun sejak Habitat I, dunia telah mengalami pertambahan populasi sebanyak 1,5 miliar jiwa dengan hampir sepertiga penduduk berusia di bawah 15 tahun dan meningkatnya penduduk yang hidup di kota. Selama abad 21 ini, diperkirakan menjadi titik yang mana 50% penduduk dunia.

Selain itu, konferensi ini dihadiri oleh 117 perwakilan negara. Konferensi ini menyasar dua tema global, **yaitu hunian yang memadai bagi semua dan pembangunan permukiman berkelanjutan** di tengah urbanisasi global.

Habitat II menghasilkan strategi permukiman untuk 20 tahun selama abad 21. Keputusan pelaksanaan habitat II secara resmi ditetapkan tanggal 22 Desember 1992 pada 47 *Session of the General Assembly* melalui Resolusi **47/180** yang menyatakan Habitat II sebagai ***"a world-wide conference with broad, multidisciplinary, and high-level participation could provide***

a suitable forum for considering the current situation in the planning, development, and management of human settlements".

Berbeda dengan Habitat I, Habitat II memiliki tujuan sebagai berikut:

1. **Dalam jangka panjang**, menahan kemerosotan kondisi permukiman dan pada akhirnya menciptakan perbaikan lingkungan hidup semua orang secara berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada kebutuhan dan kontribusi perempuan dan kelompok sosial rentan, yang kualitas hidup dan partisipasinya dalam pembangunan terhambat oleh eksklusi dan ketimpangan, serta secara umum berdampak pada masyarakat miskin.

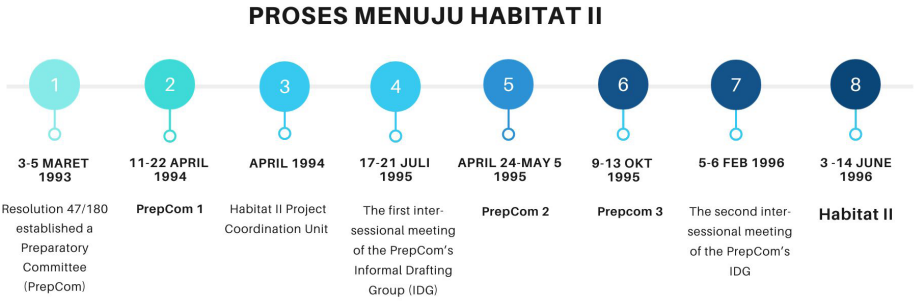

Gambar 2.4 Peta jalan pelaksanaan Habitat II di Istanbul, Turki

2. **Untuk mengadopsi prinsip umum dan komitmen, serta merumuskan rencana aksi global** yang cocok untuk memandu upaya nasional dan internasional selama dua dekade pertama abad berikutnya.

Sedangkan, di dalam proses menuju Habitat II, kemudian akan:

1. **Meninjau tren kebijakan dan program** yang dilakukan oleh negara serta organisasi internasional untuk menerapkan rekomendasi yang diadopsi oleh Habitat: Konferensi PBB tentang Permukiman.

2. **Melakukan tinjauan jangka menengah atas implementasi Strategi Global** untuk hunian hingga tahun 2000 dan membuat rekomendasi untuk pencapaian tujuannya sesuai target.

3. **Meninjau kontribusi terhadap implementasi Agenda 21** aksi nasional dan internasional di bidang permukiman manusia.

4. **Meninjau tren global** dalam pembangunan ekonomi dan sosial karena memengaruhi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan permukiman manusia, serta membuat rekomendasi untuk tindakan di masa depan pada tingkat nasional dan internasional.

5. **Menunjuk UN Habitat akan menjadi sebagai sekretariat** untuk Habitat II tahun 1996.

Habitat II merupakan forum kerja sama yang memberikan suara khusus secara resmi bagi perwakilan komunitas sipil. Habitat II juga dikenal dengan penekanan kepada penjajakan kolaborasi dan inovasi. Pada 14 Juni 1996, Habitat II menghasilkan *Istanbul Declaration* dan Habitat Agenda. *Report of the United Nations Conference on Human Settlements* (Habitat II) terdiri atas:

Chapter I (p. 5–10): *The Declaration of Principles*, atau yang dikenal sebagai *The Istanbul Declaration*, terdiri atas 15 paragraf yang menyoroti tujuh prioritas utama Agenda Habitat berikut: pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan, khususnya di negara-negara industri; perubahan populasi yang tidak berkelanjutan; tunawisma; pengangguran; kurangnya infrastruktur dan layanan dasar; meningkatnya ketidakamanan dan kekerasan; serta peningkatan kerentanan terhadap bencana.

Chapter II (p. 12–120): *The Habitat Agenda*, atau dikenal sebagai rencana aksi global, dimaksudkan sebagai seruan global untuk bertindak di semua tingkatan dan panduan yang ditujukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan kota-kota dan desa-desa di dunia dalam dua dekade pertama abad berikutnya. Agenda ini berisi pernyataan tujuan dan prinsip, serangkaian komitmen yang harus dilakukan oleh pemerintah, serta strategi akhir untuk mengimplementasikan rencana aksi.

Chapters III to VIII (p. 121–229): Kehadiran dan organisasi kerja; pertukaran pandangan secara umum tentang keadaan permukiman manusia dan strategi untuk perbaikan; laporan panitia; serta laporan lampiran.

Kemanusiaan menjadi pusat perhatian dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk hunian dan permukiman yang berkelanjutan sebagai pemenuhan hak atas kehidupan yang sehat dan produktif selaras dengan alam. Setelah mempertimbangkan pengalaman Konferensi Habitat I, Vancouver, Kanada, pada tahun 1976, Habitat II kembali menegaskan hasil dari konferensi dunia yang relevan dengan sektor perkotaan dan mengembangkannya menjadi agenda untuk pembangunan permukiman.

Para pemimpin negara yang tergabung dalam Konferensi Habitat II menyadari kebutuhan untuk meningkatkan upaya dan kerja sama dalam meningkatkan kondisi kehidupan di perkotaan serta desa-desa di dunia, terutama negara berkembang dalam situasi transisi ekonomi. Globalisasi menjadi isu baru dari sektor ekonomi yang menyajikan kesempatan dan tantangan untuk proses pembangunan, juga risiko dan ketidakpastian.

"Habitat II is more than a conference. It is a recognition by the international community -an awakening, if you will- that time is running out on us, that if we want to save the future. We have no choice other than to find answers today to one of the most neglected and urgent problems of our time, one that goes to the very heart of our everyday lives -how we live. Where we live. And. Above all. If we live at all."

Dr Wally N Dow
Secretary General of Habitat II

Oleh karena itu, tujuan **Agenda Habitat** akan didukung oleh pembiayaan pembangunan, pinjaman luar negeri, perdagangan internasional, dan transfer teknologi. Kota-kota di dunia harus menjadi tempat di mana manusia menjalani kehidupan yang penuh martabat, kesehatan yang baik, keamanan, kebahagiaan, dan harapan.

Selain beberapa topik yang telah menjadi kesepakatan dan ditindaklanjuti kembali dari Habitat I, berikut beberapa komitmen yang disepakati dalam Habitat II:

1. **Hunian yang layak untuk semua.** Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan masyarakat dalam memperoleh hunian dan perlindungan, serta meningkatkan kualitas tempat tinggal

dan lingkungan permukiman. Tujuannya supaya setiap orang mendapatkan hunian yang sehat, aman, mudah diakses serta terdapat layanan dasar maupun layanan lainnya, dan fasilitas yang mudah dijangkau. Selain itu masyarakat juga mendapatkan jaminan kepastian hukum akan kepemilikan serta terhindar dari diskriminasi.

2. **Permukiman yang berkelanjutan.** Komitmen untuk mewujudkan permukiman berkelanjutan dengan langkah-langkah berikut: i) membangun masyarakat yang menggunakan sumber daya secara efisien sesuai dengan daya dukung ekosistem; ii) memastikan kesetaraan bagi kelompok rentan dalam hal akses terhadap kesehatan, keamanan, dan layanan produktivitas; serta iii) memastikan pembangunan ekonomi, sosial, dan perlindungan lingkungan sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan nasional.

3. **Pemberdayaan dan partisipasi.** Komitmen untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan-publik, swasta, dan masyarakat mewujudkan perannya secara efektif di tingkat nasional, provinsi, dan lokal/regional dalam pembangunan hunian dan permukiman melalui kepemimpinan lokal (*local leadership*), mendistribusikan kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya, bekerja sama dengan pemuda dalam hal edukasi dan kemampuan pengambilan keputusan, hingga mendorong institusionalisasi pendekatan partisipatif untuk mencapai pembangunan permukiman berkelanjutan.

4. **Kesetaraan gender.** Komitmen untuk menciptakan kesetaraan gender melalui integrasi perspektif gender dalam proses legislasi, perumusan kebijakan, program, dan proyek melalui aplikasi analisis sensitif gender (*gender-sensitive analysis*), menyusun metodologi praktis terkait gender dalam perencanaan dan pembangunan permukiman, menggunakan *gender-disaggregated* data dalam melakukan analisis dan penyebaran informasi, serta mendorong penyusunan kebijakan yang mempromosikan kesetaraan bagi perempuan.

5. **Pembiayaan untuk perumahan dan permukiman.** Komitmen untuk memperkuat dan meningkatkan mekanisme pembiayaan yang ada saat ini dan menyusun pendekatan inovatif untuk pembiayaan Agenda Habitat melalui berbagai sumber pembiayaan publik, privat, multilateral dan bilateral pada level internasional,

nasional, regional, hingga lokal. Pembiayaan dilakukan secara efisien, efektif, serta akuntabel dalam mengalokasikan dan manajemen pendanaan. Pembiayaan untuk perumahan juga mengakui pentingnya institusi lokal dalam penyediaan kredit mikro sebagai skema pembiayaan yang potensial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

6. **Kerja sama internasional.** Komitmen dalam meningkatkan kerja sama internasional dan kemitraan di tingkat global dan nasional melalui skema kerja sama bilateral maupun multilateral untuk memberikan program bantuan teknis serta keuangan; dengan mempromosikan pertukaran teknologi tepat guna; dengan mengumpulkan, menganalisis serta menyebarluaskan informasi tentang hunian dan permukiman oleh jejaring internasional.

7. **Pengukuran capaian.** Komitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi Agenda Habitat dari setiap negara. Indikator kualitatif dan kuantitatif di tingkat nasional dan lokal harus merefleksikan keberagaman dalam hal perencanaan, pemantauan, serta evaluasi. Dalam hal ini, kesejahteraan anak-anak adalah indikator kritis dari sebuah komunitas yang sehat. Indikator, data berdasarkan usia dan gender, serta metode analisis harus dibangun dengan baik dan digunakan untuk memantau dampak kebijakan serta implementasi pembangunan permukiman bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.

Habitat II menekankan pada pentingnya pembangunan kualitas hunian yang layak bagi masyarakat, termasuk kesetaraan gender. Ini sejalan dengan tema besar Habitat II. Selain itu, isu keberlanjutan menjadi salah satu poin penting dalam pembangunan permukiman, yang mana isu ini dilandasi dengan keadaan pembangunan global yang menurunkan kualitas lingkungan. Dalam Habitat II, pemberdayaan juga menjadi salah satu hal yang didorong dalam pembangunan perkotaan. Pembangunan ini diharapkan bukan hanya sekadar melibatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga memberdayakan masyarakat dalam prosesnya sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat maksimal dalam proses tersebut. Selain itu, beberapa isu lainnya seperti kesetaraan gender menjadi hal baru yang diangkat dalam Habitat II. Pembiayaan untuk perumahan dan permukiman juga menjadi salah satu kesepakatan yang dicapai, pembangunan permukiman diharapkan dapat diperkuat dengan berbagai mekanisme pembiayaan yang inovatif dan didukung oleh seluruh sumber dan pemangku kepentingan mulai dari pembiayaan publik, sektor privat,

hingga kerja sama internasional. Salah satu pembeda signifikan dalam Habitat II yaitu adanya komitmen untuk mengukur pencapaian komitmen yang telah disepakati. Setiap negara diharapkan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi dari berbagai kebijakan dan implementasi pembangunan perkotaan, terutama kaitannya dengan kelompok marginal serta rentan. Selain itu, Habitat II mengakui peran penting otoritas lokal dalam pembangunan perkotaan dan menyerukan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan.

Gambar 2.5 Johan Silas bersama diplomat Indonesia di Habitat II

Pada Habitat II ini, Indonesia mengirimkan 23 orang delegasi yang merupakan gabungan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Prof. Johan Silas dari ITS. Indonesia cukup aktif dalam Habitat II ini mulai dari memberikan pernyataan resmi hingga turut berpartisipasi dalam pameran.

“Saat Habitat II, saya full aktif pada kelompok teknis, sedangkan pada kelompok non-teknis diwakili wakil ketua PTRI, dan deklarasi dilakukan oleh seorang direktur Deplu. Saya dibantu oleh dua diplomat muda perempuan, sedangkan delegasi lainnya banyak bertugas di tempat pameran. Kegiatan pembahasan dijadwalkan pada pukul 8 pagi, sebelumnya saya sarapan bersama Pak Soejono dan Dirjen Deplu sembari membahas hasil diskusi hari sebelumnya dan mendiskusikan sikap RI di hari itu. Selanjutnya, pada

pukul 9, kami rapat dengan G77 dan Cina untuk mensinkronkan sikap kelompok dalam menghadapi EU, USA, maupun Jepang. Malam harinya, kami membuat laporan dengan dibantu dua diplomat untuk melapor ke presiden melalui sekretaris negara," ujar Johan Silas mengenang Habitat II.

Secara nasional keberadaan Habitat II tidak memberikan dampak signifikan dalam mendorong pembangunan perkotaan secara khusus. Hal ini dikarenakan, kondisi stabilitas nasional yang tidak memungkinkan, terjadi gejolak politik dan ekonomi yang akhirnya membuat gaung Habitat II tidak terdengar. Selain itu, dunia juga sedang bersiap untuk mengimplementasikan Millennial Development Goals (MDGs) sebagai komitmen pembangunan global selama 15 tahun sejak 2000 hingga 2015. Keberadaan MDGs ini juga pada akhirnya membuat Agenda Habitat tidak menjadi fokus utama dalam Pembangunan global.

Habitat III: Quito, 17–20 Oktober 2016

Jika Habitat I didorong oleh adanya lonjakan penduduk di perkotaan dengan jumlah populasi penduduk yang masih dominan di perdesaan, maka Habitat III telah mencapai babak baru pembangunan perkotaan dunia. Saat itu lebih dari 50% penduduk dunia tinggal di perkotaan. Hal ini memiliki arti bahwa perkotaan telah menjadi bagian penting serta fokus pembangunan dunia. Jika berbicara mengenai pembangunan global maka kita juga berbicara mengenai pembangunan perkotaan. Masa depan dunia bergantung pada masa depan perkotaannya. Di masa mendatang tentunya akan banyak lagi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan perkotaan.

Berbeda dengan Habitat I dan II, dalam Habitat III pembahasan terkait pembangunan perkotaan menjadi sangat kompleks. Terdapat 22 isu yang menjadi dasar pelaksanaan Habitat III yang dibagi menjadi 5 tema besar pembangunan perkotaan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.6 di bawah. Seluruh isu-isu ini menjadi perhatian dalam pembangunan perkotaan 20 tahun mendatang.

Dalam proses mencapai *New Urban Agenda*, maka Majelis Umum PBB dalam **Resolusi 67/216** memutuskan membentuk sebuah Komite Persiapan (Preparatory Committee) untuk mempersiapkan

penyelenggaraan konferensi yang terbuka bagi semua negara anggota PBB dan anggota badan-badan khusus serta Badan Energi Atom Internasional (IAEA). *Preparatory Committee* menyelenggarakan tiga kali pertemuan sebelum dilangsungkannya konferensi Habitat III. Selain PrepCom, dilakukan juga berbagai kegiatan lainnya yang menjadi bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Baru Perkotaan contohnya *regional high level meeting* hingga berbagai *thematic meeting*.

AREAS	ISSUE PAPERS	POLICY UNITS
Social Cohesion and Equity - Livable Cities	• Inclusive cities (a.o. Pro-poor, Gender, Youth, Ageing) • Migration and refugess in urban areas • Safer Cities • Urban Culture and Heritage	• Right to the City and Cities for All • Socio-Cultural Urban Framework
Urban Frameworks	• Urban Rules and Legislation • Urban Governance • Municipal Finance	• National Urban Policies • Urban Governance, Capacity and Institutional Development • Municipal Finance and Local Fiscal Systems
Spatial Development	• Urban and Spatial Planning and Design • Urban Land • Urban-rural Linkages • Public Space	• Urban Spatial Strategies: Land Market and Segregation
Urban Economy	• Local Economic Development • Jobs and Livelihoods • Informal Sector	• Urban Economic Development Strategies
Urban Ecology and Environment	• Urban Resilience • Urban Ecosystems and Resource Management • Cities and Climate Change and Disaster Risk Management	• Urban Ecology and Resilience
Urban Housing and Basic Services	• Urban Infrastructure and Basic Services, Including Energy • Transport and Mobility • Housing • Smart Cities • Informal Settlements	• Urban Services and Technology • Housing Policies

Gambar 2.6 Fokus area, isu, dan kebijakan dalam Habitat III

Preparatory Committee Meeting (PrepCom) 1

Sesi pertama dari *Preparatory Committee Meeting* 1 (PrepCom 1) diselenggarakan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 17–18 September 2014. Dalam kegiatan ini dilakukan 4 rapat pleno dan 2 pertemuan kelompok kerja. Pembahasan yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi pemilihan petugas, persiapan konferensi: laporan

kemajuan dari sekjen konferensi, pembahasan kemajuan implementasi keluaran Habitat II dan identifikasi tantangan baru terkait pengembangan perkotaan berkelanjutan, pembiayaan proses persiapan dan konferensi, hingga pengaturan sesi PrepCom. Dalam rapat pleno dipilih petugas dari Preparatory Committee yang terdiri atas Co-chair, anggota biro dan rapporteur. Indonesia dalam PrepCom terpilih menjadi anggota biro yang diwakili oleh Purnomo A. Chandra (Minister Counsellor, Perutusan Tetap RI untuk PBB saat itu). Dalam rapat pleno 1 hingga 4 dilangsungkan pertukaran pandangan terkait kemajuan implementasi hasil dari konferensi Habitat II tahun 1996 melalui pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan 35 negara dan perwakilan dari Uni Eropa. Terdapat lima organisasi antarpemerintah dan PBB serta sembilan organisasi masyarakat internasional yang juga menyampaikan pernyataan.

Gambar 2.7 *National Report Indonesia*

Gambar 2.8 Suasana ruang diskusi Preparatory Committee Meeting 1 (17–18 September 2014) di New York, Amerika Serikat.

Masing-masing negara menyampaikan kondisi terkait perkotaan di negaranya melalui laporan nasional yang telah disusun dalam rangka persiapan menuju Habitat III. Laporan ini menggambarkan berbagai aspek dari kehidupan perkotaan di masing-masing negara, dilihat dari segi ekonomi hingga lingkungan. Indonesia telah menyampaikan *draft* pertama dari *national report* dalam kegiatan ini.

Gambar 2.9 Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto menyampaikan laporan nasional pada Preparatory Committee Meeting 1 (17–18 September 2014) di New York, Amerika Serikat.

Berdasarkan hasil diskusi dua kali pertemuan kelompok kerja dalam acara ini, Komite Persiapan menyepakati proses pendanaan kegiatan persiapan dan konferensi dari Habitat III. Komite juga merekomendasikan pelaksanaan sesi kedua dari *Preparatory Committee* dilangsungkan pada tanggal 14–16 April 2015.

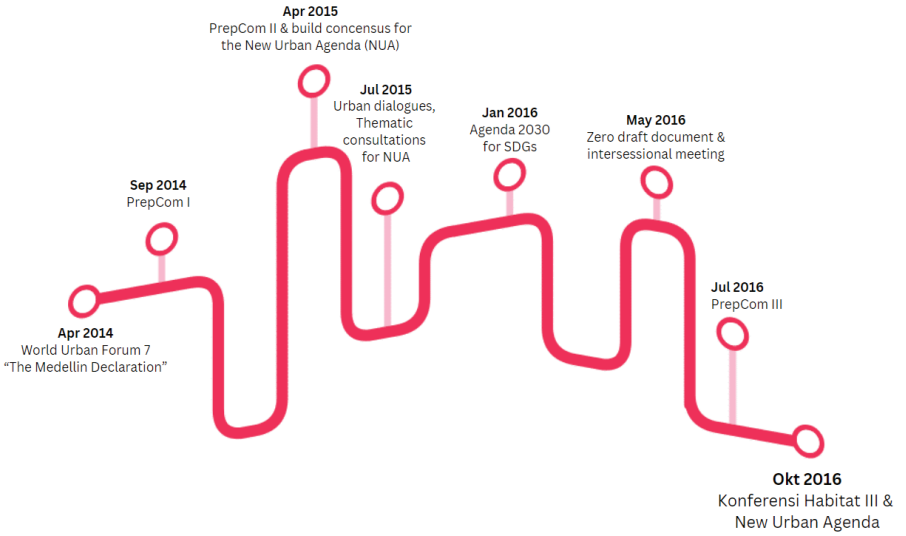

Gambar 2.10 Peta jalan pelaksanaan Habitat III di Quito

Preparatory Committee Meeting (PrepCom) 2

Sesi kedua dari PrepCom diselenggarakan di kantor PBB di Nairobi, Kenya, pada tanggal 14–16 April 2015. Dalam kegiatan ini diadakan 6 rapat pleno dan 4 rapat kelompok kerja. Kegiatan ini membahas kemajuan implementasi keluaran Habitat II dan proses penyusunan Agenda Baru Perkotaan.

Rapat pleno pertama, lima perwakilan UN-Habitat dan satu perwakilan Program Lingkungan PBB (UNEP) menyampaikan 22 makalah isu (*issue papers*) yang dihasilkan oleh badan-badan PBB terkait enam area bahasan untuk Agenda Baru Perkotaan, yaitu:

1. Kohesi sosial dan keadilan (*social cohesion and equity*)
2. Pembangunan spasial (*spatial development*)
3. Kerangka perkotaan (*urban frameworks*)
4. Ekonomi perkotaan *(urban economy*)
5. Ekologi dan lingkungan perkotaan (*urban ecology and environment*)
6. Perumahan dan layanan dasar perkotaan (*urban housing and basic services*)

Disampaikan juga pernyataan dari perwakilan Jerman, Ghana, Malaysia, Slovakia, Algeria, Kongo, Maroko, Senegal; perwakilan UNU, WHO, UNISDR; serta perwakilan organisasi non-pemerintah yaitu Colegio Nacional de Jurisprudencia Urbanistica, Lincoln Institute of Land Policy, Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing, Shack Dwellers International, Réseau d'Échanges Stratégiques pour une Afrique Urbaine Durable, the New School for Public Engagement, Cities Alliance, dan University of Pennsylvania.

Gambar 2.11 Stan Indonesia dalam Preparatory Committee (14–15 April 2015) di Nairobi, Kenya.

Selama berlangsungnya PrepCom 2 terdapat rangkaian kegiatan sampingan (*side events*) yang masing-masing membicarakan satu topik spesifik di ruangan yang lebih kecil untuk diikuti peserta. Dalam setiap sesi, secara umum terdapat 4 *side events* yang berlangsung secara sekaligus. Selama 3 hari pelaksanaan PrepCom 2, terdapat 37 *side events* yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi non-pemerintah, badan PBB, dan akademisi yang membahas berbagai permasalahan perkotaan yang berkaitan dengan *issue papers* Habitat III. Selain itu, juga disampaikan *draft* kedua dari national report dari berbagai negara termasuk Indonesia. PrepCom 2 menghasilkan keputusan akreditasi organisasi non-pemerintah dan grup utama lain ke dalam Habitat III dan proses persiapannya, serta resolusi terkait persiapan Habitat III. Indonesia dan Ekuador juga mengirimkan *draft* keputusan tanggal dan tempat dari PrepCom 3 dan Habitat III untuk tahun 2016.

Preparatory Committee Meeting (PrepCom) 3

Pertemuan terakhir dari PrepCom adalah PrepCom 3 yang diselenggarakan di Surabaya, Indonesia, pada tanggal 25–27 Juli 2016. Kegiatan ini dilakukan di Grand City Exhibition and Convention Center. Agenda utama PrepComm 3 adalah membahas dan menegosiasikan isi dari *Draft New Urban Agenda*. Setelah pembahasan di tingkat pleno dan *working group*, sidang menetapkan dokumen *draft* keluaran yang akan disampaikan ke konferensi.

Gambar 2.12 Para delegasi dari berbagai negara sedang berdiskusi dalam Preparatory Committee 3 (25–27 Juli 2016) di Surabaya, Indonesia.

Selama pembahasan, terdapat berbagai kegiatan pendukung seperti pameran, *urban speakers corner*, serta acara tambahan (*side events*) contohnya seminar *urban heritage tourism, global youth training*, dan kunjungan lapangan.

Gambar 2.13 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menghadiri konferensi pers pada Preparatory Committee 3 (25–27 Juli 2016) di Surabaya, Indonesia.

Dalam pertemuan Prepcom3 dihasilkan Surabaya Draft of the New Urban Agenda yang di dalamnya menyatakan Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for All dan rencana implementasi. Beberapa poin penting dalam pembahasan New Urban Agenda pada PrepCom 3, yaitu sebagai berikut:

1. ***Right to the Cities***, masih menjadi perdebatan di antara negara-negara yang memiliki pandangan berbeda dalam penggunaannya, pilihan penggunaan istilah seperti *cities for all* menjadi pilihan lain yang didorong oleh Indonesia.

2. ***Inclusive Cities***, masih menjadi poin penting yang sebenarnya tidak terpisahkan dari poin pertama dan kedua, penciptaan kota yang ramah terhadap kaum lansia dan difabel, wanita dan anak-anak, menjadi tantangan di masa yang akan datang. Perencanaan perkotaan dan infrastruktur ke depan harus dapat mengakomodasi kaum-kaum yang rentan dan termarjinalkan dalam kota, termasuk juga di dalamnya imigran. Arsitek, perancang kota, *planner*, dan *stakeholder* perkotaan diharapkan berpikir keras dan berinovasi untuk dapat merancang kota yang layak untuk semua warga kota.

3. ***Multilevel Partnership*** dan kerja sama antar *stakeholder* menjadi perhatian penting dalam mewujudkan kota masa depan yang inklusif bagi semua orang. *Prinsip cities for all* menjadi landasan yang menekankan keterlibatan dan keterikatan *stakeholder* menjadi poin utama keberhasilan suatu kota. Selain itu integrasi dan kerja sama pemerintah kota serta daerah sekitarnya menjadi suatu keharusan untuk bisa menciptakan manfaat hubungan kota-desa dan kota-kota.

4. ***Leadership***, menjadi faktor kunci keberhasilan sebuah kota. Kepala pemerintahan seperti gubernur atau walikota menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kota. Suatu kota, contohnya Surabaya dianggap beruntung karena memiliki pemimpin yang menekankan pentingnya *people centered development*, yaitu pembangunan yang berpusat pada masyarakat sebagai sasaran pembangunan dan pelaku pembangunan itu sendiri. Namun, bagi kota yang tidak beruntung, masyarakat tidak boleh tinggal diam, melainkan mengusahakannya sendiri dan bersuara keras (*people power*), serta memulai sendiri pembangunan. Kepemimpinan dan atau pemerintahan yang bisa dipercaya merupakan faktor penting penarik investasi di suatu wilayah.

5. ***Public–Public Partnership*** (PuP) menjadi skema baru pembiayaan pembangunan yang dianggap mampu menggantikan *Public-Private Partnership* (PPP) yang dianggap gagal oleh beberapa negara. Kerja sama ini dianggap dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan lebih berorientasi kepada kepentingan banyak orang atau warga kota sendiri.

Selain PrepCom, dalam proses menuju Habitat III dilaksanakan juga berbagai kegiatan seperti urban dialog di beberapa kota, *high-level regional meeting, thematic meeting*, dan juga *intersessional meetings*. Hasil dan rekomendasi dari berbagai kegiatan ini juga menjadi masukan penting bagi dokumen *New Urban Agenda*.

Dalam proses menuju Habitat III, selain menjadi tuan rumah Preparatory Committee, Indonesia juga secara aktif terlibat dalam penyusunan *policy brief* untuk beberapa tema contohnya *urban governance* dan *urban infrastructure*.

Gambar 2.14 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bersama Executive Director UN Habitat, Joan Clos saat Preparatory Committee 3 (25–27 Juli 2016) di Surabaya, Indonesia

"Kita memberi masukan, kira-kira isu-isu apa saja yang harus masuk, tidak penting dari sudut pandang negaranya sendiri tetapi harus bicara pada level yang internasional. Asia pada waktu itu diwakili oleh saya dan satu dari Bangladesh. Lalu ada perwakilan dari Amerika Latin dan Eropa. Setelah bertukar pikiran, kami masuk dalam kelompok dan mendapat PR untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Saat itu kami berdikusi menggunakan Skype, jadi kita rapatnya pake Skype. Setelah selesai, kami presentasi di New York."

Wicaksono Sarosa
Tokoh Perencanaan Kota di Indonesia

Agenda Baru Perkotaan

Dokumen Agenda Baru Perkotaan merupakan dokumen yang ditetapkan melalui berbagai proses panjang sejak Mei 2016 hingga ditetapkannya dalam Habitat III dan didukung oleh United Nation General Assembly (UNGA). Dokumen ini merupakan hasil kolaborasi beberapa keluaran proses menuju Habitat III di antaranya, yaitu *national report* berbagai negara, pertemuan tematik, pertemuan regional dan *policy issue*, hingga *preparatory committee meeting. New Urban Agend*a menjadi dokumen yang bersifat komprehensif yang didasarkan pada 6 tema utama dan 22 *issue papers* terkait pembangunan perkotaan. Berikut kronologis perubahan dokumen NUA sejak *zero draft* penulisan hingga dokumen final yang kemudian ditetapkan dalam Habitat III di Quito, Ekuador.

Zero Draft Agenda Baru Perkotaan, 6 Mei 2016

Zero Draft merupakan dokumen pertama rancangan awal Agenda Baru Perkotaan yang dikeluarkan oleh Habitat III pada tanggal 6 Mei 2016 terdiri dari 22 halaman yang berisi 175 poin. *Draft* penulisan ini memiliki struktur dengan beberapa komponen penting di dalamnya.

Revised Zero Draft Agenda Baru Perkotaan, 18 Juni 2016

Revisi *draft* awal Agenda Baru Perkotaan merupakan hasil dari beberapa pertemuan antara lain *Informal Hearings with Local Authorities Association* pada 16-17 May 2016, *Informal Intergovernmental Meetings* pada 18-20 May dan 8-10 Juni 2016, dan *Informal Hearing with Stakeholder* pada 6-7 Juni 2016 yang keseluruhannya dilakukan di New York, Amerika Serikat. Berdasarkan berbagai masukan dari beberapa pertemuan tersebut maka dihasilkan *draft* kedua dengan beberapa perubahan di dalamnya. Dalam draft ini dokumen Agenda Baru Perkotaan menjadi lebih singkat dibandingkan *zero draft* sebelumnya. Dalam draft terbaru ini terdapat 17 halaman dan 152 poin atau berkurang sebanyak 23 poin dari sebelumnya.

Gambar 2.15 Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memberikan sambutan pada Konferensi Habitat III (20 Oktober 2016) di Quito, Ekuador

Draft Agenda Baru Perkotaan, 18 Juli 2016

Revisi *draft* awal Agenda Baru Perkotaan merupakan hasil dari beberapa pertemuan antara lain *Informal Hearings with Local Authorities Association* pada 16-17 Mei 2016, *Informal Intergovernmental Meetings* pada 18-20 Mei dan 8-10 Juni 2016, dan *Informal Hearing with Stakeholder* pada 6-7 Juni 2016 yang keseluruhannya dilakukan di New York, Amerika Serikat. Berdasarkan berbagai masukan dari beberapa pertemuan tersebut maka dihasilkan draft kedua dengan beberapa perubahan di dalamnya.

Dalam draft ini dokumen Agenda Baru Perkotaan menjadi lebih singkat dibandingkan *zero draft* sebelumnya. Dalam *draft* terbaru ini terdapat 17 halaman dan 152 poin atau berkurang sebanyak 23 poin dari sebelumnya.

Surabaya *Draft* Agenda Baru Perkotaan, 28 Juli 2016

Surabaya *Draft* Agenda Baru Perkotaan merupakan hasil dari PrepCom 3 yang dilaksanakan di Surabaya, 25-27 Juli 2016. PrepCom 3 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap *draft* Agenda Baru Perkotaan, terutama terhadap detail-detail poin di dalamnya. PrepCom 3 seharusnya menjadi pertemuan terakhir sebelum dilaksanakannya Habitat III di Ekuador pada 17-20 Oktober 2016. Meskipun demikian, PrepCom 3 tidak menghasilkan *Agreed Draft* Agenda Baru Perkotaan, sehingga dilaksanakanlah pertemuan lanjutan yaitu *informal negotiation* pada bulan September di New York, Amerika Serikat.

Secara substansi, draf ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada draft terbaru ini terdapat 22 halaman dan 165 poin atau bertambah 9 poin dari sebelumnya. Struktur dokumen tidak berubah dari draft sebelumnya.

Agreed Draft Agenda Baru Perkotaan, 10 September 2016

Agreed Draft Agenda Baru Perkotaan merupakan hasil dari *informal negotiation* yang dilaksanakan di New York 10 September 2016. Pertemuan ini dilaksanakan untuk menegosiasikan poin-poin yang belum mencapai kesepakatan dalam Prepcom 3.

Pada *Agreed Draft* ini juga tidak terdapat perubahan yang signifikan secara substansi. Draft terbaru ini terdiri atas 23 halaman dan 175 poin, atau bertambah 10 poin dari dokumen sebelumnya. Selain itu, struktur dokumen tidak berubah dari draft sebelumnya.

Adopted Agenda Baru Perkotaan, 20 Oktober 2016

Dokumen ini merupakan dokumen yang ditetapkan pada Konferensi Habitat III di Quito, Ekuador. Dokumen NUA ini sama seperti dokumen sebelumnya sudah terdiri dari dua bagian yaitu *Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for All* dan Quito *Implementation Plan for the New Urban Agenda*.

Tidak berbeda dengan *agreed* dokumen yang dihasilkan pada pertemuan di New York, *Adopted* NUA ini telah berisi 175 poin.

Endorsed by UN General Assembly, 10 September 2016

Dari berbagai proses, dokumen ini mengalami perubahan struktur hingga akhirnya menghasilkan Agenda Baru Perkotaan berdasarkan penetapan oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi PBB A/RES/71/256 , dengan struktur sebagai berikut:

1. *Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for All* (terdiri atas 22 poin)
    a. *Our Shared Vision:*
    b. *Our Principles and Commitments;*
    c. *Call for Action.*
2. *Quito Implementation Plan for The New Urban Agenda*
    a. *The Transformative Commitments for Sustainable Urban Development*
        1. *Sustainable Urban Development for Social Inclusion and Ending Poverty;*
        2. *Sustainable and Inclusive Urban Prosperity and Opportunities for All;*
        3. *Environmentally Sustainable and Resilient Urban Development.*
    b. *Effective Implementation*
        1. *Building The Urban Governance Structure: Establishing a Supportive Framework;*
        2. *Planning and Managing Urban Spatial Development;*
        3. *Means of Implementation.*
    c. *Follow Up and Review.*

Bagian pertama, yaitu *Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for All*. Pada pengantar bagian ini terdiri atas 10 poin yaitu:

1. Pernyataan untuk mengadopsi NUA dari berbagai *stakeholder* sebagai hasil partisipasi dan kesepakatan bersama.
2. Pada 2050 populasi penduduk di perkotaan telah dua kali lipat, urbanisasi menjadi tren abad ini yang paling mengubahkan yang mengakibatkan konsentrasi populasi, aktivitas ekonomi, interaksi sosial dan budaya, serta dampak lingkungan dan kemanusiaan yang semakin besar di kota-kota. Hal ini menimbulkan tantangan dalam hal perumahan, infrastruktur, layanan dasar, keamanan pangan, kesehatan, pendidikan,

pekerjaan yang layak, keselamatan, dan sumber daya alam.

3. Menyatakan bahwa sejak Habitat I, II, dan adopsi MDGs, dunia telah mengupayakan peningkatan kualitas hidup jutaan penduduk perkotaan termasuk penduduk pada permukiman kumuh dan informal. Pertumbuhan ketimpangan dan berbagai bentuk kemiskinan terus-menerus menjadi tantangan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Eksklusivitas sosial ekonomi dan segregasi lahan menjadi realitas tak terbantahkan dalam kota dan permukiman.

4. Menyatakan bahwa urbanisasi merupakan potensi dan memiliki kontribusi positif dalam pembangunan berkelanjutan.

5. Membicarakan kembali bagaimana kota dan permukiman direncanakan, dibangun, dipimpin, dan dikelola. NUA akan membantu untuk mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensi dan pengurangan ketimpangan.

6. NUA merupakan dokumen pertama setelah Agenda 2030 SDGs, dan sejalan dengan Paris Agreement, Sendai Framework for DRR, SAMOA *Pathway* dan *Istanbul Plan for Action*, dan *Vienna Programme of Action* (penambahan dokumen).

7. Agenda Baru Perkotaan mempertimbangkan hasil dari keputusan *the World Humanitarian Summit* yang diselenggarakan pada bulan Mei 2016 di Istanbul.

8. Mengakui kontribusi Pemerintah Nasional, serta kontribusi Pemerintah Sub Nasional dan Lokal, dalam menentukan Agenda Baru Perkotaan

9. Pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan melibatkan kontribusi seluruh stakeholder yang terdiri dari pemerintah lokal hingga pemerintah nasional. Agenda Baru Perkotaan menegaskan kembali komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkontribusi kepada pencapaian SDGs terutama tujuan 11.

10. Agenda Baru Perkotaan mengakui bahwa budaya dan keragaman merupakan hal penting yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan perkotaan sehingga memerlukan pengelolaan sumber daya secara

bertanggung jawab yang dapat mengatasi dampak buruk dari perubahan iklim.

Sebagai panduan mencapai visi Agenda Baru Perkotaan terdapat 3 prinsip yang dapat diadopsi, yaitu:

1. ***Leave no one behind***, dengan memastikan keadilan perkotaan dan pengentasan semua bentuk dan dimensi kemiskinan.

2. **Memastikan ekonomi perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif** dengan memanfaatkan manfaat aglomerasi dari urbanisasi yang terencana dengan baik, termasuk produktivitas tinggi, daya saing, dan inovasi, dengan mempromosikan pekerjaan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua, dengan memastikan penciptaan pekerjaan yang layak dan akses yang setara bagi semua.

3. **Memastikan keberlanjutan lingkungan dengan mempromosikan energi bersih** dan penggunaan lahan dan sumber daya yang berkelanjutan dalam pengembangan perkotaan, melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati, termasuk mengadopsi gaya hidup sehat yang sejalan dengan alam, dengan mempromosikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, membangun ketahanan perkotaan, mengurangi risiko bencana, dan mengatasi perubahan iklim.

Ketiga prinsip ini pada dasarnya tidak berubah dari draft sebelumnya, hanya terdapat perbedaan diksi dan penambahan kata untuk menekankan makna utamanya. Sebagai contoh, *leave no one behind* yang pada awalnya hanya menyebutkan pengentasan kemiskinan mendapat penekanan dengan menambahkan semua bentuk dan dimensi di dalamnya.

Bagian kedua dalam dokumen ini, yaitu Quito Implementation Plan for The New Urban Agenda. Bagian ini berisi instrumen kunci bagi pemerintahan di semua level dan *stakeholder* terkait untuk mencapai pembangunan perkotaan berkelanjutan. Poin-poin di dalamnya tidak banyak berubah dari *draft* sebelumnya.

1. ***Transformative Commitment***

   Transformative commitment berisi mengenai penjabaran 3 prinsip NUA yang sudah disebutkan sebelumnya. Namun, dari ketiga prinsip tersebut tidak lagi terdapat pembagian di dalamnya seperti pada *draft* awal.

2. ***Effective Implementation***

Terdapat 3 hal penting yang dibutuhkan untuk merealisasikan komitmen dalam Agenda Baru Perkotaan, yaitu membangun struktur perkotaan dengan adanya kerangka pendukung. Hal kedua yang menjadi fokus dalam implementasi Agenda Baru Perkotaan, yaitu perencanaan dan pengelolaan pembangunan ruang perkotaan. Pada akhirnya implementasi Agenda Baru Perkotaan harus didukung oleh adanya cara pelaksanaan yang terkait erat dengan pembiayaan.

3. ***Follow Up and Review***

Pada bagian terakhir dalam dokumen Agenda Baru Perkotaan ini menekankan kepada perlunya tindak lanjut dan peninjauan terhadap Agenda Baru Perkotaan untuk memastikan pengaplikasian yang efektif dan pengaruh yang progresif. Bagian ini juga menekankan kepada perlunya kerangka tindak lanjut dan pembahasan secara berkala, efektif, inklusif, dan transparan pada tingkatan global, regional, hingga tingkat lokal. Pada bagian ini juga meminta UN Habitat sebagai salah satu bagian dari sistem dalam PBB untuk menyiapkan laporan kemajuan berkala dari implementasi Agenda Baru Perkotaan dan menekankan peran dalam pelaksanaannya. Bagian ini diakhiri dengan pertimbangan untuk mengadakan Habitat IV pada tahun 2036 untuk menilai keberhasilan Agenda Baru Perkotaan dan *midterm review* di tahun 2026 untuk melihat kemajuan pelaksanaan.

"The Conference is a unique opportunity for rethinking the Urban Agenda in which governments can respond by promoting a new model of urban development able to integrate all facets of sustainable development to promote equity, welfare, and shared prosperity."

Dr. Joan Clos
Executive Director UN-Habitat (2010–2017)

Tabel 2.1 Perbandingan Habitat I, Habitat II, dan Habitat III

Sumber: Diolah dari www.habitat3.org, 2023

Item	Habitat I	Habitat II	Habitat III
Lokasi	Vancouver, Kanada	Istanbul, Turkiye	Quito, Ekuador
Tanggal Pelaksanaan	31 Mei - 11 Juni 1976	3-14 Juni 1996	17-20 Oktober 2016
Latar Belakang	Peningkatan urbanisasi, kebutuhan permukiman layak, dan isu-isu perkotaan yang semakin tidak terkendali.	Pertambahan populasi sebanyak 1,5 miliar jiwa, sepertiga penduduk berusia di bawah 15 tahun, meningkatnya penduduk yang hidup di kota.	50% penduduk dunia tinggal di perkotaan, perkotaan telah menjadi bagian penting pembangunan dunia.
Landasan	Resolusi 3001	Resolusi 47/180	Resolusi 66/207
Tema	*Adequate Shelter for All*	*Adequate shelter for all and sustainable human settlements development in an urbanizing world*	*Sustainable Urbanization*
Tujuan	Sarana pertukaran pengalaman dan ide; merumuskan rekomendasi; serta mendorong sistem dan kelembagaan.	Menahan kemerosotan kondisi pemukiman dan pada akhirnya menciptakan perbaikan lingkungan hidup; serta merumuskan rencana aksi global.	Menjamin komitmen politik baru bagi pembangunan perkotaan berkelanjutan, menilai pencapaian mengatasi kemiskinan, dan mengidentifikasi serta mengatasi tantangan baru.
Peserta	Perwakilan 140 negara	117 perwakilan negara, 12.000 peserta	Perwakilan 167 negara dengan 30.000 peserta
Output	Deklarasi Vancouver; Pendirian UNCHS, hunian sebagai hak asasi	The Habitat Agenda: Istanbul Declaration on Human Settlements	The New Urban Agenda: Quito Declaration on Sustainable Cities and Human Settlements for All
Laporan	Report of Habitat: United Nations Conference on Human Settlements 6 Bagian dan 64 Rekomendasi	Report of the United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II) 8 Bagian dan 241 rekomendasi	Agenda Baru Perkotaan 3 Bagian dan 175 poin rekomendasi
Poin Penting	Kebijakan dan strategi permukiman; perencanaan permukiman; hunian; infrastruktur dan layanan dasar; lahan; partisipasi publik; serta kelembagaan dan manajemen pembangunan.	Hunian yang layak untuk semua; permukiman berkelanjutan; pemberdayaan dan partisipasi; kesetaraan gender; pembiayaan perumahan dan permukiman; serta kolaborasi dan pengukuran capaian.	Urbanisasi semua tingkat permukiman; mengintegrasikan keadilan dalam agenda pembangunan; perencanaan kota nasional dan perencanaan perluasan kota; relevan tujuan pembangunan berkelanjutan dan urbanisasi berkelanjutan; serta menyelaraskan dan memperkuat pengaturan kelembagaan.

Agenda Baru Perkotaan dan Komitmen Lainnya

03

Pembangunan perkotaan merupakan sesuatu yang kompleks karena melibatkan seluruh aspek mulai dari ekonomi, sosial, sampai dengan lingkungan. Oleh karena itu, Agenda Baru Perkotaan sebagai komitmen pembangunan perkotaan memiliki irisan dan keterkaitan dengan berbagai komitmen pembangunan internasional lainnya, contohnya SDGs, Addis Ababa Action Agenda, Paris Agreement, Sendai Framework, dan lain sebagainya. Keterkaitan Agenda Baru Perkotaan dengan komitmen lain akan menjadi pembahasan pada bab ini. Sedangkan pada bab berikutnya, secara spesifik akan membahas detail peran Indonesia dalam berbagai proses Habitat.

Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework*)

Kerangka Kerja Sendai untuk Penurunan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015–2030 merupakan perjanjian global pertama yang disusun setelah 2015 *Development Agenda*. Kerangka Kerja Sendai disahkan oleh PBB pada The World Conference on Disaster Risk Reduction yang dilaksanakan tanggal 14–18 Maret 2015 di Sendai, Jepang. Kerangka kerja ini memberikan petunjuk konkret terkait pengurangan risiko bencana, kerentanan, dan peningkatan ketahanan bencana bagi seluruh negara anggota PBB dalam periode 15 tahun.

Komitmen internasional ini sejalan dengan Agenda 2030 lainnya, termasuk Perjanjian Paris pada Perubahan Iklim (*Paris Agreement on Climate Change*), Agenda Aksi Addis Ababa pada Pendanaan untuk Pengembangan (*Addis Ababa Action Agenda on Financing for Development*), Agenda Baru Perkotaan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Kerangka ini merupakan keberlanjutan dari instrumen sebelumnya, Kerangka Kerja Hyogo untuk Aksi 2005–2015 dengan tujuan utama, yaitu:

“Pengurangan risiko bencana dan kerugian lainnya yang mencakup aspek penghidupan, kesehatan, ekonomi, fisik, sosial, budaya dan aset-aset milik perorangan, pelaku usaha, komunitas masyarakat, serta negara.”

Kerangka kerja Ini berfokus pada berbagai bahaya, termasuk bahaya yang disebabkan oleh alam dan manusia. Selain itu, kerangka ini juga bertujuan untuk mencegah munculnya risiko baru, mengurangi risiko yang

ada, dan memperkuat ketahanan pada semua tingkatan. Kerangka Kerja Sendai memuat empat prioritas utama, yaitu: i) memahami risiko bencana; ii) memperkuat tata kelola untuk manajemen risiko kebencanaan; iii) menaruh investasi pada pengurangan risiko bencana dengan membangun ketahanan; dan iv) meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respons yang lebih efektif dan mengedepankan pembangunan kembali dengan lebih baik (*build back better*) selama proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Keempat prioritas tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam tujuh target dan 38 indikator.

AGENDA	RUANG LINGKUP DAN STATUS PERJANJIAN	ASPEK UTAMA
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (Maret, 2015)	Perjanjian global yang tidak mengikat untuk pengurangan risiko bencana oleh 186 negara anggota PBB dalam *Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction* (DRR) di Sendai, Jepang, pada Maret 2015	• Mengidentifikasi urbanisasi cepat yang tidak dikelola dengan baik sebagai faktor risiko utama terjadinya bencana • Mendorong peralihan dari respons bencana ke pengurangan risiko bencana di pemerintah pusat dan daerah
Addis Ababa Action Agenda (Juli, 2015)	Perjanjian globalyang tidak mengikat untuk mendukung pelaksanaan Agenda 2030, yang didukung oleh 193 negara anggota PBB dalam *Third International Conference on Financing for Development*	• Pentingnya aktor lokal dan kesadaran perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah • Komitmen untuk mendukung pemerintah daerah dalam memobilisasi pendapatan sebagaimana mestinya • Memberikan informasi tentang cara mendapatkan pendanaan untuk mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi komitmen tersebut
Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development (September, 2015)	Perjanjian global yang tidak mengikat dalam 17 tujuan SDGs oleh 193 negara anggota PBB yang menggambarkan sasaran dan lingkup agenda global yang inklusif dan multidimensi	• Berdasarkan tujuan SDG 11 yang secara eksplisit menuliskan untuk menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan • Berfokus pada tujuan nasional dan pemantauan nasional tanpa adanya pengakuan yang memadai terhadap peran kunci pemerintah daerah dan masyarakat sipil perkotaan dalam mencapai sebagian besar SDGs, meskipun terdapat keterlibatan yang berkelanjutan dari jaringan dan asosiasi pemerintah daerah serta perwakilan masyarakat sipil selama proses negosiasi antar pemerintah
The Paris Agreement (Desember 2015)	Perjanjian global yang mengikat dalam UN *Framework Convention on Climate Change* yang disetujui oleh 195 dan diratifikasi oleh 170 negara anggota PBB	• Merujuk pada otoritas kota dan daerah sebagai salah satu dari banyak pemangku kepentingan non-partai tanpa mengacu secara spesifik pada peran, tanggung jawab, kapasitas, atau kebutuhan dukungan mereka • Mendorong kota untuk menyusun agenda spesifik untuk isu ini
The New Urban Agenda (Oktober 2016)	Perjanjian global yang tidak mengikat sebagai kerangka pembangunan kota yang berkelanjutan oleh 167 negara anggota PBB dalam *UN Conference on Housing and Sustainable Urban Development* (Habitat III)	• Dimaksudkan sebagai pedoman global untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan selama 20 tahun, tetapi tidak sejalan dengan perjanjian lain dan sedikit dukungan dari organisasi yang ingin menerapkannya • Memiliki pengakuan terbatas terhadap pemerintah lokal atau masyarakat sipil sebagai pemrakarsa dan penggerak perubahan • Mencakup banyak penyebutan mengenai pemerintah lokal, namun terbatas hanya sebagai pelaksana kebijakan nasional

Gambar 3.1 Perbandingan beberapa komitmen global terkait perkotaan

Hubungan antara Kerangka Kerja Sendai dan Agenda Baru Perkotaan ini terletak pada tujuan yang tumpang tindih dan pengakuan akan keterkaitan antara pengurangan risiko bencana dan pembangunan perkotaan. Keduanya mengakui pentingnya membangun kota dan komunitas yang tangguh. Agenda Baru Perkotaan menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan kawasan perkotaan yang siap menghadapi dampak bencana, termasuk kejadian terkait iklim, sementara Kerangka Kerja Sendai menekankan integrasi langkah-langkah pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan pembangunan kota.

Selain itu, terkait pembangunan berkelanjutan, kedua komitmen global ini memiliki tujuan yang sama untuk memajukan pembangunan berkelanjutan. Agenda Baru Perkotaan menyoroti peran urbanisasi dalam mencapai

Gambar 3.2 Hasil rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sulawesi Tengah

tujuan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Kerangka Kerja Sendai menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Kedua komitmen global ini juga mengakui perlunya kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk secara efektif mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan risiko bencana. Komitmen tersebut juga mengintegrasikan langkah-langkah pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan kota dan proses pembangunan, seperti yang dianjurkan oleh Kerangka Kerja Sendai–sangat penting untuk mencapai tujuan Agenda Baru Perkotaan.

Hubungan antara Kerangka Kerja Sendai dan Agenda Baru Perkotaan ini terletak pada tujuan yang tumpang tindih dan pengakuan akan keterkaitan antara pengurangan risiko bencana dan pembangunan perkotaan. Keduanya mengakui pentingnya membangun kota dan komunitas yang tangguh. Agenda Baru Perkotaan menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan kawasan perkotaan yang siap menghadapi dampak

Gambar 3.3 Sampul Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020–2024

bencana, termasuk kejadian terkait iklim, sementara Kerangka Kerja Sendai menekankan integrasi langkah-langkah pengurangan risiko bencana dalam perencanaan dan pembangunan kota.

Selain itu, terkait pembangunan berkelanjutan, kedua komitmen global ini memiliki tujuan yang sama untuk memajukan pembangunan berkelanjutan. Agenda Baru Perkotaan menyoroti peran urbanisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Kerangka Kerja Sendai menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Kedua komitmen global ini juga mengakui perlunya kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pemerintah

daerah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk secara efektif mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi dan risiko bencana. Komitmen tersebut juga mengintegrasikan langkah-langkah pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan kota dan proses pembangunan, seperti yang dianjurkan oleh Kerangka Kerja Sendai–sangat penting untuk mencapai tujuan Agenda Baru Perkotaan.

Kerangka Kerja Sendai dan Agenda Baru Perkotaan saling melengkapi dengan mempromosikan strategi yang berkontribusi untuk membangun kawasan perkotaan yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif yang tahan terhadap dampak bencana. Kedua kerangka tersebut menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi untuk pembangunan perkotaan dan pengurangan risiko.

Secara nasional, Indonesia telah mengadopsi kerangka kerja ini ke dalam berbagai aspek dan bidang pembangunan, di antaranya:

1. **Pengembangan kebijakan dan rencana aksi**

   Indonesia telah mengembangkan kebijakan dan rencana aksi nasional untuk mengurangi risiko bencana sesuai dengan prinsip-prinsip Kerangka Kerja Sendai. Hal ini termasuk pengidentifikasian risiko bencana, pemantauan dan penilaian risiko, serta perencanaan mitigasi.

2. **Penguatan kapasitas**

   Indonesia terus berinvestasi dalam memperkuat kapasitas personel dan lembaga yang terlibat dalam manajemen risiko bencana. Ini mencakup pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keahlian dalam bidang mitigasi dan tanggap darurat.

3. **Penyuluhan masyarakat**

   Pemerintah Indonesia sering kali melakukan kampanye penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi dan merespons bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan persiapan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

4. **Pengembangan infrastruktur tahan bencana**

   Indonesia terus membangun dan mengembangkan infrastruktur yang tahan terhadap bencana, seperti bangunan yang sesuai dengan standar tahan gempa, sistem peringatan dini, dan infrastruktur perlindungan pantai, sebagai contoh pengembangan RISHA bagi kawasan rawan bencana.

Gambar 3.4 Pembangunan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) di Sulawesi Tengah

5. **Kerja sama regional dan internasional**

   Indonesia juga terlibat dalam kerja sama regional dan internasional dalam upaya mengurangi risiko bencana. Hal ini mencakup pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dengan negara-negara lain dalam kawasan Asia Pasifik.

6. **Penggunaan teknologi**

   Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti sistem peringatan dini berbasis teknologi, telah diterapkan untuk meningkatkan respons terhadap bencana.

7. **Pengumpulan data dan pemantauan**

   Indonesia telah meningkatkan pengumpulan data dan pemantauan risiko bencana, yang penting dalam pengambilan keputusan dan perencanaan mitigasi.

8. **Komitmen pada pembangunan berkelanjutan**

   Kerangka Kerja Sendai menekankan pentingnya mengintegrasikan manajemen risiko bencana ke dalam pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, Indonesia telah berupaya untuk memasukkan aspek-aspek mitigasi risiko bencana ke dalam rencana pembangunannya.

Agenda Aksi Addis Ababa tentang Pembiayaan untuk Pembangunan

Agenda Aksi Addis Ababa merupakan komitmen pendanaan global untuk mendukung implementasi Agenda 2030. Komitmen ini dihasilkan dalam *The Third International Conference on Financing for Development* pada Juli 2015 di Ethiopia dan disepakati oleh 193 negara yang tergabung dalam PBB. Agenda aksi ini menguraikan kerangka komprehensif untuk mendanai pembangunan berkelanjutan. Secara umum, komitmen ini membahas berbagai sumber pembiayaan, termasuk sumber daya domestik dan internasional, pendanaan publik dan swasta, serta mekanisme keuangan inovatif untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Beberapa agenda lintas sektoral yang masuk dalam pembahasan Agenda Aksi Addis Ababa meliputi:

1. Memberikan perlindungan sosial dan layanan sosial dasar untuk semua. Hal ini sejalan dengan komitmen pengentasan kemiskinan melalui dukungan fiskal yang berkelanjutan dan proporsional bagi kelompok rentan, difabel, penduduk asli (tradisional), anak-anak, pemuda, dan orang tua.

2. Meningkatkan upaya pengentasan kelaparan dan malnutrisi. Ini mempertimbangkan bahwa sebagian besar penduduk miskin berada di perdesaan, upaya ini akan difokuskan untuk merevitalisasi sektor pertanian termasuk kehutanan, perikanan dan peternakan, mengedepankan pembangunan perdesaan, serta memastikan ketahanan pangan dengan cara yang berkelanjutan terutama di negara berkembang.

3. Membangun forum baru untuk menjembatani kesenjangan infrastruktur. Hal ini akan dicapai melalui dukungan finansial dan teknis, terutama untuk negara berkembang dalam membangun infrastruktur yang aksesibel, tangguh, serta berkelanjutan pada sektor transportasi, energi, air bersih, dan sanitasi.

4. Mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi dengan badan PBB terkait untuk meningkatkan hubungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi, dan inovasi yang inklusif serta berkelanjutan.

5. Menciptakan iklim kerja yang produktif bagi semua dan mempromosikan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini akan dicapai melalui partisipasi yang setara antara wanita dan pria, termasuk kelompok difabel, membuka akses kredit yang terjangkau bagi usaha mikro, kecil dan menengah, serta mempromosikan partisipasi pemuda dan wirausaha.

6. Melindungi ekosistem untuk semua dengan membangun komitmen untuk melindungi lingkungan dan sumber daya alam, biodiversitas, dan iklim, memastikan seluruh komitmen, kebijakan, pendanaan, kerangka perdagangan dan pengembangan teknologi sejalan dengan upaya melindungi lingkungan.

7. Mempromosikan perdamaian dan inklusivitas untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan membangun tata kelola yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

Beberapa rencana aksi yang telah disusun untuk mendukung agenda lintas sektoral tersebut meliputi sumber daya domestik, sektor bisnis privat dan keuangan internasional maupun lokal, pembangunan dan perdagangan internasional, pinjaman dan utang, serta pendanaan untuk mengatasi permasalahan sistemik, sains, teknologi, inovasi, dan peningkatan kapasitas Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di perkotaan, Agenda Aksi Addis Ababa telah mencakup komitmen umum yang penting bagi aktor-aktor di tingkat daerah dan menyadari pentingnya penguatan kapasitas pemerintah kota dalam implementasi Agenda 2030. Selain itu, komitmen ini secara eksplisit menyatakan dukungan kepada pemerintah daerah untuk memobilisasi pendanaan yang disesuaikan masing-masing daerah. Namun, masih terbatas dalam mengungkapkan bagaimana cara untuk mendapatkan pendanaan tersebut sehingga pemerintah daerah dapat berpartisipasi dalam komitmen Agenda Aksi Addis Ababa.

Integrated national financing frameworks (INFFs) atau kerangka kerja pembiayaan nasional terpadu (INFF) pertama kali diperkenalkan oleh Negara-negara anggota PBB dalam Agenda Aksi Addis Ababa tahun 2015 sebagai pendekatan yang dipimpin negara untuk memperkuat pembiayaan publik dan swasta untuk pembangunan berkelanjutan. Melalui INFF, negara-negara menyatukan aktor-aktor publik dan swasta, masyarakat sipil dan mitra pembangunan untuk mengembangkan strategi pembiayaan, reformasi dan instrumen yang meningkatkan investasi, mengelola risiko dan menyelaraskan keuangan dengan prioritas pembangunan berkelanjutan nasional dan SDGs.

Hubungan antara Agenda Aksi Addis Ababa dan Agenda Baru Perkotaan, tidak lepas dari pembangunan berkelanjutan. Agenda aksi ini mengakui pentingnya pembiayaan pembangunan perkotaan dan infrastruktur secara berkelanjutan. Hal ini menekankan perlunya memobilisasi sumber daya untuk proyek-proyek perkotaan, termasuk melalui investasi publik dan swasta, bantuan pembangunan resmi (*Official Development Assistance/ODA*), serta mekanisme pembiayaan yang inovatif. Visi Agenda Baru Perkotaan untuk urbanisasi yang berkelanjutan juga sejalan dengan tujuan pembiayaan yang efisien dan efektif. Ini sebagaimana digariskan dalam Agenda Aksi Addis Ababa tersebut.

Kedua agenda menekankan pentingnya inklusivitas, kesetaraan, dan integrasi sosial dalam proses pembangunan. Agenda Baru Perkotaan menekankan perlunya mengatasi kesenjangan dan ketidaksetaraan di daerah perkotaan, sedangkan Agenda Aksi Addis Ababa menyoroti pentingnya pembiayaan yang ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan mengurangi kemiskinan.

Agenda Baru Perkotaan menekankan peran pemerintah dan otoritas lokal dalam pembangunan perkotaan. Sedangkan Agenda Aksi Addis Ababa mengakui pentingnya tata kelola lokal dan pembangunan kapasitas dalam melaksanakan proyek pembangunan secara efektif, yang sangat relevan dalam konteks urbanisasi. Kedua agenda berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Agenda Baru Perkotaan secara langsung membahas tantangan dan peluang urbanisasi, sedangkan Agenda Aksi Addis Ababa membahas aspek keuangan yang diperlukan untuk mendukung berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk yang terkait dengan kawasan perkotaan.

Agenda Aksi Addis Ababa dan Agenda Baru Perkotaan saling berhubungan dalam arti bahwa keduanya berkontribusi pada upaya global menuju pembangunan berkelanjutan. Agenda Aksi Addis Ababa menyediakan kerangka pembiayaan yang mendukung pelaksanaan berbagai agenda, termasuk Agenda Baru Perkotaan, dengan memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan dimobilisasi untuk mencapai tujuan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tujuan utama dari Agenda Aksi Addis Ababa adalah mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. Ini mencakup pendanaan untuk mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan dampak perubahan iklim, serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB, telah mengambil berbagai langkah untuk menindaklanjuti Agenda Aksi Addis Ababa. Beberapa langkah yang telah diambil oleh Indonesia meliputi:

1. Pengembangan rencana aksi nasional: Indonesia mengupayakan pengembangan rencana aksi nasional yang sesuai dengan agenda aksi tersebut. Rencana ini mencakup strategi dan langkah-langkah konkret untuk menggerakkan sumber-sumber pendanaan yang berkelanjutan. Indonesia telah menjadi pemimpin dalam pembiayaan inovatif dengan menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan Green Sukuk, sebuah obligasi syariah yang dirancang untuk membiayai investasi ramah lingkungan, dan baru-baru ini menerbitkan obligasi SDG pertamanya.

2. Penguatan kebijakan fiskal dan moneter: Indonesia mengambil langkah-langkah dalam penguatan kebijakan fiskal dan moneter untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan, yang mencakup reformasi pajak, perbaikan kebijakan investasi, dan upaya lainnya untuk meningkatkan pendapatan negara.

3. Pengembangan sektor keuangan: Indonesia telah mengembangkan sektor keuangan, termasuk sektor perbankan dan pasar modal, untuk mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Hal ini bisa melibatkan peningkatan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat dan usaha kecil dan menengah.

4. Promosi investasi asing dan swasta: Untuk mendukung pendanaan pembangunan berkelanjutan, Indonesia berupaya mempromosikan investasi asing langsung dan investasi swasta dalam sektor-sektor yang relevan dengan SDGs. Sebagai contoh, dalam rangka meningkatkan investasi dibentuk PT Sarana Multi infrastruktur (PT SMI) yang bergerak pada bidang pembiayaan dan penyiapan proyek infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga mendorong jenis-jenis pembiayaan pembangunan yang inovatif seperti KPBU.

5. Pendekatan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan: Terkait hal ini, Indonesia mengintegrasikan pendekatan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan lokal, yang mencakup pemberdayaan masyarakat, perlindungan lingkungan, serta pengurangan ketidaksetaraan dalam agenda pembangunan.

6. Partisipasi dalam forum internasional: Indonesia juga aktif dalam forum-forum internasional yang berkaitan dengan pembiayaan pembangunan, contohnya Forum PBB tentang Pembiayaan untuk Pembangunan (*UN Financing for Development Forum*).

7. *Green Financing* (pembiayaan hijau): adalah investasi keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan, berkaitan erat dengan lingkungan, serta kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungan terhadap skema pembiayaan hijau, yaitu dorongan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada praktik keuangan berkelanjutan, yang tertuang dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap 1 (2015–2019) dan Tahap 2 (2021–2025), Peraturan OJK No. 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, dan Taksonomi Hijau Indonesia (THI).

Harap diperhatikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dalam menindaklanjuti Agenda Aksi Addis Ababa dapat terus berkembang dan berubah seiring waktu.

Agenda 2030: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi salah satu komitmen global yang telah banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Komitmen internasional ini berisi serangkaian target dan tujuan yang diadopsi oleh anggota PBB pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Dalam komitmen ini, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satunya yaitu secara spesifik mendorong terciptanya kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, serta berkelanjutan yang juga merupakan Tujuan 11.

Adapun Tujuan 11 ini telah memiliki indikator dan target yang jelas antara lain:

11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi seluruh penduduk terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan dilengkapi dengan pelayanan dasar; serta menata kawasan kumuh.

11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan untuk semua penduduk; meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan penggunaan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan penduduk yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.

11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan; menambah kapasitas partisipasi; serta merencanakan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.

11.4 Mempromosikan serta menjaga warisan budaya dan alam dunia.

11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak bencana; serta secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan berada pada situasi rentan.

11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak merugikan dari per kapita lingkungan perkotaan. Ini termasuk pemberian perhatian khusus pada kualitas udara dan penanganan sampah kota.

11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, serta mudah diakses terutama untuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, serta lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan, dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional serta daerah.

11.b Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan menerapkan kebijakan serta perencanaan yang terintegrasi, terkait penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana; serta pengimplementasian penanganan risiko bencana secara

holistik di semua lini. Ini sesuai dengan Kerangka Kerja Sendai untuk Penurunan Risiko Bencana 2015–2030.

11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam pembangunan fasilitas perkotaan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan pemanfaatan bahan lokal.

Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mencapai SDGs yang terdiri dari 17 tujuan melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 111 Tahun 2022. Dalam perpres tersebut, Indonesia secara jelas berfokus kepada empat hal, yaitu:

1. Menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
2. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
3. Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif;
4. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hubungan antara SDGs dan Agenda Baru Perkotaan memiliki banyak sisi. SDGs dan Agenda Baru Perkotaan memiliki tujuan yang sama untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. SDGs memberikan kerangka kerja global yang mencakup berbagai dimensi keberlanjutan, sedangkan Agenda Baru Perkotaan berfokus pada urbanisasi berkelanjutan sebagai komponen penting untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagian besar SDGs terkait langsung dengan kawasan perkotaan, sebab mayoritas pertambahan populasi global terjadi dan menetap di perkotaan. Agenda Baru Perkotaan memberikan pendekatan yang ditargetkan untuk mengatasi tantangan dan peluang urbanisasi yang unik dan kompleks. Ini untuk memastikan bahwa daerah perkotaan berkontribusi secara positif untuk mencapai SDGs. Agenda Baru Perkotaan selaras dengan berbagai SDGs, termasuk yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, infrastruktur berkelanjutan, perumahan yang terjangkau, aksi iklim, dan banyak lagi. Penerapan Agenda Baru Perkotaan dapat berkontribusi pada kemajuan di berbagai SDGs, terutama yang relevan dengan konteks perkotaan.

Sebagian besar SDGs beserta targetnya paling baik ketika diterapkan pada tingkat lokal. Ini khususnya penekanan pengaplikasian Agenda Baru Perkotaan pada tata kelola, perencanaan, dan pelibatan masyarakat dalam pengembangan perkotaan. Sebab, faktor lokal menjadi hal krusial dalam mencapai target SDGs di masing-masing wilayah perkotaan.

Agenda Baru Perkotaan menggarisbawahi pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dan pemantauan kemajuan. Hal ini sejalan dengan penekanan SDGs pada pengumpulan, analisis, dan pelaporan data untuk melacak kemajuan menuju pencapaian tujuan.

Agenda Baru Perkotaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah dua komitmen yang saling menguatkan dan melengkapi. Kerangka kerja komprehensif terkait pencapaian target perkotaan yang disediakan oleh SDGs terlengkapi oleh adanya panduan khusus pembangunan kota berkelanjutan dari Agenda Baru Perkotaan. Dengan menerapkan Agenda Baru Perkotaan dalam konteks SDGs, kota dan kawasan perkotaan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.

Berikut adalah beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk mendukung SDGs:

1. **Pengembangan rencana aksi nasional dan daerah**

   Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional dan Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG *National Action Plan*). Rencana ini berisi langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai masing-masing SDG, serta mengidentifikasi prioritas-prioritas yang perlu ditekankan.

2. **Penetapan target nasional**

   Pemerintah Indonesia telah menetapkan target-target nasional untuk setiap SDGs yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara. Hal ini termasuk target-target untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, mempromosikan kesehatan, melindungi lingkungan, dan lain-lain. Progress pencapaian Indonesia dalam SDGs dapat dilihat pada tautan berikut ini https://sdgs.bappenas.go.id/repository/.

3. **Partisipasi dalam konferensi dan forum internasional**

   Indonesia aktif dalam berbagai konferensi dan forum internasional yang berkaitan dengan SDGs. Negara ini berpartisipasi dalam reviu

tingkat tinggi (*High-Level Political Forum*) PBB tentang implementasi SDGs.

4. **Pengintegrasian SDGs dalam perencanaan pembangunan**

   Indonesia telah berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip SDGs dalam perencanaan pembangunan nasional dan lokal. Ini termasuk dalam rencana pembangunan jangka panjang. contohnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

5. **Peningkatan akses pendidikan**

   Salah satu langkah yang diambil adalah peningkatan akses pendidikan. Indonesia berkomitmen untuk memastikan semua anak-anak memiliki akses terhadap berbagai jenjang pendidikan berkualitas.

6. **Pengurangan emisi gas rumah kaca**

   Indonesia juga berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga kelestarian lingkungan, yang berkaitan dengan beberapa SDGs, terutama yang terkait dengan perlindungan ekosistem dan sumber daya alam.

7. **Pemberdayaan ekonomi**

   Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi, termasuk dukungan untuk usaha kecil dan menengah serta pengentasan kemiskinan.

8. **Kampanye kesadaran publik**

   Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan kampanye kesadaran publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang SDGs dan peran mereka dalam mencapainya.

9. **Kerja sama internasional**

   Indonesia terlibat dalam kerja sama internasional untuk mendukung implementasi SDGs, termasuk dalam kerangka kerja ASEAN dan kerja sama regional lainnya.

Posisi setiap negara di dunia dalam mencapai SDGs tertulis dalam The Sustainable Development Report (dahulu bernama *The Sustainable Development Goals Index and Dashboards*), yang dipublikasikan oleh sebuah studi bernama *Sustainable Development Solutions Network*. Di dalam negeri, Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian

Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN), serta berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain yang terkait juga melakukan studi guna memantau, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja pelaksanaan komitmen negara ini dalam mengadopsi konsep SDGs.

Dalam pelaksanaan SDGs, Kementerian PPN/Bappenas telah membentuk Sekretariat SDGs, dan bersama dengan kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, media, serta para filantropi, pelaku usaha, pakar, dan akademisi merumuskan rencana aksi (renaksi) SDGs sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan. Renaksi ini dilaksanakan baik pada tingkat nasional (Rencana Aksi Nasional atau RAN) maupun pada tingkat daerah (Rencana Aksi Daerah atau RAD).

Renaksi TPB/SDGs adalah dokumen rencana kerja lima tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian target nasional dan daerah. Dengan rencana aksi tersebut diharapkan pihak-pihak terkait pada tingkat nasional dan daerah mempunyai komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program, serta kegiatan untuk mencapai sasaran SDGs.

Perjanjian Paris (*Paris Agreement*)

Aktivitas di kawasan perkotaan telah menjadi kontributor yang signifikan terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca global. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) pada tahun 2014, menyatakan bahwa kawasan perkotaan berkontribusi sebesar 37–49% emisi dari total emisi gas CO2 global yang sebesar 71–76%. Emisi tersebut terutama dihasilkan dari konsumsi bahan bakar fosil untuk transportasi dan konsumsi listrik di perkotaan, serta perubahan penggunaan lahan. Meskipun demikian, kota-kota tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK), tetapi juga telah mengalami dampak dari perubahan iklim, seperti peningkatan muka air laut, peningkatan temperatur, perubahan pola dan curah hujan, serta kejadian cuaca ekstrem lainnya.

Perkotaan berperan pada pencapaian target yang terumuskan dalam Perjanjian Paris, terutama dalam hal pembangunan kota yang lebih tahan bencana dan rendah karbon. Pemangku kepentingan di perkotaan diajak untuk bersama-sama menambah upayanya, dalam mitigasi dan adaptasi terhadap ancaman bencana di masa depan, khususnya melalui pengurangan emisi dan peningkatan ketangguhan infrastruktur kota.

Gambar 3.5 Presiden Joko Widodo, dalam Conference of The Parties 21 (COP 21) di Paris, Perancis
Sumber: Sekretariat Kabinet, 2015

Selain itu, Perjanjian Paris juga menekankan pentingnya penguatan peran aktor-aktor lokal dengan meningkatkan transfer pengetahuan, teknologi, serta pelibatan masyarakat adat. Dalam hal ini, penting bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pengalaman dan belajar dari masyarakat adat mengenai mitigasi dan adaptasi lingkungan perkotaan. Sehingga upaya pembangunan perkotaan bisa berjalan lebih holistik dan terintegrasi antar kelompok masyarakat.

Nationally Determined Contributions (NDCs) menjadi dokumen yang memastikan akuntabilitas serta komitmen pelaksanaan mitigasi dan adaptasi Perjanjian Paris dari setiap negara. Hingga Juni 2017, jumlah NDCs mencapai 164 dokumen yang merepresentasikan komitmen dari 192 negara, yang mana NDCs Uni Eropa mencakup 28 negara. NDCs merupakan dasar bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan komitmen dan prioritas masing-masing negara dalam menanggulangi perubahan iklim. Dokumen ini juga mengindikasikan kebutuhan pendanaan dan teknologi untuk mencapai pembangunan rendah karbon dan berketahanan. Mitigasi perubahan iklim di perkotaan yang diupayakan dengan menurunkan emisi karbon, didorong melalui mekanisme kebijakan dan dukungan implementasi yang tepat. Selain itu, dalam beberapa kondisi dimungkinkan adanya pemberian insentif. Kebijakan pembangunan kota dilakukan dengan mengedepankan konsep kota kompak, penyediaan hutan kota dan ruang terbuka hijau untuk menurunkan temperatur lingkungan, penggunaan transportasi rendah karbon, serta pengaturan *building code* yang berkelanjutan.

Gambar 3.6 Bus listrik Transjakarta melaju di antara sepeda motor

Sedangkan upaya adaptasi perkotaan dilaksanakan dengan mengedepankan peningkatan kemampuan penyesuaian perkotaan terhadap dampak buruk perubahan iklim dan mendorong ketahanan iklim–terutama pada aspek produksi pangan. Meskipun demikian, dalam konteks perkotaan, implementasi adaptasi lebih sulit untuk diukur. Ini disebabkan karena terbatasnya proyeksi kejadian ekstrim pada efek negatif perubahan iklim dan durasi kejadian, perubahan perilaku penduduk, serta kondisi ketahanan aset pribadi (fisik dan sosial) milik masyarakat.

Perjanjian Paris dan Agenda Baru Perkotaan adalah dua perjanjian internasional berbeda yang menangani berbagai aspek keberlanjutan dan pembangunan global, tetapi keduanya saling terkait dalam konteks aksi iklim dan urbanisasi. Hubungan antara Perjanjian Paris dan Agenda Baru Perkotaan dapat dipahami sebagai dua perjanjian yang mengakui pentingnya membangun ketahanan iklim di daerah perkotaan. Agenda Baru Perkotaan mengakui bahwa pusat-pusat perkotaan rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sehingga agenda ini sangat menyoroti keterkaitan berbagai tantangan perkotaan, termasuk perubahan iklim, dan panggilan untuk solusi holistik. Sedangkan Perjanjian Paris mempromosikan pentingnya integrasi antara pertimbangan iklim dengan semua aspek perencanaan pembangunan, contohnya pertimbangan pada kerentanan lokal dan regional untuk tindakan adaptasi.

Poin Agenda Baru Perkotaan, contohnya mempromosikan transportasi berkelanjutan, meningkatkan infrastruktur perkotaan, dan meningkatkan

keadilan sosial, selaras dengan tujuan Perjanjian Paris dalam hal mengurangi emisi dan membangun ketahanan.

Terkait faktor penyebab perubahan iklim, Agenda Baru perkotaan menyoroti bahwa kota adalah kontributor utama emisi gas rumah kaca. Ini karena kepadatan permukiman penduduk yang terkonsentrasi di wilayah kota, penggunaan energi, dan aktivitas ekonomi. Menyikapi hal itu, Agenda Baru Perkotaan menekankan penerapan transportasi berkelanjutan, efisiensi energi, dan strategi pembangunan rendah karbon, yang sejalan dengan target pengurangan emisi Perjanjian Paris. Bersama dengan Agenda Baru Perkotaan, Perjanjian Paris mengakui pentingnya peran pemerintah sub-nasional dan lokal dalam aksi iklim.

Kedua perjanjian ini saling terkait dalam penekanan bersama mereka pada pembangunan berkelanjutan, aksi iklim, dan ketahanan. Adanya penyelarasan perencanaan dan kebijakan pembangunan perkotaan dengan pertimbangan iklim dapat berkontribusi secara signifikan untuk mencapai target kedua kesepakatan sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak huni dan berkelanjutan bagi penduduknya. Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen dengan Perjanjian Paris, telah mengambil berbagai langkah untuk menindaklanjuti perjanjian ini, dengan cara:

1. **Penetapan target pengurangan emisi**

   Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam naskah NDC yang diajukan ke dalam Perjanjian Paris. NDC adalah komitmen nasional yang berisi rencana-rencana konkrit untuk mengurangi emisi GRK. Pemerintah Indonesia awalnya berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 29% dari tingkat emisi yang diproyeksikan pada tahun 2030 dengan pendanaan nasional dan 41% dengan bantuan internasional dan kerja sama. Target ini lalu menjadi lebih optimis hingga menyatakan penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri pada *Updated NDC* (UNDC) sebesar 29% meningkat ke 31,89% pada *Enhanced NDC* (ENDC), sedangkan target dengan dukungan internasional pada UNDC sebesar 41% meningkat ke 43,20% pada ENDC.

2. **Pengembangan rencana aksi nasional**

   Indonesia telah mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Rencana ini merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai target pengurangan emisi yang telah ditetapkan.

3. **Pengembangan energi terbarukan**

   Indonesia telah berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan angin, serta mempromosikan energi bersih dan ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim.

4. **Penghijauan dan pelestarian hutan**

   Indonesia memiliki program untuk menghentikan deforestasi dan merestorasi hutan-hutan yang rusak. Ini penting karena deforestasi adalah penyumbang utama emisi GRK di negara ini.

5. **Peningkatan penggunaan transportasi publik**

   Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk meningkatkan tingkat penggunaan transportasi publik dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor berbahan bakar fosil untuk mengurangi emisi.

6. **Partisipasi dalam proyek karbon dan dana hijau**

   Indonesia berpartisipasi dalam proyek-proyek karbon dan mendapatkan dana hijau untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan dan pengurangan emisi.

7. **Pendanaan dan kerja sama internasional**

   Indonesia terlibat dalam kerja sama internasional dalam hal perubahan iklim, termasuk dalam kerangka kerja Perjanjian Paris. Negara ini juga mencari sumber-sumber pendanaan tambahan untuk mendukung implementasi rencana aksi nasionalnya.

8. **Kampanye kesadaran publik**

   Pemerintah Indonesia juga melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi emisi GRK dan dampak perubahan iklim.

Keseluruhan keterkaitan dan upaya implementasi berbagai komitmen global untuk pencapaian perkotaan yang berkelanjutan ini terangkum dalam laporan implementasi *New Urban Agenda* yang disampaikan oleh Kementerian PUPR pada akhir tahun 2021. Kegiatan Laporan Implementasi NUA menghasilkan 2 laporan NUA, yaitu Laporan Provisional dan Laporan Final.

Gambar 3.7 Hasil laporan provisional dan final NUA

Fokus penyusunan laporan provisional adalah menyampaikan gambaran umum hasil implementasi NUA dan *best practices* pada berbagai sektor pembangunan perkotaan dan perumahan sebagai bahan bagi UN-Habitat Ketika melakukan reviu dari laporan semua negara yang sudah terkumpul. Pengumpulan Laporan Provisional NUA ke *Urban Agenda Platform* dilakukan pada 4 Oktober 2021. Dengan pengumpulan Laporan Provisional NUA Indonesia, maka status Indonesia di *Urban Agenda Platform* berubah menjadi *submitted*, dari status sebelumnya yaitu *in progress*. Laporan Final kemudian disampaikan kembali ke UN-Habitat pada bulan Desember 2021.

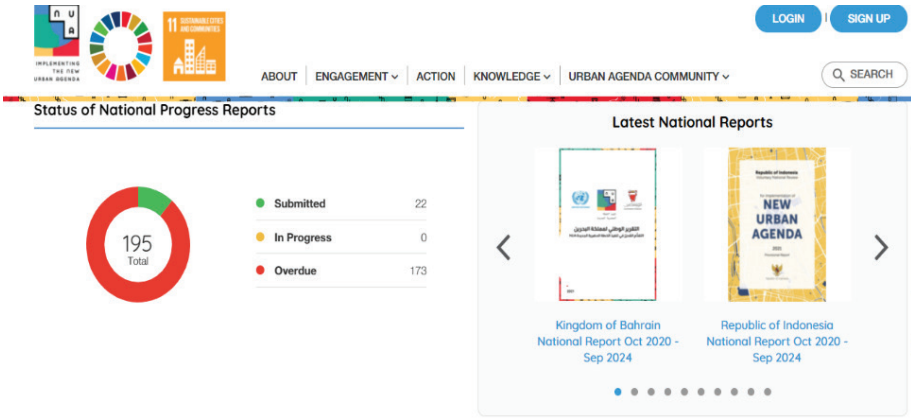

Gambar 3.8 Pengumpulan laporan provisional NUA ke Urban Agenda Platform

mandiri
IFG

Peran Indonesia dalam Habitat

04

Indonesia berperan aktif dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan (Habitat III) pada tahun 2016, yang menghasilkan adopsi Agenda Baru Perkotaan. Seperti telah dijelaskan pada Bab 3, Agenda Baru Perkotaan adalah kerangka kerja global untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan yang bertujuan untuk mempromosikan kota dan permukiman yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Selain perannya dalam konferensi internasional, Indonesia juga secara nasional melakukan berbagai upaya dalam pengimplementasiannya.

Gambar 4.1 Delegasi dari berbagai negara dalam Asia Pacific Urban Youth Assembly tahun 2015

Indonesia memainkan peran kepemimpinan dalam mengadvokasi masuknya kawasan Asia-Pasifik dalam diskusi di Habitat III. Negara ini juga menjadi tuan rumah Forum Perkotaan Asia-Pasifik pada tahun 2015, yang mempertemukan perwakilan dari pemerintah, masyarakat sipil, serta sektor swasta untuk membahas tantangan dan peluang pembangunan perkotaan di wilayah tersebut.

Setelah penyepakatan Agenda Baru Perkotaan, Indonesia telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip dan tujuan agenda tersebut dalam kebijakan dan program nasionalnya. Pemerintah memprioritaskan pembangunan perkotaan berkelanjutan sebagai area fokus utama dalam rencana pembangunannya dan telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mempromosikan urbanisasi berkelanjutan dan meningkatkan akses ke layanan dasar di daerah perkotaan.

Upaya Indonesia dalam mengimplementasikan Agenda Baru Perkotaan meliputi:

1. Mengembangkan Kebijakan Perkotaan Nasional untuk memandu pembangunan perkotaan berkelanjutan di seluruh negeri.
2. Meluncurkan Program Perumahan Terjangkau Nasional untuk meningkatkan akses perumahan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan sistem transportasi publik dan menggalakkan penggunaan transportasi tidak bermotor untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara di kawasan perkotaan.
4. Mempromosikan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan kota.

Secara keseluruhan, peran Indonesia dalam proses Habitat III dan komitmennya untuk mengimplementasikan Agenda Baru Perkotaan menunjukkan upaya kuat terhadap pembangunan perkotaan berkelanjutan dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat. Peran Indonesia juga dilihat dari pembentukan berbagai kelembagaan, forum, hingga berkontribusi dalam menyampaikan laporan implementasi **Agenda Baru Perkotaan.**

Upaya Indonesia Dalam Peningkatan Pemahaman Perkotaan

Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Sekretariat SDGs Indonesia adalah sebuah entitas atau lembaga yang bertanggung jawab dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Sekretariat SDGs Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan upaya dan program yang berhubungan dengan pencapaian SDGs pada tingkat nasional.
2. Memfasilitasi komunikasi dan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
3. Mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan kemajuan pencapaian SDGs di Indonesia.

4. Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung pencapaian SDGs.

5. Edukasi dan kesadaran masyarakat tentang SDGs.

Gambar 4.2 Beberapa publikasi Sekretariat SDGs tentang Metadata Indikator

Tujuan utama dari sekretariat ini adalah untuk memastikan bahwa Indonesia berkomitmen dan berhasil mencapai semua target SDGs yang telah ditetapkan dalam Agenda 2030. Seknas SDGs membagi TPB menjadi empat pilar besar yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Hukum dan Tata Kelola.

Seknas SDGs dalam menjalankan perannya telah aktif menyusun berbagai pedoman dan bahan pendukung implementasi SDGs di Indonesia seperti Metadata Indikator TPB, Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi, Peta Jalan/*Roadmap* SDGs, Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs, Ringkasan Metadata Indikator TPB, Terjemahan Baku Tujuan dan Target Global TPB, Buku Saku Metadata SDGs, dan Panduan Kemitraan Multi Pihak. Selain itu, seknas juga telah menerbitkan beberapa Laporan Pencapaian SDGs 2019, Laporan Pelaksanaan SDGs 2021, *Indonesia's Voluntary National Review* 2017, *Indonesia's Voluntary National Review* 2019, dan *Indonesia's Voluntary National Review* 2021.

Sekretariat Nasional Habitat (Seknas Habitat)

Seknas Habitat adalah bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) yang bertanggung jawab di antaranya untuk melaksanakan agenda habitat nasional maupun internasional, serta menyiapkan dokumentasi dan informasi pembangunan perumahan dan permukiman. Badan ini bekerja sama

dengan lembaga pemerintah lainnya, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi internasional untuk mempromosikan pembangunan perumahan dan urbanisasi yang berkelanjutan di Indonesia.

Cikal bakal pendirian seknas ini dimulai dari pembentukan Komite Nasional Agenda Habitat yang telah dibentuk pada tahun 2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Komite Nasional Agenda Habitat ini merupakan amanat dari PBB agar setiap anggotanya membentuk organisasi komisi nasional habitat atau *national habitat committees* (NHCs). Pada awalnya komite ini bekerja selama 5 tahun sebagai penghubung antara kementerian dan lembaga untuk menangani berbagai agenda terkait Habitat. Anggotanya terdiri atas kementerian atau lembaga terkait perumahan dan perkotaan, akademisi, serta praktisi.

Namun setelah masa kerja komitmen tersebut selesai, terdapat niat untuk tetap melanjutkan upaya perwujudan perkotaan berkelanjutan melalui wadah yang lebih resmi. Akhirnya dibentuklah institusi yang berbentuk kesekretariatan yaitu Seknas Habitat Indonesia pada tahun 2008. Institusi ini didirikan dalam bentuk sekretariat nasional karena lebih berperan dalam menghimpun data dan informasi, pelaporan capaian agenda habitat, serta memfasilitasi program implementasi oleh lembaga atau pemangku kepentingan lain dengan tidak mengokupasi peran masing-masing. Pada waktu itu, Surat Keputusan pendirian Seknas Habitat ditandatangani dua menteri yaitu, Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Pekerjaan Umum, sebelum pada tahun 2014 kedua kementerian tersebut digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

Beberapa fungsi utama Seknas Habitat, meliputi:

1. Penyusunan kebijakan dan program untuk meningkatkan akses perumahan dan layanan dasar yang terjangkau, terutama bagi rumah tangga dan masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Pengoordinasian program pembangunan perumahan dan perkotaan di tingkat nasional, regional, maupun lokal.

3. Pemberian bantuan dan dukungan teknis kepada pemerintah daerah, masyarakat, serta LSM dalam pengembangan dan pelaksanaan program pembangunan perumahan dan perkotaan.

4. Pengumpulan dan penyebarluasan data serta informasi tentang masalah perumahan dan pembangunan perkotaan di Indonesia.

5. Pemberian fasilitas kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan perumahan dan urbanisasi yang berkelanjutan.

Implementasi Habitat merupakan tugas semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu keterlibatan semua pihak adalah suatu keharusan. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan dan Habitat. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyinergikan berbagai program, aksi, dan peran tiap pihak agar pencapaiannya menjadi lebih efisien, mencakup skala yang lebih luas, serta tercatat dan terlaporkan dengan baik. Maka dari itu, dibutuhkan suatu manajemen pengetahuan Habitat yang fungsinya dijalankan oleh Seknas Habitat.

Sebagai tindak lanjut Konferensi Habitat III (Quito, 2016), diarahkanlah pengembangan kelembagaan Habitat tingkat nasional, dengan Bappenas sebagai *focal point* yang didukung Seknas Habitat sebagai sekretariat harian di bawah Kementerian PUPR. Namun seiring dengan perkembangannya, fungsi *focal point* beralih kepada Seknas Habitat dengan ketua Direktur Jenderal Cipta Karya. Sejak adanya perubahan organisasi di Kementerian PUPR yang mengubah Pusat Litbang menjadi Direktorat Bina Teknik, sesuai arahan Menteri PUPR maka sejak tahun 2020 *focal point* UN-Habitat berada di bawah Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, tepatnya di Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan. Selain melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kelembagaan habitat nasional ini berfungsi untuk "membumikan" dan memfasilitasi pengaplikasian Agenda Baru Perkotaan hingga pada tingkat lokal.

Gambar 4.3 Publikasi Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan dan Kilas Balik Perumahan Rakyat 1900–2000 Perkotaan

Dalam menunjang seluruh peran tersebut dan menyesuaikan perkembangan hingga saat ini, dibutuhkan revitalisasi Seknas Habitat sebagai suatu *center of excellence* pada bidang habitat. Seknas Habitat perlu dikembangkan dan diposisikan kembali sebagai *knowledge hub* atau simpul pengetahuan habitat, simpul jejaring kemitraan multipihak, dan sinergi lintas sektor, serta sebagai pusat data dan informasi dalam pelaksanaan agenda habitat nasional serta global. Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 adalah beberapa contoh publikasi yang mana Seknas Habitat terlibat dalam penyusunannya.

Gambar 4.4 Poster penyelenggaraan NUF-1 tahun 2015

Peran Seknas Habitat dalam implementasi Agenda Baru Perkotaan

Oleh: **Lana Winayanti, Kemitraan Habitat**

Agenda Baru Perkotaan

Konferensi Habitat diselenggarakan setiap 20 tahun. Sejak Habitat II di Istanbul tahun 1996, dunia semakin mengkota sehingga lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di perkotaan. Diperkirakan tahun 2030, 60% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Urbanisasi Berkelanjutan menjadi tema Konferensi Habitat III yang menyepakati sebuah Agenda Baru Perkotaan. Agenda ini merupakan komitmen global untuk mewujudkan kota-kota yang lebih inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan. Tiga prinsip utama Agenda Baru Perkotaan adalah: 1) tidak menelantarkan seorangpun; 2) ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; dan 3) lingkungan hidup perkotaan yang berketahanan dan berkelanjutan. Agenda Baru Perkotaan sangat menekankan pendekatan yang fokus pada manusia (*people-centered development*).

Agenda Baru Perkotaan sejalan dengan *Sustainable Development Goals*, khususnya Goal 11 - *making cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable*, dan juga mendukung SDGs lain yaitu mengentaskan kemiskinan dan kelaparan (SDG 1 dan 3), mengurangi ketimpangan (SDG10), mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (SDG8), meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan (SDG4), meningkatkan kebertahanan (SDG11 dan 13) dan melindungi lingkungan hidup (SDG 6, 9, 13, 14 dan 15) dalam konteks perkotaan. Namun penekanan Agenda Baru Perkotaan lebih pada bagaimana dapat mewujudkan visi bersama kota ke depan yang lebih baik dan berkelanjutan melalui komitmen transformatif untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan implementasi yang efektif. Ini memerlukan struktur pemerintahan perkotaan yang kuat, perencanaan dan pengelolaan pengembangan spasial perkotaan (yang terpadu dalam kewilayahan), serta sarana implementasi seperti mobilisasi sumber pembiayaan, pengembangan kapasitas serta teknologi informasi dan inovasi.

Tindak Lanjut dan Peninjauan Kembali

Implementasi Agenda Baru Perkotaan dilaporkan secara berkala kepada PBB. Penyusunan laporan dikoordinasikan oleh kementerian yang membina

perkotaan, tim penyusun laporan terdiri atas kementerian terkait di level nasional, pemerintah daerah, organisasi masyarakat seperti asosiasi, LSM, media, sektor swasta dan akademisi. Komite Nasional Habitat dan/atau Forum Perkotaan Nasional dapat juga berperan memimpin tim ini atau menjaring masukan pemangku kepentingan. Berbeda dengan pelaporan SDGs yang dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi sesuai tema setiap tujuan, pelaporan Agenda Baru Perkotaan disusun menyeluruh mencakup komitmen transformatif, implementasi efektif dan tindak lanjut/peninjauan kembali. Laporan 4 tahun pertama telah disusun untuk periode 2018-2022. Laporan kedua akan meliputi periode 2022- 2026. UN-Habitat telah menyusun panduan untuk monitoring dan pelaporan Agenda Baru Perkotaan yang perlu diikuti setiap negara.

Peran Seknas Habitat dalam Agenda Baru Perkotaan

Sekretariat Nasional Habitat Indonesia (Seknas Habitat) dibentuk melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum (Djoko Kirmanto) dan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Moh. Yusuf Asy'ari) pada tahun 2008. Seknas Habitat diharapkan menjadi pendukung kerjasama antara lembaga, baik pemerintah dan bukan pemerintah, dalam pelaksanaan program yang terkait dengan Agenda Habitat II di Indonesia. Anggota Seknas Habitat pada waktu itu merupakan wakil dari Kementerian terkait pembangunan perumahan dan permukiman. Selain Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, juga terdapat anggota dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup, Bappenas dan Kementerian Luar Negeri. Visi yang ingin dicapai adalah mendorong terwujudnya pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan dan menjadikan Seknas Habitat sebagai *knowledge hub*. Ada empat misi utama Seknas Habitat:

1. meningkatkan hubungan baik mitra kerja bidang perumahan dan permukiman dan membentuk jejaring kerja untuk pertukaran informasi praktik terbaik, serta program kegiatan permukiman yang berkelanjutan,

2. meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perumahan dan permukiman berkelanjutan melalui diskusi/seminar/lokakarya, dan publikasi informasi di *website* dan media,

3. mendukung penyelenggaraan kegiatan nasional/internasional terkait implementasi Agenda Habitat, dan

4. memberikan masukan isu strategis terkait perumahan dan permukiman berkelanjutan untuk para pembuat kebijakan.

Setelah penggabungan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. peran Seknas Habitat sebagai *knowledge hub* kurang berjalan. Keterlibatan dalam kegiatan APUF, APUFY, Prepcom III dan delegasi RI ke Quito lebih ke teknis pelaksanaan kegiatan.

Setelah Quito, terjemahan NUA diprakarsai oleh RuangWaktu *knowledge hub* yang dipimpin Dr. Wicaksono Sarosa, kemudian dibentuk Tim Terjemahan NUA di Kementerian PUPR untuk mendukung penyelesaian terjemahan NUA tersebut. Terjemahan NUA telah resmi disampaikan kepada UN-Habitat dan telah diunggah ke website UN-Habitat bersama terjemahan lain. Sesuai komitmen dalam Agenda Baru Perkotaan setiap negara perlu menyusun panduan untuk pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan 'Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan' tahun 2017 dan 2018. Penyusunan panduan tersebut dikoordinasi oleh Tim RuangWaktu dengan kontributor antara lain Seknas Habitat, Kemitraan Habitat, akademisi dan praktisi, dan penerbitannya didukung oleh BPIW Kementerian PUPR.

Ada delapan panduan praktis yaitu panduan umum dan tujuh panduan sesuai komponen urusan pemerintahan dalam UU no. 23/2014 yaitu: perumahan dan akses pelayanan dasar, kebencanaan dan lingkungan hidup, tata kelola perkotaan, transportasi dan mobilitas perkotaan, penataan ruang dan penembangan wilayah perkotaan, pembangunan ekonomi lokal, serta sosial-budaya dan kesehatan. Sangat disayangkan, panduan tersebut belum disosialisasikan secara luas ke pemangku kepentingan dan masyarakat. Padahal panduan praktis tersebut merupakan *living document* yang perlu disesuaikan dengan perkembangan urbanisasi di Indonesia dan dilengkapi dengan praktik baik yang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Mengingat banyaknya pekerjaan untuk mewujudkan kota yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan, Seknas Habitat perlu dihidupkan kembali sebagai *knowledge hub* untuk mendukung implementasi Agenda Baru Perkotaan dan pencapaian Tujuan 11 SDGs di Indonesia. Masih banyak yang perlu ditindaklanjuti seperti peningkatan kapasitas pemangku kepentingan, penyusunan materi sosialisasi, produksi data dan penyusunan praktek baik dan pembelajaran, pelaporan dan konsultasi terus-menerus dengan para pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri PUPR di Habitat III Quito bahwa Seknas Habitat diperlukan untuk mendukung Sekretariat SDGs (yang dikoordinasikan Bappenas) dalam monitoring dan pelaporan SDGs, khususnya Tujuan 11 dan Agenda Baru Perkotaan.

The First National Urban Forum (NUF-1)

Tahun 2015, menjadi tahun yang penting bagi Indonesia menuju Habitat III. Indonesia diberikan kesempatan menjadi tuan rumah dalam beberapa agenda menuju Habitat III. Dalam rangka persiapan berbagai kegiatan tersebut, terdapat inisiasi diadakannya forum baru pembangunan perkotaan nasional, salah satunya yaitu dengan penyelenggaran *National Urban Forum* (NUF). Untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan forum nasional perkotaan yang merupakan forum pertemuan *multi-stakeholders* untuk membahas isu-isu perkotaan, berbagi pengalaman tentang pendekatan pembangunan perkotaan, serta praktik-praktik terbaik bidang permukiman dan pembangunan perkotaan di Indonesia.

NUF ini dilaksanakan oleh Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan pada 28 Mei 2015 dengan mengusung tema "*Towards Indonesia New Urban Agenda*" dengan mengangkat ide-ide inovatif yang memungkinkan kota-kota yang ada saat ini dapat mengakomodasi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah. NUF menjadi rangkaian dari acara "*Water, Sanitation, and Cities*" yang berfokus pada layanan sarana dan prasarana dasar dan kota-kota di Indonesia yang berlangsung pada 27-29 Mei 2015.

"*Saat ini, penduduk Indonesia jumlahnya telah mencapai sekitar 250 juta, dan pada akhir tahun 2019 diperkirakan akan menjadi 270 juta jiwa dengan jumlah kelahiran setiap tahun mencapai 4 juta bayi, dan hal ini merupakan suatu hal yang perlu kita cermati bersama*", kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono saat membuka National Urban Forum, di Jakarta.

NUF diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun pemahaman bersama dan merumuskan Agenda Baru Perkotaan untuk Indonesia yang nantinya akan disampaikan pada The High Level Asia-Pacific Regional Meeting for Habitat III dan Asia-Pacific Urban Forum ke-6 pada Oktober 2015 di Jakarta, sebelum acara Preparatory Committee (PrepCom) 3 pada tahun 2016 di Surabaya.

Melalui kegiatan NUF 2015, dibahas pula praktik-praktik terbaik dari pembangunan permukiman perkotaan pada beberapa kota dan kabupaten, dalam mewujudkan kota layak huni dan berkelanjutan secara inklusif, yang melibatkan seluruh aktor pembangunan perkotaan tersebut. Contohnya, praktik pembangunan yang dilaksanakan di Kota Surabaya,

Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Banyuwangi. NUF 2015 ini dihadiri oleh kurang lebih 515 orang peserta yang terdiri atas unsur-unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, mahasiswa, komunitas terkait, serta asosiasi. Dalam forum tersebut terjadi diskusi dan tukar pikiran antara para pemangku kepentingan untuk membahas strategi pengembangan perkotaan yang lebih baik di masa depan.

Mengingat pentingnya peran Indonesia di tingkat Asia Pasifik, kegiatan NUF ini merupakan sebuah momentum yang penting sebagai langkah awal perumusan Agenda Baru Perkotaan di Indonesia yang diharapkan dapat diadakan secara rutin sebagai wadah bagi pembangunan perkotaan nasional.

The Second National Urban Forum (NUF-2)

Tahun 2023, NUF kembali diselenggarakan sebagai salah satu bentuk forum inklusif yang membahas isu kompleks perkotaan. Upaya kolaborasi dalam NUF kedua ini telah dilakukan sejak awal tahun 2023 dalam menjalin *networking* lintas *stakeholder* dari berbagai bidang yang sudah mencapai lebih dari 40 instansi dari Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, profesional, komunitas, LSM, maupun sektor privat dan lembaga donor.

Gambar 4.5 Pelaksanaan NUF 2 2023

Networking ini menghasilkan sejumlah kegiatan substansial dalam bentuk *workshop*, webinar, dan dialog, yang disebarluaskan melalui kanal media sosial seperti *YouTube* dan *instagram*. Rangkain kegiatan ini ditujukan untuk memperoleh masukan dari berbagai *stakeholder*, mendapatkan keberagaman sudut pandang dalam memahami isu kompleks perkotaan, dan mencari solusi bersama.

Mengingat pentingnya peran kota yang akan menjadi tempat tinggal mayoritas penduduk di masa yang akan datang, terdapat 5 *working group* (WG) dalam NUF dengan mengadopsi struktur dari Habitat III sebagai berikut:

1. Kesetaraan dan kohesi sosial, termasuk di dalamnya isu tentang *urban culture and heritage*;
2. Ekonomi dan kerangka kerja perkotaan;
3. Pengembangan spasial;
4. Ekologi dan lingkungan perkotaan; serta
5. Perumahan dan infrastruktur dasar, termasuk isu tentang transportasi dan *smart cities*.

Penyelenggaraan acara NUF menjadi salah satu *milestone* dalam penerapan kebijakan perkotaan nasional dan menjadi salah satu instrumen dalam bentuk implementasi Agenda Baru Perkotaan dan *Sustainable Development Goals* di Indonesia.

Gambar 4.6 Tim perumus dalam NUF-2 tahun 2023

Peringatan Hari Kota Dunia dan Hari Habitat Dunia

Hari Habitat Sedunia dicanangkan oleh PBB untuk merefleksikan bentuk dan kondisi habitat kita dalam rangka memastikan terdapat kecukupan tempat tinggal yang layak. Peringatan ini juga diharapkan dapat mengingatkan seluruh masyarakat dunia bahwa semua orang memiliki kuasa dan tanggung jawab untuk membentuk masa depan setiap kota dan habitat manusia.

Hari Habitat Dunia yang pertama kali ditetapkan PBB pada 1985 ini mulai dirayakan setahun setelahnya, tahun 1986 mengangkat tema "*Shelter is My Right*" dengan Nairobi menjadi tuan rumah pertama *global observance.* Selanjutnya tuan rumah dan tema selalu berganti antara lain "*Shelter for the Homeless*" (1987, New York), "*Shelter and Community*" (1988, London), hingga pada tahun 2023 mengangkat tema "*Resilient urban economies. Cities as drivers of growth and recovery*" dengan Baku, Azerbaijan sebagai tuan rumah. Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah *global observance* dalam Hari Habitat yaitu pada tahun 1989. Pada saat itu tema yang diangkat adalah "*Shelter, Health, and Family*" dengan Jakarta sebagai tuan rumah. Kemudian, negara ini menjadi tuan rumah kembali pada 2005 dengan tema "*The Millennium Development Goals and the City*".

Terakhir kali Indonesia menjadi tuan rumah, yaitu pada tahun 2020 yang dilaksanakan di kota Surabaya secara virtual dalam situasi pandemi dengan mengangkat tema "*Housing For All: A Better Urban Future*". Daftar lengkap tuan rumah *global observance* dapat dilihat pada link berikut https://en.wikipedia.org/wiki/World_Habitat_Day.

Kesempatan pertama Indonesia menjadi tuan rumah *global observance*, juga merupakan pertama kalinya Hari Habitat diperingati secara nasional yaitu pada 2 Oktober 1989, pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Peringatan itu bersamaan dengan penyerahan penghargaan dari *Building and Social Housing Foundation*

serta pengumuman pemenang lomba Penghijauan Permukiman baru, dan Lomba Taman Nasional. Sejak saat itu, setiap tahun secara mandiri Indonesia memperingati Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD). Peringatan HHD dan HKD secara nasional yang diadakan bergantian di berbagai kota, diharapkan dapat menjadi momen peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dasar semua orang. Ini khususnya hak untuk bisa menghuni tempat tinggal yang layak, serta adanya tanggung jawab yang dimiliki semua pihak dalam membentuk kota dan permukiman yang ramah huni. Berbagai tema dan lokasi nasional penyelenggaraan HKD dan HDD dapat dilihat pada ilustrasi di bawah ini.

Penghargaan *UN-Habitat Scroll of Honour* pertama kali diberikan pada tahun 1989 dan menjadi salah satu penghargaan permukiman dan perkotaan paling bergengsi di dunia. Penghargaan ini bertujuan untuk memberikan pengakuan atas inisiatif yang telah memberikan kontribusi dan langkah luar biasa pada bidang permukiman manusia, penyediaan perumahan, kemiskinan, peningkatan dan pengembangan permukiman, serta kualitas kehidupan perkotaan untuk memastikan *no one leave behind* dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya penekanan pada Tujuan 11.

Penghargaan ini diserahkan pada Peringatan Global Hari Habitat Dunia kepada individu, organisasi, proyek, dan mitra Agenda Habitat yang mencakup pemerintah dan organisasi atau lembaga antar-pemerintah termasuk lembaga bantuan bilateral, kota, otoritas lokal, asosiasi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, Komite Habitat Nasional atau *focal point*, institusi penelitian dan akademik, yayasan publik atau swasta, lembaga multilateral (Badan PBB, Bank Dunia, dan sebagainya), media, serta individu.

Penghargaan ini diberikan melalui proses pengkajian dan penyaringan yang ketat terhadap semua calon, hingga dipilih para pemenangnya. Dalam beberapa tahun terakhir, biasanya terdapat kurang dari sepuluh penghargaan yang diberikan. Sejak tahun 2018, hanya dipilih lima pemenang penghargaan, idealnya dari setiap wilayah dunia yang berbeda. Indonesia telah menerima penghargaan ini beberapa kali, daftarnya yaitu sebagai berikut:

a. 2018: Tri Rismaharini, Walikota Surabaya, untuk upaya pelaksanaan pembangunan inklusif yang berfokus pada masyarakat (*people-centered*), dan berbagai inisiatif yang memprioritaskan

HARI HABITAT 2001-2023

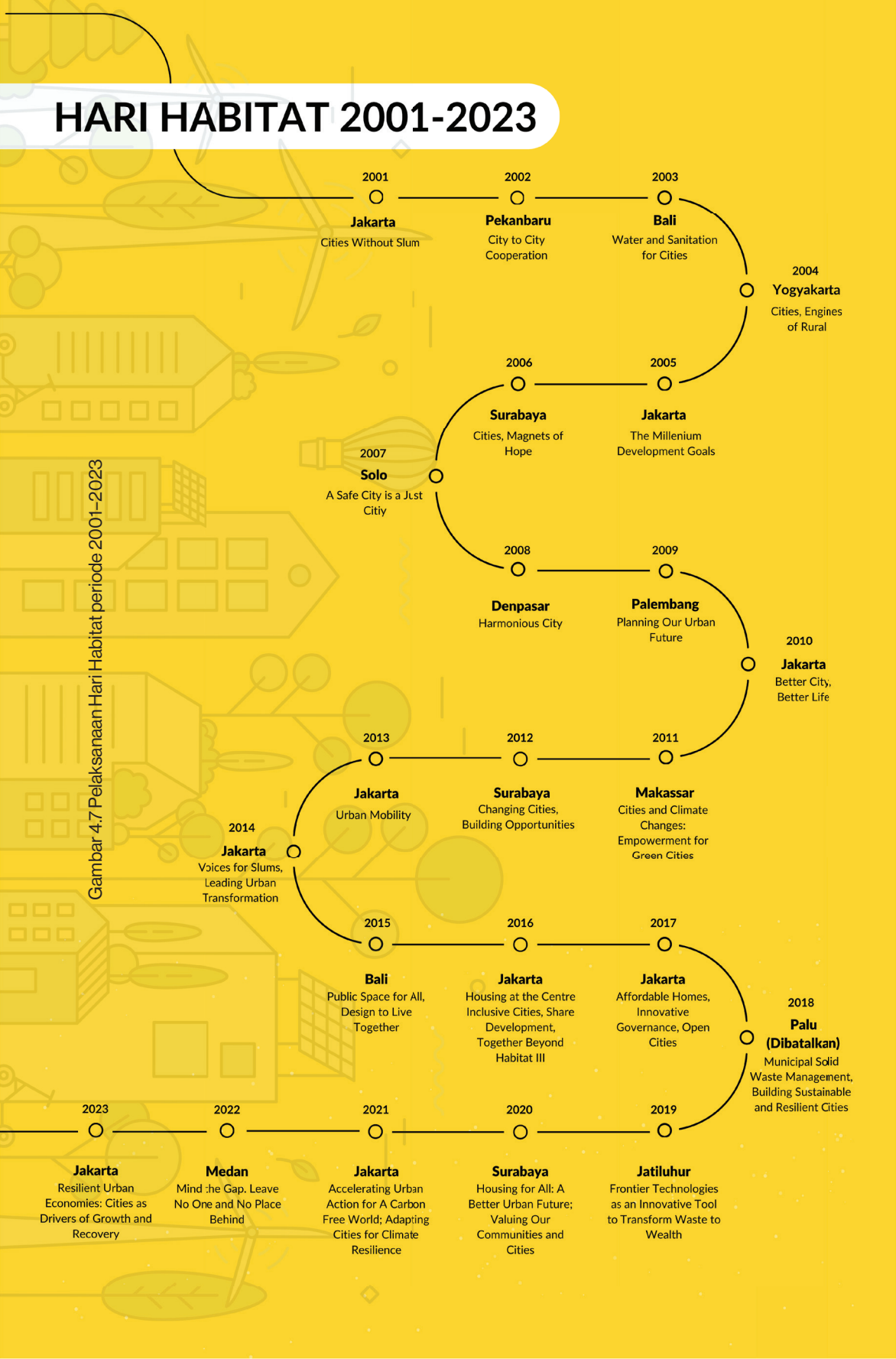

Gambar 4.7 Pelaksanaan Hari Habitat periode 2001–2023

masyarakat berpenghasilan rendah untuk memastikan tidak ada yang tertinggal.

b. 2005: Profesor Johan Silas, Pemerintah DKI Jakarta dan almarhum Bapak Tengku Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara masa jabatan 1998–2005.

c. 1997: Penghargaan khusus *(special citation)* untuk Bapak Radinal Mochtar, Menteri Pekerjaan Umum.

d. 1994: Bank Tabungan Negara.

Kiprah Indonesia dalam Berbagai Forum Perkotaan Internasional

The Sixth Asia Pacific Urban Forum (APUF-6) - 2015

Forum Urban Asia-Pasifik keenam (APUF-6) merupakan salah satu forum tingkat Asia Pasifik yang membahas pembangunan perkotaan. Forum ini diadakan tanggal 19–21 Oktober 2015 di *Fairmont Convention Centre*, Jakarta, Indonesia. Forum tersebut diselenggarakan oleh *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (ESCAP) dan Kementerian PUPR bersama dengan lebih dari 30 mitra. APUF-6 mengangkat tema "*Sustainable Urban Development in Asia-Pacific: Towards a New Urban Agenda*" dirangkaikan dengan *Regional Meeting* Habitat III untuk Asia-Pasifik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia bersama Sekretariat Habitat III pada 21–22 Oktober 2015.

APUF-6 mempertemukan lebih dari 900 peserta, termasuk menteri, wali kota dan pejabat pemerintah lainnya, perwakilan dari akademisi, profesional perkotaan, sektor swasta, masyarakat sipil, pemimpin akar rumput, orang tua, pemuda, serta organisasi internasional, untuk membahas isu-isu yang terus muncul terkait pembangunan perkotaan berkelanjutan di Asia-Pasifik. Letak pembahasan ini khususnya pada isu-isu prioritas untuk kawasan yang akan dipertimbangkan dalam

"Agenda Baru Perkotaan" yang akan diadopsi pada Habitat III, dan dalam implementasi 2030 Agenda Pembangunan Berkelanjutan.

APUF-6 berfungsi sebagai ruang bagi para pemangku kepentingan di regional untuk berbagi praktik terbaik dalam isu-isu pembangunan perkotaan yang kritis dan kerap muncul, contohnya tata kelola, perencanaan, pembiayaan, pengelolaan lahan, perumahan, ketahanan, inklusivitas sosial, pengentasan kemiskinan, perencanaan partisipatif, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perubahan iklim, transportasi, keselamatan di ruang publik, pengelolaan limbah, serta pengelolaan sumber daya terpadu.

Forum mengadopsi APUF-6 Jakarta '*Call for Action*' tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan, inklusif dan tangguh, yang dipresentasikan pada Pertemuan Regional Habitat III untuk Asia-Pasifik, sebagai berikut:

1. Masa depan perkotaan yang berpusat pada manusia di kawasan Asia dan Pasifik mengharuskan perubahan radikal dalam perencanaan dan pengembangan kota, serta melibatkan berbagai kelompok masyarakat sebagai agen perubahan–bukan hanya penerima manfaat.

2. Faktor pendukungnya termasuk perundang-undangan progresif, pembiayaan inovatif, teknologi untuk pengambilan keputusan, dan masyarakat sipil yang kuat.

3. Kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan hasil dari Habitat III. Keseimbangan peran pemerintahan dalam pengelolaan perkotaan harus diperhatikan, dengan prinsip subsidiaritas sebagai panduan.

4. Diperlukan peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan pada semua tingkat. Perencanaan kota harus didasarkan pada visi dan kebutuhan pemerintah daerah, diimplementasikan melalui kolaborasi lokal, dan bekerja menuju solusi yang sesuai dengan situasi setempat.

5. Tindakan harus diambil untuk meningkatkan konektivitas antara perkotaan dan perdesaan, guna mendukung pembangunan ekonomi yang seimbang. Tata kelola perkotaan yang akuntabel dan inklusif penting untuk masa depan berkelanjutan.

6. Pengakuan terhadap peran pekerja informal, perusahaan, dan organisasi pekerja informal dalam ekonomi lokal harus ditingkatkan. Perencanaan partisipatif dan hak tinggal bagi mereka yang tinggal di permukiman informal juga harus diprioritaskan.

7. Penting untuk menciptakan kota yang aman dan inklusif, termasuk untuk penyandang disabilitas dan untuk melawan pelecehan dan kekerasan seksual. Investasi dalam praktik baik dan inovasi (yang telah terbukti berhasil) harus didukung.

8. Tata kelola pertanahan yang baik harus dipromosikan, dan pemerintah daerah perlu diberdayakan secara lebih efektif. Ketersediaan data yang akurat dan mencukupi menjadi kunci untuk perencanaan yang lebih baik.

9. Perubahan iklim dan bahaya alam memerlukan perubahan dalam infrastruktur perkotaan menuju bentuk yang lebih hijau dan berkelanjutan. Ketahanan yang berpusat pada masyarakat harus menjadi fokus.

10. Pemerintah perlu mengadopsi pendekatan terintegrasi dan berbasis ekosistem dalam pemenuhan sumber daya alam untuk kota, serta mengubah pengelolaan sampah menjadi pemulihan sumber daya.

11. Kebijakan transportasi perkotaan berkelanjutan harus diterapkan, dengan koordinasi yang lebih baik antartingkat pemerintahan. Masalah pembiayaan harus diatasi dengan berbagai mekanisme pembiayaan.

12. Pemerintah daerah harus proaktif dalam pembiayaan infrastruktur perkotaan berkelanjutan. Semua pemangku kepentingan harus berkomitmen untuk mengimplementasikan hasil forum ini.

Dalam forum ini, Indonesia secara khusus menekankan kepada pentingnya sikap menghargai terhadap keberagaman kondisi wilayah, geografis, suku, adat, dan budaya dalam pembangunan perkotaan yang berpusat pada manusia. Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia menekankan pada konsep pembangunan *Small Island Nation* yang berbeda dengan negara benua.

The Asia Pacific Urban Youth Assembly (APUFY)

Pertemuan Pemuda Perkotaan Asia-Pasifik yang dijuluki "APUFY" diadakan pada tanggal 17–18 Oktober 2015 di kantor Kementerian PUPR dan Hotel Shangri-la Jakarta. Forum tersebut diselenggarakan oleh Kementerian PUPR bekerja sama dengan United Nations Human Settlements Program (UN-Habitat) bersama mitra inti, Asian Development Bank (ADB), United Nations Major Group for Children & Youth (UN MGCY), serta dukungan dari lebih dari 10 mitra internasional dan tiga mitra nasional Indonesia.

APUFY menjadi rangkaian resmi Forum Urban Asia-Pasifik Keenam (APUF-6) yang diadakan pada tanggal 19–21 Oktober 2015. Forum ini dilaksanakan sebelum Pertemuan Regional Asia-Pasifik (HLM) Habitat III yang diadakan pada tanggal 21–22 Oktober 2015 juga di Jakarta, Indonesia.

Gambar 4.8 Delegasi Indonesia dalam APUFY

Peserta APUFY terdiri dari 300 pemuda usia 18-32 tahun yang berasal atas 31 negara dan 22 negara Asia-Pasifik. Peserta remaja dipilih dari proses aplikasi terbuka daring dengan 1.500 pelamar. Menunjukkan minat perkotaan yang kuat dan komitmen untuk bertindak, 150 peserta muda mewakili kota-kota di Indonesia, dan 150 lainnya berasal dari negara-negara di seluruh Asia dan Pasifik.

Platform APUFY memfasilitasi *sharing knowledge* praktik baik yang muncul dan contoh kepemimpinan yang dipimpin kaum muda tentang urbanisasi Asia-Pasifik melalui 12 sesi paralel tematik (masing-masing 90 menit) dan dua lokakarya pelatihan intensif (masing-masing lima jam). Wawasan dan praktik terbaik yang dibagikan di APUFY memberikan perspektif baru ke dalam diskusi yang sedang berlangsung tentang masukan Asia-Pasifik untuk "Agenda Baru Perkotaan" global. Keberhasilan APUFY di Jakarta mencapai langkah baru dan menunjukkan model dalam memperkuat kemitraan konstruktif antara pemerintah, mitra pembangunan, dan kaum muda dalam mengatasi tantangan yang dihadapi kota-kota di Asia-Pasifik.

Pemuda menawarkan pesan kunci bahwa pemuda di Asia-Pasifik dapat membantu memberikan solusi bagi perkotaan. Mereka melampaui kebutuhan atau minat pribadi diri sendiri untuk menciptakan solusi perkotaan yang holistik dan inklusif. Partisipasi pemuda dalam kebijakan pembangunan perkotaan dapat meningkatkan tata kelola perkotaan yang inklusif, memastikan perlindungan lingkungan perkotaan, serta mengarah pada pendekatan inovatif dan kewirausahaan. Menteri PUPR menyatakan bahwa "*Pintar itu harus, tetapi itu saja tidaklah cukup. Sehingga, diperlukan nilai-nilai yang kuat dan kemampuan melihat kemaslahatan semua anggota masyarakat*."

APUFY menyimpulkan tiga hal penting sebagai masukan dan disampaikan dalam APUF-6:

1. Kaum muda memiliki pandangan dan ide yang unik, mereka juga memperjuangkan kehidupan mereka sendiri. Mereka harus didorong untuk menjadi bagian dari pengambil keputusan dan pemimpin dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan di Asia Pasifik.

2. Saat ini, pemimpin masa depan sudah mulai bergerak di dalam komunitas dan kota mereka. Mereka terlibat secara politik dan mencari solusi baru untuk masalah perkotaan. Otoritas lokal dan mitra pembangunan tidak perlu khawatir tentang meningkatnya partisipasi mereka, bahkan harus mendorong mereka untuk terlibat aktif.

3. Kaum muda, termasuk yang rentan, harus dilibatkan dalam pembuatan kebijakan praktis dan implementasi solusi untuk masalah perkotaan di Asia-Pasifik. Tujuannya adalah menciptakan perkotaan yang berpusat pada masyarakat.

Selain itu, terdapat juga rumusan tantangan umum perkotaan yang berdampak pada kaum muda dan cara untuk mengatasinya, yang muncul dari berbagai sesi tematik, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah harus mengakui bahwa kaum muda memiliki potensi besar untuk menjadi mitra yang setara dalam menciptakan kota berkelanjutan yang berfokus pada manusia. Mereka memiliki pandangan unik dan potensi inovasi yang bisa bermanfaat bagi komunitas mereka dalam menyelesaikan masalah perkotaan.

2. Banyak kaum muda menghadapi masalah seperti pengangguran atau bekerja di sektor informal. Untuk melibatkan mereka secara produktif di perkotaan, diperlukan solusi yang mencakup berbagai aspek, contohnya pembiayaan, pendidikan, pelatihan, akses ke teknologi dan informasi, serta kerja sama antarlembaga. Ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta, akademisi, dan lembaga lainnya.

3. Penggunaan data terbuka dan metode perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dapat memberikan kerangka kerja yang memungkinkan para inovator muda dan pengusaha untuk berkontribusi secara efektif dalam perencanaan kota, baik dalam kondisi normal maupun dalam situasi darurat contohnya bencana. Mereka dapat mengembangkan solusi teknologi atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dengan efektif melalui pendekatan ini.

***High Level Regional Meeting Asia Pacific* (HLRM-AP)**

Pertemuan Regional Tingkat Tinggi di Asia-Pasifik mengangkat tema "Urbanisasi yang Berkelanjutan untuk Mempercepat Pembangunan" yang diselenggarakan di *Fairmont Convention Center*, Jakarta, Indonesia pada tanggal 21–22 Oktober 2015. Pertemuan ini dihadiri kurang lebih 1500 peserta yang berasal dari perwakilan pemerintah nasional, lokal dan regional, organisasi antarpemerintah, Badan PBB, profesional dan akademisi, swasta, NGO, kaum wanita, anak–anak, serta kaum muda.

Kesimpulan dari Pertemuan Regional Asia Pasifik ini adalah dikehendakinya keputusan *General Assembly* ke-70 untuk menyetujui Agenda 2030 dan SDGs tujuan ke-11, tercapainya kesepakatan baru terkait perubahan iklim agar dapat diraih pada UNFCCC COP21, serta deklarasi "*Call for Action*" sebagai hasil dari APUF-6.

Gambar 4.9 Executive Director UN Habitat, Joan Clos saat membuka High Level Regional Meeting-Asia Pacific

Sebagian besar wilayah Asia-Pasifik terdiri atas keragaman yang besar dari negara paling terbelakang, negara berkembang, negara dengan mayoritas daratan, negara kepulauan, begitu juga negara–negara yang rawan konflik. Rekomendasi yang dihasilkan pada pertemuan ini berupa **Deklarasi Jakarta**, dengan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Melaksanakan komitmen dan fokus kepemimpinan yang komprehensif dalam jangka panjang untuk meraih SDGs 11 serta tujuan SDGs dengan melaksanakan Agenda Baru Perkotaan untuk kota berkelanjutan dan permukiman yang inklusif, aman, dan berketahanan.

2. Advokasi terhadap perubahan radikal dalam penataan, pengembangan, dan pengelolaan kota dengan manusia sebagai agen perubahan bukan sebagai penerima manfaat saja.

3. Rumusan integrasi, kebijakan multisektor, serta nasional untuk menyediakan sebuah kerangka acuan pembangunan perkotaan pada jangka menengah dan panjang.

4. Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

5. Solusi pembangunan yang sistemik untuk memaksimalkan dan mempromosikan penggunaan sumber daya alam serta pengurangan emisi dengan tetap memenuhi kebutuhan manusia.

6. Sektor strategi yang berpihak kepada golongan miskin dengan mengelola risiko perkotaan dan meningkatkan ketahanan dalam bencana serta perubahan alam.

7. Menyelaraskan penetapan risiko bencana ke dalam kebijakan pembangunan tata guna lahan.

8. Pembangunan dan implementasi untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dengan menyediakan perumahan yang terjangkau dan pelayanan dasar termasuk untuk permukiman informal.

9. Kebijakan yang mengakomodasi kepentingan semua golongan (perempuan, anak-anak, pemuda, pekerja sektor informal, imigran, golongan minoritas, dan golongan rawan).

10. Pentingnya kerja sama antarpemerintah pada migrasi perkotaan.

11. Perlunya kolaborasi antara pemerintah dengan semua pemangku kepentingan untuk mengelola keragaman dan kompleksitas demografis pada kota, selain untuk mengurangi konflik sosial.

12. Rekomendasi lain terkait ekonomi perkotaan, kota yang kompak, teknologi dan informasi, serta pembiayaan. Semua strategi pembangunan perkotaan tersebut harus jelas, transparan, terukur dan memiliki indikator yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan serta pencapaiannya.

Gambar 4.10 Sampul Jakarta Deklarasi

Preparatory Committee 3 (PrepCom 3) for Habitat III

PrepCom 3 merupakan pertemuan terakhir dari komite persiapan Habitat III yang diselenggarakan di Surabaya, Indonesia, pada tanggal 25-27 Juli 2016. Kegiatan ini dilakukan di Grand City Exhibition and Convention Center. Prepcom 3 for Habitat III dihadiri oleh 298 delegasi dari 142 negara.

Sidang pleno Prepcom 3 dibuka oleh Maryse Gautier dari Perancis, dan Jaime Silva dari Chile karena co-chair Maria Duarte dari Ekuador tidak dapat hadir. Sambutan pembukaan disampaikan oleh co-chair Prancis, vice-chair Chile, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konferensi Habitat III.

Gambar 4.11 Pidato pembukaan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada Preparatory Committee 3 di Surabaya, Indonesia.

Setelah penetapan co-chair main committee, yaitu Purnomo Chandra dari Indonesia dan Elena Szolgayova dari Slovakia, sidang mengadopsi agenda dan program kerja. Laporan Sekjen Konferensi Habitat III tentang kegiatan-kegiatan persiapan Konferensi Habitat III juga disampaikan, termasuk pertemuan regional dan tematik, pertemuan *policy unit* yang menghasilkan rekomendasi, dan sesi pembahasan informal di New York untuk membahas *draft* Agenda Baru Perkotaan.

Beberapa keputusan yang diadopsi dalam sidang pleno tanggal 25 Juli terkait dengan prosedur, agenda, modalitas, dan organisasi kerja konferensi Habitat III. Ada beberapa isu kontroversial yang masih diperdebatkan, seperti hak-hak kota, LGBTQ, peran UN-Habitat, dan lainnya. Secara umum, dokumen *draft* Agenda Baru Perkotaan semakin sejalan dengan kepentingan Indonesia, dengan mencakup berbagai aspek yang relevan, seperti pembangunan berbasis masyarakat, ketahanan pangan, budaya, pengelolaan wilayah pesisir, dan lainnya.

Namun, PrepCom 3 sebagai pertemuan terakhir sebelum penetapan Agenda Baru Perkotaan, belum berhasil menghasilkan *draft* final agenda tersebut. Sidang pleno Prepcom 3 memutuskan untuk mengadakan

pertemuan tambahan di New York pada bulan September untuk menyelesaikan isu-isu yang belum disepakati dalam *draft* Agenda Baru Perkotaan sebelum ditetapkan di Quito.

Selain *plenary session* sebagai sesi utama yang mana peserta perwakilan dari masing-masing negara merundingkan dan menyempurnakan konten *draft* dari Agenda Baru Perkotaan untuk dibawa ke Habitat III di Quito, terdapat beberapa macam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari pelaksanaan PrepCom, yaitu:

a. ***Parallel events*,** kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi dan organisasi lokal dan internasional di Surabaya sebelum dan sesudah pelaksanaan PrepCom 3 dengan tema-tema terkait pengembangan perkotaan berkelanjutan. Terdapat 25 acara paralel dan beberapa di antaranya adalah seminar "*Urban Heritage Tourism*" (Kementerian PUPR) dan lokakarya "*Global Youth Training*" (UN-MGCY).

b. ***Side events*,** seminar-seminar kecil yang berlangsung secara sekaligus pada saat acara berjalan, membahas isu-isu hangat perkotaan di dunia dengan menampilkan pembicara dari berbagai instansi pemerintah, badan PBB, dan organisasi masyarakat dan internasional. Acara tambahan selama PrepCom 3 ini adalah hasil seleksi dari berbagai organisasi internasional yang mengajukan proposal untuk membicarakan isu-isu perkotaan. Pada tiap sesi, umumnya ada 5-6 acara tambahan yang berlangsung secara bersamaan. Secara keseluruhan terdapat 39 acara tambahan yang dilangsungkan selama berjalannya PrepCom 3.

c. ***Urban speakers corner*,** panggung di area pameran yang berfungsi sebagai tempat diskusi-diskusi singkat selama 30-45 menit bergantian oleh berbagai organisasi internasional untuk menyampaikan ide, riset, dan hasil kegiatan mereka di negara masing-masing.

d. ***Exhibition*,** area pameran tempat berbagai organisasi dan instansi pemerintah internasional mendirikan *booth* untuk pengunjung sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kegiatan mereka kepada kalangan internasional.

Gambar 4.12 Situasi Preparatory Committee 3 di Surabaya, Indonesia.

World Urban Forum (WUF)

World Urban Forum menjadi salah satu forum rutin yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia. Seknas Habitat sebagai *knowledge hub* pembangunan perkotaan secara rutin memberikan pendampingan bagi Pemerintah Indonesia untuk turut aktif dalam forum perkotaan dunia ini. WUF diadakan setiap 2 tahun sekali dengan tuan rumah yang berbeda dalam setiap penyelenggaraannya. WUF pertama kali diadakan di Kenya Nairobi pada 2002. Indonesia telah aktif ikut serta sejak WUF 2006 yang berlangsung di Vancouver Kanada.

Gambar 4.13 Delegasi Indonesia bersama dengan Duta Besar RI untuk Brazil pada World Urban Forum (WUF) 5 di Rio de Janeiro, Brazil

Dari kiri, Agustaviano Sofjan, Lana Winayanti, Dodo Juliman, Sony Bowo Laksono, Djoko Kirmanto, Iskandar Saleh, Setiabudi Algamar (SAMPU), Amwazi Idrus, Antonius Budiono, Hadi Sucahyono, dan Reni Ahiantini.

Gambar 4.14. Delegasi Indonesia dalam WUF 3 Vancouver, Kanada.

Gambar 4.15 Delegasi pemuda Indonesia aktif dalam World Urban Forum 9

Peran serta Indonesia dalam WUF berbeda tiap tahunnya. Indonesia secara aktif turut serta dalam berbagai acara paralel, pertemuan tingkat tinggi (HLM), pameran, unjuk bincang, maupun menjadi peserta. Terakhir kali Indonesia berpartisipasi secara aktif yaitu dalam *The Ninth World Urban Forum* (WUF 9) yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 7–13 Februari 2018. Indonesia secara aktif mengirimkan delegasi dan pemudanya dalam WUF 9 ini.

Dalam berbagai kesempatan WUF, Indonesia menyampaikan pengalaman pengembangan perkotaannya, contohnya Kampung *Improvement Program* (KIP), *Urban Poverty Project* (UPP), *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP), *Community Based Initiative for Housing and Local Development* (CO-BILD), *Urban Poor Livelihood Improvement Program,* Rehabilitasi dan Rekonstruksi Permukiman Berbasis Masyarakat, *Water and Sanitation for Low Income Community* (WSLIC), Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), serta Program Pembangunan Kota Hijau.

Tabel 4.1 Keterlibatan Indonesia dalam World Urban Forum

WUF	Tahun	Lokasi	Tema	Keterlibatan Indonesia
WUF 3	2006	Vancouver, Kanada	Sustainable Urbanization and Inclusive Cities	Delegasi resmi, acara networking
WUF 4	2008	Nanjing, China	Harmonious Urbanization	Delegasi resmi, pertemuan tingkat tinggi, acara networking
WUF 5	2010	Rio de Janeiro, Brasil	The Right to the City: Bridging the Urban Divide	Delegasi resmi, sesi paralel, pertemuan tingkat tinggi, diskusi para menteri *(ministerial roundtable)*, South-South Cooperation meeting, dan pameran
WUF 6	2012	Naples, Italia	The Urban Future	Delegasi resmi, diskusi para menteri *(ministerial roundtable)*, pertemuan Biro APMCHUD, dan parlemen global pada diskusi Habitat *(global parliament on Habitat roundtable)*
WUF 7	2014	Medellin, Kolombia	Urban Equity in Development – Cities for Life	Acara tambahan *(side events)*, acara networking, dan pertemuan biro APMCHUD
WUF 9	2018	Kuala Lumpur, Malaysia	Cities 2030, Cities for All: Implementing the New Urban Agenda	Delegasi resmi, sesi paralel, pertemuan tingkat tinggi, unjuk bincang *(talkshow)*, dan pameran
WUF 10	2020	Abu Dhabi, UEA	Cities of Opportunities: Connecting Culture and Innovation	Penandatanganan Letter of Intent Surabaya sebagai tuan rumah WHD 2020 oleh Dubes RI Nairobi/Wakil Tetap RI untuk UN-Habitat, Soehardjono Sastromihardjo
WUF 11	2022	Katowice, Polandia	Transforming our cities for a better urban future	Informasi keikutsertaan terbatas

Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD)

Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) merupakan kegiatan kolaborasi antara UN HABITAT dengan 68 negara di kawasan Asia-Pasifik. Pembentukan APMCHUD didorong oleh UN-Habitat yang juga tertulis dalam resolusi 20/2 dan 19/3 *Governing Council* UN-Habitat untuk mengadakan konferensi regional setingkat menteri secara rutin dalam rangka memahami dan memiliki posisi yang sama terhadap tantangan perkotaan abad ke-21.

Kolaborasi ini merupakan respons atas berbagai tantangan yang dihadapi perkotaan, contohnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat bersamaan dengan besarnya proporsi populasi perkotaan yang tinggal di lingkungan permukiman kumuh. APMCHUD pertama kali diselenggarakan pada tahun 2006. India yang menjadi tuan rumah pertama APMCHUD mengangkat tema *"A vision for sustainable urbanisation in the Asia-Pacific by* 2020". Dalam konferensi pertama ini dihasilkan rekomendasi dan kerangka kerja untuk implementasi program pembangunan perkotaan berkelanjutan di Asia-Pasifik dengan fokus:

1. Perencanaan dan tata kelola perkotaan yang berpihak pada masyarakat miskin;
2. Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
3. Pelaksanaan MDGs untuk air bersih dan sanitasi di regional Asia-Pasifik;
4. Pembiayaan pembangunan perkotaan berkelanjutan; dan
5. Mekanisme konsultatif antarnegara-negara Asia-Pasifik.

Pelaksanaan APMCHUD terus berlanjut dan dilaksanakan setiap dua tahun sekali. Konferensi kedua APMCHUD dilaksanakan di Iran (2008) dengan tema "*Sustainable Urban Development; Associating Growth with Equality and Identity*", kemudian dilanjutkan di Indonesia (2010) "*Empowering Communities for Sustainable Urbanization*", Jordan (2012) "*Youth and IT in Sustainable Urban Development*", Korea (2014) dengan tema "*Equal Opportunity for Sustainable Development*", dan kembali ke India sebagai tempat penyelenggaraan terakhir APMCHUD pada tahun 2016.

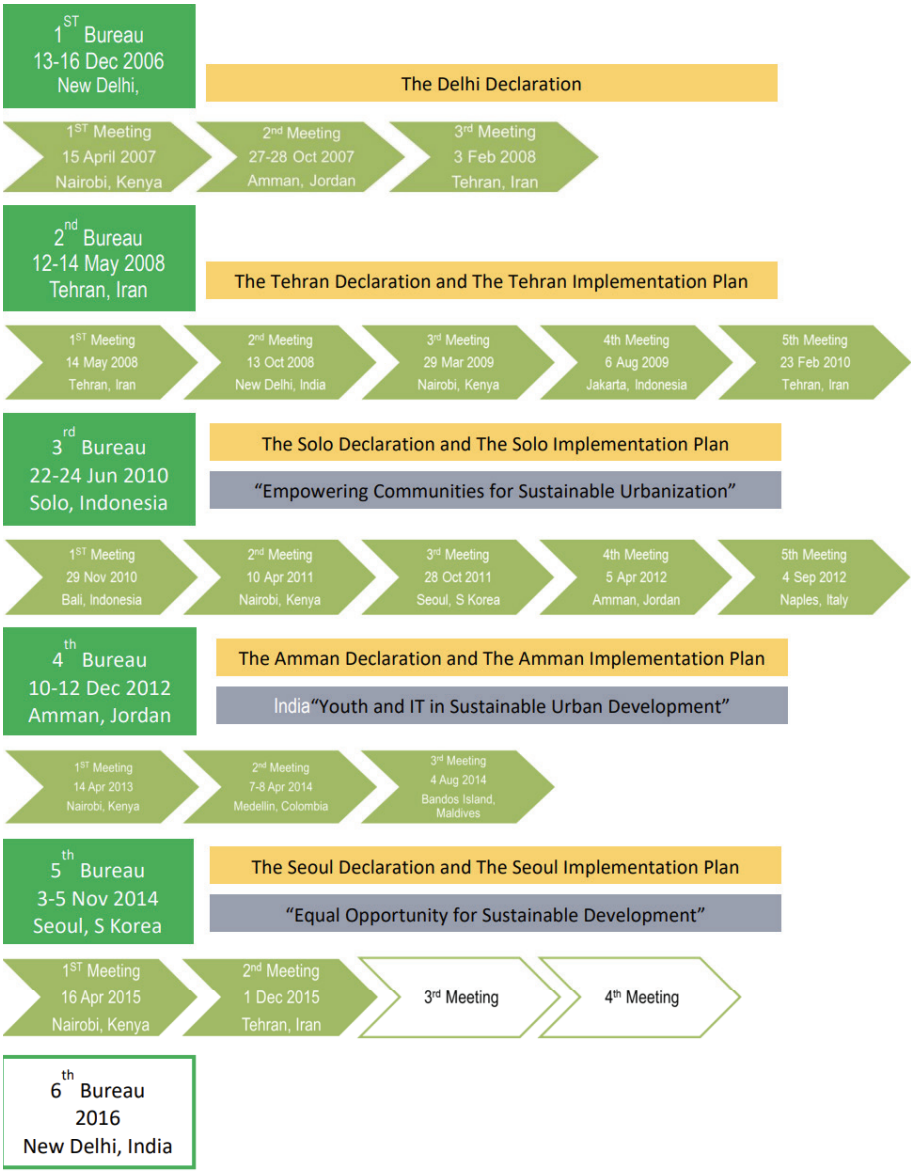

Gambar 4.16 Linimasa pelaksanaan APMCHUD

Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) ke-3

Indonesia menjadi tuan rumah APMCHUD ketiga yang diselenggarakan di Kota Solo, Jawa Tengah pada tahun 2010 dan dihadiri perwakilan dari 27 negara . Kegiatan ini terdiri atas diskusi *working groups*, diskusi utama di tingkat organisasi APMCHUD, dan acara tambahan. *Working groups* terbagi atas lima tema utama, yaitu: i) partisipasi komunitas dalam perencanaan dan tata kelola; ii) partisipasi dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh; iii) implementasi MDGs sektor air bersih dan sanitasi; iv) pembiayaan perumahan dan pembangunan perkotaan; dan v) peran komunitas dalam menghadapi perubahan iklim.

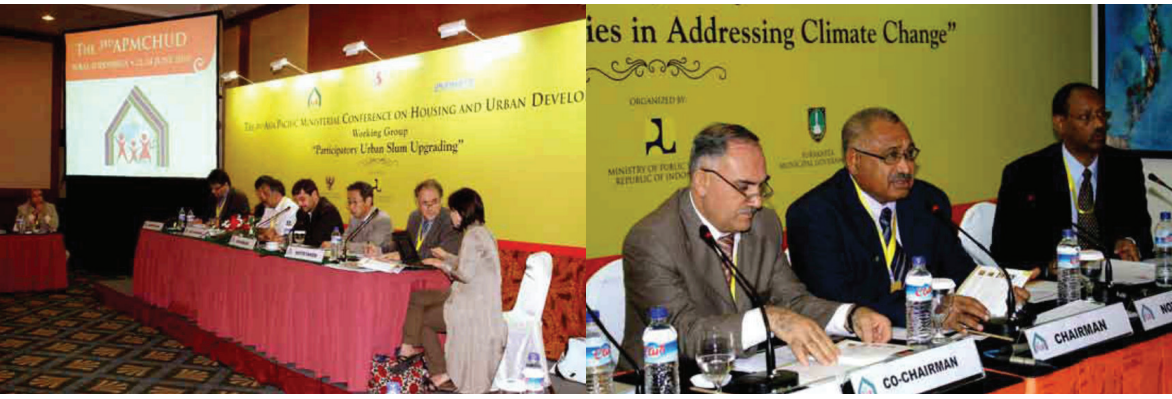

Gambar 4.17 Sesi dalam APMCHUD 3 di Surakarta, Indonesia

Selanjutnya, dalam APMCHUD ketiga ini tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam rumusan *Solo Declaration* dan Solo *Implementation Plan* mencakup:

1. Mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memberdayakan komunitas dalam rangka urbanisasi berkelanjutan;

2. Membangun sistem informasi dan basis data, serta mendukung pertukaran inovasi dan pengetahuan antarkota dan negara;

3. Mempromosikan pemanfaatan kapasitas *Regional Centre for Knowledge and Learning Network for Community Empowerment in Housing and Urban Development* di berbagai pusat yang telah berdiri di Indonesia kepada negara-negara lainnya untuk direplikasi;

4. Mempercepat peningkatan kapasitas dan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan inklusif dan partisipatif melalui kerja sama pembangunan perkotaan;

5. Memperkuat program pengentasan kemiskinan di perkotaan dengan memastikan akses terhadap infrastruktur, sumber daya ekonomi dan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan kepemilikan aset;

6. Mengundang pemerintah mempromosikan indikator pembangunan berkelanjutan bidang air bersih dan sanitasi, perumahan, dan layanan perkotaan yang sesuai dengan konteks lokal daerah;

7. Mendesak Komunitas Asia Pasifik untuk meminimalkan perang dan konflik di kawasan dan membuat kota menjadi tempat yang damai dan layak huni untuk generasi mendatang;

8. Mengakomodasi dampak perubahan iklim dalam perencanaan tata ruang makro dan mikro;

9. Menganalisis berbagai kebijakan yang diadopsi untuk mengatasi tantangan perumahan dan urbanisasi, yang dapat mengarah pada kemungkinan mekanisme kerja sama regional; dan

10. Mengadopsi *Solo Implementation Plan* yang dihasilkan dalam *working groups* dan memastikan keberlanjutan agenda *working groups* pada APMCHUD selanjutnya.

Gambar 4.18 Pelaksanaan youth forum dan pameran dalam APMCHUD 3

Penyelenggaraan APMCHUD di Kota Solo juga mencakup acara tambahan berupa kunjungan lapangan untuk melihat capaian Kota Solo di bidang perumahan dan pembangunan perkotaan, pameran yang terbagi sesuai topik dalam *working groups*, *Youth Urban Forum* (YUF) Indonesia, dan acara kebudayaan. Beberapa destinasi kunjungan lapangan, yaitu Pasar Notoharjo dan Apartemen Semanggi sebagai bagian dari penataan pedagang kaki lima, relokasi permukiman di pinggir sungai dan pembangunan hutan kota di Pucang Sawit, penanganan kawasan kumuh di Kratonan, dan penyelenggaraan program air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat di Serengan.

Pameran yang diselenggarakan menyajikan informasi statistik bidang perumahan dan perkotaan di Asia-Pasifik, praktik-praktik terbaik dari berbagai negara, serta hasil kompetisi menggambar tingkat nasional untuk anak-anak. Kegiatan YUF dihadiri oleh 50 mahasiswa Indonesia untuk mendiskusikan peran pemuda dalam aktivitas pembangunan perkotaan dan perumahan. Setelah Indonesia, selanjutnya tuan rumah APMCHUD berurutan Yordania (2012), Korea Selatan (2014), dan India (2016).

APMCHUD ke-7 yang rencananya diselenggarakan di Iran pada tahun 2018 terpaksa batal, akibat adanya gejolak politik dan setelah itu Konferensi APMCHUD tidak berlanjut. Keberadaan sekretariat tetap APMCHUD di India yang pendanaannya dibebankan pada setiap negara Asia Pacific menjadi salah satu kendala. Usulan *rotating secretariat* (mengikuti negara yang menjadi tuan rumah) ditolak India sehingga menyebabkan situasi *deadlock*, yaitu negara-negara kesulitan untuk mendanai keberadaan sekretariat tersebut.

Pre-Meeting on the Implementation of the New Urban Agenda

Pada 21 Maret 2022, *Pre-Meeting on the Implementation of the New Urban Agenda* diadakan secara *online*, diselenggarakan oleh UN Habitat-ROAP dan ESCAP dengan dukungan dari Pemerintah Indonesia, sebagai sebuah *pre-event* untuk 9th Asia Pacific Forum on Sustainable Development dan High Level Meeting (HLM) di New York pada bulan April 2022. Ir. Diana Kusumastuti, M.T selaku Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Indonesia memberikan *opening statement* yang menyerukan pentingnya akselerasi NUA.

Gambar 4.19 Pidato pembukaan dari Direktur Jenderal Cipta Karya

Danny Rahdiansyah selaku Deputy Permanent Representative untuk UNEP dan UN Habitat KBRI Nairobi memberikan penjelasan awal di rapat dan membacakan *draft statement* menyuarakan kawasan Asia-Pasifik sebagai bahan masukan HLM di New York. Bruno Dercon selaku Senior Human Settlement Officer UN Habitat dan Curt Garrigan selaku Chief of Sustainable Urban Development Section ESCAP juga memberikan penjelasan terkait *second quadrennial report* dan *policy brief* tentang akselerasi urbanisasi berkelanjutan di Asia-Pasifik.

Acara dilanjutkan dengan Sesi Diskusi Panel 1 dengan tema "*Previewing Key Policy Directions and Commitments*" dengan moderator dari Kementerian PUPR memandu diskusi tentang arah kebijakan yang perlu diangkat pada HLM dan dukungan dari para panelis pada *draft statement*. Panelis memaparkan bagaimana arahan kebijakan di negara mereka terkait dengan Implementasi NUA. Panelis diskusi 1 antara lain: Pinar Zoral (Republic of Turkey), Sengdara Douangmyxay (Lao People's Democratic Republic), Mayor Datuk Mahadi Che Ngah Mayor of Kuala Lumpur (Malaysia), Lim Chze Chen (ASEAN Connectivity Division).

Sesi Diskusi Panel 2 dengan tema "*Towards More Regional, National and Local NUA Reporting*" dengan moderator Maria Adelaida Cea dari UN-Habitat Filipina memandu diskusi tentang *key lesson* pelaporan di terkait dengan Implementasi NUA. Panelis diskusi 2 antara lain: Dr. Ramesh Prasad Singh- Nepal, Marylin Pintor-Filipina, Dr. Bernadia Tjandradewi-UCLG ASPAC, Norliza Hashim-Urbanice Malaysia, dan Karibaiti Taoaba-CLGF Pacific.

Ministerial Meeting on Urbanization and Climate Change dan Peluncuran Inisiatif SURGE (*Sustainable Urban Resilience for The Next Generation*) di COP 27 (Sharm El Sheikh, Mesir)

COP27 berlangsung dari tanggal 6–18 November 2022 di Sharm el Sheikh Mesir. Delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Presiden dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai koordinator delegasi;

Delegasi dari Kementerian PUPR terdiri dari Direktur BTPP dan Kepala Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan sebagai perwakilan Sekretariat Habitat Indonesia, dengan tujuan keikutsertaan pada acara Ministerial Meeting dan Peluncuran Inisiatif SURGe pada tanggal 17 November 2022;

Gambar 4.20 Peluncuran inisiatif SURGE

Tujuan dari *Ministerial Meeting* dan peluncuran inisiatif SURGe ini adalah untuk membangun kolaborasi dalam pengurangan emisi perkotaan, mengadaptasi sistem perkotaan yang tanggap terhadap perubahan iklim, dan membangun ketahanan sistem perkotaan melalui berbagai kegiatan penguatan implementasi agenda iklim terkait perkotaan, pendanaan, peningkatan kapasitas, akselerasi teknologi dan inovasi perkotaan dan penjaminan kesetaraan;

Gambar 4.21 Keterlibatan dalam Ministerial Meeting on Urbanization and Climate Change COP27

Inisiatif SURGe ini meliputi 5 lingkup berikut: bangunan dan perumahan, penyediaan air, mobilitas, limbah dan konsumsi, serta energi perkotaan, yang semuanya akan didukung oleh kemitraan dan kolaborasi dengan organisasi dari seluruh dunia. Acara ini diinisiasi oleh UN Habitat dan didukung oleh ICLEI (*International Council for Local Environmental Initiatives*);

Pelaksanaan *Ministerial Meeting* ini direncanakan akan dilanjutkan lagi pada ajang COP28 tahun 2023 di Dubai, United Arab Emirates.

The Second UN-Habitat Assembly

The second UN-Habitat Assembly dengan tema "Masa Depan Perkotaan Berkelanjutan melalui Kerjasama Multilateral secara Inklusif dan Efektif: Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Masa Krisis Global" (*A Sustainable Urban Future through Inclusive and Effective Multilateralism: Achieving the Sustainable Development Goals in Times of Global Crisis*).

1. Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk UNEP dan UN-Habitat telah menyampaikan national statement yang menyatakan dukungan untuk penyelenggaraan program UN-Habitat. Indonesia menyampaikan program-program seperti Sanimas, Pamsimas, dan Kotaku yang telah dilaksanakan untuk berkontribusi mewujudkan target SDGs dan NUA.

Gambar 4.22 Suasana pembukaan The Second UN-Habitat Assembly di Nairobi (5/6/2023)

2. Pada 6 Juni 2023, Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan menanggapi isu peluncuran laporan *Global Report on Sanitation and Wastewater Management in Cities and Human Settlements* yang diterbitkan UN Habitat.

3. Delegasi Indonesia juga berpartisipasi dalam 4 *side events* yang relevan dengan isu yang saat ini berkembang di Indonesia. *Side events* yang diikuti meliputi pembahasan pembangunan *smart city* yang inklusif dan berkelanjutan (5 Juni 2023), kerja sama dalam penanganan permukiman kumuh (6 Juni 2023), kemitraan lokal dalam *urban water management* (7 Juni 2023), dan perencanaan perkotaan dan sekitar dalam menghadapi perubahan iklim (8 Juni 2023).

4. Delegasi Indonesia melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan Arab Saudi (6 Juni 2023), Filipina (6 Juni 2023), dan Malaysia (7 Juni 2023). Pertemuan dengan Arab Saudi membahas mengenai pemilihan ketua UN Habitat, sedangkan topik yang dibahas dalam pertemuan dengan Filipina adalah pembangunan permukiman di Kota Surakarta, dan pertemuan dengan Malaysia membahas topik kerja sama PPP untuk pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan.

Gambar 4.23 Pembacaan pernyataan nasional Indonesia pada hari Kedua The Second UN-Habitat Assembly di Nairobi (6/6/2023)

5. Dalam kesempatan ini, delegasi Indonesia mempromosikan agenda 10th *World Water Forum* yang akan diselenggarakan di Bali pada tahun 2024. Promosi dilakukan melalui media *booklet*, *flyer*, dan melakukan pendekatan secara langsung kepada negara-negara yang ditemui.

Perkotaan Indonesia dari Masa ke Masa

05

Pertumbuhan Penduduk Perkotaan di Indonesia

Indonesia merupakan negara terpadat ke-4 di dunia dan akan menempati urutan ke-8 dalam daftar negara yang berkontribusi terhadap pertumbuhan populasi global pada tahun 2050, dengan total pertambahan penduduk lebih dari 66 juta jiwa. Sebagian besar pertumbuhan penduduk pada masa mendatang ini akan terkonsentrasi di daerah perkotaan. Wilayah yang infrastruktur dan layanan sosialnya telah mengalami kesulitan akibat signifikannya kecepatan urbanisasi dalam beberapa dekade terakhir. Pertambahan populasi Indonesia dalam beberapa dekade ke depan dapat menjadi tantangan sekaligus potensi. Jika dikelola dengan baik, maka hal tersebut berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang lebih baik.

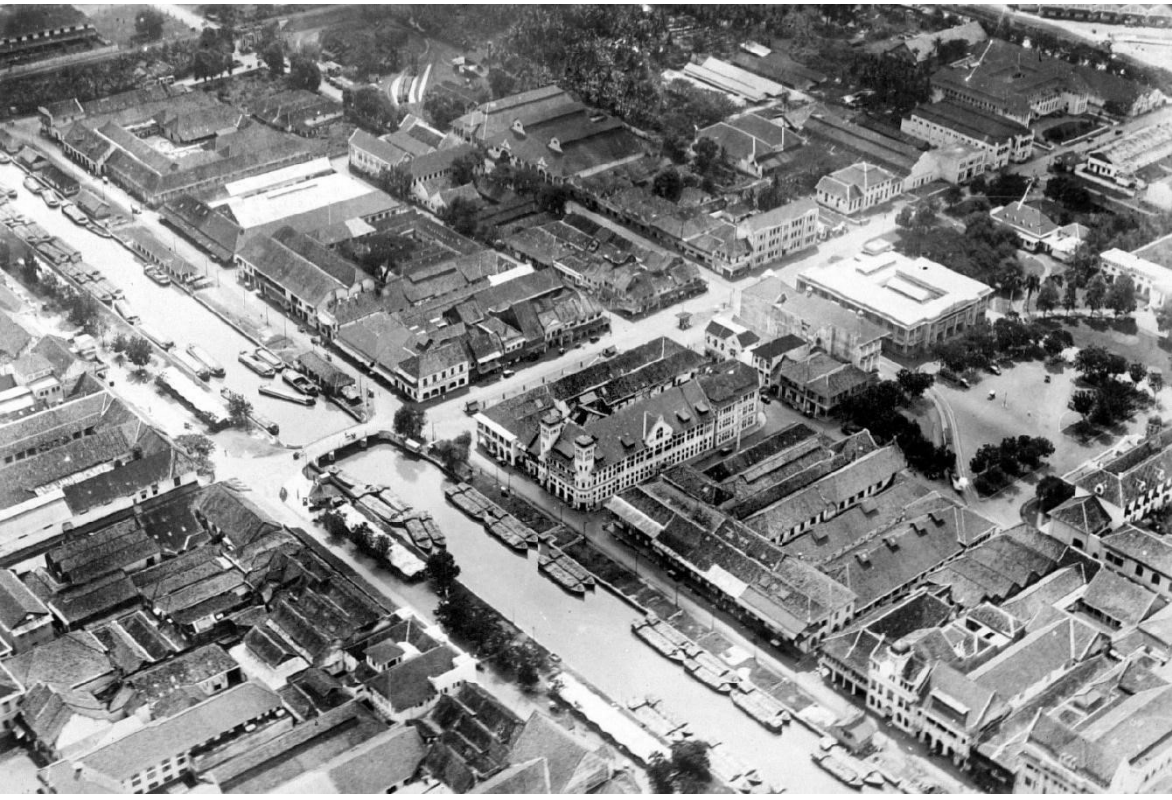

Gambar 5.1 Kali besar Batavia
Sumber: colonialarchitecture.eu

Perkembangan perkotaan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan selama beberapa dekade terakhir. Pada awalnya, pola perkembangan kota didominasi oleh pertumbuhan spontan dan tidak terencana. Seiring berjalannya waktu, pemerintah mulai mengadopsi pendekatan perencanaan yang lebih baik untuk mengelola pertumbuhan kota. Rencana tata ruang kota, pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, dan peningkatan layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan air bersih telah menjadi isu penting dalam pembangunan di sejumlah daerah. Proses urbanisasi dan pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama yang diikuti dengan upaya untuk mendorong perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Urbanisasi telah membawa beberapa tantangan bagi perkembangan kota di Indonesia seperti kemacetan lalu lintas, kekurangan perumahan (*backlog*), kekurangan air bersih, dan lain-lain. Urbanisasi juga dapat mengancam keberlanjutan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik, termasuk polusi udara, limbah, dan semakin berkurangnya lahan pertanian.

Kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta merupakan langkah penting dalam mendukung perkembangan perkotaan yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga bisa menghasilkan solusi yang baik sesuai dengan kebutuhan lokal. Sedangkan, partisipasi sektor swasta dapat berperan dalam investasi pembiayaan proyek infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan kota.

Perpindahan Penduduk Menuju Perkotaan

Sekitar 65 persen penduduk ASEAN diproyeksikan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050. Sementara di Indonesia, proyeksi penduduk perkotaan 2050 diperkirakan melebihi persentase penduduk perkotaan di ASEAN. Tingkat urbanisasi terus beranjak naik dengan pesat setelah tahun 1975 dan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Indonesia diperkirakan akan mencapai tingkat urbanisasi sekitar 68% pada tahun 2035, dan mendekati 73% pada tahun 2050. Hal ini terjadi karena laju kenaikan persentase penduduk kota di Indonesia (2,5% pada 2016) berlangsung lebih cepat daripada laju kenaikan penduduk kota-kota di dunia (2,0% pada tahun yang sama) .

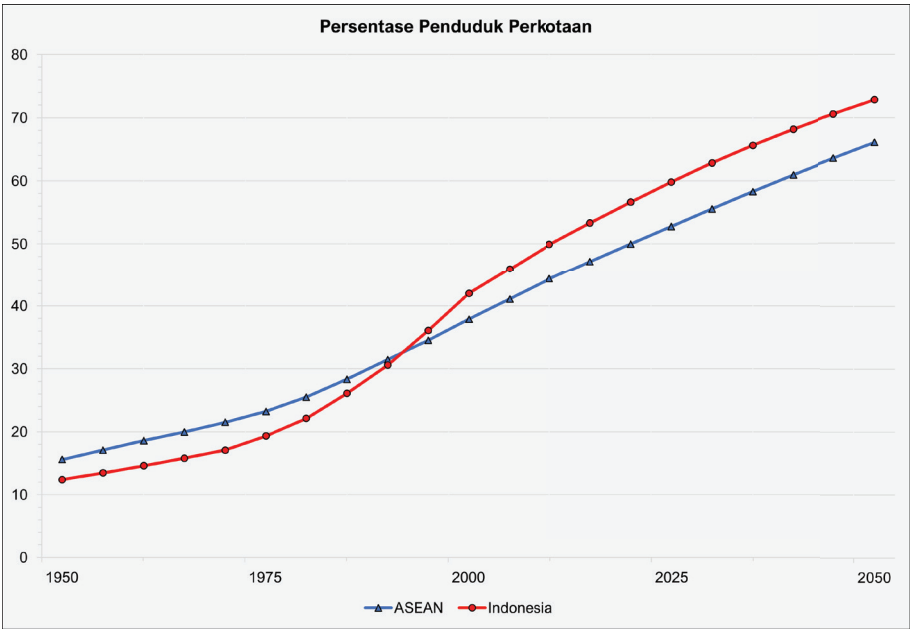

Gambar 5.2 Grafik pertumbuhan penduduk perkotaan Indonesia
Sumber: Population Division, United Nations 2018

Meskipun demikian, akan tetap ada disparitas antarprovinsi yang sangat besar. Pada tahun 2035, sebanyak 90% dari masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa, khususnya di wilayah sebelah barat perbatasan Provinsi Jawa Tengah-Jawa Barat akan menjadi penduduk perkotaan. Populasi perkotaan sebesar 76 juta jiwa ini akan terkonsentrasi terutama di daerah megapolitan Jakarta Raya dan Bandung Raya; sebaliknya, kurang dari 40% penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, dan Maluku Utara akan tinggal di perkotaan .

Proyeksi ini menggambarkan penyebutan Indonesia sebagai *urbanized country*. Artinya, Indonesia adalah negara dengan lebih banyak penduduk yang tinggal di perkotaan. Urbanisasi dapat memberikan peluang peningkatan kehidupan di perkotaan atau justru semakin menimbulkan banyak permasalahan, contohnya penurunan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat perkotaan yang dapat mengancam keberlanjutan kota.

Tidak diragukan lagi, urbanisasi merupakan pendorong utama pembangunan. Ini karena kota menyediakan wadah untuk kemakmuran, penyediaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Akan tetapi, urbanisasi juga menimbulkan tantangan besar yang kita semua kenal,

contohnya kemacetan, polusi udara, perpecahan sosial, kriminalitas, kerusakan layanan publik dan infrastruktur, serta permukiman kumuh .

Pada era tahun 1960 hingga 1970-an, pengambil kebijakan sering kali memandang urbanisasi dan perkembangan kota sebagai sesuatu yang perlu dicegah karena lebih menghasilkan persoalan daripada solusi. Sikap tersebut bahkan diimplementasikan dalam beberapa bentuk kebijakan pembatasan arus masuk penduduk ke suatu kota. Namun, pada tahun 1960 hingga 1970-an, Cina justru memelopori kebijakan yang lebih berorientasi pada pembangunan perkotaan. Bahkan, secara resmi pemerintah Cina memulai program pembangunan dengan memanfaatkan peluang urbanisasi dan menjadikan urbanisasi sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta pengurangan kemiskinan. Hasilnya adalah kemajuan yang luar biasa di Cina, begitu pula pengurangan kemiskinan yang mencapai angka fantastis, yaitu 500 juta jiwa .

Dalam dua dekade terakhir kota-kota Indonesia telah mengalami perkembangan, baik dari segi jumlah penduduk maupun luasannya. Pemerintah telah menetapkan kategori kota berdasarkan jumlah penduduknya yaitu kota megapolitan, metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Berdasarkan kategori tersebut, Indonesia memiliki satu kota Megapolitan yaitu Jakarta, sepuluh kota metropolitan yaitu Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, Palembang, Semarang, Batam, Pekanbaru, Malang, dan Bekasi. Selain itu juga terdapat 11 kota berskala besar, 112 kota berskala sedang, dan lebih dari 200 kota berskala kecil.

Klasifikasi kota-kota ini sangat penting karena dapat mencerminkan berbagai hal, contohnya keterkaitannya dengan wilayah sekitar, pembangunan fisik dan ruang, hingga persoalan yang dihadapi kota tersebut. Dalam merumuskan upaya penyelesaian tantangan perkotaan, juga tidak terlepas dari interaksi suatu kota dengan kota-kota di sekelilingnya. Hal ini menjadikan perlu adanya kebijakan di tingkat nasional untuk mengatur permasalahan seperti ini, misalnya mendorong pertumbuhan sentra-sentra kota besar (metropolitan) atau kota baru di luar Pulau Jawa.

Periodesasi Pembangunan Perkotaan Nasional

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pertumbuhan penduduk perkotaan mengalami perubahan yang signifikan dan cepat. Beberapa faktor yang telah mempengaruhi pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia termasuk industrialisasi, urbanisasi, migrasi internal, serta perkembangan ekonomi dan sosial. Berikut perubahan pembangunan perkotaan Indonesia yang dibagi menjadi beberapa periode penting sejarah Indonesia:

1. **Awal Kemerdekaan (1945 hingga 1960-an)**

   Pada awal kemerdekaan yaitu sekitar tahun 1945 hingga tahun 1960-an, populasi Indonesia masih didominasi oleh penduduk di perdesaan. Meskipun demikian, perkembangan perkotaan di negara ini mengalami transformasi signifikan akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi setelah merdeka dari penjajahan Belanda. Langkah awal industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi mendorong migrasi penduduk dari perdesaan ke kota-kota besar misalnya Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Urbanisasi di periode ini sebagian besar dipicu oleh peningkatan peluang pekerjaan di sektor industri dan jasa di kota-kota.

   a. **Industrialisasi awal.** Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi. Meskipun masih didominasi oleh sektor pertanian, langkah-langkah awal menuju industrialisasi mulai dilakukan. Ini menciptakan peluang pekerjaan di sektor industri yang mengarah pada migrasi penduduk dari perdesaan ke kota-kota.

   b. **Migrasi internal.** Periode ini menyaksikan gelombang migrasi internal yang signifikan dari daerah perdesaan ke kota-kota besar. Banyak penduduk yang mencari pekerjaan di sektor industri dan jasa di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Migrasi ini dipicu oleh harapan akan peluang pekerjaan yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih baik di perkotaan.

   c. **Pembangunan infrastruktur.** Pemerintah yang baru merdeka berusaha membangun infrastruktur dasar di kota-kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan

nasional. Peningkatan jaringan jalan, perbaikan transportasi, dan penyediaan fasilitas publik menjadi fokus penting di awal kemerdekaan.

d. **Peningkatan pelayanan kota.** Periode ini juga menyaksikan upaya untuk meningkatkan layanan kota seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Pemerintah berusaha meningkatkan akses penduduk perkotaan terhadap fasilitas-fasilitas ini untuk mendukung perkembangan perkotaan.

e. **Pengembangan sosial dan budaya.** Di samping aspek ekonomi dan infrastruktur, upaya juga dilakukan untuk membangun identitas nasional dan budaya yang kuat di tengah proses pembangunan. Pendidikan dan media dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya identitas nasional dan kesatuan.

f. **Tantangan sosial dan politik.** Meskipun perkembangan perkotaan pada periode ini memiliki dampak positif dalam menciptakan peluang ekonomi dan modernisasi, juga terdapat tantangan. Migrasi besar-besaran ke kota-kota menyebabkan masalah perumahan yang serius, terutama dengan munculnya permukiman kumuh.

g. **Tumbuhnya kehidupan politik.** Selain perubahan ekonomi dan sosial, perkembangan politik juga berlangsung. Kota-kota menjadi pusat aktivitas politik dan pergerakan nasional. Kegiatan politik ini sering kali berkembang di ruang-ruang publik di kota-kota.

h. **Modernisasi dan identitas nasional.** Selama periode ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk memodernisasi negara dan meningkatkan identitas nasional. Salah satu caranya adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan budaya di kota-kota sebagai bagian dari upaya membangun sebuah bangsa yang bersatu.

Periode ini merupakan fondasi awal dari perkembangan perkotaan di Indonesia setelah kemerdekaan. Transformasi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi dalam periode ini membentuk dasar bagi perkembangan lebih lanjut di dekade-dekade berikutnya.

PERKEMBANGAN PERKOTAAN DI INDONESIA

Gambar 5.3 Perkembangan perkotaan Indonesia

2. Era Orde Baru (1960-an hingga 1990-an)

Pada masa Orde Baru, yang berlangsung dari tahun 1960-an hingga 1998, adalah periode signifikan dalam sejarah Indonesia yang ditandai oleh pemerintahan otoriter dan modernisasi yang dikuasai oleh Presiden Soeharto. Pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur di kota-kota besar sebagai bagian dari upaya modernisasi dan pembangunan nasional. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan kota-kota besar, contohnya Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Era ini juga ditandai oleh program transmigrasi yang bertujuan untuk mengurangi tekanan penduduk di pulau-pulau besar seperti Jawa dengan memindahkan penduduk ke wilayah-wilayah yang lebih jarang penduduk.

Perkembangan perkotaan selama periode ini juga memiliki ciri khas dan perubahan penting. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai Era Orde Baru dan dampaknya terhadap perkembangan perkotaan:

a. **Pembangunan infrastruktur masif.** Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas utama. Banyak kota di Indonesia mengalami peningkatan dalam pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya. Peningkatan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan modernisasi.

b. **Transmigrasi dan perluasan kota.** Program transmigrasi ditujukan untuk mengurangi tekanan penduduk di pulau-pulau yang padat penduduk, terutama Jawa, dengan memindahkan penduduk ke pulau-pulau lain di Indonesia. Program ini juga menyebabkan perkembangan dan perluasan kota-kota di luar pulau Jawa.

c. **Pusat-pusat industri dan ekonomi baru.** Perkembangan ekonomi diarahkan ke sektor industri dan manufaktur. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan pusat-pusat industri di beberapa kota contohnya Cilegon, Semarang, dan Medan.

d. **Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).** Kawasan Ekonomi Khusus menjadi upaya untuk menarik investasi asing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa kota, contohnya Batam, Bintan, dan Karawang.

e. **Modernisasi kota.** Upaya memodernisasi kota-kota besar dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur, mengadopsi teknologi modern, dan mengurangi kawasan permukiman kumuh.

f. **Pengaruh militer.** Militer memiliki peran yang signifikan dalam pemerintahan Orde Baru. Terdapat banyak proyek pembangunan perkotaan juga melibatkan peran militer dalam pengembangan infrastruktur dan pengelolaan kawasan-kawasan tertentu.

g. **Ketidaksetaraan antara perkotaan dan perdesaan.** Meskipun terjadi pembangunan perkotaan yang pesat, ketidaksetaraan antara perkotaan dan perdesaan masih ada. Pusat-pusat pembangunan lebih terfokus di kota-kota besar, sementara perdesaan kadang ditinggalkan dalam hal pembangunan dan akses terhadap fasilitas.

h. **Konsep pembangunan terencana.** Pemerintah Orde Baru menerapkan konsep "Pembangunan Terencana" yang mengarahkan perkembangan kota-kota dan wilayah-wilayah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial yang telah ditetapkan.

"Program Transmigrasi merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi beban perkotaan Pulau Jawa."

Meskipun terdapat perkembangan ekonomi dan infrastruktur yang signifikan selama Era Orde Baru, periode ini juga ditandai oleh pengawasan ketat pemerintah terhadap politik dan media, serta isu-isu hak asasi manusia yang kontroversial. Setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik dan sosial yang lebih besar, yang juga berdampak pada perkembangan perkotaan di negara ini.

3. Era Reformasi (1990-an hingga 2000-an)

Setelah reformasi pada akhir tahun 1990-an, pertumbuhan penduduk perkotaan semakin cepat. Urbanisasi masih terus berlanjut, dan terjadi lonjakan penduduk yang mencari peluang ekonomi dan pendidikan di kota-kota besar. Era ini juga ditandai oleh upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan dan memajukan kota-kota di luar Pulau Jawa. Era Reformasi yang dimulai setelah pengunduran diri Presiden Soeharto pada tahun 1998 merupakan periode yang penting dalam sejarah Indonesia. Era ini ditandai oleh perubahan politik, perluasan kebebasan sipil, dan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sistemik yang ada. Selain itu, terdapat pengaruh signifikan terhadap perkembangan perkotaan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai Era Reformasi dan dampaknya terhadap perkembangan perkotaan:

a. **Desentralisasi dan otonomi daerah.** Salah satu perubahan paling penting adalah perubahan dalam sistem pemerintahan menuju desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal, termasuk pembangunan perkotaan. Desentralisasi di Indonesia dimulai pada tahun 1999 dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur desentralisasi di Indonesia.

b. **Partisipasi publik dalam pembangunan perkotaan.** Era Reformasi membawa perluasan kebebasan berbicara dan partisipasi politik yang lebih besar. Masyarakat sipil memiliki peluang lebih besar untuk berperan dalam pembangunan perkotaan melalui aktivisme, pengawasan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Pemerintah daerah mulai mengajak warga untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan kota. Warga dilibatkan dalam diskusi mengenai penggunaan lahan, transportasi, lingkungan, dan lain-lain.

c. **Urbanisasi terus berlanjut.** Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk perkotaan terus berlanjut, dengan banyak penduduk yang mencari peluang pekerjaan, pendidikan, dan layanan di kota-kota. Walaupun ada upaya untuk memperluas pembangunan ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, kota-kota

besar di pulau ini masih menjadi pusat pertumbuhan.

d. **Peningkatan infrastruktur.** Pemerintah fokus pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur perkotaan, termasuk transportasi, jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga kota dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

e. **Pengembangan daerah pesisir.** Beberapa kota pesisir mengalami perkembangan pesat, termasuk pengembangan kawasan wisata dan ekonomi di daerah-daerah contohnya Bali, Yogyakarta, dan Lombok.

f. **Pengembangan teknologi informasi.** Era Reformasi melihat pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Masyarakat kota semakin mengadopsi teknologi, memungkinkan munculnya berbagai inisiatif menuju *Smart City*.

g. **Penekanan pada lingkungan dan keberlanjutan.** Era Reformasi juga menyaksikan peningkatan kesadaran akan isu lingkungan dan keberlanjutan. Banyak kota berusaha mengadopsi praktik ramah lingkungan dan mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam perencanaan perkotaan.

Meskipun Era Reformasi membawa perubahan positif dalam hal demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan, juga terdapat tantangan seperti pertumbuhan kota yang cepat, ketimpangan sosial, dan perluasan permukiman kumuh. Selama periode ini, perkembangan perkotaan juga terus dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang berkembang di Indonesia.

4. Abad ke-21: Modernisasi dan Globalisasi

Sejak awal abad ke-21, pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia terus berlangsung. Perkembangan perkotaan di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan sebagai respons terhadap perubahan global, kecanggihan teknologi, dan tuntutan masyarakat. Peningkatan urbanisasi telah menyebabkan banyak kota berkembang pesat, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kehadiran peluang pekerjaan, pendidikan, dan pelayanan kota yang lebih baik masih menjadi dorongan kuat bagi migrasi penduduk ke kota-kota.

Gambar 5.4 Ilustrasi Makassar Virtual Economic Centre (Marvec)

Beberapa tren dan peristiwa penting dalam perkembangan perkotaan di Indonesia pada abad ke-21 adalah sebagai berikut:

a. **Pertumbuhan populasi perkotaan.** Pertumbuhan penduduk perkotaan terus berlanjut, dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengalami peningkatan pesat dalam populasi. Urbanisasi dan migrasi internal masih merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ini.

b. ***Smart city initiatives.*** Banyak kota di Indonesia mengadopsi inisiatif *Smart City* untuk meningkatkan efisiensi, pelayanan, dan kualitas hidup warganya. Teknologi informasi dan data digunakan untuk mengelola lalu lintas, layanan publik, pengelolaan limbah, dan lain-lain.

c. **Pertumbuhan ekonomi dan investasi.** Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa daerah perkotaan menghasilkan peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur, properti, dan sektor usaha lainnya. Beberapa kawasan ekonomi khusus terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan industri.

d. **Peningkatan infrastruktur.** Pemerintah terus berfokus pada pembangunan dan peningkatan infrastruktur, termasuk jalan tol, bandara, pelabuhan, dan transportasi umum. Ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan memperbaiki konektivitas antar wilayah.

e. **Pengembangan pariwisata.** Indonesia terus mengembangkan sektor pariwisata, dengan banyak kota dan daerah wisata di seluruh negara. Bali, Yogyakarta, dan beberapa destinasi lainnya terus menarik perhatian wisatawan.

f. **Isu lingkungan dan bencana alam.** Peningkatan kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam menjadi perhatian serius. Beberapa kota menghadapi risiko banjir, tanah longsor, dan peningkatan permukaan air laut. Upaya untuk mengatasi isu lingkungan semakin ditekankan.

g. **Pengelolaan sampah dan lingkungan.** Isu sampah dan pengelolaan limbah menjadi fokus penting dalam perkembangan perkotaan. Beberapa kota berupaya menerapkan sistem pengelolaan limbah yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

h. **Konsep kota berkelanjutan.** Konsep kota berkelanjutan semakin mendapatkan perhatian, dengan upaya untuk menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan sosial.

i. **Digitalisasi layanan publik.** Layanan publik semakin didigitalisasi untuk mempermudah akses bagi masyarakat. Layanan pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan dapat diakses secara daring.

j. **Partisipasi masyarakat.** Masyarakat semakin berperan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan perkotaan melalui forum partisipasi publik dan keterlibatan dalam inisiatif kota cerdas.

k. **Ketimpangan ekonomi dan akses.** Meskipun terjadi perkembangan ekonomi dan infrastruktur, masih ada ketimpangan ekonomi dan akses terhadap layanan antara kota-kota dan wilayah-wilayah di Indonesia.

Perkembangan perkotaan di Indonesia pada abad ke-21 terus dipengaruhi oleh perubahan global, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Meskipun terdapat sejumlah pencapaian positif, juga masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai perkembangan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, pertumbuhan penduduk perkotaan juga

telah menimbulkan sejumlah tantangan, termasuk kemacetan lalu lintas, perumahan yang terbatas, peningkatan permintaan layanan publik, dan perlunya pengelolaan lingkungan yang lebih baik untuk menjaga kualitas hidup di kota-kota. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi tantangan ini melalui program-program pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan berfokus pada peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pengembangan kawasan perkotaan yang lebih baik. Saat ini juga, setelah penyepakatan berbagai komitmen global, pemerintah mulai fokus kepada pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan kota yang lebih hijau dan transportasi umum, serta upaya untuk mengatasi masalah seperti kemacetan lalu lintas dan polusi lingkungan.

Capaian Pembangunan Perkotaan di Indonesia

Dalam periode 20 tahun setelah Habitat II, kota-kota di dunia telah mengalami transformasi, tanpa terkecuali kota-kota di Indonesia. Beberapa kota di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat baik dalam berbagai hal, yang secara fisik juga dapat kita amati secara kasatmata. Berikut beberapa pencapaian berbagai kota di Indonesia yang dapat kita jadikan praktik terbaik (*best practices*), dan sekaligus pemicu bahwa kota-kota tersebut juga mampu bertransformasi menjadi kota kelas dunia.

Pembangunan Perkotaan di Tingkat Nasional

Pembangunan perkotaan Indonesia telah mengalami evolusi dari masa ke masa. Evolusi ini sesuai dengan kondisi dan tantangan yang ada pada masanya. Pembangunan permukiman perkotaan dimulai pada tahun 1969 dengan fokus pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mengatasi permukiman kumuh. Awalnya, pembangunan ini dilakukan dengan implementasi Kampung *Improvement Project*, kemudian berlanjut dengan program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, Program Kota Tanpa Kumuh hingga akhirnya menjadi *smart city program*. Selain itu, juga terdapat program tematik dengan tujuan khusus contohnya Pamsimas dan Sanimas, hingga Program Sejuta Rumah. Berbagai program ini memberikan dampak pada perkotaan Indonesia hingga saat ini.

1. Kampung *Improvement Program* (1968–1993)

Program Peningkatan Kampung (Kampung *Improvement Program atau KIP*) adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan infrastruktur di kampung-kampung atau desa-desa di Indonesia. Program ini merupakan inisiatif yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, diawali dengan program penataan kawasan kumuh yang disebut "*Kampong Verbetering*." Pada tahun 1969, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memimpin program untuk memperbaiki permukiman informal, yang lebih dikenal sebagai kampung, dan kemudian program ini direplikasi di Surabaya. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, termasuk pengerasan jalan, drainase, penyediaan air bersih, fasilitas pengelolaan sampah, dan sanitasi.

Pada tahun 1982, Program Perbaikan Kampung diadopsi secara nasional serta mendapat dukungan pendanaan dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Program ini mengalami perkembangan seiring dengan evaluasi dan masukan yang diterima. KIP berubah dari program yang berfokus pada aspek fisik menjadi program yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat, dengan dukungan dari lembaga internasional contohnya WHO, UNEP, dan UNDP. Selanjutnya, pada tahun 1989, pendekatan tiga cabang "Tridaya" diterapkan, yang mencakup fokus pada pendekatan holistik, perkembangan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Program KIP sendiri juga telah mendapatkan penghargaan internasional untuk keberhasilannya dalam memperbaiki kawasan kumuh di berbagai kota. Pada pertengahan tahun 1990-an, meskipun program yang didanai dengan pinjaman telah ditutup, beberapa kota contohnya Surabaya tetap menggunakan tiga jenis program perbaikan kawasan kumuh dengan program yang berbeda, yaitu:

a. Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (PLP), diprakarsai oleh komunitas setempat dengan dukungan keuangan dari pemerintah daerah.
b. Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), yang merupakan implementasi tingkat nasional.
c. Program Perbaikan Perumahan dan Permukiman, diprakarsai oleh pemerintah setempat yang menyediakan bahan bangunan kepada rumah tangga berpendapatan rendah.

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter dan reformasi politik. Pemerintah menginisiasi Program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM DKE), yang mencakup perbaikan fisik kampung untuk menciptakan lapangan kerja baru.

2. Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (1985–2003)

P3KT adalah pendekatan terpadu untuk merencanakan program prasarana kota yang bergantung pada kemampuan keuangan dan kelembagaan pemerintah daerah tingkat II. Tujuannya adalah mendukung pemerintah daerah tingkat II dalam menyusun program pembangunan prasarana di berbagai bidang perkotaan, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, dan meningkatkan efektivitas penyediaan layanan perkotaan. Pendekatan ini memiliki empat prinsip utama: optimasi, mobilisasi sumber daya, desentralisasi, dan kesepakatan bersama. Keempat prinsip ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana, dekonsentrasi pelaksanaan program, dan mencapai kesepakatan dalam pembiayaan program.

Siklus program P3KT terdiri dari lima tahap, termasuk perencanaan, penyiapan program, penilaian, alokasi dana, dan pelaksanaan program. Pemerintah daerah tingkat II memiliki peran penting dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Program ini memiliki 40 lokasi pilot penanganan kumuh dengan konsep *urban renewal*. Program informasi dan komunikasi menjadi penting untuk mendukung pembangunan perkotaan, menciptakan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, serta memungkinkan kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Informasi dan komunikasi dapat membantu memahami peran masyarakat dan mengubah sikap serta perilaku dalam mendukung pembangunan kota. Program ini menekankan pada keterpaduan tingkat layanan lingkungan dengan kota dan kabupaten.

3. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (1999–2011)

Pada tahun 1999, KIP lalu dilanjutkan dengan program P2KP pada tahun 1999. P2KP bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pengembangan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat perkotaan, khususnya masyarakat miskin. P2KP melibatkan peningkatan kapasitas, sumber daya, dan kemitraan antarpemangku kepentingan.

P2KP memiliki tiga sasaran utama:

a. Membangun organisasi berbasis masyarakat yang vokal dan akuntabel, dalam mewakili kepentingan masyarakat miskin di 11.670 kelurahan atau desa.

b. Mendorong responsifnya pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat miskin melalui kemitraan dengan kelompok masyarakat.

c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin, termasuk dalam hal pembiayaan, jaminan sosial, dan fasilitas perumahan.

Program P2KP menekankan pengembangan modal sosial serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan modal sosial untuk masyarakat kumuh dan menciptakan kesejahteraan yang lebih baik dalam lingkungan produktif dan berkelanjutan.

Selama pelaksanaan P2KP, upaya terus dilakukan untuk membentuk modal sosial yang akan mempertahankan program ini. Modal sosial ini mencakup aspek kelembagaan dan relasional, dan upaya transformasi sosial terus dilakukan untuk mengembangkan modal sosial dalam masyarakat kumuh. Program ini juga memungkinkan masyarakat kumuh untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan kelompok lokal lainnya.

P2KP merupakan upaya untuk mencapai kota tanpa permukiman kumuh, sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025 dan SDGs. Program ini telah memberikan manfaat kepada banyak Rukun Tetangga (RT) dan penduduk kumuh perkotaan di Indonesia.

4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (2007–2014)

PNPM Mandiri Perkotaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan) adalah sebuah program pembangunan perkotaan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup penduduk perkotaan. Selain itu, juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan perkotaan. Proses partisipatif melibatkan masyarakat dalam menentukan proyek-

proyek yang dibutuhkan dan pengelolaan dana pembangunan. Adapun komponen program ini sebagai berikut:

a. **Infrastruktur fisik:** Membangun atau memperbaiki infrastruktur fisik seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum lainnya di perkotaan.

b. **Infrastruktur sosial:** Meningkatkan akses masyarakat perkotaan terhadap layanan sosial contohnya pendidikan, kesehatan, dan sanitasi.

c. **Pemberdayaan ekonomi:** Mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil, koperasi, serta sektor ekonomi lainnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perkotaan.

d. **Tata ruang:** Meningkatkan perencanaan tata ruang kota dan permukiman untuk memastikan pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan.

e. **Partisipasi masyarakat:** Masyarakat lokal secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program, termasuk dalam pengelolaan dana.

Dana PNPM Mandiri Perkotaan berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dana internasional. Masyarakat juga berkontribusi dalam bentuk uang, tenaga kerja, atau sumber daya lokal lainnya. PNPM Mandiri telah berhasil memperkuat kelembagaan Masyarakat (BKM) di sekitar 11.000 kelurahan atau desa dengan intervensi terkait perencanaan spasial, gender, dan *disaster risk management* mainstreaming. Program ini juga mendorong kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

5. Program Kota Tanpa Kumuh (2017–2023)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan *platform* kolaborasi antara pemerintah pusat; pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten; masyarakat; serta pemangku kepentingan lainnya, dengan memosisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda).

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar di permukiman kumuh perkotaan, serta mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, juga terdapat pendanaan dari lembaga mitra pembangunan pemerintah, contohnya World Bank (WB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan Islamic Development Bank (IsDB). Berdasarkan kebutuhan total pembiayaan, sumber dari mitra pembangunan pemerintah (*loan*) sekitar 45%.

Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dilakukan dengan tahap-tahap berikut: (a) pendataan, (b) perencanaan, (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi, serta (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya. Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat, juga sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu diterapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial (*environment and social safeguard*).

Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan kegiatan:

a. Pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan;

b. Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah; serta;

c. Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (*livelihood*) masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh, yang terdiri atas 7 aspek antara lain kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase, lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan persampahan dan ketersediaan ruang terbuka publik.

6. Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas)

Infrastruktur sanitasi merupakan infrastruktur dasar yang berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Penyediaan infrastruktur sanitasi dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu skala kota ataupun skala komunitas. Pada tahun 2000, pemerintah mempertimbangkan program sanitasi skala kota yang belum optimal terutama dalam aspek keberlanjutannya, kemudian mencanangkan kebijakan penyediaan sanitasi berbasis masyarakat.

Program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dimulai pada tahun 2003. Program ini diawali dengan terbitnya kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang menargetkan penyediaan prasarana dan sarana air limbah permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan padat penduduk dan kumuh di perkotaan. Pelaksanaan program ini melibatkan masyarakat secara penuh dengan pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*).

Dalam pembangunan fasilitas sanimas, digunakan konsep pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal. Tujuannya agar fasilitas yang terbangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Konsep tersebut menggunakan prinsip-prinsip pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat, contohnya pada pilihan yang diinformasikan sebagai dasar dalam pendekatan tanggap kebutuhan, penjelasan bahwa air merupakan benda sosial dan ekonomi, pembangunan berwawasan lingkungan, peran aktif masyarakat, serta penerapan prinsip pemulihan biaya.

Sanimas diperkenalkan oleh *Bremen Overseas Research and Development Association* (BORDA) dengan proyek pilot di Provinsi Bali, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur (sebanyak 25 lokasi) yang dilaksanakan sejak tahun 2003 hingga 2005. Melihat keberlanjutan dari proyek pilot tersebut, Departemen Pekerjaan Umum melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Permukiman, Ditjen Cipta Karya terus melaksanakan replikasi kegiatan Sanimas dan peningkatan (*scaling up*) pendekatan fasilitas sanitasi terdesentralisasi berbasis masyarakat atau *Decentralized Wastewater Treatment Systems* (Dewats) secara nasional. Hingga saat ini, Sanimas sudah dilaksanakan pada lebih dari 400 lokasi yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Sejak tahun 2010, pembangunan fasilitas Sanimas didukung penuh oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Sanitasi yang sudah terpisah dengan DAK bidang Air Minum. Selain didukung oleh pendanaan APBN Direktorat Jenderal Cipta Karya–Kementerian PUPR, pemerintah pusat juga mendorong pembangunan fasilitas sanimas melalui dukungan dana luar negeri dan dana APBD melalui berbagai kerangka program. Kerja sama pendanaan luar negeri yang besar berasal dari Asian Development Bank (ADB), digunakan untuk membangun fasilitas Sanimas di 1.350 kelurahan di lebih dari 30 kota/kabupaten di 5 provinsi.

Selain itu, Islamic Development Bank turut berkomitmen mendukung program ini, dengan pembangunan sebanyak lebih dari 2.000 fasilitas sanimas di 48 kota/kabupaten di 14 provinsi. Hingga tahun 2011, telah terbangun sebanyak 551 fasilitas sanimas di 131 kabupaten/kota di 30 provinsi di Indonesia. Pembangunan fasilitas sanimas merupakan komponen utama dalam mencapai target RPJMN 2010-2014 bidang sanitasi, yaitu menyediakan akses terhadap layanan pengelolaan air limbah terpusat skala komunal untuk 5% penduduk Indonesia di tahun 2014.

7. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

Sebagai pelayanan publik yang mendasar, berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pamsimas berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Pamsimas merupakan program jangka panjang, periode 2008–2020, yang didukung oleh pendanaan Bank Dunia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah fasilitas air minum dan sanitasi bagi warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban. Sehingga, masyarakat dapat mengakses layanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Program ini diterapkan dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi), melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Untuk selanjutnya, melalui pendekatan tersebut, program ini mencapai target SDGs dan Universal Akses 2030.

Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan, dan memelihara sarana yang telah dibangun. Selain itu juga melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Program Pamsimas dilaksanakan dalam 3 fase periode, yaitu sebagai berikut:

a. Program Pamsimas I (2008–2013), dilaksanakan di 110 kabupaten/kota dari 15 Provinsi. Pamsimas I berhasil diterapkan pada 6.845 desa, terdiri atas 6.262 desa reguler dan sekitar 593 desa replikasi.

b. Program Pamsimas II (2013–2016), dilaksanakan untuk 6800 desa di 32 provinsi di 233 kabupaten/kota.

c. Program Pamsimas III (2016–2020), dilaksanakan 15.000 desa sasaran baru di 33 provinsi, 396 kabupaten, dan 11 kota. Pada fase ketiga ini juga dilakukan pengelolaan pada keberlanjutan program di hampir lebih dari 27.000 desa.

8. Program Sejuta Rumah (2015–Sekarang)

Presiden Jokowi mencanangkan Program Sejuta Rumah (PSR) pada tanggal 29 April 2015. Program ini merupakan gerakan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi kekurangan (*backlog*) perumahan dan mewujudkan percepatan penyediaan rumah layak huni bagi seluruh masyarakat Indonesia. PSR ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016.

Kementerian PUPR telah berhasil melaksanakan program ini dengan pencapaian 8,47 juta unit rumah sejak tahun 2015. Program ini adalah hasil kerja sama antara pemerintah dan para pengembang yang berkomitmen memberikan dukungan dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Para pengembang tersebut juga tergabung dalam anggota Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra). Adapun target PSR ini dibagi menjadi dua bagian yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Non-MBR. Pelaksanaan penyediaan rumah bagi MBR melibatkan berbagai pihak contohnya pemda, kementerian lainnya, pengembang, hingga masyarakat umum. Sedangkan Non-MBR, akan dilaksanakan oleh pengembang dan masyarakat.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi *backlog* perumahan hingga mencapai 12,7 juta unit dan bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam upaya ini. Komitmen ini sejalan dengan visi Indonesia tahun 2045 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan keluarga baru di Indonesia mencapai 700.000-800.000 per tahun. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian PUPR telah menetapkan target peningkatan akses rumah layak huni dari 56% menjadi 70% pada tahun 2024 melalui RPJMN 2020-2024. Selain kegiatan fisik, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi dan menyediakan dana pembiayaan murah jangka panjang. Bantuan dana tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah dalam pembelian rumah pertama, dan berupa: Bantuan uang muka.

a. Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) untuk pengembang yang membangun perumahan MBR.

b. Program Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) sebagai bagian dari kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi

c. Program Kredit Perumahan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) dengan suku bunga terjangkau dan tetap sepanjang tenor. KPR FLPP dikelola oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan sampai tahun 2021, dan diambil alih pengelolaannya oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

d. Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk meningkatkan MBR sektor informal membangun dan meningkatkan kualitas rumah pertama.

Selama perjalanan RPJPN 2005–2025, sektor pembiayaan perumahan telah melahirkan berbagai skema dan program yang ditujukan untuk memfasilitasi akses MBR kepada pembiayaan perumahan. Tercatat sejak 2011 hingga 2022 telah disalurkan dana senilai Rp1.305 triliun untuk 1.997.482 unit rumah realisasi program bantuan penyediaan perumahan. Melalui Program FLPP mulai tahun 2010 hingga 2022 telah disalurkan Rp100,327 triliun untuk 1.169.579 unit rumah.

Selain program FLPP, dilaksanakan kembali SBB dan SBUM sebagai bagian dari KPR bersubsidi. Program ini telah menyalurkan sebesar Rp15,31 triliun untuk 805.506 unit. Program lainya yaitu program Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) dengan capaian hingga 2022 sebesar Rp1,19 Triliun untuk 30.356 unit.

Pembangunan Perkotaan di Tingkat Daerah

1. Jakarta, Transformasi Transportasi Publik

Dalam 10 tahun terakhir, tidak dapat dimungkiri bahwa Jakarta mencoba berbenah menjadi lebih baik, salah satunya di bidang transportasi. Hal ini dimulai dari lahirnya Transjakarta sebagai Bus Raya Terpadu (BRT) pertama di Indonesia yang kemudian menjadi salah satu BRT terbaik di dunia dengan kapasitas penumpang yang besar dan akhirnya menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia. Transjakarta terbukti mengalami perbaikan dari waktu ke waktu dari segi fasilitas, infrastruktur, hingga segi pelayanan.

Gambar 5.5 Transjakarta yang melintas di salah satu jalur khusus

Keberhasilan ini, tentunya telah diakui oleh dunia, salah satunya pada tahun 2020, ITDP menobatkan Jakarta sebagai *runner up Sustainable Transport Award* pada kategori kemajuan terbaik di bidang transportasi publik. Hingga selanjutnya pada tahun 2021, Jakarta berhasil memperoleh *Sustainable Transport Award* karena dianggap berhasil mengintegrasikan semua moda transportasi dengan baik secara fisik maupun pembayaran. Selain itu, Jakarta juga dianggap mampu membenahi akses pejalan kaki menuju transportasi publik yang tersedia. Selain itu, pada tahun 2021, Jakarta juga telah mampu mengintegrasikan Moda Raya Terpadu (MRT) dengan *Commuter Line* milik KAI yang menjadi tonggak baru sistem transportasi modern di Jabodetabek. Keberhasilan Jakarta

perlu diakui karena telah terbukti mampu bersaing dengan kota-kota lainnya yang juga mengalami kemajuan di bidang transportasi seperti Addis Ababa, Bogota, Auckland, Braga, Buenos Aires, Frankfurt, San Paola, dan lain sebagainya. Perkembangan moda transportasi publik ini masih terus dilakukan di masa mendatang dengan adanya integrasi moda lain, contohnya Lintas Raya Terpadu (LRT) dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung.

2. Surabaya, Kota Seribu Penghargaan Lahan Basah menjadi Pengendali Banjir

Surabaya dikenal sebagai salah satu kota dengan pembangunan perkotaan yang sangat baik di Indonesia.

Gambar 5.6 Suasana Kali Mas di Surabaya

Berbagai penghargaan internasional telah diraih oleh kota terbesar ke-2 di Indonesia ini. Salah satu penghargaan yang diperoleh, yaitu *Wetland City Accreditation* yang diberikan oleh Konvensi Ramsar, yang mana Kota Surabaya menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang mendapatkan penghargaan ini. Selain Surabaya, daerah lainnya yang mendapatkan penghargaan ini yaitu Tanjung Jabung Timur. Sedangkan daerah lain di luar Indonesia yang menerima penghargaan serupa antara lain Bandar Khamir dan Varzaneh, Republik Islam Iran, Al Chibayish (Irak), Izumi dan Niigata (Jepang), Ifran (Maroko), Gochang, Seocheon, dan Seogwipo (Korea), Kigali (Afrika Selatan), Valencia (Spanyol), Distrik Sri Songkhram (Thailand), dan Sackville (Kanada).

Penghargaan ini didapatkan Kota Surabaya karena dinilai sudah melakukan konservasi dan pemanfaatan lahan basah. Selain itu, dalam penataan lahan basah di Kota Surabaya, pemerintah kota tidak bergerak sendiri, warga sekitar dilibatkan dalam penataan, pemanfaatan, dan pengelolaannya. Bahkan, di masa depan, kawasan lahan basah di kota dengan penduduk 3,1 juta jiwa ini akan ditambah. Pemanfaatan lahan basah yang dilakukan selama ini sangat banyak memberikan dampak yang positif bagi kota seluas 326 km^2 ini. Semakin banyak lahan basah yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, secara tidak langsung ruang terbuka hijau (RTH) bertambah dan berfungsi sebagai pengendali banjir. Termasuk dengan sungai Kalimas sepanjang 15 km, yang saat ini juga sudah menjadi obyek wisata sungai.

Dalam konteks penataan kota, penataan sepanjang sungai Kalimas dengan membangun taman dan area-area publik juga akan menjadi magnet baru bagi warga yang sekadar bersepeda atau tamasya ke kawasan ini. Selain sungai Kalimas, pemkot juga terus menggiatkan penanaman pohon *mangrove* dan cemara udang di sepanjang pesisir timur dan utara. Kawasan pesisir bukan hanya dimanfaatkan sebagai hutan *mangrove* saja, melainkan juga dijadikan kawasan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Langkah ini bagian dari upaya Surabaya melestarikan hutan *mangrove*.

Champion dalam Pembangunan Komunitas Hijau

Surabaya menjadi salah satu kota inspirasi yang menjadi contoh dalam Pedoman Internasional Tentang Perencanaan Kota dan Wilayah. Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia dengan lebih dari 3,3 juta penduduk. Kota ini memiliki peran ekonomi sebagai pusat industri nasional dan lokal yang besar, memproduksi barang untuk pasar Jawa dan Indonesia. Selain itu, Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota pelabuhan yang mendukung perdagangan serta layanan. Sebagai hasil dari perkembangannya yang pesat, wajah perkotaan Surabaya sekarang terdiri dari gedung-gedung perkantoran sedang, pasar modern, dan hotel-hotel yang berdiri di sepanjang jalan-jalan hijau. Namun, kawasan permukiman berpenghasilan rendah, yang disebut "*kampong*," memiliki nilai-nilai sosial dan budaya asli yang penting untuk dijaga dalam kota ini.

Pada tahun 2005, Surabaya memulai program unggulan yang disebut *Green Kampong*, yang merupakan bagian dari strategi perencanaan dan pembangunan kota yang inovatif. Program ini telah menjadi strategi kota yang komprehensif, dengan pengambilan keputusan perencanaan yang terdesentralisasi, mendorong demokrasi lokal, perencanaan partisipatif, dan pengelolaan lingkungan.

Pada tingkat kota, Surabaya meluncurkan "Program Ruang Taman Warga", yang bekerja sama dengan komunitas kampung untuk memindahkan mereka dari tepi sungai yang rusak dan mengubahnya menjadi taman komunitas hijau yang populer. Setiap taman didukung oleh perusahaan swasta lokal yang menjadi sponsor pembangunan berkelanjutan Surabaya. Di tingkat lingkungan, Surabaya mendorong komunitas untuk mengadopsi pendekatan penghijauan kampung tanpa subsidi, dengan menghasilkan pendapatan melalui usaha kecil berbasis lingkungan mereka sendiri. Program ini melibatkan perusahaan-perusahaan lokal dan media dalam mengadakan kompetisi dan memberikan penghargaan untuk inovasi dan praktik terbaik di tingkat lokal.

Surabaya juga telah memanfaatkan platform e-pemerintahan kolaboratif untuk mencatat program pengurangan kemiskinan nasional, memungkinkan identifikasi kesenjangan dalam penyediaan layanan. Dengan kebijakan perencanaan teritorial yang strategis, kota yang lebih padat dan ramah lingkungan telah muncul, dengan kawasan-kawasan hijau menjadi fokus dalam proposal pengembangan perkotaan. Program *Green Kampong* telah memberikan sistem pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat, yang menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi penyakit pada lebih dari 100.000 rumah tangga yang berpartisipasi.

Melalui *platform* e-pemerintahan untuk penganggaran berbasis peta, Surabaya telah memperkuat kesatuan sosial dan partisipasi, serta memungkinkan distribusi sumber daya yang lebih adil. Media lokal dan pemangku kunci sektor swasta telah didorong untuk mendukung inisiatif yang didukung oleh komunitas dalam menciptakan ruang publik yang hijau dan aman. Perlu dicatat bahwa komunitas perkotaan yang semakin aktif dan terinformasi telah memengaruhi pengambilan keputusan yang mendukung visi jangka

panjang tentang urbanisasi yang berkelanjutan untuk Surabaya dan wilayah sekitarnya.

Lee Kuan Yew *World City Prize*

Nama Surabaya sempat menjadi buah bibir warga dunia setelah tagar #SurabayaMendunia jadi *trending topic* di media sosial, awal Juli 2018 lalu. Pemicunya, penghargaan Lee Kuan Yew *World City Prize* kategori *Special Mention Urban Development Authority* (URA) dan *Center Liveable Cities* (CLC) di Singapura yang sukses diboyong oleh Kota Surabaya.

Penghargaan itu diterima berkat Program Peningkatan Kampung Unggulan dan Pahlawan Ekonomi yang ada di Surabaya. Kota lain yang juga menerima kategori special mention di antaranya adalah Hamburg (Jerman), Kazan (Rusia), dan Tokyo (Jepang). Munculnya Surabaya dalam jajaran tersebut membuktikan bahwa Kota Pahlawan ini layak disandingkan dengan kota-kota besar di dunia. Mencuatnya nama Surabaya ke dunia global, senada dengan berbagai kemajuan pada banyak bidang. Lini transportasi di Surabaya, misalnya, kini terdapat pelabuhan internasional. Beberapa kapal mewah menjadikan Tanjung Perak sebagai tempat berlabuh. Penilaian dunia internasional tersebut juga dalam bidang pemerintahan yang dikelola dengan baik. Tempat wisata di Kota Surabaya juga sukses dikelola pemerintah kota dengan tata kelola profesional. Seperti adanya panduan bagi wisatawan mancanegara di beberapa tempat wisata historis di Surabaya.

Program Perbaikan Kampung awalnya dimulai pada tahun 1920 ketika tindakan diambil untuk mencegah penyebaran penyakit dari kampung-kampung ke distrik permukiman tetangga yang lebih kaya. Program ekstensif di Surabaya ini dimulai pada tahun 1969 dan saat ini telah meningkatkan kelayakan 70% kampung di kota tersebut. Meskipun program peningkatan seperti itu terjadi di seluruh Indonesia, tetapi program di Surabaya belum terbiasa dengan konsep kekuatan kemitraan yang telah dikembangkan antara masyarakat berpenghasilan rendah bersama dengan pemerintah kota. Oleh sebab itu, pelaksanaan konsep tersebut, perwujudannya telah dibantu melalui kerja sama dengan Institut Teknologi setempat di bawah arahan Profesor Johan Silas.

Gambar 5.7 Kampung Masupati Surabaya
sumber: https://m.tribunnews.com/travel/2016/05/25/yuk-wisata-sejarah-di-kampung-maspati-surabaya-kampung-lawas-saksi-perjuangan-melawan-penjajah?page=all

Program Perbaikan Kampung Surabaya adalah program lingkungan yang komprehensif yang tidak hanya menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik bagi keluarga berpenghasilan rendah, tetapi juga dengan melibatkan masyarakat setempat dalam prosesnya, memastikan keberlanjutan jangka panjang dan peningkatan berkelanjutan.

Perbaikan infrastruktur fisik dasar kampung merupakan elemen kunci dari program ini. Jalur dan jalan baru disediakan, dengan saluran drainase di pinggirnya. Pembangunan jalur sangat penting, terhitung sepertiga atau lebih dari total pengeluaran pembangunan. Jalur untuk kendaraan bermotor dibuat seminimal mungkin, hanya dengan anggaran sebesar 18% dari pengeluaran. Akses yang sangat terbatas untuk mobil berarti bahwa kampung-kampung yang lebih baik tidak diserbu oleh keluarga berpenghasilan menengah dan karena itu tetap terjangkau oleh keluarga berpenghasilan rendah. Survei terbaru yang dilakukan di kampung-kampung menunjukkan bahwa 90% penduduk kampung tinggal di sana selama 5 tahun atau lebih.

Drainase samping disediakan di sepanjang jalan setapak untuk pembuangan air limbah dan untuk limpasan air hujan yang cepat. Setiap rumah memiliki tangki septik sendiri yang dikosongkan

secara teratur. Toilet umum dan fasilitas cuci juga disediakan. Jaringan pasokan air dengan pipa tegak disediakan di seluruh kampung, dengan masing-masing pipa tegak melayani sejumlah 25–35 keluarga. Untuk air minum, persediaan dibeli dari pedagang kaki lima setiap hari. Sumur digunakan untuk menyediakan air untuk kebutuhan non-minum dan kualitas air ini terus ditingkatkan. Selama tahun 1984-1990 di bawah Program Perbaikan Kampung Perkotaan di Surabaya, 70 km jalan akses dan 150 km jalan setapak diperbaiki, 93 km saluran air dan gorong-gorong dibangun dan 56.000 m pipa air dipasang. Selain itu, 86 fasilitas pemandian umum, cuci dan kakus dibangun. Perbaikan tempat tinggal itu sendiri dilakukan oleh warga dan bukan bagian dari program.

Kesan pertama yang biasanya akan langsung ditangkap oleh pengunjung ketika datang ke suatu kampung, adalah sisi kebersihan dan penghijauannya. Pada kampung-kampung *improvement* di Surabaya, pepohonan, semak, tanaman berbunga berjejer di jalan dan menghiasi bagian depan rumah. Adanya berbagai tanaman peliharaan, membantu menciptakan iklim mikro baru di kampung tersebut, yaitu mendinginkan iklim kering yang panas di permukiman padat penduduk ini. Tanaman pun juga efektif dalam menyaring polutan gas dari udara.

Masyarakat pun juga menyediakan fasilitas kampung lainnya, contohnya rambu lalu lintas, lampu jalan, dan tempat sampah. Khusus, tempat sampah, masyarakat memanfaatkan ban mobil bekas yang dicat kuning dan biru untuk memisahkan sampah daur ulang dan non daur ulang. Keterlibatan masyarakat dalam Program Perbaikan Kampung terjadi sejak tahap paling awal. Survei awal tentang kondisi fisik di kampung-kampung dilakukan dengan berkolaborasi bersama warga. Selain itu diadakan pula diskusi terkait kebutuhan dasar dan masalah masyarakat, untuk merumuskan dasar dan rencana perbaikan di masa mendatang.

Setelah survei dan diskusi selesai, maka selanjutnya adalah pembuatan proposal pengembangan kampung. Pada tahap ini juga terdapat diskusi kembali dengan masyarakat. Selanjutnya, implementasi program dapat dimulai, hanya setelah tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait berkolaborasi dalam perbaikan lingkungan hidup tersebut. Masyarakat didorong untuk menanam pohon, memperbaiki sendiri lingkungan beserta fasilitasnya, *on-plot*, dan bertanggung

jawab atas pemeliharaan kampung yang sedang berlangsung. Masyarakat dan pemerintah daerah bekerja sama sebagai mitra yang setara dalam pembangunan, memberikan waktu, tenaga dan dana untuk proyek tersebut.

Rata-rata, pada setiap Rp1.000.000 yang diinvestasikan oleh pemerintah dalam KIP, terdapat kontribusi masyarakat sebesar Rp500.000. Ini belum termasuk usaha masyarakat untuk penanaman, penerangan jalan, pintu masuk, tempat sampah, dan lain-lain. Penghuni akan menggunakan dan merawat fasilitas serta layanan, jika mereka terlibat dalam pembuatan dan pengoperasian.

3. Penghargaan Kota Berkelanjutan Lingkungan ASEAN (ESC)

Tiga kota di Indonesia menerima Penghargaan Kota Berkelanjutan Lingkungan ASEAN (ESC) ke-5 dan Sertifikat Pengakuan ke-4 atas upaya pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan mereka. Kota-kota ini dianggap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur menerima penghargaan untuk kategori ESC, Kota Bontang di Kalimantan Timur meraih penghargaan untuk kategori kota kecil dengan tanah bersih, sedangkan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur mengantongi penghargaan untuk kota besar dengan air bersih. Penghargaan ini diharapkan menjadi adalah salah satu pendekatan yang efektif untuk mendorong pemerintah di Asia Tenggara untuk membangun lebih banyak kota hijau. Dalam hal ini, Indonesia juga memiliki program serupa bertajuk Adipura *Award* yang diberikan kepada kota-kota yang tidak hanya bersih dan hijau, tetapi juga melakukan upaya yang signifikan untuk mengelola sampah domestik dan mempromosikan ekonomi sirkular.

Penghargaan Adipura dimulai pada tahun 1986 dan diberikan setiap tahun hingga tahun 1998. Kemudian, penghargaan tersebut dilanjutkan kembali pada tahun 2002 hingga saat ini. Tiga kota penerima penghargaan ASEAN ini termasuk yang pernah meraih penghargaan Adipura. ASEAN ESC *Award and Certificate of Recognition* merupakan salah satu program kerja sama organisasi regional yang dikoordinasikan oleh ASEAN *Working Group on Environmentally Sustainable Cities*, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan kota-kota berkelanjutan di kawasan terkait.

Pembangunan Perkotaan Melalui Peran Organisasi Akar Rumput

1. Perencanaan Kota dan Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif dalam perencanaan kota sangat penting dalam menciptakan kota yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Setiap entitas yang ada di dalam masyarakat menjadi penting dan memiliki peran serta tanggung jawab yang berbeda-beda baik itu secara perspektif, suara, maupun kekuatan dari setiap komunitas. Perbedaan yang ada dalam masyarakat bukan dipandang menjadi hambatan dalam membangun kota, tetapi hal ini justru menjadi kekuatan untuk membangun kota yang utuh.

Berbagai organisasi non-pemerintahan telah banyak melakukan upaya dan *best practice* dalam mendorong perencanaan kota dengan pendekatan partisipatif, salah satunya Kota Kita. Kota Kita merupakan organisasi nirlaba yang berada di Kota Surakarta. Organisasi ini bertujuan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat terutama masyarakat yang termarginalkan atau terpinggirkan terkait pembangunan perkotaan. Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode partisipatori, yang mana keseluruhan suara dari masyarakat adalah hal penting untuk diperhatikan guna membangun kota yang dapat merangkul seluruh masyarakat. Ditambah lagi, Kota Kita tidak hanya terkonsentrasi pada satu atau beberapa isu saja. Pada umumnya, isu perkotaan yang cukup mendapat perhatian di Kota Kita terkait dengan beberapa hal, yaitu:

a. Tata kelola pemerintahan kota, pendekatan secara partisipatif didorong untuk menciptakan tata kota dan kebijakan perkotaan dengan memberdayakan masyarakat. Selain itu, Kota Kita juga mengadvokasi berbagai prioritas proyek perkotaan di tingkat lingkungan, kabupaten, kota, dan lingkungan.

b. Inklusivitas perkotaan, mengutamakan konsep inklusivitas dalam berbagai perancangan, perencanaan, dan implementasi di perkotaan. Hal ini harus dipastikan di mana semua orang dapat terlayani tanpa terkecuali tanpa harus melihat usia, identitas, gender, kemampuan dan karakteristik lainnya.

c. Ketahanan perkotaan, pendekatan partisipatif yang dilakukan juga diterapkan sebagai bentuk strategi adaptasi dan mitigasi untuk merespons bencana. Selain dalam menghadapi bencana alam yang berpotensi di wilayahnya saja, masyarakat juga harus mulai sadar akan bahaya krisis iklim yang terjadi dan berdampak besar bagi perkotaan. Tentu saja hal ini memiliki keterkaitan yang erat dalam membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan tantangan lainnya.

Ruang lingkup kerja Kota Kita meliputi penelitian, desain bersama, pengumpulan data partisipatif, perencanaan strategis dan visi, pendidikan kewarganegaraan dan pemberdayaan, serta kampanye peningkatan kesadaran. Melalui wadah ini, Kota Kita meneliti isu-isu terkait perkotaan sehingga menghasilkan wawasan yang kaya dalam konteks lokal serta analisis berbasis data. Dengan demikian, maka program atau kegiatan yang akan diadakan dapat diselaraskan oleh seluruh pihak pemangku kepentingan sehingga aktif dalam mengambil kebijakan dan langkah praktis. Kolaborasi ini menggandeng seluruh lapisan masyarakat dengan pemerintah daerah untuk merancang lingkungan hidup perkotaan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat.

Keberadaan Kota Kita menjadi ruang tersendiri bagi pemerintah daerah untuk berdialog, diskusi, terhubung, dan berkumpul dengan masyarakat. Tentu saja pendekatan seperti ini menjadi pertukaran informasi yang lebih efektif sehingga dalam melakukan identifikasi, analisis, dan mengatasi permasalahan perkotaan dapat tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh warga kotanya.

Salah satu program yang telah Kota Kita lakukan adalah pembangunan Taman Rukun Mangkubumen di Kota Surakarta. Pembangunan taman ini merupakan hasil urun rembug dengan warga rusunawa Mangkubumen bersama para pemangku kepentingan lainnya, contohnya Ayo Ke Taman, Urban Institute, serta mendapat dukungan dari UN Habitat.

Adapun ide yang dimunculkan adalah pembangunan fasilitas berupa ruang publik berskala lingkungan di kawasan permukiman. Dalam proses penjaringan suara dari masyarakat dilakukan serangkaian lokakarya, konsultasi publik, dan desain ruang publik. Perayaan pembukaan Taman Rukun Mangkubumen dilakukan

selama dua hari dengan aktivitas luar ruangan (*outdoor*) yang dihadirkan untuk memeriahkan acara, contohnya *live music*, kegiatan menggambar, pertandingan sepak bola, serta diskusi antara warga dengan pemerintah Kota Surakarta. Keberadaan taman ini di masa depan diharapkan dapat menjadi pusat interaksi sosial dan pembangunan lingkungan sekitar kawasan.

Kota Kita juga telah banyak membantu proses pembangunan partisipatif di Indonesia, salah satunya contohnya di Kota Banjarmasin. Kota Kita bersama organisasi lokal yang ada di sana yaitu Kaki Kota, dengan menggandeng UNESCO dan pemerintah kota telah memprakarsai proyek pilot untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan perencanaan inklusif dan membangun kapasitas masyarakat. Beberapa keluaran dari kegiatan yang dilakukan antara lain mengembangkan lingkungan yang inklusif, zona sekolah yang aman dan inklusif, mobilitas inklusif sebagai layanan publik, dan kawasan pejalan kaki di samping sungai yang dapat diakses oleh masyarakat.

Selain itu, Kota Kita juga aktif mengadakan *Urban Social Forum* yang diadakan setiap tahun dengan tujuan untuk memberikan ruang bertukar ide dan kolaborasi di antara sesama organisasi yang juga peduli terhadap permasalahan perkotaan. Forum ini membawa tema besar yaitu "*is another city possible?*".

2. Riset dan Advokasi untuk Kota Berkelanjutan

Peran organisasi non-pemerintahan atau akar rumput bukan saja dalam ranah implementasi dan proyek, namun juga dalam bentuk riset dan advosi mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Salah satu instansi yang secara aktif melakukan peran ini yaitu Rujak Center for Urban Studies (RCUS). RCUS merupakan sebuah *think tank* yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2010 untuk membantu proses transisi menuju era ekologis. RCUS bekerja sama dengan masyarakat untuk menghasilkan pengetahuan dan praktik inovatif dalam membentuk kota dan wilayah yang berkelanjutan.

Dengan keberlanjutan, RCUS tidak hanya berarti bertahan dari perubahan iklim dan bencana ekologi lainnya, tetapi juga menyelesaikan permasalahan perkotaan lainnya yang sudah ada sebelum kesadaran kita mengenai permasalahan ekologi muncul. Meskipun demikian, RCUS yakin bahwa kesadaran

mengenai ekologi dan produksi pengetahuan baru yang dihasilkannya telah menciptakan perspektif dan peluang baru untuk mengkonseptualisasikan tindakan-tindakan kita secara berbeda khususnya dalam menyelesaikan masalah-masalah perkotaan lainnya yang belum terselesaikan contohnya kemiskinan, keadilan, kesetaraan, pluralisme, inklusivitas, dan lain-lain.

Memang benar, hal tersebut memungkinkan adanya cara baru dalam membentuk kota. Namun, disadari juga bahwa diperlukan lebih banyak penelitian dan pengetahuan baru untuk mengubah banyak hal.

RCUS fokus pada kota sebagai wilayah kemanusiaan yang menggabungkan sebagian besar permasalahan kemanusiaan masa kini dan masa depan. Pada tahun 2007, dunia telah melampaui angka urbanisasi sebesar 50% yang tidak dapat diubah, hal ini sebagian besar disebabkan oleh angka tertinggi yang terjadi di kota-kota di negara berkembang. RCUS juga memandang kota sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari wilayah yang memiliki tingkat urbanisasi yang berbeda-beda. RCUS menjangkau seluruh Asia Tenggara dan sekitarnya, dan berbasis di Indonesia.

RCUS dibentuk oleh pengalaman dan latar belakang berbeda dari para pendirinya yang telah melakukan banyak penelitian, peningkatan kapasitas, dan advokasi kebijakan selama lebih dari tiga dekade. Mereka memiliki pengalaman kerja profesional di bidang tata pemerintahan yang baik, seni dan budaya, warisan budaya, strategi pembangunan, serta rekonstruksi pascabencana.

Ketika kita belajar sambil melakukan, kita menyadari bahwa perubahan memerlukan langkah-langkah yang dirancang, skala dan kolaborasi yang lebih besar, komitmen jangka panjang, ketekunan, dan karenanya pengorganisasian yang serius. Kami ingin menggabungkan penelitian, peningkatan kapasitas, dan advokasi kebijakan agar upaya kami lebih efektif.

3. Pengelolaan Sampah Perkotaan, Pendekatan Hulu ke Hilir

Dalam tataran implementasi, pewujudan Pembangunan perkotaan berkelanjutan yang sesuai dengan asas dan prinisp Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Baru Perkotaan telah dilakukan oleh banyak instansi, salah satunya *Waste 4 Change* yang fokus dibindang pengelolaan persampahan. *Waste 4 Change*

didirikan oleh seorang aktivis lingkungan yang akrab dipanggil Sano. Sampah adalah salah satu isu yang sangat menarik perhatiannya hingga ia berkuliah di jurusan Teknik Lingkungan ITB. Selama ini masyarakat memiliki pandangan yang salah tentang sampah bahwa sampah dinilai sebagai sesuatu yang tidak berguna dan harus dibuang. Padahal, jika dikelola dengan benar, maka sampah bisa menghasilkan uang hingga triliunan rupiah.

Greeneration Foundation pun lahir pada tahun 2006 berkat keinginan Sano dalam mewujudkan implementasi produksi serta konsumsi berkelanjutan. Organisasi ini membawahi *Waste 4 Change* yang didirikan oleh Sano pada tahun 2014. *Waste 4 Change* adalah kewirausahaan sosial yang memberikan solusi terhadap permasalahan sampah dari hulu ke hilir, dengan prinsip perubahan perilaku dan pengelolaan yang bertanggung jawab dengan misi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab atas sampahnya. Metode *zero waste to landfill* menjadi ciri khas dari perusahaan yang berdomisili di Bekasi, Jawa Barat ini.

Empat usaha inti *Waste 4 Change* antara lain *consult, campaign, collect*, dan *create*. *Consult* merupakan kegiatan riset dan studi yang berhubungan dengan masalah persampahan. *Campaign* merupakan kegiatan dari *capacity building*, edukasi dan pendampingan. *Collect* merupakan kegiatan dari pengangkutan dan pengolahan sampah harian untuk nol sampah ke TPA. Sedangkan *create* merupakan kegiatan mendaur ulang sampah dan penerapan program *Extended Producer Responsibility* (EPR).

Kesuksesan *Waste 4 Change* dalam pengelolaan limbah membuat usaha ini berhasil beroperasi pada 9 kota. Dengan menggabungkan misi sosial dan teknologi, *Waste 4 Change* berkembang dari akar *start-up* dan menangani limbah melalui solusi pengelolaan limbah sirkular. *Waste 4 Change* juga berkolaborasi dengan banyak pihak, mulai dari pemerintah sampai dengan pihak swasta dalam mengelola sampah. Sebagai contoh, IKEA, produsen furnitur Swedia, yang dikelola limbahnya oleh *Waste 4 Change* selama tiga tahun ini. Pada awal tahun ini, *Waste 4 Change* juga digandeng oleh Pemda Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi masalah sampah di 100 titik sungai wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang bersama *Sungai Watch*.

Waste 4 Change mengoptimalkan pemilahan sampah menjadi kategori mendetail, contohnya bukan hanya sekedar plastik, logam, kertas, organik, dan kaca, tetapi juga memisahkan jenis plastik sesuai jenisnya. Kemudian sampah-sampah tersebut akan menjadi dua bagian besar, yaitu sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang sulit didaur ulang (sampah residu). Sampah dikategorikan sebagai sampah residu bukan hanya karena materialnya (contohnya *styrofoam* yang saat ini masih sulit didaur ulang), tetapi juga karena perlakuan terhadap sampah (contohnya tisu bekas pakai dan kertas basah). Oleh karena itu, *Waste 4 Change* juga menganjurkan klien untuk melakukan 2 hal, yaitu melakukan pemilahan sampah di sumber menjadi setidaknya organik, anorganik kertas, dan anorganik non-kertas (contohnya logam, kaca, dan plastik). Selain itu, mereka juga memberikan edukasi pengelolaan sampah yang baik agar bisa menjaga kondisi sampah tetap baik untuk didaur ulang, misalnya dengan mengurangi penggunaan tisu basah dan menghemat penggunaan kertas.

4. Percepatan Capaian 100-0-100

Dalam merespons secara konkret berbagai tantangan yang semakin kompleks di bidang permukiman dan perkotaan Indonesia, sejumlah tokoh penggiat permukiman dan perkotaan, secara resmi sepakat membentuk lembaga swadaya bernama Kemitraan Habitat. Kemitraan Habitat terdiri atas multipemangku kepentingan, meliputi unsur masyarakat sipil, dunia usaha, akademisi, pakar dan praktisi, serta pemerintah daerah dan pusat.

Kemitraan Habitat memiliki fokus membantu pemerintah mewujudkan target keluaran 100-0-100 (100% akses aman air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi). Peran Kemitraan Habitat sebagai institusi independen untuk mendukung target pemerintah tersebut dilakukan dengan mendampingi, menjembatani, mengembangkan akses, dan mendorong inovasi dalam penyelenggaraan permukiman dan perkotaan yang sedang dilaksanakan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, termasuk dunia usaha.

Kemitraan Habitat memiliki lima lingkup kerja. Pertama, memilih proyek pilot yang dapat segera dilaksanakan, sebagai *quick-win* untuk menunjukkan kiprah Kemitraan Habitat kepada seluruh

pemangku kepentingan. Kedua, membangun jaringan dengan kepala daerah dan meningkatkan kualitas hubungan antarkepala daerah, serta jaringan dengan tokoh-tokoh lokal yang memiliki komitmen untuk sosialisasi program Habitat. Ketiga, melakukan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) dengan cara memberikan kesempatan pembelajaran antarkota, karena lebih bermanfaat sesuai kondisi daerah dan lebih murah, termasuk pendampingan daerah dalam implementasi kebijakan. Keempat, melakukan sosialisasi dan advokasi melalui pengembangan kerja sama (kemitraan) dengan beberapa universitas di Indonesia yang memiliki fokus atau spesialisasi tertentu (contohnya bidang *real estate, urban management,* dan permukiman). Kelima, sebagai *counterpart* pemerintah, melakukan analisis kebijakan dan memberikan masukan untuk kebijakan pembangunan yang lebih sinergis dengan memanfaatkan potensi seluruh pemangku kepentingan.

Terkait dengan program kerja jangka pendek, Kemitraan Habitat menetapkan lima isu program berbasis *pro-poor* yang akan disasar menjadi prakarsa Kemitraan Habitat, yaitu isu Pro-Rakyat, Kemaritiman, Kota Pusaka, *Green Issues*, dan *Blue Issues*. Lima isu program tersebut disebut sebagai pemancing kota-kota yang identik untuk mendukung program pemerintah menuju permukiman dan perkotaan Indonesia yang berkelanjutan.

Beberapa pendiri atau teman serikat Kemitraan Habitat, meliputi para penggiat, akademisi, praktisi, masyarakat sipil dan dunia usaha, antara lain Djoko Kirmanto, Erna Witoelar, Yayat Supriyatna, Nirwono Joga, Wicaksono Sarosa, Tommy Firman, Teguh Satria, Dhony Rahajoe, Enny Herawaty, Ruchyat Deni Djakapermana, Danny Sutjiono, Susmono, dan dari unsur politisi seperti Budi Yuwono anggota Komisi V DPR RI periode 2014–2019, dan Hetifah Sjaifudian mantan anggota Komisi V DPR RI periode 2009–2014. Kemitraan Habitat bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Seknas Habitat, dan Ruang Waktu juga Menyusun Buku Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan (*New Urban Agenda*/ NUA) sebagai tindak lanjut dari Agenda Baru Perkotaan yang terdiri atas 8 seri buku.

Transformasi Kota Masa Kini

Perkotaan merupakan media interaksi dan akulturasi bangsa dengan dunia global. Perkotaan di Indonesia dihadapkan pada tantangan baru yang menarik sekaligus menghadirkan peluang. Peluang tersebut tetap ada meskipun masih banyak masalah perkotaan terkait kendala fisik ekonomi, sosial, dan budaya; kemiskinan; kerentanan; ketimpangan pendapatan; isu konflik tata ruang; pencemaran lingkungan; bencana alam; serta perubahan iklim. Berhubungan dengan hal itu, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurai permasalahan perkotaan sekaligus menangkap peluangnya. Upaya itu dilakukan dengan mengawal dan mengarahkan perkotaan di Indonesia untuk bertransformasi menjadi kota berkelanjutan, contohnya melalui pengembangan sistem perencanaan dan pengelolaan perkotaan, serta penguatan dukungan sumber daya manusia. Secara demografi, transformasi perkotaan akan dihadapkan pada semakin tingginya pergerakan dan migrasi antarnegara (*borderless society*) serta semakin panjangnya angka harapan hidup manusia. Hal ini berimplikasi pada perubahan pola produksi dan konsumsi umat manusia yang diprediksikan akan berjumlah 10 miliar jiwa pada tahun 2050 mendatang. Hal ini juga secara tidak langsung berdampak pada kecukupan kebutuhan hidup dengan jumlah permintaan yang semakin besar.

Dalam hal urbanisasi, PBB memperkirakan sekitar 65-70% penduduk dunia akan tinggal di perkotaan dengan 95% pertumbuhannya terjadi pada negara-negara yang masuk dalam kategori *emerging economies*, contohnya Indonesia. Kota-kota kecil akan terus membesar menjadi kota menengah, kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota besar menjadi kota metropolitan. Pertambahan penduduk tentunya akan semakin meningkatkan proses urbanisasi dan perkembangan kota. Tantangan penting terkait dengan pertambahan penduduk dan perkembangan perkotaan di Indonesia adalah keterbatasan lahan perkotaan, khususnya di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Pertambahan penduduk dan perkembangan kota menuntut perluasan lahan perkotaan. Selain itu, isu lain yang berkaitan dengan lahan adalah tidak dapat diakses dan dibangunnya suatu wilayah/lahan. Pada lahan tersebut sebenarnya terdapat ruang yang layak untuk dikembangkan menjadi fungsi-fungsi kota, misalnya sebagai perumahan. Namun, biasanya terdapat kendala disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu telah menjadi kepemilikan pihak lain atau menjadi objek spekulasi, harganya begitu tinggi sehingga

menghambat pemanfaatan lahan tersebut, dan kasus hukum atau terdapat sengketa–yang menyebabkan lahan menjadi terlantar dan menjadi lahan yang *idle* di tengah kota. Implikasi atas keterbatasan akses lahan perkotaan ini menghambat pembangunan perkotaan yang seharusnya dapat dioptimalkan untuk kepentingan umum. Tantangan lain dalam transformasi perkotaan saat ini adalah revolusi industri ke depan yang akan memasuki era industri 4.0. Pada fase ini, *internet of things* atau otomatisasi pada penerapan teknologi yang bertumpu pada internet dan pertukaran data akan menjadi tren untuk proses yang lebih efisien dalam manufaktur.

Saat ini, Indonesia juga sedang memasuki era disrupsi dan inovasi. Era ini ditandai sebagai periode yang penuh dengan perubahan dinamis dan tidak terduga. Era disruptif ini, menuntut perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang selalu siap dengan berbagai kemungkinan perubahan serta tekanan. Pengalaman pada pandemi Covid-19 lalu mengajarkan bahwa kota-kota tidak cukup siap dan tangguh menghadapi tekanan. Perencanaan perkotaan harus mencari pendekatan-pendekatan baru agar dapat beradaptasi pada era disruptif saat ini. Ekspansi lingkungan perkotaan dapat mengancam lahan-lahan lindung dan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Pengembangan kota baru, kawasan industri baru, pariwisata, perkebunan, dan fungsi-fungsi lain dalam pembangunan regional dapat mempercepat kerusakan lingkungan, contohnya semakin hilangnya hutan, kawasan lindung, dan keanekaragaman hayati. Diperlukan model transformasi perkotaan yang cermat dan ramah lingkungan untuk mengurangi dampak negatif ekspansi perkembangan kota pada kawasan lindung, pesisir, dan pulau-pulau kecil.Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim yang lebih tinggi. Garis pantai Indonesia merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pulau-pulau yang mana lokasi kota-kota pada umumnya berada di wilayah pesisir begitu juga dengan kota yang berada di pulau-pulau kecil. Hal ini berpotensi besar terpapar berbagai bencana seperti banjir akibat kenaikan muka air laut, badai, bahkan terancam akan tenggelam. Sebagai pusat aktivitas dan pertumbuhan penduduk, kota dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan iklim. Kota tangguh perubahan iklim (*climate-resilient city*) merujuk pada kondisi sistem sebuah kota yang memiliki kapasitas untuk bertahan, pulih, dan mengatur kembali sistem kotanya, baik secara sosial, ekonomi, maupun infrastruktur sebagai respons terhadap tekanan dan krisis yang terjadi akibat perubahan iklim.

Masa Depan Perkotaan Indonesia

06

Perkotaan Indonesia telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Berbagai pembahasan dan komitmen terkait pembangunan perkotaan khususnya Habitat dan Agenda Baru Perkotaan berperan penting dalam menentukan arah dan mendorong pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Peran Indonesia dalam berbagai kegiatan Habitat pun menjadi salah satu Indikator keseriusan pemerintah dalam membangun perkotaan yang lebih baik di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa perkotaan Indonesia di masa mendatang memiliki harapan untuk menjadi tempat yang nyaman, layak, dan memberikan kesejahteraan bagi penduduknya.

Gambar 6.1 Ilustrasi desain IKN Nusantara
sumber:https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magnet_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_cityekonomi_baru_dan_smart_city

Dalam bab ini, kita akan membahas berbagai komitmen dan kebijakan nasional, tren pembangunan perkotaan di Indonesia, berbagai capaian pembangunan perkotaan yang diakui secara internasional, rencana pembangunan ibu kota negara, hingga berbagai pernyataan-pernyataan harapan dari berbagai pemangku terkait pembangunan perkotaan.

Komitmen Pembangunan Perkotaan di Indonesia

Keseriusan pembangunan perkotaan dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu regulasi kebijakan, perencanaan yang matang, program yang baik, implementasi yang tepat sasaran dan evaluasi yang membangun.

Secara nasional, pemerintah mulai memberikan perhatian kepada pembangunan perkotaan. Pertumbuhan populasi penduduk perkotaan yang mencapai 82% pada tahun 2045, menjadi faktor pentingnya perkotaan dalam pembangunan nasional. Munculnya berbagai permasalahan perkotaan yang semakin kompleks membutuhkan inovasi dalam penanganannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan konsep dan perencanaan pengelolaan yang sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Tujuan 11, serta berdaya saing dan berbasis teknologi. Sejauh ini, pemerintah telah melakukan beberapa hal terkait perkotaan antara lain penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan, Kebijakan Perkotaan Nasional, dan Penyusunan Strategi Pembangunan Perkotaan melalui *National Urban Development Project*.

1. **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan**

   PP No. 59 Tahun 2022 lahir dari kekosongan dalam regulasi perkotaan. Terdapat beberapa isu perkotaan yang menjadi latar belakang munculnya regulasi ini, yaitu kurangnya keterpaduan layanan perkotaan, tahapan perbaikan layanan yang kurang terintegrasi, pembangunan yang hanya fokus pada fisik keruangan, pencatatan kepemilikan dan pemanfaatan aset yang kurang baik, ketentuan kota cerdas yang belum memiliki landasan hukum, pelayanan yang dirasakan warga perkotaan kurang terukur, kawasan perkotaan baru yang muncul tidak sesuai, dan kelembagaan kawasan perkotaan yang kurang efektif.

   PP ini terdiri atas beberapa bagian yaitu ketentuan umum, bentuk dan klasifikasi perkotaan, penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas, serta pendanaan. Dalam Bab II, PP ini mengatur tentang klasifikasi perkotaan yang terdiri atas tiga klasifikasi yaitu menurut besaran jumlah penduduk yang terbagi menjadi kecil, sedang, besar, metropolitan, dan megapolitan; kondisi geografis yang terdiri dari dataran, pulau-pulau kecil,

dan pesisir; serta menurut fungsi dan peran yang terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah, dan Pusat Kegiatan Lokal. Sedangkan pada Bab III, PP ini mengatur terkait penyelenggaraan perkotaan mulai dari:

a. Perencanaan, yang dilakukan melalui penyusunan RP2P yang merupakan bagian dari RPJMD dan terintegrasi dengan RTRW.

b. Pelaksanaan, yang melalui penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan perkotaan berpedoman pada RP2P untuk memenuhi pelayanan perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP).

c. Pengendalian pelaksanaan, yang bertujuan memantau efektivitas dan efisiensi pemenuhan SPP.

Selanjutnya, Bab IV mengatur penyelenggaraan pengelolaan perkotaan dengan pendekatan kota cerdas yang terdiri atas 6 pilar kota cerdas, yaitu tata kelola birokrasi, ekonomi, kehidupan bermasyarakat di kota, masyarakat, lingkungan, dan mobilitas. Keenam pilar kota cerdas ini secara lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan Bab terakhir pada PP ini mengatur terkait pendanaan penyelenggaraan perkotaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain dengan adanya PP perkotaan, Indonesia juga telah berupa mempercepat pembangunan perkotaan melalui desentralisasi. Desentralisasi di Indonesia dimulai pada tahun 1999 dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama yang mengatur mengenai desentralisasi di Indonesia.

Dasar hukum yang mendasari desentralisasi di Indonesia adalah:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pasal 18B-18I dalam UUD 1945 mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi. Pasal-pasal ini memberikan dasar konstitusi untuk pelaksanaan desentralisasi.

b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini merupakan peraturan yang mengatur secara rinci tentang pelaksanaan desentralisasi di Indonesia. Undang-

undang ini menciptakan kerangka kerja untuk pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan yang ada di wilayahnya sendiri.

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1999, memperkuat otonomi daerah, dan memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini merupakan revisi lebih lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 dan mengatur lebih lanjut tentang tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah selain undang-undang di atas, peraturan-peraturan turunan contohnya Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) juga mengatur lebih detail pelaksanaan desentralisasi di tingkat nasional dan daerah.

Desentralisasi di Indonesia bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan-urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Sehingga, hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan di berbagai daerah di Indonesia.

2. Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN)

Pemerintah melalui Bappenas telah menyusun Kebijakan Perkotaan Nasional. Hal ini didasarkan pada berbagai urgensi Pembangunan perkotaan seperti proporsi penduduk perkotaan, reorientasi menuju Indonesia-Sentris, kontribusi urbanisasi terhadap kesejahteraan, efisiensi penggunaan sumberdaya, berbagai resiko bencana dan permasalahan perkotaan di berbagai tingkatan. KPN akan menjadi acuan dan pedoman yang strategis dan antisipatif sebagai *living document*, acuan bagi berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi urbanisasi. KPN terdiri atas 5 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem perkotaan yang seimbang, menyejahterakan, berkeadilan
2. Mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif, berbudaya
3. Mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan

4. Mendorong perkotaan yang hijau dan Tangguh

5. Mewujudkan tata Kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu

Kelima misi ini akan menjadi kerangka bagi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah hingga Rencana Kerja Pemerintah (RKP). KPN sendiri merupakan kebijakan yang telah mengintegrasikan asas dan prinsip dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Agenda Baru Perkotaan yang menekankan kepada inklusivitas, daya saing ekonomi dan lingkungan. KPN akan didukung oleh 3 instrumen implementasi yaitu regulasi, kelembagaan dan pembiayaan dengan pendekatan cerdas.

Tabel 6.1 Misi Kebijakan Perkotaan Nasional

Kebijakan Perkotaan Nasional	
Misi 1: **Mewujudkan system perkotaan nasional yang seimbang, menyejahterakan dan berkeadilan**	1. Penguatan pusat kegiatan nasional/metropolitan yang berdaya saing global 2. Pengembangan kota sedang, kota besar, dan metropolitan di luar jawa yang terkoneksi dengan baik 3. Pengembangan pusat pemerintahan nasional yang baru 4. Pengembangan keterkaitan desa-kota yang tidak eksploitatif dan saling menguntungkan 5. Penerapan sempadan pertumbuhan perkotaan secara tegas
Misi 2: **Mendorong perkotaan yang layak huni, inklusif dan berbudaya**	1. Perwujudan Kawasan permukiman yang layak untuk semua 2. Peningkatan akses sistem transportasi dan mobilitas perkotaan bagi semua 3. Penyediaan layanan sosial dasar untuk semua 4. Peningkatan lingkungan perkotaan yang aman dan tentram 5. Perlindungan dan pemeliharaan warisan budaya dan alam 6. Pengembangan budaya berkota yang bertanggungjawab
Misi 3: **Mendorong perkotaan yang maju dan menyejahterakan**	1. Peningkatan produktivitas ekonomi, lapangan kerja layak, dan peluang penghidupan di perkotaan 2. Penciptaan kondisi dan ruang kota yang kondusif bagi tumbuhnya usaha dan investasi 3. Pemberdayaan sektor ekonomi informal di perkotaan
Misi 4: **Mendorong perkotaan yang hijau dan tangguh**	1. Penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan dan berkelanjutan 2. Penyediaan RTH dan Ruang Publik 3. Pemanfaatan SDA berkelanjutan dan pengendalian pencemaran lingkungan 4. Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana
Misi 5: **Mendorong perkotaan yang hijau dan tangguh**	1. Pengembangan kerangka regulasi perkotaan yang terpadu 2. Pengembangan kerangka pendanaan pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perkotaan di tingkat nasional dan daerah 4. Pemanfataan pengembangan pengetahuan dan teknologi secara cerdas.

3. Strategi Pembangunan Perkotaan

Sama halnya dengan PP Perkotaan, Strategi Perkotaan Nasional juga dilatarbelakangi oleh tantangan perkotaan, khususnya dalam konteks Indonesia emas 2045. Beberapa tantangan telah diulas pada bab sebelumnya contohnya urbanisasi dan perubahan iklim. Dalam hal ini, isu global, contohnya SDGs dan Agenda Baru Perkotaan juga menjadi strategi pembangunan perkotaan sebagai prioritas menuju perkotaan 2045. Selain itu, tantangan global seperti pertumbuhan penduduk, pengelolaan lahan, degradasi lingkungan, hingga pertumbuhan ekonomi juga menjadi dasar urgensi strategi pembangunan perkotaan.

Visi pembangunan perkotaan 2045 didasari oleh amanat agenda global yaitu SDGs dan Agenda Baru Perkotaan serta arahan presiden untuk membangun kota masa depan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai Visi Pembangunan Perkotaan 2045, pemerintah melaksanakan *National Urban Development Project* (NUDP). Proyek tersebut adalah pengembangan dan implementasi kebijakan serta strategi pembangunan perkotaan terpadu tahun 2045 berbasis *Smart Integrated Urban Infrastructure Development Program*. Tujuannya untuk mewujudkan kota-kota di Indonesia berperan sesuai fungsinya dalam suatu sistem perkotaan nasional dan karakter wilayahnya, agar menjadi kota yang layak, hijau, dan cerdas dengan berstandar global yang disepakati.

Tujuan lainnya supaya kota-kota di Indonesia bisa meningkatkan kemampuan kota (kelembagaan dan SDM) terkait manajemen dan pembiayaan dalam pengembangan infrastruktur dengan berbagai pembiayaan alternatif (*creative financing*). Melalui NUDP, diharapkan program tersebut dapat mendukung pelaksanaan pembangunan kota jangka panjang mulai dari penyiapan RPJMN hingga program tahunan secara terpadu. Selain itu, NUDP diharapkan pula dapat meningkatkan efisiensi pembangunan kota, sehingga pengembangan kota dapat memiliki KPI yang terukur.

Tren Pembangunan Perkotaan di Indonesia

Tren pembangunan perkotaan Indonesia di masa depan telah mengarah kepada komitmen global contohnya Agenda Baru Perkotaan, Perjanjian Paris, maupun SDGs. Ini menandakan bahwa perkotaan Indonesia telah mengarah kepada tujuan yang tepat. Berikut adalah beberapa tren utama dalam pembangunan perkotaan di Indonesia:

01. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan

Untuk mengakomodasi pertumbuhan populasi perkotaan, telah dilakukan upaya berkelanjutan untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur perkotaan, termasuk jaringan transportasi, jalan, jembatan, dan utilitas publik.

Tren Taman, Kota Hijau Rakyat Bahagia

Pengembangan taman kota merupakan salah satu upaya penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang seimbang dan nyaman bagi warganya. Berikut beberapa kota di Indonesia yang menunjukkan tren positif dalam pembangunan taman kota:

Surabaya: Pemerintah Kota Surabaya telah giat dalam mengembangkan taman kota sebagai bagian dari transformasi kota menjadi lebih hijau dan ramah lingkungan. Taman Bungkul dan Taman Harmoni adalah beberapa contoh taman kota yang populer di Surabaya.

Jakarta: Meskipun Jakarta memiliki tantangan dalam menyediakan ruang terbuka hijau karena tekanan urbanisasi yang tinggi, beberapa taman kota contohnya Taman Menteng, Taman Suropati, dan Taman Mini Indonesia Indah terus dikembangkan dan ditingkatkan.

Bandung: Kota Bandung juga menunjukkan komitmen dalam pembangunan taman kota yang menyediakan ruang rekreasi dan relaksasi bagi warga masyarakat. Adapun salah satu contohnya adalah Taman Film.

Yogyakarta: Kota Yogyakarta memiliki berbagai taman kota yang menyediakan tempat berkumpul dan beraktivitas bagi penduduk dan wisatawan. Taman Pintar dan Taman Sari adalah beberapa taman yang populer di kota ini.

Semarang: Pemerintah Kota Semarang juga telah berusaha meningkatkan kualitas taman kota. Taman Budaya Raden Saleh dan Taman Diponegoro adalah contoh-contoh taman yang menarik perhatian.

Denpasar: Kota Denpasar memperhatikan pembangunan taman kota sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara perkotaan dan alam. Taman Kota Lumintang dan Taman Ayodya adalah beberapa contoh taman yang ada di Denpasar.

02. Inisiatif *smart city*

Banyak kota di Indonesia telah menganut konsep *smart city*, memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan layanan perkotaan, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan lingkungan yang layak huni. Inisiatif ini termasuk pada tata kelola digital, sistem transportasi pintar, dan perencanaan kota berbasis data.

Tren *Smart City*, Efisien dan Efektif

Banyak kota di Indonesia telah mengadopsi tren pembangunan *smart city* untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keberlanjutan perkotaan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa kota yang menonjol dalam pembangunan *smart city* di Indonesia adalah:

Jakarta: Ibu kota Indonesia, Jakarta, memiliki inisiatif besar dalam mengembangkan konsep *smart city*. Beberapa proyek meliputi pengembangan sistem manajemen lalu lintas, aplikasi transportasi publik, pengelolaan limbah berbasis teknologi, dan penerapan teknologi cerdas di berbagai aspek kota.

Surabaya: Surabaya telah mengambil langkah-langkah untuk menjadi *smart city* dengan pengembangan sistem informasi pemerintahan, aplikasi untuk pelaporan masalah infrastruktur, dan

integrasi teknologi dalam layanan publik.

Bandung: Bandung telah aktif dalam menerapkan teknologi cerdas dalam perkotaan. Beberapa inisiatif termasuk pemasangan sensor untuk pemantauan lalu lintas dan aplikasi untuk pemantauan kualitas udara.

Yogyakarta: Yogyakarta telah memanfaatkan teknologi pengembangan kota cerdas, termasuk penggunaan teknologi dalam pendidikan, e-pemerintahan, dan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.

Semarang: Semarang juga telah memasukkan elemen kota cerdas dalam pembangunan kota. Inisiatif tersebut termasuk aplikasi pendukung mobilitas, pusat komando operasi, dan sistem manajemen limbah.

Makassar: Makassar memiliki rencana pembangunan kota cerdas dengan fokus pada pengembangan transportasi cerdas, sistem pengelolaan dengan teknologi, dan inisiatif lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup warga.

Balikpapan: Balikpapan telah mengambil langkah-langkah menuju konsep kota cerdas dengan fokus pada sistem informasi geografis, pengelolaan parkir berbasis teknologi, dan pengembangan transportasi cerdas.

03. Perencanaan kota berkelanjutan

Adanya peningkatan penekanan pada pembangunan perkotaan berkelanjutan. Kota berfokus pada praktik ramah lingkungan, promosi ruang hijau, penerapan sistem pengelolaan limbah, dan pengadopsian teknologi hemat energi.

04. Revitalisasi kawasan bersejarah

Beberapa kota telah melakukan revitalisasi kawasan bersejarah dan budaya mereka untuk melestarikan warisan historis dan menarik pariwisata. Pemugaran bangunan tua dan penciptaan ruang budaya adalah contoh dari upaya tersebut.

Tren *Branding Heritage*, Tujuan Wisata Baru

Beberapa kota di Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam revitalisasi kota tua atau pelestarian warisan budaya mereka. Beberapa di antaranya adalah:

Yogyakarta: Yogyakarta memiliki keraton (istana) dan kawasan sekitarnya yang merupakan pusat budaya dan sejarah Jawa. Pemerintah dan pihak terkait telah berupaya untuk menjaga keaslian arsitektur dan budaya kota ini. Selain itu, inisiatif revitalisasi juga dilakukan di kawasan sekeliling keraton, yaitu Malioboro dan sekitarnya.

Semarang: Kota Lama Semarang adalah contoh yang menonjol dalam revitalisasi kota tua. Pemerintah setempat telah melakukan upaya pemugaran, pelestarian, dan pengembangan kawasan ini sebagai objek wisata dan pusat budaya.

Jakarta: Kota Tua Jakarta, juga dikenal sebagai Kota Tua Batavia, telah menjadi fokus revitalisasi. Beberapa bangunan bersejarah di kawasan ini telah direstorasi dan diubah menjadi museum, galeri, dan tempat bersejarah lainnya. Ini adalah langkah penting untuk menjaga sejarah periode kolonialisme di Indonesia.

Surabaya: Surabaya juga memiliki kawasan kota tua yang sedang dalam proses revitalisasi. Inisiatif ini melibatkan pelestarian arsitektur kuno dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Gambar 6.2 Kawasan Kota Tua Semarang

Medan: Kota Lama Medan memiliki bangunan-bangunan kolonial Belanda yang bersejarah. Beberapa bangunan ini telah direstorasi dan dikelola sebagai tempat wisata dan budaya.

Makassar: Pemerintah Kota Makassar telah berupaya untuk memulihkan kawasan Kota Tua Makassar. Ini melibatkan pemugaran bangunan bersejarah dan pengembangan fasilitas wisata.

Bandung: Beberapa kawasan di Bandung yang memiliki nilai sejarah juga sedang diberikan perhatian untuk revitalisasi dan pelestarian.

Revitalisasi kota tua dan warisan budaya adalah upaya penting dalam mempertahankan identitas budaya dan sejarah suatu daerah. Namun, sumber daya yang diperlukan untuk proyek semacam ini bisa jadi cukup besar. Selain itu, pada proyek revitalisasi tersebut juga ada tantangan, termasuk kelanjutan pemeliharaan serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pariwisata dan keberlanjutan ekonomi. Informasi lebih lanjut mengenai proyek revitalisasi kota tua dapat diperoleh melalui sumber resmi pemerintah setempat dan lembaga terkait.

05.
Pembangunan inklusif

Saat ini, semakin banyak adanya pengakuan terhadap pentingnya pembangunan perkotaan yang inklusif di Indonesia. Terkait itu, upaya-upaya sedang dilakukan untuk menyediakan perumahan yang terjangkau, meningkatkan akses ke pendidikan dan kesehatan, dan meningkatkan pelayanan sosial bagi semua penduduk.

06.
Ketahanan Iklim

Dengan meningkatnya ancaman perubahan iklim, kota-kota berfokus pada pembangunan ketahanan terhadap bencana alam dan peristiwa cuaca ekstrem. Ini termasuk perbaikan infrastruktur, pengelolaan banjir, dan integrasi strategi adaptasi iklim.

Tren Kota Berketahanan, *100 Resilient Cities*

100 Resilient Cities (100RC) adalah program yang didirikan oleh *The Rockefeller Foundation* pada tahun 2013. Tujuannya untuk membantu kota-kota di seluruh dunia dalam menghadapi tantangan dan meningkatkan ketahanan mereka terhadap berbagai ancaman, contohnya perubahan iklim, bencana alam, masalah sosial, dan ekonomi. Program ini bekerja sama dengan kota-kota besar di seluruh dunia untuk mengembangkan rencana ketahanan yang kuat. Beberapa kota di Indonesia yang berpartisipasi dalam program ini termasuk Jakarta, Semarang, dan Surakarta. Berikut adalah beberapa informasi lebih lanjut tentang program "*100 Resilient Cities*" di Indonesia:

Jakarta: Jakarta adalah salah satu kota di Indonesia yang telah berpartisipasi dalam inisiatif 100RC. Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta memiliki tantangan besar terkait dengan banjir, kemacetan lalu lintas, pertumbuhan populasi yang cepat, dan ancaman perubahan iklim. Program 100RC membantu Jakarta dalam mengembangkan rencana ketahanan yang mencakup manajemen banjir, infrastruktur perkotaan yang lebih baik, dan peningkatan respons terhadap bencana.

Semarang: Kota Semarang adalah kota pelabuhan yang juga memiliki masalah serius terkait banjir, terutama di wilayah pesisir. Program 100RC membantu Semarang dalam merumuskan strategi ketahanan yang mencakup pengelolaan air yang lebih baik, perbaikan infrastruktur, dan perencanaan tata kota yang lebih bijaksana.

Surakarta: Surakarta atau yang juga dikenal sebagai Solo, adalah kota bersejarah di Jawa Tengah. Kota ini juga menghadapi tantangan dalam hal ketahanan, terutama terkait dengan perubahan iklim dan manajemen limbah. Program 100RC membantu Solo dalam mengidentifikasi solusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan mengelola limbah secara lebih efektif.

Selain ketiga kota di atas, beberapa kota lain di Indonesia juga telah berpartisipasi dalam program 100RC atau telah menerapkan konsep ketahanan dalam perencanaan perkotaan mereka. Inisiatif ini utamanya bertujuan untuk memastikan bahwa kota-kota di Indonesia dan di seluruh dunia memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bertahan dan berkembang di tengah berbagai bencana dan tantangan yang mereka hadapi. Sehingga, lingkungan yang layak dan lebih baik untuk ditinggali dapat tercipta.

07. Transportasi umum atau massa

Banyak kota berinvestasi dalam sistem transportasi umum untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan mengurangi polusi. Ini termasuk pengembangan sistem metro, jaringan bus rapid transit (BRT), dan infrastruktur ramah pejalan kaki.

Tren Trotoar, Kota Sehat berjalan kaki

Pembangunan trotoar telah menjadi fokus di berbagai kota di Indonesia dalam upaya meningkatkan infrastruktur perkotaan yang lebih ramah pejalan kaki dan berkelanjutan. Beberapa kota di Indonesia yang telah mengadopsi tren pembangunan trotoar termasuk:

Gambar 6.3 Trotoar Malioboro Yogyakarta yang luas dan tertata rapi

Jakarta: Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta telah meluncurkan berbagai proyek perbaikan trotoar dan jalur pejalan kaki. Inisiatif contohnya "Jakarta Jalan Kaki" bertujuan untuk mengembangkan trotoar yang lebih nyaman, estetis, dan dapat diakses bagi pejalan kaki. Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas berkelanjutan.

Bandung: Bandung juga telah aktif dalam pembangunan trotoar yang lebih baik. Inisiatif contohnya "*Bandung Creative City Walk*" bertujuan untuk meningkatkan kualitas trotoar dan menjadikannya lebih ramah pejalan kaki, serta mendukung kegiatan budaya dan seni di sekitar trotoar tersebut.

Surabaya: Kota Surabaya juga telah menerapkan upaya untuk memperbaiki trotoar dan meningkatkan infrastruktur pejalan kaki. Beberapa area di Surabaya telah mengalami transformasi trotoar yang lebih baik, serta memberikan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi pejalan kaki.

Yogyakarta: Yogyakarta juga berupaya untuk mengembangkan trotoar yang lebih baik, terutama di kawasan-kawasan wisata dan pusat kota. Inisiatif ini didukung oleh komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi warga lokal dan wisatawan.

Denpasar: Kota Denpasar di Provinsi Bali juga telah berfokus pada perbaikan trotoar dan infrastruktur pejalan kaki. Langkah-langkah ini sejalan dengan tujuan untuk mendukung mobilitas berkelanjutan dan meningkatkan pengalaman berjalan kaki di sekitar kota.

Semarang: Pemerintah Kota Semarang telah berupaya meningkatkan kualitas trotoar di berbagai daerah, termasuk di sekitar jalan-jalan utama dan pusat kota.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada tren positif dalam pembangunan trotoar di beberapa kota di Indonesia, tantangan seperti pemeliharaan, penegakan hukum terhadap pelanggaran trotoar, dan integrasi trotoar dengan infrastruktur transportasi lainnya masih menjadi isu yang perlu diatasi.

08.
Keterlibatan masyarakat

Beberapa kota secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan kota untuk memastikan bahwa proyek pembangunan memenuhi kebutuhan dan aspirasi penduduk setempat.

09.
Pengelolaan Lombah dan Keberlanjutan Lingkungan

Beberapa kota telah melakukan revitalisasi kawasan Praktik pengelolaan limbah yang lebih baik, contohnya inisiatif daur ulang dan konversi limbah menjadi energi, sedang diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan populasi perkotaan.

Faktor Pendukung (*Enabler*) Pembangunan Perkotaan

Ada beberapa faktor yang dapat berperan sebagai "*enabling factors*" atau faktor yang memungkinkan terjadinya pembangunan perkotaan berkelanjutan. Faktor-faktor ini menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan perkotaan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa faktor penting tersebut:

a. Kebijakan dan regulasi

Kebijakan dan perencanaan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan adalah kunci. Ini mencakup rencana kota dan tata ruang, transportasi publik, lingkungan dan konservasi, perumahan terjangkau, hingga pengelolaan limbah, serta penggunaan lahan yang efisien, dan kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

1. Transportasi publik: Infrastruktur transportasi publik yang baik dapat mengurangi kemacetan lalu lintas, polusi udara, dan kepadatan lalu lintas. Ini juga dapat meningkatkan aksesibilitas

bagi penduduk perkotaan.

2. Hunian terjangkau: Ketersediaan perumahan yang terjangkau adalah faktor kunci dalam menjaga inklusi sosial dan mengurangi ketimpangan di perkotaan. Ini juga dapat mencegah masalah perumahan liar.

3. Infrastruktur dan layanan dasar: Akses yang memadai ke air bersih, sanitasi, listrik, dan pelayanan dasar lainnya sangat penting untuk kualitas hidup di perkotaan.

4. Pengelolaan limbah dan air: Sistem pengelolaan limbah dan air yang efisien dan berkelanjutan dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga kualitas air dan udara.

5. Konservasi lingkungan: Perlindungan ruang terbuka hijau, taman kota, dan penghijauan perkotaan adalah penting untuk menjaga lingkungan yang sehat dan nyaman.

Kebijakan Perkotaan Nasional ini perlu ditetapkan dan didorong melalui peraturan dan regulasi yang dapat memastikan implementasinya dalam pembangunan perkotaan. Jika sebelumnya Indonesia telah memiliki peraturan pemerintah terkait pembangunan perkotaan yang lebih bersifat administrasi, maka keberadaan undang-undang perkotaan juga menjadi penting untuk dipersiapkan sebagai landasan bagi pembangunan perkotaan menuju Indonesia 2045.

b. Teknologi informasi dan komunikasi

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, transportasi, dan komunikasi antarwarga kota. Beberapa hal contohnya Manajemen Data Kota (satu data) terintegrasi, Sistem Informasi Geografis (SIG) serta satu peta, Analisis Big Data, Teknologi Hijau, serta aplikasi *mobile* dan *platform* daring menjadi sangat penting sebagai bagian dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang inklusif, terintegrasi, berketahanan, dan berkelanjutan.

c. Pendanaan berkelanjutan

Sumber daya keuangan yang berkelanjutan untuk pembangunan perkotaan merupakan kunci terlaksananya pembangunan perkotaan. Sumber-sumber pendanaan contohnya pajak dan pendapatan daerah, investasi swasta, dana investasi perkotaan,

pendanaan proyek-proyek infrastruktur, sumber dana pembangunan berkelanjutan, serta berbagai alternatif dan inovasi pembiayaan yang disertai dengan manajemen keuangan yang baik, menjadi faktor pendukung utama pembangunan. Pemetaan kebutuhan dan ketersediaan hingga potensi pendanaan yang dimiliki, akan memudahkan dalam identifikasi sumber daya keuangan yang akan digunakan untuk setiap aspek pembangunan perkotaan. Beberapa inisiasi kelembagaan pendanaan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) telah dibentuk

d. Kemitraan, kolaborasi, dan partisipasi

Kerja sama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil adalah penting dalam mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan adalah kunci untuk menciptakan perkotaan yang responsif terhadap kebutuhan penduduknya. Kerja sama antara pemerintah dan swasta, kolaborasi pemerintah daerah, kemitraan dengan LSM dan organisasi masyarakat sipil, kemitraan internasional, serta kemitraan antara perusahaan dan masyarakat diperlukan dalam berbagai aspek perkotaan mulai dari pendanaan hingga pembangunan fisik lainnya, contohnya pengentasan permukiman kumuh dan kemiskinan.

e. Kelembagaan yang kuat

Kelembagaan pemerintah yang baik, transparan, dan efisien sangat penting dalam mengelola pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan. Kelembagaan juga merupakan faktor penting sebagai "*enabling factor*" dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Kelembagaan yang baik dapat memberikan kerangka kerja, koordinasi, serta pengambilan keputusan yang efektif untuk mendukung pembangunan perkotaan yang berkualitas.

Berikut adalah beberapa aspek penting kelembagaan dalam konteks ini:

1. Pemerintah daerah: Pemerintah daerah, misalnya pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, memainkan peran sentral dalam pengembangan perkotaan. Mereka bertanggung jawab untuk perencanaan tata ruang, infrastruktur, dan penyediaan layanan publik. Kelembagaan pemerintah daerah yang kuat dan efisien adalah kunci dalam mendukung pertumbuhan perkotaan yang

terorganisir dengan baik

2. Perencanaan dan pengembangan kota: Kelembagaan yang mengurus perencanaan perkotaan, contohnya lembaga perencanaan kota atau badan tata ruang, adalah aspek penting dalam membantu menciptakan visi jangka panjang untuk perkotaan. Mereka dapat mengembangkan rencana tata ruang yang berfokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Lembaga keuangan dan investasi: Kelembagaan yang mendukung pembiayaan dan investasi dalam infrastruktur dan proyek-proyek perkotaan, penting untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan perkotaan. Ini termasuk bank pembangunan, dana investasi perkotaan, dan lembaga keuangan lainnya yang dapat memfasilitasi investasi di kota.

4. Lembaga penelitian dan pendidikan: Lembaga-lembaga penelitian dan pendidikan, contohnya universitas dan pusat riset perkotaan, dapat berperan dalam memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan perkotaan dan solusi yang mungkin. Mereka juga dapat membantu dalam pelatihan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelola perkotaan secara efektif.

5. Lembaga masyarakat sipil: Lembaga-lembaga masyarakat sipil, contohnya LSM, organisasi lingkungan, dan kelompok advokasi, berperan dalam mewakili kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perkotaan. Mereka dapat membantu mengawasi dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan perkotaan.

6. Kerja sama antar lembaga: Kerja sama yang baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam pembangunan perkotaan sangat penting. Koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga ini dapat membantu menghindari tumpang tindih, mengurangi konflik, dan memaksimalkan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

7. Pengelolaan data dan informasi: Kelembagaan yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penyediaan data serta informasi yang akurat dan relevan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti dalam

pembangunan perkotaan.

Kelembagaan yang baik berperan penting dalam membentuk lingkungan yang mendukung pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan, inklusif, dan efisien. Kelembagaan yang kuat dan berfungsi baik dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mempromosikan inovasi, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada penduduk perkotaan. Berbagai inisiasi contohnya keberadaan *National Urban Forum* juga menjadi bentuk kelembagaan yang penting sebagai media pertukaran ide, pemikiran, dan solusi dalam pembangunan perkotaan. Inisiasi ini juga perlu didorong keberadaannya hingga pada level regional, provinsi, bahkan hingga kota.

f. Pengetahuan, pendidikan dan keterampilan

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan juga merupakan kunci untuk menciptakan perkotaan yang berkelanjutan dan berkualitas. Sejak berakhirnya era Orde Baru dan ditetapkannya UU Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, perubahan tampak pada hubungan pusat dan daerah. Pemerintah kabupaten/kota secara signifikan mendapat pelimpahan urusan pemerintahan yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat atau provinsi. Kebutuhan untuk memberikan layanan dasar yang memadai bagi masyarakat pun turut bertambah. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan pemerintah kabupaten/kota merupakan hal mendasar yang tidak dapat dihindari.

Pada tahun 2015, *World Economic Forum* menyoroti dampak serius dari perencanaan kota dan tata kelola pemerintahan yang kurang memadai terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada bidang legislatif, banyak di antaranya yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan formal serta pengalaman berpolitik. Pemahaman akan kebijakan dan kualitasnya dapat dikatakan masih rendah. Pemerintah lokal memiliki kebutuhan yang sangat mendesak untuk membangun kapasitas lokal dalam hal perencanaan, perancangan rekayasa (*engineering design*), penganggaran, akuntansi, keuangan dan manajemen proyek. Pembangunan kapasitas lokal perlu diutamakan sehingga daerah dapat mendayagunakan sumber daya yang ada untuk kebutuhan yang spesifik.

Seiring dengan pesatnya arus urbanisasi dan kompleksitas perkotaan, pemerintah kota dituntut untuk terus menyesuaikan

diri dan berinovasi dalam waktu yang terbatas untuk mengatasi berbagai tantangan perkotaan. Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan antara lain kapasitas sumber daya manusia yang cukup, meliputi kelompok eksekutif, legislatif, dan pelaku lainnya, contohnya masyarakat dan dunia usaha.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan inovasi dan mengakuisisi beragam praktek terbaik (*best practices*) dapat dilakukan melalui proses pembelajaran *city-to-city*. Transfer pengetahuan yang terstruktur dapat difasilitasi oleh para ahli sehingga dapat memastikan efektivitas aliran informasi dan membangun tingkat kepercayaan para pelaku pembangunan perkotaan. Kolaborasi antara para praktisi yang terlibat dalam pembelajaran *city-to-city*, juga merupakan hal mendasar untuk memastikan tindak lanjut atau rencana aksi transformasi perkotaan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah kota, untuk memberikan pelayanan yang unggul kepada masyarakat . Manajemen pengetahuan tidak hanya sekedar memastikan tersedianya data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan, melainkan juga interaksi antara pemerintah dengan masyarakat untuk menjaring aspirasi dari warga. Sehingga, pengetahuan lokal dapat disimpan, dibagikan, dan diteruskan ke generasi selanjutnya. Manajemen pengetahuan juga mengikutsertakan pengalaman dan praktik terbaik berbagai pihak, termasuk *city-to-city learning process*, sehingga dapat digunakan untuk pemecahan masalah sejenis dan berinovasi di masa mendatang.

Selain berbagi pengetahuan melalui proses *city-to-city* dan penjaringan aspirasi masyarakat, membangun kolaborasi bersama asosiasi dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang bergerak di bidang perencanaan dan perkotaan pun semakin dibutuhkan dalam menjawab tantangan kewilayahan yang semakin kompleks. Asosiasi contohnya Ikatan Ahli Perencana (IAP) dan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) memiliki peran penting dalam memberi pandangan dan respons terhadap tantangan perencanaan serta isu strategis nasional. Gagasan dari para ahli perencanaan baik akademisi maupun praktisi harus mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam mengembangkan profesi perencanaan wilayah dan kota, mengimplementasikan

rencana pembangunan, serta memperluas kolaborasi. Sehingga, hal ini turut mengakselerasi perencanaan wilayah dan kota di Indonesia.

Sementara itu kolaborasi dengan NGO akan mempercepat diseminasi informasi pemerintah ke masyarakat, mendukung peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat terhadap perencanaan kota melalui advokasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pembangunan berkelanjutan untuk kawasan perkotaan. Terdapat 3 komponen penting dalam mendukung pembangunan perkotaan yaitu adanya pendidikan formal dan non-formal, pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta penelitian dan inovasi terkait pembangunan perkotaan.

Beberapa hal di atas menjadi faktor-faktor kunci yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Namun, penting untuk diingat bahwa faktor-faktor ini sering kali saling terkait dan harus dikelola secara holistik serta terintegrasi untuk mencapai hasil yang optimal. Meskipun faktor-faktor ini juga dapat bervariasi bergantung pada konteks lokal, tetapi prinsip-prinsip dasarnya tetap relevan pada hampir semua konteks perkotaan.

Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Menuju Indonesia Maju 2045, pemerintah mengembangkan pembangunan di berbagai bidang, termasuk dengan membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ibu kota baru ini diharapkan dapat mencerminkan kemajuan suatu bangsa dan tentunya menjadi *benchmark* bagi pembangunan perkotaan lainnya di Indonesia. Pembangunan IKN Nusantara menjadi bagian dalam mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai visi Indonesia 2045. IKN dibangun dengan dan sebagai identitas nasional. IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

IKN mengusung konsep *forest city* dengan setidaknya 65% lahan merupakan tutupan hutan. Jumlah tersebut dicapai dengan upaya rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah IKN seluas 58.570 ha. Saat ini, area tersebut berada dalam kondisi lahan terbuka, area bekas tambang, semak

Gambar 6.4 Proses penyatuan tanah dan air nusantara di titik nol Ibu Kota Nusantara
Sumber: BPMI Setpres/Laily Rachev

belukar, dan area konsesi yang akan dilakukan pemanenan. Diperlukan desain lanskap yang terintegrasi untuk memastikan capaian *forest city*, baik melalui penanaman, maupun perlindungan tutupan hutan yang saat ini masih baik.

IKN memiliki karakteristik wilayah yang sangat sensitif dan limitasi ekologi yang tinggi terhadap pembangunan sehingga proses pembangunannya harus dilakukan dengan cermat. Ini demi memastikan pembangunan IKN menerapkan konsep kota yang berkelanjutan, serta mempertimbangkan aspek daya dukung sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup. Berbagai konsep ini didukung dengan telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Masterplan IKN. Penyusunan KLHS Masterplan IKN ini dilakukan secara terintegrasi dengan penyusunan Masterplan IKN.

Terdapat Delapan Prinsip dalam Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, yaitu sebagai berikut:

1. Mendesain sesuai kondisi alam. IKN dibangun dengan lebih dari 75% kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN, 100% penduduk

dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi dalam 10 menit, serta 100% konstruksi ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian

2. Bhinneka Tunggal Ika. IKN dibangun dengan 100% integrasi seluruh penduduk, baik penduduk lokal maupun pendatang, 100% warga dapat mengakses layanan sosial atau masyarakat dalam 10 menit, 100% tempat umum dirancang menggunakan prinsip akses universal, kearifan lokal, dan desain inklusif

3. Terhubung, aktif, dan mudah Diakses. IKN dibangun dengan 80% perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif, 10 menit ke fasilitas penting dan simpul transportasi umum, <50 Menit koneksi transit ekspres dari kawasan inti pusat pemerintahan ke bandara.

4. Rendah emisi karbon. IKN dibangun dengan instalasi kapasitas energi terbarukan akan memenuhi 100% kebutuhan energi wilayah tersebut, 60% peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru di 2045, dan *Net Zero Emissions* di area itu pada 2045.

5. Sirkuler dan tangguh. IKN dibangun dengan memastikan bahwa 10% dari lahan seluas kawasan pemerintahannya tersedia untuk kebutuhan produksi pangan, 60% daur ulang semua timbulan sampah di 2045, dan 100% air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada 2035.

6. Aman dan terjangkau. IKN akan menjadi 10 kota terbaik menurut *Global Livability Index* pada 2045. Semua permukiman di kawasan pemerintahan IKN memiliki akses terhadap infrastruktur penting pada 2045. Selain itu juga terdapat perumahan yang adil dengan perbandingan 1:3:6 untuk jenis perumahan mewah, menengah, dan sederhana.

7. Kenyamanan dan efisiensi melalui teknologi. IKN akan memperoleh peringkat sangat tinggi dalam indeks pengembangan perangkat *e-Gov* oleh PBB, dengan 100% konektivitas digital dan TIK untuk semua penduduk dan bisnis, serta lebih dari 75% kepuasan bisnis dengan peringkat layanan digital.

8. Peluang ekonomi untuk semua. IKN menjadi kota dengan 0% kemiskinan pada 2035, PDB per kapita negara berpendapatan tinggi, dan rasio gini regional terendah di Indonesia pada 2045.

Dalam mendukung pembangunan IKN, pemerintah telah menyediakan berbagai regulasi dan kebijakan untuk memastikan pembangunan ibu kota baru ini dapat berjalan sesuai dengan konsep dan prinsip yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022–2042;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara;
7. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara;
9. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara;
10. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Barat;
11. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 1;
12. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ibu Kota Nusantara Timur 2.

Seluruh peraturan ini diharapkan memberikan kejelasan dalam proses pembangunan IKN. Selain didukung dengan regulasi yang jelas, pembangunan IKN juga telah memiliki rencana jangka panjang dalam proses pembangunannya menuju kota kelas dunia untuk semua, yaitu sebagai berikut:

1. Periode 2022–2024. Pemindahan tahap awal ke Kawasan IKN (K-IKN), membangun infrastruktur utama contohnya Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI dan perumahan, juga meliputi pemindahan ASN tahap awal, pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500 ribu penduduk tahap awal. Presiden Republik Indonesia akan merayakan HUT Ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024.

2. Periode 2025–2035. Membangun IKN sebagai area inti yang tangguh, mengembangkan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi, menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan IKN, mengembangkan sektor-sektor ekonomi prioritas, menerapkan sistem insentif untuk sektor-sektor ekonomi prioritas, serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

3. Periode 2045 dan selanjutnya. Mengukuhkan reputasi sebagai "Kota Dunia untuk Semua" dan menjadi kota terdepan di dunia dalam hal daya saing. Masuk dalam 10 Kota Layak Huni Terbaik serta mencapai *net zero-carbon emission* dan 100% energi terbarukan pada kapasitas terpasang. Selain itu juga menjadi kota pertama di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa yang akan mencapai target ini.

Berdasarkan seluruh konsep, prinsip, dan regulasi yang telah disusun dalam pembangunan IKN, dapat disimpulkan bahwa IKN memberikan gambaran sebagai kota dunia yang sesuai dengan Agenda Baru Perkotaan, yaitu *leave no one behind, sustainable and inclusive urban economies*, serta *sustainable environmental*.

IKN akan menjadi *benchmark* atau praktik terbaik implementasi Agenda Baru Perkotaan yang menjadi acuan bagi pembangunan kota lain di Indonesia dan dunia. Keberadaan IKN diharapkan menjadi titik harapan bahwa kita mampu membangun kota yang kita harapkan dan impikan selama ini.

"People just need to see IKN to understand New Urban Agenda"

Idealisme IKN, Indonesia Emas, RPJPN 2025–2045, dan Transformasi Perkotaan di Indonesia

Bakti Setiawan - Guru Besar Perencanaan Kota, UGM

Idealisme IKN

Sementara berbagai upaya untuk mempercepat pembangunan IKN terus dilakukan, kita tidak boleh melupakan tantangan transformasi perkotaan yang sangat menentukan di Indonesia. Sebagaimana telah diprediksikan, pada tahun 2045, sekitar 75% penduduk Indonesia akan tinggal di wilayah perkotaan (BPS, 2019). Wilayah perkotaan ini meliputi lebih dari 400 kota, serta akan menjadi tumpuan kehidupan tidak kurang dari 230 juta jiwa.

IKN direncanakan dengan segudang idealisme dan bahkan diharapkan akan menjadi contoh nyata atau model pembangunan kota masa depan, tidak saja di Indonesia, bahkan di dunia. Idealisme ini baik, perlu terus didukung dan diupayakan. Pada saat yang sama, Indonesia juga terus mengejar cita cita untuk menjadi negara maju, berdaulat, dan sejahtera pada tahun 2045 mendatang. Cita-cita ini diterjemahkan dalam strategi pencapaian Indonesia Emas 2045, yang juga sejalan dengan kerangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2025–2045). Persoalannya, “Bagaimana berbagai idealisme IKN dan Indonesia Emas tersebut juga menjadi kerangka dasar sekaligus motivasi untuk mengawal proses transformasi perkotaan di Indonesia?”.

Diperlukan pendekatan dan strategi baru untuk memastikan agar transformasi perkotaan di Indonesia menghasilkan wilayah perkotaan dan kota yang berkelanjutan, sekaligus mendukung, bahkan menjadi pilar penting terwujudnya cita cita Indonesia Emas.

Tantangan Transformasi Perkotaan di Indonesia

Setidaknya, terdapat 5 tantangan transformasi perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia. **Pertama**, Kajian Bank Dunia (2019) menunjukkan bahwa selama ini arus urbanisasi di Indonesia masih terkonsentrasi di beberapa kota metropolitan contohnya Jakarta, Bandung Raya, Semarang, serta Surabaya. Ke depan, arus urbanisasi yang lebih merata ke kota-kota menengah dan kecil baik di luar maupun di Pulau Jawa akan semakin menjamin pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh wilayah NKRI.

Membangun dan mengelola kota menengah dan kecil yang berkelanjutan relatif lebih mudah dilakukan daripada membangun dan mengelola kota besar dengan segala kompleksitasnya. Desentralisasi dan otonomi daerah yang berkualitas akan semakin menjamin pembangunan kota yang lebih memperhatikan aspirasi dan potensi lokal. Pembangunan IKN di Pulau Kalimantan diharapkan dapat memicu pembangunan wilayah di Kalimantan, khususnya koridor atau aglomerasi perkotaan di Balikpapan, Paser, dan Samarinda. IKN juga diharapkan memberikan inspirasi pembangunan wilayah perkotaan di luar Pulau Jawa.

Tantangan dan peluang **kedua** transformasi perkotaan di Indonesia menyangkut isu *urban productivity*. Selama ini setiap peningkatan `1% urbanisasi di Indonesia, hanya memicu 4% penghasilan per kapita–setengah dari yang terjadi di beberapa negara lain, contohnya Cina dan Malaysia (Setiawan, 2021).

Ke depan, kualitas urbanisasi di Indonesia harus ditingkatkan agar dapat lebih menjamin dan mempercepat proses transformasi Indonesia menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Sebagaimana telah digariskan dalam Indonesia Emas dan RPJPN 2025–2045, kota tetap dan akan terus menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Kota akan terus menjadi mesin pertumbuhan (ekonomi) satu negara. IKN, diharapkan tidak hanya menjadi wacana pemindahan ibu kota pemerintahan saja, tetapi juga memberikan inspirasi bagaimana meningkatkan produktivitas kota yang inklusif.

Berikutnya atau yang **ketiga**, perubahan iklim dan bencana telah dan akan menjadi tantangan penting transformasi perkotaan di Indonesia. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019, menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat paling tidak 90 kota yang terletak di kawasan pesisir yang rentan atas perubahan iklim. Kota-kota ini mewadahi sekitar 100 juta jiwa pada tahun 2045 nanti. Perencanaan dan pengelolaan kota di Indonesia harus didasarkan pada konsep ramah iklim dan rendah karbon.

Karena seluruh wilayah Indonesia berada dalam "*ring of fire*" maka hampir seluruh kota di Indonesia menghadapi berbagai ragam potensi bencana. Meningkatkan ketangguhan kota-kota di Indonesia menjadi keharusan untuk menjamin keberlanjutan kota. Pembangunan kota rendah karbon dan ketangguhan yang distandarkan untuk IKN, harus dipastikan berlaku pula untuk seluruh kota di Indonesia.

Tantangan **keempat** transformasi perkotaan di Indonesia berkaitan dengan isu *heritage* dan identitas. Kota dan wilayah perkotaan selalu menjadi ajang utama globalisasi dan kapitalisme sehingga rentan atas berbagai perubahan dan modernisasi. Kota-kota di seluruh dunia cenderung menjadi seragam dan tidak mampu merepresentasikan sejarah dan karakternya. Proses ini harus diwaspadai dan dilawan.

Kota-kota di Indonesia sejatinya telah mampu merespons dan bernegosiasi dengan berbagai kekuatan luar/global dan menghasilkan kota-kota hibrid yang menarik dan khas. Banyak kota di Indonesia menggambarkan dialektika kekuatan lokal-global yang dinamis. Meskipun banyak mengadopsi konsepsi ideal pembangunan kota dari Barat, IKN harus menyerap inspirasi kearifan lokal dan identitas Indonesia dalam membangun kota.

Terakhir atau yang kelima, tata kelola yang efektif dan inklusif akan menjadi kunci keberhasilan untuk mengawal keberlanjutan transformasi perkotaan di Indonesia. Jane Jacobs (1985), pemikir perkotaan yang ternama dari Amerika, telah mengingatkan sejak lama, bahwa keberhasilan pembangunan kota akan terwujud jika dan hanya jika seluruh warga kota diberi kesempatan dan peluang untuk membangun kotanya.

Di Indonesia, inklusivitas pembangunan perkotaan ini juga dipengaruhi oleh proses demokratisasi, desentralisasi, dan otonomi daerah. Ratusan pemimpin daerah di Indonesia diharapkan akan semakin sadar dan berupaya meningkatkan tata kelola pembangunan kota yang efektif dan inklusif, serta berlomba-lomba untuk mewujudkan banyak aspirasi warganya. IKN Nusantara, harus menjadi momen transformasi tata kelola kota yang terbuka dan partisipatif.

Di tengah upaya besar pembangunan IKN, seyogjanya proses transformasi perkotaan lainnya di Indonesia tetap berjalan. Idealisme pembangunan IKN Nusantara, akan mempunyai makna lebih besar apabila dikaitkan dengan upaya untuk menjamin transformasi perkotaan yang berkelanjutan di seluruh Nusantara, perwujudan cita-cita Indonesia Emas, dan pencapaian RPJPN 2025–2045. Sebagaimana pandangan Edward Glaeser dalam bukunya *Triumph of the City* (2012), "*city magnify humanity's strengths*" –IKN dan ratusan kota di Indonesia harus menunjukkan kekuatan kemanusiaan dan peradaban bangsa Indonesia.

Harapan pemuda
Akan Perkotaan di Indonesia

Mengakhiri bab terakhir dari buku ini, disajikan harapan pemuda untuk perkotaan di Indonesia di masa mendatang. **Dari 150 jawaban yang berasal dari pemuda di 52 kota/kabupaten di Indonesia,** dirangkum menjadi beberapa kelompok tema kondisi kota dan kehidupan ideal yang didambakan oleh pemuda, contohnya lingkungan hijau dan bersih, serta transportasi dan infrastruktur.

Namun, terdapat juga tema kelompok yang mengharapkan kondisi non-fisik seperti kesejahteraan dan kualitas hidup, pendidikan berkualitas, pemberdayaan masyarakat hingga pemberantasan korupsi dan tata kelola dalam pembangunan perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan perkotaan bukan sekadar pembangunan secara fisik melainkan juga pembangunan sosial dan manusia yang ada di dalamnya. Harapan-harapan ini juga seirama dengan harapan dari para ahli perkotaan dan pelaku pembangunan perkotaan terhadap masa depan kota-kota di Indonesia. Aspirasi para pemuda tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa tema, yaitu harapan yang bersifat fisik dan non-fisik perkotaan.

Infrastruktur dan fasilitas yang lebih baik: Banyak orang berharap kota-kota di Indonesia dapat memiliki infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan yang lebih baik, sistem transportasi yang efisien, dan akses yang lebih baik ke fasilitas kesehatan dan pendidikan. Ini juga termasuk tersedianya taman kota, fasilitas olahraga, dan ruang terbuka hijau yang dapat digunakan oleh masyarakat. Mulai dari mengurangi polusi udara hingga meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Mereka berharap agar kota-kota di Indonesia dapat menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk ditinggali.

Kualitas hidup: Secara keseluruhan, harapan dan imajinasi ini mencerminkan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan lingkungan kota. Mereka juga berharap untuk mengurangi polusi dan menjaga kualitas udara yang sehat.

Transportasi umum yang lebih baik: Sejumlah responden menyampaikan harapan agar transportasi umum menjadi lebih baik dan lebih luas termasuk bus, kereta, dan fasilitas untuk bersepeda termasuk

Harapan Bagi Perkotaan di Indonesia

fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas. Hal ini untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengatasi kemacetan lalu lintas, dan mengurangi polusi udara yang sering terjadi di kota-kota besar.

Kota yang bersih dan tertata: Banyak orang juga menyuarakan keinginan untuk kota yang lebih bersih, hijau, dan ramah ingkungan, serta bebas dari kumuh dan kemacetan. Ini mencakup berbagai hal, Penegakan hukum dan tata kelola yang lebih baik: Harapan untuk kehidupan yang lebih aman dengan penegakan hukum yang lebih baik dan responsif juga disuarakan oleh beberapa responden. Upaya untuk mengurangi korupsi dalam pembangunan kota dan harapan akan tata kelola yang baik dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan.

Budaya dan warisan yang dilestarikan: Beberapa responden mengharapkan pelestarian budaya dan warisan lokal. Mereka ingin melihat pengembangan tempat-tempat bersejarah dan budaya yang mempromosikan identitas kota-kota di Indonesia.

Pemerataan pembangunan: Banyak responden menginginkan pemerataan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Mereka ingin agar kota-kota di Indonesia memiliki kondisi fisik maupun sosial-ekonomi yang lebih baik. Harapan untuk keterjangkauan layanan dan fasilitas umum yang standar di seluruh wilayah kota juga menjadi tema umum.

Inovasi dan pengembangan ekonomi: Beberapa orang berharap agar kota mendukung inovasi dan pengembangan ekonomi, termasuk peluang wirausaha dan lapangan pekerjaan, termasuk pengembangan pariwisata sebagai daya tarik wilayah.

Keppel

Epilog: Perkotaan Menuju Indonesia 2045

07

Melalui pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, kita telah memahami berbagai hal terkait pembangunan perkotaan secara global maupun nasional. Mulai dari berbagai latar belakang, mengapa kita perlu merencanakan kota, arti penting perkotaan bagi masa depan suatu bangsa, berbagai masalah-masalah pembangunan perkotaan, permasalahan yang sifatnya 'klasik' atau belum terselesaikan misalnya kemiskinan dan kekumuhan, masalah yang akhir-akhir ini muncul contohnya perubahan iklim, hingga hal-hal yang belum dapat kita pastikan apakah merupakan sebuah kesempatan atau, sebaliknya, menjadi tantangan bagi pembangunan perkotaan.

Upaya global dalam menangani isu dan tantangan pembangunan perkotaan juga telah diulas di dalam buku ini. Berbagai komitmen global telah dirumuskan dalam berbagai acuan dan komitmen bersama untuk membangun perkotaan ke arah yang berkelanjutan. Dalam perjalanan menjawab berbagai isu dan tantangan tersebut, juga dilakukan berbagai agenda, forum, dan kegiatan untuk menghasilkan suatu kesepakatan bersama dalam menyelesaikan pembangunan perkotaan.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat urbanisasi paling tinggi berperan aktif dalam mengawal Agenda Baru Perkotaan, baik dalam memberikan masukan substansi maupun sebagai penyelenggara beberapa agenda global, contohnya PrepCom 3 dan Pertemuan Tingkat Tinggi Regional Asia-Pasifik (*High Level Meeting Regional Asia-Pacific*). Tidak hanya sampai pada perumusan dan penetapan Agenda Baru Perkotaan, Indonesia juga secara aktif mendorong implementasi Agenda Baru Perkotaan di tingkat nasional. Indonesia dalam konteks pembangunan telah aktif dan menaruh perhatian pada pembangunan perkotaan dan permukiman. Indonesia telah memiliki berbagai program pengembangan perkotaan contohnya Kampung *Improvement Program*, P2KP, Pamsimas, Sanimas, Kotaku, hingga program Sejuta Rumah. Berbagai kegiatan ini telah memberikan dampak terhadap kondisi perkotaan, khususnya dalam meningkatkan kondisi permukiman yang kumuh dan peningkatan infrastruktur dasar permukiman.

Melihat perkembangan kota-kota di Indonesia, terdapat pola-pola yang relatif sama yaitu *sprawling* dan urbanisasi yang tidak terkendali. Pola-pola perkembangan yang relatif sama dan terkesan tidak terencana ini mengakibatkan isu, masalah dan tantangan yang dihadapi juga relatif sama, meskipun daerah juga memiliki isu dan permasalahan yang spesifik sesuai kondisi wilayah.

Dalam hal ini, dibutuhkan suatu acuan dan target serta indikator melalui berbagai komitmen yang ada, agar pembangunan perkotaan menjadi lebih terarah.

Melihat kondisi dan perkembangan perkotaan saat ini, sesungguhnya telah terdapat banyak kota-kota yang mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kota-kota di Indonesia mulai memperhatikan pembangunan transportasi yang baik, penyediaan RTH, mitigasi bencana, dan lain sebagainya. Perlahan tetapi pasti, kita dapat melihat bahwa kota-kota kita menjadi lebih baik, meskipun masih banyak kekurangan.

Beberapa faktor pendukung misalnya kelembagaan yang mapan, serta kolaborasi dan komitmen bersama dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci sukses pembangunan perkotaan yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah pusat perlu menyediakan payung hukum yang dapat membawahi pembangunan perkotaan secara lebih luas, *grand design* atau *blue print* pembangunan perkotaan nasional, serta menyiapkan kebijakan nasional perkotaan menjadi bagian vital untuk mencapai Pembangunan Perkotaan Indonesia Emas (2045).

Perkotaan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045

Pemerintah telah menetapkan untuk memindahkan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Saat ini, berbagai payung hukum hingga perencanaan telah dan sedang dipersiapkan. Seperti yang telah dijabarkan pada Bab 6, pembangunan ibu kota baru dipersiapkan menuju Indonesia Emas 2045. Nusantara diharapkan dapat menjadi gambaran cita-cita perkotaan masa depan Indonesia bahkan dunia.

Kita perlu menjawab beberapa pertanyaan yang akan menentukan rencana aksi kita selanjutnya.

Sudahkah kota-kota kita memiliki perencanaan perkotaan yang jelas dan terencana?

Apakah Agenda Baru Perkotaan, SDGs, dan komitmen lainnya telah dapat menjadi panduan serta acuan kita dalam membangun perkotaan?

Apakah kota-kota kita memiliki sumber daya manusia, modal ide, dan pembiayaan yang memadai untuk menjalankan rencananya?

Bagaimana political will pemimpin kota kita dalam menuju Indonesia Emas 2045?

Namun, perkotaan menuju Indonesia Emas 2045 perlu untuk kita wujudkan sesegera mungkin, bukan menunggu 2045 melainkan dimulai saat ini juga.

Foto: **Unsplash**

Lampiran

Linimasa Perkembangan Permukiman Perkotaan di Indonesia

1 8 7 0 Tanam Paksa dihapuskan

Perkebunan kopi dengan pekerja-pekerja pribumi.

Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) dan **Suiker Wet** (Undang-Undang Gula) diberlakukan.

UU Agraria memberi hak sewa tanah pada pengusaha swasta untuk memanfaatkan lahan perkebunan selama 75 tahun ke depan. Sementara UU Gula memberi kesempatan pada swasta untuk berinvestasi di pabrik gula dan melarang ekspor bahan mentah. Akibatnya, banyak daerah-daerah di luar Jawa yang tumbuh menjadi perkebunan atau pertambangan hingga membentuk kota-kota baru seperti Medan, Sawahlunto, dan Balikpapan.

1 9 0 0 Jumlah penduduk perkotaan dunia +- 200 juta

1 9 0 1 Ratu Belanda Wilhelmina memberlakukan Politik Etis

Politik Etis membawa kewajiban moral bagi koloni untuk menyejahterakan masyarakat yang mereka jajah. Penerapannya termasuk di bidang pekerjaan umum (seperti pembangunan kanal), pendidikan, kesehatan, dan administrasi yang otonom.

1 9 0 3 Decentralisatie Wet / UU Desentralisasi Ind. Stb no. 329

UU Desentralisasi memberi wewenang kepada dewan daerah dan wali kota untuk menarik pajak, memenuhi dan mengatur kebutuhan masing-masing *gemeente* (kotapraja). Namun, wilayah pribumi (kabupaten) di sekitar kotapraja memiliki kepala-kepala sendiri dan tidak termasuk dalam pemerintahan kotapraja.

1 9 0 5 Batavia, Meester Cornlis (Jatinegara), dan Buitenzorg (Bogor) menjadi kota pertama yang mendapat status *gemeente* (kotapraja). Hingga tahun 1921, ada 32 *gemeente* di Indonesia.

Rapat dewan kota Batavia, 17 Maret 1930.
Sumber: *Gemeente Batavia 1905-1930*, 1930.

1 9 1 2 Vereeniging voor Locale Belangen/Badan Asosiasi Kepentingan Lokal berdiri

Asosiasi ini terdiri dari para tenaga ahli dan pemerintah kota untuk mendiskusikan masalah-masalah urban, serta mengupayakan bantuan teknis dan finansial dari pemerintah pusat. Masalah yang dibicarakan antara lain perencanaan kota, perbaikan kampung, perumahan, penerangan jalan, pengairan, hingga pasar. Asosiasi ini memiliki terbitan berkala berjudul *Locale Belangen*.

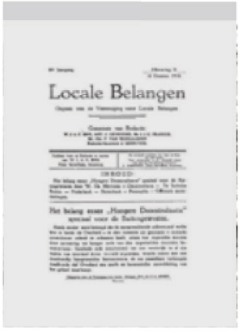
Locale Belangen

Locale Belangen 16 Juni 1928, volume 15, issue 12.

1 9 1 3 Gemeentelijke woningbedrijven /Badan Otoritas Perumahan

Badan ini bertanggung jawab atas kebijakan perumahan rakyat di tingkat kotapraja, juga mengerjakan konstruksinya. Tujuan pendiriannya adalah untuk mengurangi krisis rumah tinggal. Badan otoritas ini juga terdapat di kota-kota lain dengan nama formal yang berbeda, tetapi yang pertama berdiri di Batavia pada 1913.

Pembangunan 54 unit rumah di Kampung Tamansari

Proyek perumahan rakyat Tamansari merupakan proyek pertama Gemeentelijke woningbedrijven/Badan Otoritas Perumahan Batavia, yang ketika itu baru berdiri. Rumah ini dikelola dengan sistem sewa, hingga akhirnya dijual seluruhnya karena dianggap tidak menguntungkan.

KONGRES PROGRAM ORGANISASI REGULASI
PEMBANGUNAN PENERBITAN BUKU KONTEKS UMUM

Kredit:
Yayasan Museum Arsitektur Indonesia (Pameran Suatu Hari yang Baik 2045)

Linimasa Perkembangan Permukiman Perkotaan di Indonesia

1914 Perang Dunia I dimulai dan berakhir pada 1918.

1916 Pemerintah kotapraja Semarang membangun perumahan rakyat berskala besar lewat Badan Otoritas Perumahan

Proyek ini merupakan proyek pembangunan perumahan berskala besar pertama di Indonesia. Hingga 1929, badan otoritas perumahan setempat telah membangun 1.782 rumah, dan mendapat keuntungan dari biaya sewa.

Hendrik Tillema menerbitkan buku *Kromoblanda* bagian I dan II

Dokumentasi kondisi permukiman di Hindia Belanda.
Sumber: *Kromoblanda*, 1916.

Kromoblanda terdiri dari 5 bagian dan 6 jilid. Bagian terakhir terbit di tahun 1922. Kromoblanda mendokumentasikan masalah permukiman di Hindia Belanda, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan penataan lingkungan.

1917 Pemerintah Kota Surabaya membentuk Grond- en Woningbedriff (Perusahaan Tanah dan Perumahan)

Perusahaan Tanah dan Perumahan bertugas mengelola tanah di Ketabang dan area lainnya.

Nieuwe Wijk (Kota Baru) berdiri di Yogyakarta

Kawasan seluas 70 hektar ini dibangun atas seizin sultan untuk permukiman orang-orang Belanda, berisi perumahan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas olahraga. Pembangunannya selesai pada 1920.

1918 Amandemen UU Desentralisasi

Amandemen ini mengizinkan pemerintah kota memasukkan kampung sebagai wilayah otoritasnya tanpa menyediakan anggaran untuk perbaikan kampung.

1920 *Kampongverbetering* (Program Perbaikan Kampung) dimulai

Tahun 1920 dimulai di Batavia, kemudian tahun 1924 di Surabaya dan Semarang, dan di beberapa kota lain setelah 1925.

1922 Kongres Desentralisasi Semarang, Jawa Tengah

Kongresi ini membahas empat topik: Kesehatan umum, perencanaan kota, teknik arsitektural, serta masalah sosial-politik dan keuangan. Hasilnya adalah pandangan akan perlunya perencanaan kota untuk mengendalikan pertumbuhan tidak terencana dan menjaga kualitas kesehatan lingkungan, termasuk pada permukiman pribumi.

Kongres Perumahan Rakyat 15-17 April 1922

Hasil kongres ini adalah rekomendasi bahwa sistem perbaikan perumahan rakyat harus didasarkan pada kelembagaan setempat, sementara pemerintah pusat harus mendirikan badan nasional untuk urusan kesehatan masyarakat, yang juga dapat mengawasi perbaikan perumahan.

1925 Kongres Perumahan Pribumi 1-3 Agustus 1925

Hasil dari kongres ini adalah rekomendasi tindakan praktis untuk perbaikan jalan, jembatan, jaringan pipa di kampung; menegakkan ketaatan pada peraturan; pembangunan perumahan pemerintah; memberikan kredit murah; dan melibatkan pemerintah kotapraja dalam perbaikan kampung (dalam aturan desentralisasi, otoritas pemerintah kotapraja tidak mencakup wilayah desa di sekitarnya hingga 1926).

NV Volkshuisvesting berdiri

Volkshuisvesting adalah perusahaan perumahan yang didirikan oleh pemerintah Belanda untuk mengadakan perumahan di tingkat kotamadya, termasuk untuk memperoleh tanah dan modal pembangunannya. Tahun 1926, Volkshuisvesting Semarang, Cirebon, dan Batavia mulai beroperasi, disusul Surabaya dan Makassar di tahun berikutnya. Hingga tahun 1932, Volkshuisvesting sudah berdiri di 16 kota. Namun karena tidak menguntungkan, Volkshuisvesting di berbagai kota berangsur melikuidasi asetnya sejak tahun 1949.

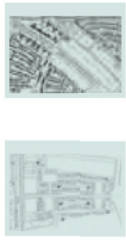

Rencana penataan permukiman milik NV Volkshuisvesting di Kampung Mlaten, Semarang oleh arsitek Thomas Karsten, 1925. Sumber: KIT; *Locale Techniek* 1 (1/2), Januari-April, 1932.

1928 NV Volkshuisvesting Surabaya membangun 458 rumah

Tipe rumah yang dibangun antara lain 336 pondok pekerja, 110 rumah untuk warga pribumi, dan 12 rumah untuk warga Eurasia.

Kredit:
Yayasan Museum Arsitektur Indonesia (Pameran Suatu Hari yang Baik 2045)

Linimasa Perkembangan Permukiman Perkotaan di Indonesia

Rumah kelas menengah di Semarang yang didirikan oleh NV Volkshuisvesting, sekitar 1930. Sumber: Gedenkboek, 1931

1 9 2 9 Kongres Desentralisasi di Semarang

Hasil kongres ini adalah rekomendasi penghapusan otonomi desa di wilayah kotapraja dan masuknya desa ke dalam otoritas pemerintah kotapraja.

Sensus penduduk ketiga

Sensus pertama dilakukan pada 1815 dan sensus kedua pada 1920 (hasil tidak diketahui). Pada sensus ketiga, lima kota dengan populasi tertinggi antara lain: Batavia 435.000 jiwa, Surabaya 341.675 jiwa, Semarang 217.796 jiwa, Bandung 166.815 jiwa, dan Palembang 108.145 jiwa.

1 9 3 2 NV Volkhuisvesting telah membangun 2.764 rumah di berbagai kota

Semarang 672 rumah, Cirebon 102 rumah, Batavia 425 rumah, Surabaya 1.257 rumah, Makassar 187 rumah, Buitenzorg (Bogor) 28 rumah, Sukabumi 39 rumah, Palembang 32 rumah, Madiun 22 rumah

1 9 3 4 Pemerintah membentuk Komite Perencanaan Kota (1884–1945)

Tugas Komite Perencanaan Kota adalah menyusun dasar-dasar perkembangan kota dan merumuskan regulasi untuk pengembangan kota, khususnya Jawa dan Madura. Komite ini dikepalai oleh arsitek Thomas Karsten, dan salah satu anggotanya adalah M.H. Thamrin.

1 9 3 8 Komite Perencanaan Kota menerbitkan Ordonansi Perencanaan Kota-Kota di Jawa beserta Memorandumnya

Rencana *Stadsvormingsordonnantie Stadsgemeenten Java* / Ordonansi Perencanaan Kota-Kota di Jawa membagi kota ke dalam zona-zona kelompok masyarakat dan aktivitas untuk membangun keharmonisan fungsi dan estetika pada lanskap kota. Pembagian zona secara etnis dihapus dan digantikan dengan pembagian berdasarkan kelas sosial. Penerapan rencana ini terhenti karena Perang Dunia II, namun menjadi dasar bagi SVO dan SVV yang terbit satu dekade kemudian.

Pemerintah membentuk Commissie voor de Kampongverbetering / Komisi Perbaikan Kampung

Tugas Komisi Perbaikan Kampung adalah melakukan survei di seluruh kotapraja dan menyusun laporan. Satu tahun setelah berdiri, Komisi Perbaikan Kampung menerbitkan laporan pertamanya yang menyimpulkan bahwa program perbaikan kampung telah gagal, begitu pula dengan NV Volkshuisvesting, yang diduga karena pesatnya pertambahan jumlah penduduk.

Perang Dunia II dimulai dan berakhir tahun 1945

1 9 4 2 Pendudukan Jepang di Indonesia

1 9 4 5 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sukarno membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

1 9 4 6 Pembentukan Central Planning Bureau (CPB)

CPB awalnya berdiri dengan nama Planning Bureau (PB). Tugas utamanya adalah merencanakan dan mengkoordinir rencana pembangunan di tingkat lokal, regional, dan nasional.

1 9 4 7 Agresi Militer Belanda I

1 9 4 8 Agresi Militer Belanda II

***Stadsvormingordonnantie* (SVO) / Ordonansi Pembentukan Kota diterbitkan**
Pembentukan

SVO mengatur pembentukan kota, terutama untuk kepentingan pembangunan kembali kota yang rusak akibat perang secara cepat. Tiga belas kota yang disebutkan dalam SVO antara lain: Batavia, Tegal, Pekalongan, Semarang, Salatiga, Surabaya, Malang, Cilacap, Tangerang, Bekasi, Padang, Palembang, dan Banjarmasin. Setahun kemudian, *Stadsvormings Verordening* (SVV) / Peraturan Pembentukan Kota diterbitkan untuk memberikan panduang praktis penerapan SVO.

1 9 4 9 Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda

Pembangunan Kota Satelit Kebayoran Baru dimulai

Kebayoran Baru adalah kota satelit dengan model kota taman (*garden city*) yang menggabungkan fasilitas perkotaan dengan kualitas lingkungan rural, dengan kepadatan yang rendah, pola bangunan menyebar, dan dikelilingi oleh *greenbelt*. Semula, Kebayoran Baru ditujukan untuk rumah-rumah dinas dan perumahan rakyat, dengan kapasitas 100.000 penduduk. Pembangunan kawasan ini selesai pada pertengahan dekade 1950.

Kredit:
Yayasan Museum Arsitektur Indonesia
(Pameran Suatu Hari yang Baik 2045)

Linimasa Perkembangan Permukiman Perkotaan di Indonesia

11" / Tablet 2

Peta rencana serta berbagai tipe rumah, fasilitas, dan infrastruktur di Kebayoran Baru, sekitar 1950. Sumber: *A New Satellite Town Near Jakarta*, 1953

● Thomas Nix menerbitkan *Stedebouw in Indonesie en De Stedenbouwkundige Vormgeving*

Buku *Stedebouw in Indonesie en De Stedenbouwkundige Vormgeving / Perencanaan Kota di Indonesia dan Perancangan Perkotaan* mempelajari perancangan tata kota dan penerapannya di Indonesia, termasuk pola perkampungan dan perumahan kecil sederhana.

Rencana pola permukiman pada sebuah kampung, lengkap dengan perkembangan pola jalan dan saluran airnya. Sumber: *Stedebouw in Indonesie en De Stedebouwkundige Vormgeving*, 1949.

● 1 9 5 0 Kongres Perumahan Rakyat Sehat I. Bandung, 25-30 Agustus 1950

Kongres ini menghasilkan standar-standar rumah sehat, seperti ukuran rumah induk seluas 36m2 dan rumah samping (paviliun) 17,5m2, dengan tinggi langit-langit 2,75m dan luas lubang angin dan jendela 10% dari luas lantai.

● Jumlah penduduk perkotaan dunia +- 740 juta

● Pemerintah Semarang mendirikan rumah-rumah sehat

Berdasarkan hasil Kongres Perumahan Rakyat Sehat di Bandung, pemerintah kota Semarang mulai membangun rumah-rumah di beberapa lokasi. Di tahun 1950 berdiri 55 rumah, 36 unit lagi di tahun berikutnya, dan 68 unit di tahun 1952.

● 1 9 5 1 Djawatan Perumahan Rakyat berdiri

Tugas pokok Djawatan Perumahan Rakyat antara lain melakukan penelitian teknis-teknologis, membuat konsep pemikiran kebijakan perumahan, mengadakan bimbingan teknis, dan mengatur pembiayaan pembangunan perumahan.

● 1 9 5 2 Yayasan Kas Pembangunan (YKP) berdiri

YKP adalah koperasi rakyat di daerah otonom tingkat II, di mana masyarakat dapat menabung untuk pembangunan rumahnya. Selain itu, YKP bertugas mendirikan rumah murah dan menyewakan atau menjualnya di bawah harga pasar pada penabung.

● Kongres Perumahan Rakyat dan Koperasi II. Jakarta, 4 Agustus 1952

Dalam kongres ini, Wakil Presiden Mohammad Hatta memberikan amanatnya terkait perwujudan perumahan rakyat.

"CITA-CITA UNTUK TERSELENGGARANYA KEBUTUHAN PERUMAHAN RAKYAT BUKAN MUSTAHIL APABILA KITA SUNGGUH-SUNGGUH MAU DENGAN PENUH KEPERCAYAAN, SEMUA PASTI BISA."

"MEMANG CITA-CITA ITU TIDAK AKAN TERCAPAI DALAM SETAHUN DUA TAHUN TIDAK AKAN TERSELENGGARA SEMUANYA DALAM 10 ATAU 20 TAHUN, TETAPI DALAM 40 TAHUN ATAU SETENGAH ABAD PASTI DAPAT TERCAPAI APABILA KITA SUNGGUH-SUNGGUH MAU DAN BERUSAHA DENGAN PENUH KEPERCAYAAN."

Bung Hatta dalam Kongres Perumahan Rakyat dan Koperasi II, 1952. Sumber: ANRI.

● 1 9 5 7 LPMB mengembangkan Prototipe Rumah Sederhana

Prototipe Rumah Sederhana dibangun dalam rentang 1957-1968 antara lain di Jawa, Kalimantan, dan Papua, dengan fungsi sebagai rumah dinas. Tujuannya adalah mencari model rumah yang mudah diterima masyarakat, dengan sistem pembangunan yang mudah dilaksanakan, dan biaya pembangunan yang rendah. Tipe yang digunakan adalah ukuran 45m2. Uji coba prototipe ini menyimpulkan bahwa sistem pembangunan dengan biaya paling rendah adalah dengan pembangunan massal dengan sistem *pre-cut*.

● KONGRES ● PROGRAM ● ORGANISASI ● REGULASI
● PEMBANGUNAN ● PENERBITAN BUKU ● KONTEKS UMUM

Kredit:
Yayasan Museum Arsitektur Indonesia (Pameran Suatu Hari yang Baik 2045)

Linimasa Perkembangan Permukiman Perkotaan di Indonesia

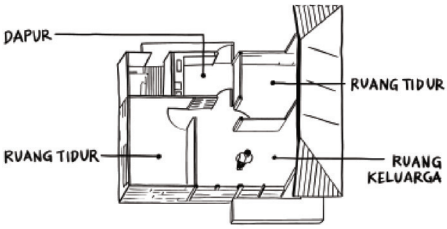

Salah satu model Prototipe Rumah Sederhana. 1957.
Sumber: *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, 1991.

1 9 6 0 Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

UU ini mengatur agar semua tanah harus didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan berprinsip bahwa negara menguasai tanah. Tujuannya adalah menghilangkan dualisme status tanah pada era kolonial, yang membagi status tanah ke dalam formal (yang dimiliki orang Eropa) dan informal (yang dimiliki orang Indonesia, termasuk tanah adat)

Jumlah penduduk perkotaan dunia +-1,02 miliar

14,5 juta / 14,59% penduduk Indonesia tinggal di area urban

1 9 6 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan

Untuk mencukupi kebutuhan akan perumahan, Perpu ini memberi hak pada setiap warga negara dan badan swasta untuk membangun perumahan baik untuk keperluan sendiri maupun disewakan, juga kepada warga negara asing untuk keperluan sendiri. Perpu ini ditetapkan menjadi UU no. 1 tahun 1964 yang mewajibkan masyarakat ikut serta dalam pengadaan perumahan, sementara pemerintah berperan sebagai penyedia dan pemberi bantuan.

1 9 6 6 Indonesia memasuki era Orde Baru

Soeharto, Presiden RI ke-2.

1 9 6 8 Rencana Undang Undang Bina Kota

RUU ini disiapkan untuk menggantikan SVO yang substansinya sudah tidak relevan. RUU Bina Kota mengatur pemanfaatan tanah serta wewenang pemerintah kota. Mengacu pada gagasan Le Corbusier, kota dibagi ke dalam zona *recreation, working, living,* dan *transportation,* yang kemudian diterjemahkan menjadi wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna. Namun RUU ini tidak pernah terwujud menjadi UU.

1 9 6 9 Repelita I. 1969–1974

Fokus Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) I adalah memenuhi kebutuhan mendasar, salah satunya adalah pengadaan perumahan. Beberapa kegiatan menonjol antara lain: pengembangan proyek prototipe dan percontohan perumahan di daerah perkotaan, pengembangan sistem produksi bahan bangunan murah, sistem penyuluhan lewat Pusat Penyuluhan Teknik Bangunan.

Kampung Improvement Program (KIP) / Proyek Mohammad Husni Thamrin (MHT)

Proyek MHT adalah program perbaikan kampung pertama yang menunjukan hasil memuaskan. Program ini diselenggarakan dan didanai oleh pemerintah kota Jakarta, dan direncanakan oleh tenaga ahli dalam Tim Teknis KIP.

Tiga bentuk infrastruktur yang dijangkau dalam Proyek MHT antara lain: (1) perkerasan jalan, jembatan, dan pedestrian, (2) suplai air, sanitasi dan drainase, (3) sekolah dan klinik. Proyek ini mendapatkan Aga Khan Award for Architecture pada 1978.

Dokumentasi Kampung *Improvement Program*, sekitar 1969.
Sumber: Aga Khan Foundation.

1 9 7 2 Lokakarya Nasional Kebijaksanaan Perumahan & Pembiayaan Pembangunan. Jakarta, 4-6 Mei 1972

Rumusan rekomendasi hasil lokakarya ini terdiri dari 3 pokok: 1) Sistem kelembagaan di mana pemerintah mengadakan badan yang menangani kebijakan nasional perumahan. 2) Sistem pembiayaan di mana pemerintah melakukan pemupukan dana untuk membiayai perumahan dan usaha yang menunjang program perumahan melalui kredit perbankan. 3) Sistem penunjang di mana pemerintah perlu menjamin kelancaran pengadaan tanah, pengembangan industri konstruksi dan bahan bangunan, serta penunjang program perumahan melalui sistem perpajakan.

Kredit:
Yayasan Museum Arsitektur Indonesia (Pameran Suatu Hari yang Baik 2045)

Linimasa Perkembangan Permukiman Perkotaan di Indonesia

United Nations Conference on the Human Environment (UNCHE). Stockholm, 5 - 16 Juni 1972

Indonesia mengikuti UNCHE di Stockholm bersama 112 negara lainnya. Dalam konferensi ini, UN mengangkat masalah lingkungan sebagai isu utama. Konferensi ini menghasilkan rencana aksi dengan 109 rekomendasi dan resolusi dan "Deklarasi Stockholm" yang berisi 26 prinsip preservasi dan pembangunan lingkungan.

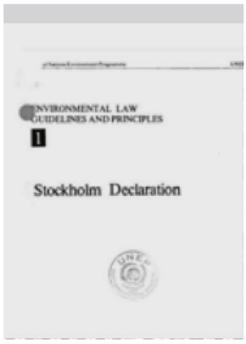

Deklarasi Stockholm, 1972.

Persatuan Real Estate Indonesia (REI) berdiri

Tugasnya adalah menghimpun pengusaha *real estate* di Indonesia yang menangani pembangunan rumah kelas menengah dan mewah.

1 9 7 4 Repelita II. 1974–1979

Fokus pada Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) II adalah meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi. Pembangunan rumah dikhususkan untuk yang bersifat mendesak, seperti untuk masyarakat berpenghasilan rendah di kota dan untuk daerah berkebutuhan khusus di desa. Di luar itu, peran pemerintah adalah mengembangkan faktor-faktor pendukungnya pengadaan perumahan, seperti ketersediaan tanah, sanitasi lingkungan, dan air minum, lembaga-lembaga pemberi hipotek dan koperasi perumahan, serta memberikan penyuluhan dan bantuan teknis.

Perum Perumnas dan BTN berdiri

Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perum Perumnas) dan Bank Tabungan Negara (BTN) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perum Perumnas bertugas membangun rumah murah atau sederhana beserta prasarana lingkungannya, sedang BTN bertugas memberi layanan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) sebagai lembaga pembiayaan perumahan.

Peresmian salah satu rumah sederhana pertama Perumnas, Proyek Depok II, bersama Wakil Presiden Adam Malik, 1970. Sumber: Kompas/JB Suratno.

Kampung Improvement Program diterapkan kembali di Jakarta dan Surabaya

Setelah keberhasilan proyek MHT di Jakarta, pemerintah pusat mengadaptasi dan menyelenggarakan kembali Kampung Improvement Program di Jakarta dan Surabaya. Pekerjaannya mencakup perbaikan fisik hunian, dengan dana pinjaman dari Bank Dunia dan Asian Development Bank.

1 9 7 5 PBB mendirikan United Nations Habitat and Human Settlements Foundation (UNHHSF) / Yayasan Habitat dan Permukiman

UNHHSF adalah lembaga resmi pertama PBB yang menangani masalah urbanisasi dan merupakan cikal bakal UN-HABITAT saat ini.

1 9 7 6 Sutami menerbitkan esai "Ilmu Wilayah dalam Kaitannya dengan Analisa Kebijaksanaan dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia"

Sutami, Menteri Pekerjaan Umum dari tahun 1966 hingga 1978, menerbitkan esai ini untuk upacara pengukuhan gelar guru besarnya. Esai ini dikembangkan menjadi buku berjudul *Ilmu Wilayah* yang terbit pada 1980, membahas pengelolaan wilayah yang mencakup masalah lingkungan, kependudukan, kebijakan, ekonomi, dan pembangunan.

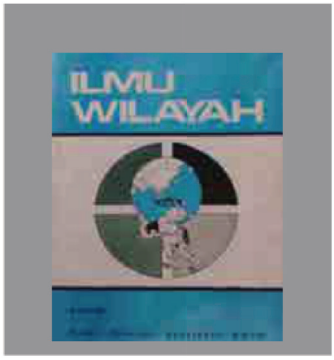

Ilmu Wilayah ditulis oleh Ir. Sutami.

Kredit:
Yayasan Museum Arsitektur Indonesia (Pameran Suatu Hari yang Baik 2045)

Linimasa Perkembangan Permukiman Perkotaan di Indonesia

1 9 7 6 Habitat I. Vancouver, 31 Mei – 11 Juni 1976

Indonesia menghadiri konferensi ini bersama 139 negara lainnya. Dalam konferensi ini, UN membahas tantangan urbanisasi untuk pertama kalinya. Konferensi ini menghasilkan "Deklarasi Vancouver" yang pertama kali mendefinisikan 'naungan yang layak' dan menempatkannya sebagai hak asasi manusia. Konferensi ini juga merekomendasikan rencana aksi di tingkat nasional yang mencakup bidang kebijakan dan strategi permukiman, perencanaan permukiman, kebijakan hunian, infrastruktur, dan layanan dasar, manajemen lahan, partisipasi publik, serta kelembagaan dan manajemen.

11" / Tablet 3

"Rural Housing Improvement", video profil yang disiapkan oleh komite persiapan nasional untuk Habitat 76. Sumber: Youtube/Habitat Conferences Digital Archives

Berbagai *real estate* berskala besar mulai dibangun di Jakarta dan sekitarnya

Setelah REI berdiri, berbagai pengembang swasta mulai membangun *real estate* berskala besar di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Beberapa di antaranya adalah Summarecon Kelapa Gading (1976), Bintaro Jaya (1979), Bumi Serpong Damai (1989), Pantai Indah Kapuk (1990), dan Lippo Karawaci (1990).

PBB mendirikan United Nations Commission on Human Settlements dan United Nations Centre for Human Settlements (Habitat)

1 9 7 9 Repelita III. 1979–1984

Pokok kebijakan Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) III mencakup pemerataan pembangunan perumahan, air bersih, dan penyehatan lingkungan. Hal ini dicapai melalui pembangunan rumah sederhana, produksi bahan bangunan secara massal, dan pembinaan pembangunan permukiman sehat di pedesaan dan perkotaan.

1 9 8 0
Jumlah penduduk perkotaan dunia +-1,75 miliar

32,75 juta / 22,1% penduduk Indonesia tinggal di area urban

PT Papan Sejahtera berdiri

PT Papan Sejahtera adalah lembaga keuangan non-bank yang tugas pokoknya adalah memberikan kredit jangka menengah rumah pertama dan tidak mewah kepada individu atau perusahaan. Sasaran utama perseroan ini adalah masyarakat berpenghasilan menengah.

1 9 8 2 KIP dicanangkan sebagai program nasional

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU ini merupakan payung hukum pertama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. UU ini menetapkan beberapa instrumen perlindungan lingkungan, di antaranya analisis dampak lingkungan dan analisis kualitas lingkungan. UU ini digantikan oleh UU no. 23 tahun 1997, kemudian oleh UU no. 32 tahun 2009.

1 9 8 4 Repelita IV. 1984-1989

Pokok kebijakan pembangunan di Repelita IV mencakup upaya pengadaan rumah secara mandiri oleh masyarakat melalui kredit pemilikan atau pembangunan, dan pemugaran rumah di pedesaan. Selain itu, pemerintah mendapat investasi Bank Dunia untuk sektor pelayanan kota (urban service sector) yang mencakup: suplai air bersih, sanitasi dan drainase, perbaikan kampung, pembangunan jalan kota, dan transportasi publik.

1 9 8 5 Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT)

P3KT adalah program perbaikan kota yang mencakup sistem pasokan air bersih, drainase dan sanitasi, pembuangan kotoran manusia dan sampah, perbaikan kampung, transportasi, pengembangan tanah dan perumahan. Program ini dilaksanakan di Medan, Surabaya, Jabodetabek, Semarang - Surakarta dan Kalimantan dengan nama yang berbeda-beda, menggunakan dana pinjaman Bank Dunia dan dari APBN.

Laporan P3KT Jilid I, 1985.

Lahirnya *World Habitat Day* (WHD) / Hari Habitat Dunia (HHD)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Hari Habitat Dunia (HHD) jatuh pada hari Senin di minggu pertama Oktober setiap tahunnya. Dalam rangka HHD, UN Habitat mengadakan Global Observance setiap tahunnya sejak 1986, sebagai ajang refleksi atas keadaan terkini dari habitat manusia dan hak dasar bagi semua orang untuk memiliki tempat tinggal yang layak.

Kredit:
Yayasan Museum Arsitektur Indonesia (Pameran Suatu Hari yang Baik 2045)

Linimasa Perkembangan Permukiman Perkotaan di Indonesia

1988 Pembangunan Kapling Siap Bangun (KSB)

Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak dapat memenuhi persyaratan program Perum Perumnas dan BTN. Program KSB tidak menyediakan bangunan rumah, melainkan kapling, jalan, toilet umum, dan warung, sementara warga membangun sendiri rumahnya. Luas kapling yang digunakan dalam KSB adalah 54m2, 60m2, dan 72m2. Ujicoba dilakukan tahun 1988 dengan membangun 100 rumah di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Tahun 1989, program ini resmi menjadi program nasional dengan fasilitas kredit kepemilikan dari BTN.

Rumah Kapling Siap Bangun di Bekasi, Jawa Barat, tanpa tahun. Sumber: *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, 1991.

1989 Repelita V. 1989-1994

Prioritas pembangunan di era ini terletak pada persiapan pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada pembangunan di pedesaan yang cukup padat dan berpotensi menjadi pusat ekonomi, pelayanan, pariwisata, dan industri kecil.

Jakarta menjadi tuan rumah *Global Observance* dalam rangka Hari Habitat Dunia dengan tema "Shelter, Health and the Family".

Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional berdiri

Tugas utama Tim Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional adalah merumuskan strategi, mengkoordinasikan penanganan, dan menetapkan prosedur pengelolaan tata ruang, serta meneliti masalah yang timbul dan memberi saran pemecahannya. Tim ini menjadi badan resmi di tahun 1993.

1990 Jumlah penduduk perkotaan dunia +-2,28 miliar

55,71 juta / 30,58% Penduduk Indonesia tinggal di area urban

1991 Tim penulis dari Kementerian Perumahan Rakyat menerbitkan buku *Rumah untuk Seluruh Rakyat*

Rumah untuk Seluruh Rakyat merupakan salah satu buku pertama yang mencatat upaya panjang pemerintah mengadakan perumahan rakyat.

Buku ini juga secara singkat menjelaskan bentuk-bentuk permukiman tradisional, peninggalan kolonial, dan bentuk-bentuk kerja sama internasional dalam penelitian dan pembangunan perumahan.

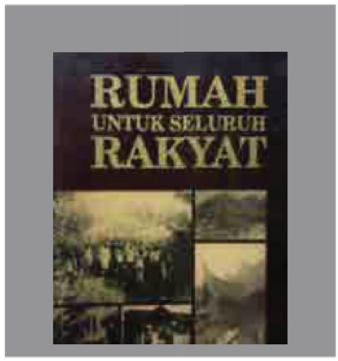

Rumah untuk Seluruh Rakyat, 1991.

1992 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

UU ini mengatur agar perkembangan perumahan dalam suatu kota berlangsung secara padu, menghindari perkembangan tidak terkendali akibat pembangunan liar dan pembangunan *real estate* yang tidak terintegrasi dengan bagian kota lainnya. Terbitnya UU ini juga meniadakan SVO, yang semula akan digantikan oleh RUU Bina Kota. UU ini digantikan oleh UU no. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pembangunan 500.000 rumah sederhana (RS) dan rumah sangat sederhana (RSS)

Program ini dijalankan oleh Perum Perumnas di 150 kota. Hampir separuhnya tercapai di tahun 1998.

Rumah sederhana tipe Mawar yang dibangun Perum Perumnas, tanpa tahun. Sumber: *Rumah Untuk Seluruh Rakyat*, 1991.

Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

UU ini membagi fungsi wilayah Indonesia ke dalam kawasan lindung dan budi daya. Kawasan lindung berfungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup, sedangkan kawasan budi daya berfungsi untuk dibudidayakan berdasarkan kondisi dan potensinya. UU ini digantikan oleh UU no.26 tahun 2007.

Kredit:
Yayasan Museum Arsitektur Indonesia (Pameran Suatu Hari yang Baik 2045)

Linimasa Perkembangan Permukiman Perkotaan di Indonesia

1 9 9 3 Paket Kebijakan 23 Oktober 1993

Paket Kebijakan 23 Oktober 1993 atau Pakto 1993 adalah deregulasi yang dilakukan pemerintah untuk memperlancar arus investasi dan mendorong pemberian izin lokasi untuk pembangunan perumahan. Ledakan pembangunan ini utamanya terjadi di Jawa Barat.

1 9 9 4 Berbagai inisiatif membangun kota baru di sekitar Jakarta muncul

Setelah deregulasi lewat Pakto 1993, berbagai pengembang swasta mengajukan pembangunan kota baru di sekitar Jakarta. Beberapa di antaranya adalah Sentul City (1994), Citra Raya (1994), Alam Sutera (1994), Rancamaya (1993), Lippo Village dan Lippo Cikarang (1993).

Repelita VI. 1994 - tidak selesai

Era ini dipersiapkan sebagai era pembangunan nasional.

1 9 9 6 Habitat II. Istanbul, 3-14 Juni 1996

Habitat II dihadiri oleh 171 perwakilan negara, termasuk Indonesia. Konferensi ini menyasar dua tema global, yaitu hunian yang memadai bagi semua dan pembangunan permukiman berkelanjutan di tengah urbanisasi global.Komitmen yang disepakati dalam Habitat II, yaitu hunian yang layak untuk semua, permukiman yang berkelanjutan, pemberdayaan dan partisipasi, kesetaraan gender, pembiayaan untuk perumahan dan permukiman, kerja sama internasional, serta pengukuran capaiannya.

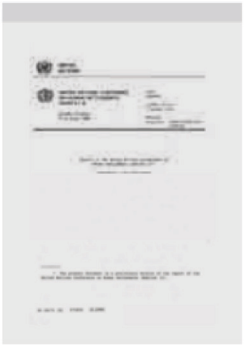

Laporan dan poster Konferensi Habitat II, 1996.

YKP telah membangun 9.000 rumah sejak era Orde Baru (1966)

1 9 9 7 Krisis Finansial Asia

1 9 9 8 Kerusuhan Mei 1998, Reformasi

1 9 9 9 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU ini adalah yang pertama memberlakukan otonomi daerah, di mana daerah provinsi, kota, dan kabupaten berwenang mengatur pembiayaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, termasuk tata ruang, berdasarkan kepentingan masyarakat setempat. UU ini digantikan oleh UU no. 32 tahun 2004, kemudian oleh UU no. 23 tahun 2014.

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

Program ini memberikan pinjaman bergulir dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di lingkup kelurahan/desa agar mereka dapat memutuskan barang dan layanan umum apa yang paling mereka perlukan. Fase kedua program ini juga melibatkan lembaga-lembaga masyarakat dan pemerintah lokal dalam pengelolaan dana.

2 0 0 0 *Millennium Development Goals* (MDGs)

MDGs adalah komitmen negara-negara anggota PBB yang terdiri dari 8 poin: (1) menghapus kemiskinan dan kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar secara universal, (3) mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, (4) mengurangi kematian anak-anak, (5) meningkatkan kesehatan maternal, (6) melawan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, (7) menjamin keberlanjutan lingkungan, dan (8) mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan. MDGs ditargetkan tercapai pada 2015.

Jumlah penduduk perkotaan dunia +-2,87 miliar

89,91 juta / 30,58% penduduk Indonesia tinggal di area urban

2 0 0 1 Komite Nasional Agenda Habitat berdiri

Dalam rangka melaksanakan keputusan Agenda Habitat II dan melaporkan hasil pelaksanaannya, Indonesia membentuk Komite Nasional Agenda Habitat. Laporan komite ini disampaikan dalam pertemuan Habitat II Agenda Implementation tahun 2001 di New York. Komite ini menjadi cikal bakal Sekretariat Nasional Habitat yang berdiri pada 2008.

2 0 0 2 UN-Habitat terbentuk

PBB menggabungkan Komisi Permukiman Manusia dan Pusat Permukiman Manusia (Habitat) PBB, termasuk Yayasan Habitat dan Permukiman PBB, menjadi UN-Habitat.

Kredit:
Yayasan Museum Arsitektur Indonesia (Pameran Suatu Hari yang Baik 2045)

Linimasa Perkembangan Permukiman Perkotaan di Indonesia

2003 Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)

SANIMAS adalah program penyediaan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan, dengan masyarakat sebagai aktor utama dalam perencanaan, pembangunan, operasional, dan pemeliharaan fasilitas komunal. Program pilotnya dilaksanakan di 25 lokasi di 4 provinsi pada 2003-2005. Di tahun 2006, program ini diterapkan di tingkat nasional, yang menyasar 400 lokasi.

2005 Adaptasi metode *Takakura Home Composting* (THC) di Surabaya

Bekerja sama dengan Kitakyushu, Surabaya mengadaptasi *Takakura Home Composting* (THC), yakni metode pengolahan dan pengomposan sampah padat, melalui program *Green Sister City*.

Super Depo Sutorejo yang didirikan pemerintah kota Surabaya pada 2013 dengan mengembangkan metode THC. Sumber: Pemerintah Kota Surabaya.

Jakarta kembali menjadi tuan rumah *Global Observance* dalam rangka HHD dengan tema "*The Millennium Development Goals and the City*"

The Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP)

Program ini adalah kelanjutan dari P2KP. Targetnya adalah meningkatkan kondisi permukiman kumuh dan menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di area rural.

2006 Program pembangunan 1.000 *tower* rumah susun

Program 1.000 *tower* rumah susun sederhana hak milik (Rusunami) digagas pemerintah pusat. Rencananya, Rusunami ini akan dibangun di kota-kota yang berpenduduk di atas dua juta jiwa, masing-masing berketinggian 20 lantai. Namun, hingga 2012 baru 10% yang terbangun dan banyak di antaranya yang tidak berpenghuni atau terhenti pembangunannya.

Tempat Pembuangan Sampah 3R (TPS 3R)

TPS 3R merupakan upaya pengolahan dan pengurangan volume sampah berbasis *reuse, reduce, recycle*. Hingga tahun ini, sudah ada lebih dari 1.200 TPR 3R yang dibangun di 32 provinsi di Indonesia.

2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 diluncurkan

RPJPN adalah rencana 20 tahunan pertama yang dimiliki Indonesia. Yang ingin dicapai di tahun 2025 adalah manusia yang beretika; bangsa yang berdaya saing; negara yang demokratis dan aman; pembangunan yang merata dan adil; lingkungan yang asri dan lestari; negara kepulauan yang mandiri, maju, dan kuat; dan peran aktif dalam pergaulan internasional.

Pertama kalinya jumlah penduduk perkotaan dunia setara dengan penduduk rural

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Program ini merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (1998) dan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (1999). PNPM Mandiri bertujuan mengajak masyarakat untuk merancang dan menyetujui agenda pembangunan mereka sendiri, bersama dengan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. Program ini dilaksanakan hingga 2014.

2008 Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) dimulai

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) adalah sarana pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan yang dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat. PAMSIMAS I dijalankan pada 2008-2012 dengan sasaran 6.834 desa di 15 provinsi. PAMSIMAS II berlangsung pada 2013-2015 dan menyasar 12.000 desa di 32 provinsi. Dan PAMSIMAS III berakhir pada 2020 dengan target 15.000 desa.

11" / Tablet 4

Video profil program PAMSIMAS, 2021
Sumber: Youtube/pupr_ciptakarya

2009 Kongres Nasional Perumahan dan Permukiman II. Jakarta, 19 Mei 2009

Lewat kongres ini, perumahan kini dianggap sebagai hak asasi manusia, bukan hanya hak bertempat tinggal. Ada 6 indikator pemenuhan perumahan: (1) sifat kepemilikan hak, (2) ketersediaan pelayanan, (3) keterjangkauan daya beli, (4) kelayakan tempat tinggal, (5) aksesibilitas, (6) kesiapan lokasi dan daya dukung budaya. Selain itu, kongres ini juga menekankan bahwa tanggung jawab pengadaan rumah ada di pemerintah daerah, bukan lagi di pemerintah pusat dan pengembang.

2010 Jumlah penduduk perkotaan dunia +-3,37 miliar

Kredit:
Yayasan Museum Arsitektur Indonesia (Pameran Suatu Hari yang Baik 2045)

Linimasa Perkembangan Perkotaan di Indonesia

● 121,8 juta / 49,91% Penduduk Indonesia tinggal di area urban

Perbandingan penduduk urban dan rural di Indonesia.

● Fase 2 P2KP berakhir

Pembangunan mencakup 7.000 m jalan besar dan jalan kecil, 2 juta meter saluran air, 54.000 unit fasilitas air bersih dan sanitasi, perbaikan 20.000 rumah, akses listrik untuk 10.000 rumah, 1.000 klinik kesehatan, dan rehabilitasi 80 gedung sekolah.

● *Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development* (APMCHUD) ke-3 digelar di Solo

Dalam konferensi ini disepakati "Deklarasi Solo" yang memuat 15 poin kesepakatan terkait perencanaan dan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencapaian MDGs dalam bidang air minum dan sanitasi, pembiayaan perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan, serta penanganan perubahan iklim.

● 2011 Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM)

SPBM merupakan program pendukung PNPM Mandiri untuk meningkatkan penyediaan sarana sanitasi komunal berbasis masyarakat, khususnya di daerah berpenduduk padat dan kumuh. Lokasi yang menjadi sasaran SPBM berada di 34 kabupaten/kota yang sudah menjadi lokasi pelaksanaan P2KP sebelumnya.

● 2014 *Neighborhood Upgrading and Shelter Project - Phase 2* (NUSP-2)

NUSP-2 menangani masalah permukiman kumuh perkotaan, melanjutkan program NUSSP. Ada 3 komponen yang ingin dicapai dalam program ini: Pembangunan skala lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat, dalam skala kawasan dengan bantuan pihak ketiga, dan pengembangan kawasan baru melalui pembangunan perumahan rakyat.

● 2015 Program Sejuta Rumah (PSR)

Program Sejuta Rumah merupakan gerakan percepatan pengadaan hunian layak, hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pelaku pembangunan perumahan. PSR memayungi berbagai subproyek, mencakup rumah susun dan rumah tapak, serta 3 jenis skema pendanaan KPR bersubsidi yang menyasar penduduk berpenghasilan rendah dan menengah.

● *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs dirumuskan dalam Sidang Umum PBB tahun 2015 sebagai acuan untuk pembangunan lingkungan dan masyarakat yang berkelanjutan. Ada 17 capaian dalam SDGs, dengan masalah habitat di nomor 11, yakni Kota dan Komunitas Berkelanjutan. Rumusan ini mulai diterapkan pada 2016 dan diharapkan dapat tercapai di tahun 2030.

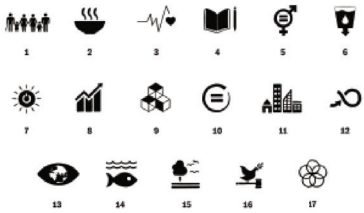

(1) Tanpa Kemiskinan (2) Tanpa Kelaparan (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera (4) Pendidikan Berkualitas (5) Kesetaraan Gender (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak (7) Energi Bersih dan Terjangkau (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (10) Berkurangnya Kesenjangan (11) Kota dan Komunitas Berkelanjutan (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (13) Penanganan Perubahan Iklim (14) Ekosistem Laut (15) Ekosistem Darat (16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

● Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

RP2KPKP adalah rencana aksi untuk penanganan dan pencegahan kawasan kumuh secara terpadu, di lingkup kawasan maupun kota. Rencana penanganan termasuk peremajaan permukiman kumuh dan pemukiman kembali, sementara strategi pencegahan meliputi pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian. Kegiatan dalam RP2KPP bersinggungan dengan pekerjaan fisik seperti jalan, sanitasi dan drainase, dan pengadaan air minum, juga dan pengembangan non-fisik seperti pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

● 2016 Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

Kotaku adalah *platform* kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan *stakeholder* lainnya dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dengan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama. Kolaborasi mencakup pendanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup: (1) Pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur permukiman, (2) penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah, serta (3) pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan masyarakat.

Implementasi Kotaku di Malang (2019) dan Singkawang (2022)
Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

● Surabaya menjadi tuan rumah *Preparatory Committee Meeting* (PrepCom) 3

Menjelang pelaksanaan Konferensi Habitat III, UN-Habitat menggelar tiga kali pertemuan Preparatory Committee. Dua pertemuan PrepCom pertama dilaksanakan di New York (2014) dan di Nairobi (2015). Sedangkan PrepCom ketiga dilaksanakan di Surabaya pada 25 -27 Juli 2016. Pertemuan PrepCom ini membahas penyusunan naskah New Urban Agenda.

Kredit:
Yayasan Museum Arsitektur Indonesia (Pameran Suatu Hari yang Baik 2045)

Linimasa Perkembangan Perkotaan di Indonesia

Habitat III. Quito, 20 Oktober 2016

Dalam konferensi ini *New Urban Agenda* (NUA) disepakati oleh 140 negara peserta Habitat III, termasuk Indonesia. NUA merupakan komitmen global untuk mewujudkan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

2018 *National Urban Water Supply Project* (NUWSP)

NUWSP merupakan program nasional pembangunan penyediaan air minum perkotaan dengan pembiayaan investasi. Prioritas investasi difokuskan kepada penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM.

Profil program National Urban Water Supply Project (NUWSP), 2022. Sumber: Youtube/pupr_ciptakarya

2019 Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) telah membangun sarana dan prasarana sanitasi di 1.800 lokasi.

Pengumuman rencana perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur

Lokasi ibu kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

2020 Surabaya menjadi tuan rumah Global Observance dalam rangka HHD dengan tema "*Housing For All: A Better Urban Future*".

Jumlah penduduk perkotaan dunia +-4,38 miliar

153,98 juta / 56,64% penduduk Indonesia tinggal di area urban

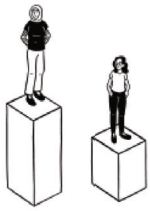

Perbandingan penduduk urban dan rural di Indonesia.

2022 Program Sejuta Rumah telah mengadakan lebih dari 7 juta unit hunian.

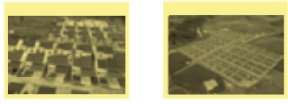

Pembangunan Program Sejuta Rumah, 2016-2023. Sumber: Kementerian PUPR.

Komitmen 100-0-100 telah mencapai 91,08% akses air minum layak, 39.000 ha perbaikan permukan kumuh, dan 80,92% akses sanitasi layak

Komitmen ini dicanangkan tahun 2015 untuk mencapai 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi. Untuk memenuhi target ini, pemerintah meluncurkan berbagai program seperti NUWSP, Kotaku, dan SPBM.

2023 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 "Indonesia Emas" dicanangkan

Rencana ini menyasar 3 bentuk transformasi, yakni transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Rentang waktu 20 tahun terbagi menjadi 4 tahap. Tahap 1 adalah perkuatan fondasi transformasi, tahap 2 adalah akselerasi transformasi, tahap 3 menyasar ekspansi global, dan tahap 4 adalah perwujudan indonesia Emas. Di 2045, Indonesia hendaknya memiliki manusia yang unggul, menjadi negara berpendapatan tinggi, dan memiliki regulasi yan adaptif, dengan tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif.

KONGRES PROGRAM ORGANISASI REGULASI

PEMBANGUNAN PENERBITAN BUKU KONTEKS UMUM

Kredit:
Yayasan Museum Arsitektur Indonesia (Pameran Suatu Hari yang Baik 2045)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

ISBN 978-979-8230-59-2